

Pandangan Editor Surat Kabar Indonesia dan Malaysia terhadap Jurnalisme Multikultural

Junaidi

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai

HP. 08127600095/e-mail: drjunaidi@yahoo.com,

Abstract

Both Indonesia and Malaysia are characterized as multicultural society. In multicultural society mass media plays a significant role in keeping peaceful condition. Journalistic activities greatly influences the coverage related to multicultural issues. Multicultural journalism is a journalistic activity which consider multicultural society's interest in keeping peaceful condition. This article aims to know Indonesian dan Malaysian newspaper editors' views toward multicultural coverage. The study of editors' views is essential to describe the implementation multicultural coverage in Indonesia and Malaysia. The multicultural coverage includes ethnic, religion and the relation of Indonesia-Malaysia. The method of deep interview is used to know editors' view toward multicultural issues in both country. This analysis shows that the Indonesian and Malaysian newspaper editors tend to acknowledge the importance of application of multiculturalism in journalistic activity to make peace in multicultural society. Multicultural coverage is driven to support pluralistic values in multicultural society. Journalists are given enough knowledge and experience in making positive multicultural coverage. Code ethic of journalism in Indonesia and Malaysia also promotes the application of multicultural views in covering multicultural issues. Based on overall findings of this research, it can be articulated that the selected Indonesian and Malaysian newspaper tend to convey information and views to support multiculturalism.

Abstrak

Indonesia dan Malaysia bercirikan masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural media massa memiliki peranan penting dalam menciptakan kondisi damai. Kegiatan-kegiatan jurnalistik memberikan pengaruh besar terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan isu-isu multikultural. Jurnalistik multikultural merupakan kegiatan jurnalistik yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat multikultural dalam menciptakan kondisi damai. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan editor surat kabar Indonesia dan Malaysia terhadap pemberitaan multikultural. Kajian terhadap pandangan para editor surat kabar penting dilakukan untuk menjelaskan pelaksanaan pemberitaan multikultural di Indonesia dan Malaysia. Pemberitaan multikultural meliputi etnis, agama, dan hubungan Indonesia-Malaysia. Metode wawancara secara mendalam diaplikasikan untuk mengetahui pandangan para editor tentang isu-isu multikultural di kedua negara. Kajian ini menunjukkan bahwa editor surat kabar Indonesia dan Malaysia cenderung mengakui pentingnya penerapan multikulturalisme dalam kegiatan jurnalistik untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat multikultural. Para jurnalis diberikan pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam membuat pemberitaan multikultural secara positif. Kode etik jurnalistik di Indonesia dan Malaysia juga mendorong penerapan pandangan-pandangan multikultural dalam pemberitaan multikultural. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa surat kabar Indonesia dan Malaysia yang dipilih dalam penelitian cenderung menyampaikan informasi dan pandangan yang mendukung multikulturalisme.

Kata Kunci: pemberitaan multikultural, editor surat kabar, jurnalistik multikultural

Pendahuluan

Dalam pembangunan masyarakat multikultural, peranan media massa sangat penting untuk menyampaikan gagasan-gagasan multikultural kepada masyarakat. Multikulturalisme menjadi salah satu asas penting dalam media massa. Pada zaman sekarang multikulturalisme telah menjadi isu yang penting. Wicaksono (2005:2) menyatakan *"In early 21st century Europe, 'multicultural society' has become a standard definition of modern nations, used always in a positive sense, indicating an enrichment of social and cultural diversity"*. Definisi masyarakat multikultural yang digunakan di Eropa, sebenarnya juga digunakan di negara lain untuk menjelaskan realitas perbedaan dalam masyarakat. Memberikan arti multikultural terhadap suatu negara modern perlu dilakukan karena ini berpengaruh pada cara pandang orang terhadap kelompok lain yang berbeda dengannya. Pengakuan terhadap perbedaan budaya yang terdapat dalam multikulturalisme mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik dalam masyarakat majemuk.

Kondisi multikultural dalam masyarakat dunia pada saat ini tidak dapat dihindari karena teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong orang untuk saling berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari budaya dan bangsa yang berbeda. Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kesederajatan (Watson, 2000: 24). Multikulturalisme memandang pentingnya untuk memandang kesamaan derajat manusia dalam kehidupan sehingga ideologi ini sangat mengedepankan unsur kemanusiaan dalam pergaulan umat manusia.

Multikulturalisme berkembang dalam masyarakat, maka ideologi ini juga berpengaruh terhadap komunikasi antara masyarakat yang berasal dari kelompok, kaum, agama, dan negara yang berbeda. Kondisi ini juga kemudian membuat ahli-ahli media berpikir apakah media perlu juga memberikan respons terhadap gagasan multikulturalisme (Voakes et al. 1996:20).

Masyarakat Indonesia dan Malaysia adalah masyarakat majemuk sehingga ideologi

multikulturalisme pun terus berkembang di kedua negara ini. Kemajemukan ini mendorong berkembangnya multikulturalisme yang memberi penghormatan terhadap kemajemukan etnis, agama, bahasa dan budaya di Indonesia. Perkembangan masyarakat multikultural berpengaruh terhadap sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu sistem sosial yang dipengaruhi multikulturalisme adalah media massa.

Lent (1990:5) menegaskan bahwa kondisi pluralistik dalam negara-negara Asean telah mendorong media untuk memelihara sensitivitas dalam hubungan etnis. Oleh karena itu, editor surat kabar perlu mempunyai pandangan dan sikap yang memberikan manfaat kepada kepentingan bersama agar hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda tetap terpelihara dalam masyarakat multikultural. Voakes et al. (1996:20) menyatakan bahwa media massa perlu memberikan respons terhadap realitas perkembangan multikulturalisme. Jurnalisme multikultural perlu dikembangkan untuk meningkatkan peranan media massa dalam mendukung pembangunan masyarakat multikultural. Prajarto (2004:111) juga menegaskan peranan media massa dalam perbesaran multikulturalisme dalam masyarakat.

Jurnalisme multikultural bermakna kegiatan pemberitaan yang memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat multikultural untuk memelihara kondisi damai. Jurnalisme multikultural menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan masyarakat multikultural dan menghindari berita yang dapat menyentuh sensitivitas hubungan multikultural. Praktik jurnalistik multikultural menekankan perlunya pertimbangan khusus untuk menghasilkan berita yang tidak mengganggu hubungan multikultural dalam masyarakat.

Para jurnalis perlu senantiasa mendorong masyarakat untuk mengakui realitas perbedaan supaya perbedaan tidak dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya, perbedaan perlu dianggap sebagai realitas yang mesti diterima secara bersama-sama sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan konflik. Surat kabar sebagai media komunikasi berperan untuk menampilkan per-

bedaan kepada masyarakat. Surat kabar dapat berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang kemajemukan dan dapat mengangkat nilai-nilai positif yang terdapat dalam satu kelompok kepada kelompok lainnya. Pengetahuan yang benar dan pengangkatan nilai-nilai positif dapat mendorong pembangunan masyarakat multikultural itu.

Tulisan ini bertujuan untuk membicarakan bagaimana pandangan editor surat kabar Indonesia dan Malaysia tentang aspek-aspek penting yang berkaitan dengan jurnalisme multikultural. Delapan aspek yang dibahas sebagai berikut: peranan surat kabar dalam masyarakat multikultural, pemberitaan etnis dan agama, pemberitaan tentang hubungan Indonesia-Malaysia, berita multikultural sebagai bahan sensasi, posisi konflik sebagai penentu nilai berita, etika pemberitaan multikultural, kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan multikulturalisme, kebebasan pers dan objektivitas pemberitaan, dan pendekatan dalam pemberitaan multikultural. Dalam kajian ini, istilah “pandangan” merupakan persepsi atau pemikiran umum tentang suatu isu yang disampaikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode pengumpulan data “wawancara secara mendalam” (*indepth interview*). Wawancara mendalam yang diaplikasikan untuk mengetahui pandangan editor surat kabar terhadap jurnalisme multikultural. Wawancara ini telah dilakukan dengan empat orang editor surat kabar, yakni dua editor surat kabar Indonesia (Kompas dan *The Jakarta Post*) dan dua editor surat kabar Malaysia (Utusan Malaysia dan *New Strait Times*). Editor-editor yang menjadi responden adalah dari kalangan pimpinan redaksi (*chief editor*) yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan. Dasar penentuan editor ialah satu orang editor mewakili surat kabar berbahasa Inggris dan satu orang lagi mewakili surat kabar berbahasa nasional. Jawaban yang diberikan oleh responden dicatat dan dinilai secara deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gagasan penting yang ditemukan berdasarkan pada jawaban editor surat kabar Indonesia dan Malaysia tentang jurnalisme multikultural sebagai berikut: Satu. Peranan Surat Kabar dalam masyarakat multikultural. Sistem masyarakat majemuk berpengaruh kepada sistem surat kabar. Surat kabar sebagai bagian dari sistem sosial dapat mendorong terciptanya perdamaian dalam masyarakat majemuk atau sebaliknya dapat mendorong terjadinya permusuhan atau pertikaian. Surat kabar mempunyai peranan penting dalam mendorong pembangunan masyarakat multikultural.

Editor Kompas menjelaskan bahwa surat kabar mempunyai peranan dalam sektor informal untuk memajukan masyarakat multikultural, sedangkan sektor formal dilaksanakan oleh negara dan sektor pendidikan formal. Peranan surat kabar menjadi sangat strategis dan lebih objektif dibandingkan peranan negara sebab peranan negara akan dipengaruhi oleh kepentingan partai politik tertentu. Jawaban editor ini menunjukkan bahwa peranan surat kabar menjadi sangat kuat karena surat kabar berdiri di atas objektivitas sehingga ia terhindar dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau kepentingan kelompok tertentu. Ini bermakna bahwa surat kabar dengan idealismenya perlu terus menggalakkan multikulturalisme sebab peranan pentingnya akan membangun masyarakat untuk menghormati nilai-nilai perbedaan yang terdapat dalam masyarakat majemuk. Perbedaan dalam masyarakat majemuk tidak seharusnya dihindari oleh surat kabar. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana surat kabar dapat menyampaikan pemahaman yang benar tentang perbedaan itu.

Editor *The Jakarta Post* juga memandang peranan penting surat kabar dalam mendukung pembangunan masyarakat multikultural. Subjek penelitian tersebut bahkan menjelaskan bahwa surat kabar mempunyai tanggung jawab besar dalam mendorong nilai-nilai pluralisme agar tetap terpelihara di Indonesia. Kekuatan surat kabar dalam membentuk pandangan dalam ma-

syarakat perlu diarahkan kepada pembentukan masyarakat majemuk di Indonesia. Surat kabar memang mempunyai kekuatan dalam membentuk pandangan atau opini masyarakat sebab ia akan dibaca setiap hari oleh banyak orang. Pemikiran masyarakat dapat terpengaruh baik secara sadar maupun tanpa disadari. Penjelasan ini menunjukkan bahwa penguatan peranan surat kabar untuk membangun masyarakat multikultural perlu mendapat perhatian oleh semua pihak supaya masyarakat dapat menghor-mati kemajemukan yang ada dalam masyarakat.

Surat kabar di Malaysia juga mengakui peranan penting surat kabar dalam mendorong multikulturalisme. Editor Utusan Malaysia memberikan penekanan kepada peranan surat kabar dalam menyediakan informasi dan mendidik khalayak. Kondisi multikultural di Malaysia menjadi tantangan bagi surat kabar dalam penyampaian berita sebab surat kabar harus mampu mempertimbangkan kepentingan masyarakat berbagai etnis dan agama. Ini bermakna bahwa kesalahan surat kabar dalam mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dapat menyebabkan satu etnis atau agama tersinggung atau terhina sehingga ini akan dapat menyebabkan konflik antarbudaya dalam masyarakat multikultural. Peranan surat kabar itu harus dimaikan secara benar bagi kepentingan masyarakat multietnis agar perbedaan benar-benar diterima oleh semua masyarakat.

Editor *New Strait Times* menyatakan peranan penting surat kabar dalam membangun masyarakat multikultural di Malaysia. Subjek penelitian tersebut lebih menekankan pengangkatan isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme untuk mewujudkan persatuan dalam negara Malaysia. Ia menjelaskan bahwa tidak semua berita dapat dibawa ke dalam isu etnis. Surat kabar perlu bijaksana dalam menentukan berita yang berkaitan dengan isu etnis dan berita yang tidak secara langsung berkaitan dengan isu etnis di Malaysia. Pengangkatan isu-isu nasionalisme memang akan menolong untuk membentuk pandangan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan yang bersifat pluralisme dalam masyarakat multikultural. Pengangkatan isu-isu nasionalisme juga dapat menyadarkan warga negara untuk

lebih berpikir dalam membangun negara secara bersama-sama dan memajukan semua etnis dan agama.

Dua. Pemberitaan Etnis dan Agama. Salah satu isu penting yang sering dibicarakan dalam hubungan etnis dan agama adalah sensitivitas. Persoalan etnis dan agama dianggap sensitif sebab ia melibatkan emosi dan pandangan orang yang berasal dari etnis dan agama tertentu. Dalam pemberitaan multikultural, sensitivitas juga harus mendapatkan perhatian wartawan. Kesadaran sensitivitas dilaksanakan dengan mempertimbangkan dengan hati-hati setiap berita yang berkaitan dengan kepentingan satu etnis dan agama. Setiap pemberitaan diharapkan tidak merendahkan atau menghina keberadaan satu etnis dan agama tertentu.

Editor Kompas menjelaskan bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan etnis dan agama dianggap sangat sensitif sebab masyarakat Indonesia masih dalam proses memahami multikulturalisme. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mudah didorong untuk terlibat dalam konflik yang berkaitan dengan kepentingan etnis dan agama. Proses menuju multikulturalisme memang penuh dengan tantangan sebab tidak semua kelompok etnis dan agama benar-benar dapat menerima perbedaan. Masih terdapat kelompok yang beranggapan bahwa kebenaran hanya berada dalam kelompoknya sendiri sedangkan kelompok yang berada di luar dirinya dianggap tidak benar. Dalam kondisi seperti ini, surat kabar berupaya untuk membangun Indonesia tetap sebagai negara multikultural melalui pemberitaan yang mempertimbangkan aspek sensitivitas dalam hubungan antar budaya. Kesadaran untuk mempertimbangkan sensitivitas itu perlu dilaksanakan agar hubungan orang-orang dalam masyarakat majemuk tetap terpelihara dengan baik.

Editor *The Jakarta Post* juga memandang perlunya kebijaksanaan wartawan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan etnis dan agama. Adanya pertimbangan sensitivitas tidak berarti bahwa surat kabar tidak bisa menunjukkan perbedaan yang ada dalam masyarakat, bahkan adanya pemaksaan untuk “menyamakan” bisa mengakibatkan konflik dalam masyarakat

majemuk. Di Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto, terdapat kecenderungan pemerintah untuk memaksakan kesamaan daripada kenyataan yang berbeda demi untuk mencapai kepentingan politik. Akibatnya adalah terjadi konflik sebab etnis dan agama tidak dapat berkembang dengan baik. Surat kabar mesti menunjukkan adanya perbedaan dalam etnis dan agama. Ini menunjukkan bahwa surat kabar mesti memberikan pemahaman bahwa setiap orang bisa menerima perbedaan itu. Namun demikian, dalam melaksanakan pemberitaan multikultural para jurnalis harus mempertimbangkan berita yang disampaikan kepada masyarakat dan dalam penyampaian pun harus menggunakan pendekatan yang tidak dapat menimbulkan pertentangan antar budaya. Bahkan surat kabar mesti menghindari pemberitaan yang dapat menimbulkan konflik. Pertimbangan dalam penentuan berita bukan berarti surat kabar menyembunyikan peristiwa yang terjadi. Surat kabar bisa menyampaikan berita konflik multikultural tetapi cara penyampaian harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan perdamaian bagi masyarakat majemuk. Ini bermakna pertimbangan terhadap sensitivitas hubungan etnis dan agama bisa mendorong terjadinya perdamaian dalam masyarakat multikultural. Walaupun surat kabar menerbitkan berita tentang konflik multikultural, surat kabar itu dapat mendorong terciptanya perdamaian dengan cara memfokuskan pemberitaannya dalam upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Surat kabar dapat juga mengambil fokus pemberitaan terhadap akibat dari konflik yang terjadi supaya pihak-pihak yang bertikai dapat menyadari akibat yang ditimbulkan oleh konflik itu. Sehingga kemudian pihak-pihak bertikai menyadari akibat negatif dari satu pertikaian. Dengan demikian, upaya-upaya menciptakan perdamaian dapat didorong oleh berita surat kabar.

Selanjutnya Editor Utusan Malaysia juga mengakui sensitivitas persoalan yang berkaitan dengan etnis dan agama. Isu etnis di Malaysia menjadi sangat sensitif karena Malaysia merupakan satu negara majemuk. Ini bermakna surat kabar mesti memberikan perhatian khusus kepada

isu etnis, sebab isu itu melibatkan masyarakat berbagai etnis di Malaysia. Kesalahan dalam menyampaikan pemberitaan multikultural dapat mengganggu hubungan etnis di Malaysia.

Dalam memandang sensitivitas hubungan etnis, Editor *New Strait Times* lebih menekankan pada sikap hati-hati wartawan dalam menjalankan pemberitaan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan surat kabar adalah pemberitaan tidak merendahkan dan menghinakan etnis atau agama tertentu. Surat kabar mesti menghormati keberadaan semua etnis dan agama. Ini bermakna sensitivitas menjadi dasar penting yang perlu diperhatikan surat kabar dalam melaksanakan pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat berbagai etnis dan agama. Pengakuan terhadap sensitivitas diwujudkan dengan sikap berhati-hati dalam menjalankan pemberitaan multikultural. Wartawan benar-benar mesti mempertimbangkan akibat yang muncul dari penerbitan berita multikultural. Dengan kata lain, wartawan harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap apa yang mereka sampaikan melalui surat kabar.

Tiga. Pemberitaan Tentang Hubungan Indonesia-Malaysia. Selain pemberitaan yang berkaitan dengan etnis dan agama, pemberitaan yang berkaitan hubungan antar negara khususnya Indonesia dan Malaysia juga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh surat kabar Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang mempunyai hubungan yang erat disebabkan adanya kesamaan latar belakang sejarah dan kedekatan wilayah. Walaupun secara umum hubungan Indonesia dan Malaysia adalah baik, kadang-kadang hubungan itu terganggu oleh beberapa persoalan. Hubungan naik turun Indonesia dan Malaysia itu tentu akan menarik perhatian surat kabar di Indonesia dan Malaysia. Dapat dikatakan juga bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan Indonesia dan Malaysia juga bersifat sensitif sebab ia bisa membangkitkan emosi rakyat di kedua negara.

Editor Kompas memandang bahwa sebenarnya telah ada kesepahaman dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, karena Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga, kedua negara itu terlibat

dalam persaingan. Persaingan sebenarnya adalah sesuatu yang positif untuk memajukan suatu negara. Persoalan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi sangat sensitif apabila dipahami secara tidak benar oleh orang-orang yang kurang memahami hubungan Indonesia-Malaysia. Kekurangan mereka dalam memahami persoalan hubungan Indonesia dan Malaysia membuat mereka bereaksi secara cepat tanpa berpikir secara lebih mendalam. Ini bermakna surat kabar perlu menyampaikan pemberitaan yang dapat memberikan pemahaman yang benar terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia supaya hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dapat terpelihara. Surat kabar mesti memberikan informasi yang benar-benar dapat mendorong terciptanya perdamaian di antara kedua negara. Walaupun surat kabar menyampaikan satu berita yang berkaitan dengan konflik antara Indonesia dan Malaysia, surat kabar harus dalam posisi mengupayakan atau mendorong terjadinya dialog dan pencarian penyelesaian.

Editor *The Jakarta Post* memandang bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang mempunyai hubungan cukup baik. Namun demikian, dalam hubungan itu juga terdapat persoalan-persoalan yang dapat mengganggu hubungan itu. Persoalan-persoalan ini menarik perhatian surat kabar di Indonesia dan Malaysia untuk menyampaikan pemberitaan yang berkaitan dengan itu. Faktor Indonesia dan Malaysia bertetangga dan berada dalam satu rumpun menyebabkan surat kabar Indonesia memberikan perhatian kepada perkembangan yang terjadi di Malaysia. Demikian juga surat kabar di Malaysia mempunyai perhatian khusus terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama mempunyai kepentingan sehingga surat kabar di kedua-dua negara cenderung saling memberikan laporan yang berkaitan dengan hubungan bilateral maupun peristiwa yang terjadi hanya di satu negara.

Selanjutnya editor Utusan Malaysia memandang bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan hubungan dua bilateral antara Indonesia dan Malaysia bersifat sensitif sehingga diperlukan pertimbangan khusus secara lebih mendalam. Pertimbangan secara lebih mendalam diberikan

untuk menghindari terjadinya konflik yang melibatkan kepentingan dua negara. Keberadaan Indonesia sebagai negara jiran membuat surat kabar di Malaysia memandang Indonesia sebagai satu sumber pemberitaan yang perlu diterbitkan untuk diketahui oleh warga Malaysia sendiri dan juga oleh banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ini bermakna bahwa surat kabar Malaysia cenderung menyadari bahwa pemberitaan yang berkaitan dengan Indonesia bersifat sensitif sehingga pekerja surat kabar akan berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan itu. Surat kabar Malaysia telah menunjukkan penghargaan terhadap Indonesia dengan memberikan pertimbangan khusus kepada pemberitaan yang berkaitan dengan Indonesia. Penjelasan ini menunjukkan faktor sejarah dan politik membuat hubungan Indonesia dan Malaysia perlu mendapatkan perhatian oleh media di kedua negara.

Editor *New Strait Times* juga mengakui bahwa banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia telah menarik perhatian surat kabar Malaysia. Ia mengakui adanya pertimbangan khusus yang diberikan kepada pemberitaan yang berkaitan dengan Indonesia. Pertimbangan khusus ini diberikan untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat melibatkan kedua negara. Surat kabar Malaysia telah berupaya untuk memisahkan isu warga Indonesia yang berkaitan dengan masalah tempatan dengan isu yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Adanya kriminal yang dilakukan oleh warga Indonesia di Malaysia adalah isu *tempatan*. Isu ini tidak akan dibawa kepada isu yang melibatkan pertentangan dua negara. Pemisahan isu *tempatan* seperti ini tampaknya bertujuan untuk menghindari agar isu itu tidak meluas kepada hubungan antar negara. Dengan sikap hati-hati yang, persoalan-persoalan yang terjadi yang melibatkan warga negara Indonesia dan Malaysia dapat dicegah menjadi persoalan yang lebih luas. Sehingga persoalan-persoalan itu diharapkan tidak mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Ini bermakna persoalan *tempatan* mesti ditempatkan dalam tingkat persoalan individu warga Indonesia dan warga Malaysia. Persoalan individu tidak bisa memperburuk hubungan kedua negara.

Empat. Berita Multikultural Sebagai Bahan Sensasi. Pemberitaan yang berkaitan dengan konflik multikultural akan menarik perhatian lebih banyak pembaca surat kabar. Peningkatan pembaca adalah penting bagi keberlangsungan surat kabar. Adakala surat kabar dengan sengaja mengangkat isu yang bisa menimbulkan sensasi dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pemberitaan itu. Penerbitan berita multikultural tidak boleh bertujuan hanya untuk menimbulkan sensasi dan kepentingan komersial sebab apabila ini dijadikan asas untuk menentukan pemberitaan multikultural, maka pemberitaan multikultural justru dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat majemuk.

Editor Kompas memandang bahwa ada surat kabar yang hanya bertujuan untuk menimbulkan sensasi demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Padahal surat kabar tidak bisa bertujuan seperti itu. Bahkan Editor Kompas menyatakan bahwa apabila surat kabar hanya bertujuan untuk mendapatkan sensasi, maka itu dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Surat kabar mesti mempunyai tanggung jawab sosial untuk membangun kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat majemuk. Institusi surat kabar memang sebuah institusi yang berorientasi bisnis. Namun demikian, surat kabar tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek bisnisnya. Surat kabar mesti mempertimbangkan dampak sosial terhadap penerbitan satu berita. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa surat kabar bisa mencari keuntungan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Editor *The Jakarta Post* lebih memfokuskan perhatiannya kepada fungsi media massa yang bisa bersifat destruktif atau konstruktif dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat majemuk. Dalam masyarakat majemuk, surat kabar idealnya berperan untuk menciptakan perdamaian dengan lebih memberikan fokus pemberitaan terhadap upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Ini bermakna bahwa surat kabar dengan kekuatannya perlu mendorong upaya konstruktif dalam membangun masyarakat majemuk. Penerbitan berita tentang konflik multikul-

tural hanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya, dapat bersifat destruktif terhadap masyarakat majemuk. Dengan kata lain, surat kabar perlu menjalankan tanggung jawab sosialnya untuk membangun masyarakat majemuk yang damai.

Editor Utusan Malaysia secara tegas menolak apabila penerbitan berita multikultural digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi saja. Ia mengatakan bahwa isu multikultural tidak bisa dijadikan bahan untuk dijual sebab itu akan menyebabkan kerugian bagi surat kabar dan negara. Surat kabar mesti berupaya untuk mengangkat isu yang berkaitan dengan persatuan di antara masyarakat berbagai etnis di Malaysia. Ia juga memandang perlunya memberikan penghalusan secara lebih mendalam terhadap berita-berita yang bersifat sensasional agar berita itu bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat berbilang etnis di Malaysia. Ini bermakna penerbitan isu multikultural oleh surat kabar bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Yang terpenting dalam penerbitan berita multikultural adalah memberikan pemahaman yang benar kepada khalayak ramai tentang perlunya penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat.

Editor *New Strait Times* mengakui bahwa berita multikultural justru tidak bisa menghasilkan keuntungan komersial kepada surat kabar. Ia memandang bahwa khalayak tidak terlalu suka untuk membaca isu yang berkaitan dengan multikulturalisme sebab khalayak lebih menyukai isu yang berkaitan dengan isu kejahatan. Kondisi masyarakat Malaysia yang bersifat majemuk juga menyebabkan isu multikulturalisme sulit untuk dijual. Dengan kondisi perbedaan seperti ini, upaya untuk menganjurkan multikulturalisme mesti dilaksanakan secara pelan-pelan dan berhati-hati agar masyarakat beragam etnis dapat menerima perbedaan itu secara benar. Ini bermakna penerbitan berita multikultural tidak bertujuan untuk perdagangan. Penerbitan berita multikultural lebih bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman di antara masyarakat berbagai etnis dan agama.

Lima. Posisi Konflik Sebagai Penentu Nilai Berita. Dalam bidang pemberitaan, konflik merupakan salah satu faktor untuk menentukan nilai berita. Khalayak akan lebih tertarik dengan peristiwa konflik dibandingkan peristiwa biasa, tetapi dalam pemberitaan multikultural, pihak surat kabar perlu sangat berhati-hati dalam mengangkat peristiwa konflik sebab berita multikultural mengandung sensitivitas yang tinggi.

Editor Kompas memandang bahwa peristiwa konflik tidak menjadi asas utama dalam penentuan berita multikultural. Surat kabar tidak hanya mengangkat isu konflik dalam pemberitaan multikultural, tetapi surat kabar mesti lebih berfokus kepada penyampaian gagasan yang dapat membuat kehidupan multikultural berjalan dengan baik.

Editor *The Jakarta Post* menyatakan bahwa surat kabar mestinya membantu mengurangi terjadinya konflik-konflik di Indonesia. Di Indonesia memang telah terjadi beberapa konflik yang melibatkan etnis dan agama tertentu. Menjadikan Indonesia sebagai negara pluralistik juga menjadi tantangan penting di Indonesia sebab ada kelompok-kelompok agama tertentu yang ingin menjadikan negara agama. Dalam kondisi seperti itu, surat kabar diharapkan untuk tidak membangkitkan konflik itu melalui pemberitaan. Surat kabar justru diharapkan dapat menyampaikan gagasan-gagasan yang dapat membangun perdamaian dalam masyarakat Indonesia. Dalam merespon perdebatan menjadikan negara agama atau negara pluralisme, surat kabarnya berfungsi sebagai media publik untuk membuka ruang dialog dan membicarakan dua gagasan yang berbeda. Indonesia adalah negara demokrasi sehingga ruang dialog perlu disediakan bagi orang yang ingin menyampaikan gagasannya secara baik-baik.

Selanjutnya editor Utusan Malaysia mengakui bahwa konflik bisa menjadi faktor penentu dalam penentuan berita tetapi itu bukan faktor mutlak dalam pemberitaan multikultural. Surat kabar perlu berhati-hati dalam menentukan pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat majemuk. Penerbitan berita konflik multikultural bisa saja dilakukan tetapi surat kabar mesti memberitakannya dengan memper-

timbangkan dampak berita itu terhadap masyarakat beragama etnis.

Editor *New Strait Times* juga menyatakan bahwa konflik bukan faktor utama dalam pemilihan satu berita yang berkaitan dengan isu peretnisan dan agama. Ini bermakna konflik memang mempunyai nilai berita yang dapat menarik perhatian khalayak. Namun demikian, ada hal yang lebih perlu dipertimbangkan dalam pemberitaan yang berkaitan dengan konflik multikultural. Pemberitaan konflik multikultural mesti lebih mendorong terciptanya perdamaian. Pemberitaan konflik multikultural mesti menghindari adanya pernyataan-pernyataan yang dapat membuat orang terprovokasi untuk memperparah konflik. Pemberitaan multikultural juga tidak bisa menghinakan dan menyinggung emosi etnis atau agama tertentu.

Enam. Etika Pemberitaan Multikultural. Dalam menjalankan pemberitaan multikultural setiap surat kabar mempunyai asas yang dijadikan panduan. Asas tersebut merupakan kesepakatan yang dibangun bersama-sama oleh pekerja surat kabar. Asas itu bertujuan untuk mempertimbangkan dampak penerbitan berita multikultural terhadap khalayak. Asas itu sangat berguna bagi pekerja surat kabar dalam menjalankan proses pemberitaan multikultural.

Editor Kompas mengakui bahwa perlu sikap hati-hati dalam pemberitaan multikultural sebab berita itu bersifat sensitif. Asas utama yang menjadi panduan pemberitaan multikultural adalah berupaya untuk menghindari provokasi dan berupaya untuk memberikan pemahaman yang benar kepada khalayak. Sehingga dengan membaca berita itu khalayak lebih dapat memahami apa yang disampaikan dalam pemberitaan dengan lebih baik dan pikiran terbuka. Dengan demikian, surat kabar lebih bertujuan untuk menyampaikan solusi kepada khalayak.

Editor *The Jakarta Post* juga mengakui bahwa surat kabarnya mempunyai asas yang bisa mendukung pembangunan masyarakat multikultural di Indonesia. Asas utama yang dijadikan panduan oleh pekerja media dalam pemberitaan multikultural adalah pluralisme. Ini bermakna bahwa setiap pemberitaan multikultural yang diterbitkan mesti membela kepentingan masyarakat

multikultural. Pemberitaan tidak bisa diarahkan untuk membela satu etnis dan agama tertentu saja. Setiap berita diarahkan untuk kepentingan semua kelompok etnis dan agama. Asas pluralisme yang digunakan ini tentu akan memberikan manfaat positif bagi pembangunan masyarakat multikultural sebab dalam asas itu terkandung penghormatan dan pengakuan terhadap adanya perbedaan dalam masyarakat multikultural.

Selanjutnya editor Utusan Malaysia menjelaskan secara lebih mendalam bahwa adanya peraturan dan etika merupakan asas utama yang digunakan dalam pemberitaan multikultural. Subjek penelitian tersebut memandang bahwa peraturan dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa atau pemerintah. Sedangkan etika dalam pemberitaan multikultural dibuat oleh editor yang bertanggung jawab di surat kabar itu. Ini bermakna bahwa peraturan bersifat formal dan tertulis. Sedangkan etika lebih bersifat informal dan merupakan konsensus yang dibuat bersama oleh editor surat kabar sebagai manifestasi tanggung jawab moral surat kabar untuk menjaga hubungan baik dalam masyarakat multikultural. Ini bermakna keberadaan peraturan dan etika berguna untuk lebih mengarahkan pemberitaan multikultural bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, dua prinsip asas ini perlu menjadi perhatian bagi semua surat kabar dalam menjalankan pemberitaan multikultural.

Selanjutnya *New Strait Times* menjelaskan bahwa asas yang digunakan pemberitaan multikultural adalah membangun kesadaran sensitivitas dalam pikiran setiap pekerja surat kabar. Dengan dibangunkannya kesadaran sensitivitas, setiap pekerja surat kabar akan lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan pemberitaan multikultural. Ini menunjukkan bahwa asas pemberitaan multikultural itu tidak dibuat secara formal. Asas itu hanya ditanamkan kepada seluruh pekerja di media. Asas itu juga diperoleh dari pengalaman bertahun-tahun dalam menjalankan pemberitaan yang berkaitan dengan isu multikultural.

Tujuh. Kode Etik Jurnalistik dan Multikulturalisme. Indonesia dan Malaysia sama-sama mempunyai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini dijadikan asas oleh para wartawan dalam menjalankan aktivitas kewartawanan.

Dalam bagian ini, akan dibincangkan bagaimana pandangan editor surat kabar terhadap kode etik jurnalistik di Indonesia dan Malaysia dalam mendukung penerapan multikulturalisme.

Editor Kompas mengatakan bahwa kode etik jurnalistik di Indonesia sudah diperbaiki ke arah yang lebih baik. Wartawan mesti menjadikan itu sebagai asas dalam melaksanakan aktivitas pemberitaan. Wartawan mesti benar-benar mempertimbangkan apa-apa yang bermanfaat dan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi khalayak. Wartawan harus melaksanakan proses pendalaman terhadap satu berita untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Dalam konteks pemberitaan multikultural, kesalahan penyampaian informasi akan dapat menyebabkan salah pengertian dan malahan konflik yang melibatkan kepentingan masyarakat majemuk. Sikap menahan diri sendiri perlu dilakukan oleh wartawan agar penerbitan berita tidak memunculkan konflik dan merugikan khalayak.

Editor *The Jakarta Post* mengakui bahwa tata susila kewartawanan adalah satu asas yang mengatur pekerjaan kewartawanan. Namun demikian, menurutnya kebijaksanaan wartawan dan editor jauh lebih penting dalam menjalankan pemberitaan multikultural. Ini menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik bersifat umum sehingga kebijaksanaan editor lebih berpengaruh dalam pemberitaan multikultural. Lagi pula, para editor diberikan kekuasaan yang besar untuk menentukan arah satu berita.

Penjelasan editor Kompas dan *The Jakarta Post* akan dikaitkan dengan kode etik jurnalistik Indonesia. Pasal 8 dari kode etik jurnalistik itu memang berkaitan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai multikulturalisme:

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

(Kode Etik Jurnalistik Indonesia)

Ini menunjukkan bahwa dalam menulis berita seorang wartawan mesti berdasarkan fakta-fakta yang jelas dan tidak berdasarkan satu

prasangka. Wartawan juga tidak bisa bersifat diskriminatif atau membedakan seseorang berdasarkan etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Ini bermakna bahwa wartawan mesti menghargai dan mengakui perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kode etik jurnalistik Indonesia cenderung memberikan dukungan terhadap penerapan nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia. Oleh karena itu, semua wartawan Indonesia perlu menjadikan pasal 8 ini sebagai asas formal dalam pemberitaan multikultural.

Dari sudut pandangan editor surat kabar Malaysia tentang dukungan kode etik jurnalistik, Editor Utusan Malaysia mengakui bahwa kode etik jurnalistik bisa mendukung kepentingan masyarakat multikultural sebab salah satu pasalnya secara jelas menganjurkan wartawan Malaysia untuk menghargai pluralisme. Ini menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik bisa dijadikan asas formal dalam pemberitaan multikultural di Malaysia.

Editor *New Strait Times* juga mengakui Tata susila Kewartawanan Malaysia telah mendukung kepentingan masyarakat multikultural. Bahkan secara lebih luas Subjek penelitian tersebut mengatakan multikulturalisme telah menjadi bagian kehidupan dari masyarakat Malaysia. Ini menunjukkan bahwa multikulturalisme telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. Sehingga multikulturalisme itu juga berpengaruh terhadap aktivitas jurnalistik di Malaysia.

Pendapat editor *Utusan Malaysia* dan *New Strait Times* itu akan dikaitkan pula dengan Tata susila Kewartawanan Malaysia (kode etik jurnalistik) yang berkaitan dengan multikulturalisme. Pasal 7 menyatakan:

Wartawan hendaklah menghindarkan siaran berita atau rencana yang bersifat peretnisan, melampau dan bertentangan dengan tatasusila masyarakat majemuk Malaysia (Tatasusila Kewartawanan Malaysia).

Ini menunjukkan bahwa masyarakat majemuk Malaysia mempunyai kode etik yang harus dihormati oleh setiap orang. Dengan demikian, pemberitaan surat kabar pun harus se-

nantiasia mempertimbangkan etika masyarakat majemuk. Pasal ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada media massa supaya mereka senantiasa menjalankan pemberitaan yang dapat menjaga keharmonisan hubungan etnis di Malaysia. Pasal ini juga memberikan bukti bahwa isu yang berkaitan dengan masyarakat majemuk bersifat sensitif sehingga diperlukan peraturan yang mengatur itu dalam bidang kewartawanan.

Delapan. Kebebasan Pers dan Objektivitas Pemberitaan. Salah satu isu penting dalam pelaksanaan pemberitaan adalah kebebasan pers. Prinsip kebebasan pers berkaitan dengan pemberitaan multikultural. Dalam prinsip kebebasan pers, wartawan dituntut untuk melaksanakan pemberitaan secara objektif atau apa adanya. Sedangkan dalam pemberitaan multikultural, wartawan tidak bisa melaporkan satu peristiwa dengan objektif sebab itu akan dapat menyinggung perasaan etnis atau agama tertentu. Oleh karena itu, wartawan perlu berhati-hati dalam menjalankan pemberitaan multikultural.

Editor Kompas mengatakan bahwa kebebasan pers telah berkembang di Indonesia, namun ia melihat justru kebebasan pers memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan kewartawanan di Indonesia sebab ada kecenderungan dari pihak wartawan untuk berisikap terlalu bebas dan mereka tidak mampu untuk menahan diri. Yang terpenting bagi sebagian wartawan adalah menyampaikan berita. Mereka kurang mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat ditimbulkan oleh pemberitaan mereka. Dengan mengambil contoh pemberitaan yang berkaitan dengan kasus konflik agama di Maluku, Editor Kompas menjelaskan bahwa beberapa surat kabar telah salah menerapkan pendekatan pemberitaan sehingga pemberitaan itu justru telah menambah parahnya konflik yang terjadi di Maluku. Ini bermakna kesalahan memahami kebebasan pers dapat menyebabkan wartawan berpikir bahwa mereka bisa memberitakan segala sesuatunya tanpa memperhatikan pendekatan yang tepat. Kesalahan memahami kebebasan pers dan kesalahan penerapan pendekatan dalam pemberitaan multikultural sangat merugikan masyarakat sebab masyarakat akan terprovokasi untuk terlibat konflik dengan

kelompok lain. Wartawan mesti mempertimbangkan konsep kebebasan pers dengan sensitivitas yang terdapat dalam masyarakat multikultural.

Sedangkan Editor *The Jakarta Post* memandang hubungan kebebasan pers dengan pemberitaan multikultural dari sudut pandang perlu adanya kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijaksanaan menjadi sangat penting sebab kebebasan pers akan menyebabkan wartawan dengan mudah untuk menyalahgunakan itu. Kebebasan pers bisa dijadikan alasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk meningkatkan penjualan surat kabar. Tidak semua kasus yang melibatkan etnis atau agama yang berbeda adalah berkaitan langsung dengan konflik etnis. Misalnya pelaku yang terlibat dalam satu konflik berasal dari etnis atau agama yang berbeda tetapi sebenarnya tidak berkaitan dengan isu etnis. Dalam kasus seperti ini, surat kabar perlu berhati-hati dalam menyampaikan berita itu. Surat kabar tidak bisa mengarahkan berita itu kepada isu etnis sebab itu akan dapat membangkitkan sensitivitas etnis. Surat kabar mesti memberikan informasi kepada khalayak bahwa itu adalah pertikaian biasa dan bukan pertikaian etnis.

Selanjutnya dalam menjelaskan hubungan kebebasan pers dan pemberitaan multikultural, editor *Utusan Malaysia* lebih memberikan perhatian kepada prinsip keseimbangan dan tanggung jawab sosial media massa. Subjek penelitian tersebut setuju bahwa kebebasan pers akan menentukan objektivitas pemberitaan multikultural. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pers perlu mempertimbangkan sensitivitas dalam hubungan masyarakat yang majemuk. Surat kabar juga mesti lebih mempertimbangkan kepentingan nasional dan dapat menjaga kestabilan satu negara dalam menjalankan pemberitaan multikultural dalam sebuah negara.

Dalam menjelaskan kebebasan pers, *New Strait Times* lebih menunjukkan relatifnya konsep kebebasan pers. Setiap negara mempunyai standar kebebasan kewartawan yang berbeda. Surat kabar mesti benar-benar berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan yang berkaitan dengan peretnisan dan agama. Malahan editor *New Strait Times* membenarkan prinsip “*self-censor-*

ship” dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat majemuk. Ini bermakna bahwa prinsip ini bisa berguna dalam mempertimbangkan sensitivitas yang berkaitan dengan pemberitaan multikultural. Dengan menjalankan prinsip ini, surat kabar telah menunjukkan kesadarannya dalam berupaya untuk menghormati kepentingan masyarakat majemuk.

Simpulan

Surat kabar Indonesia dan Malaysia mengakui bahwa pemberitaan yang melibatkan hubungan Indonesia dan Malaysia bersifat sensitif dan mereka juga mengakui bahwa mereka cenderung memberikan perhatian dan pertimbangan khusus terhadap isu yang berkaitan dengan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa surat kabar di Indonesia dan Malaysia tampaknya menganggap hubungan Indonesia-Malaysia penting untuk diberitakan dalam surat kabar di Malaysia. Oleh karena itu, sikap sensitif yang dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Indonesia-Malaysia berguna untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa adanya sensitivitas, pemberitaan yang melibatkan dua negara akan dapat menyebabkan memburuknya hubungan antara negara. Sensitivitas dapat ditunjukkan dengan memberikan pertimbangan khusus dan berhati-hati terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan kepentingan negara lain.

Isu multikultural tidak sepatutnya diperdagangkan sebab isu ini melibatkan kepentingan etnis dan agama tertentu. Penerbitan berita multikultural lebih diarahkan kepada upaya-upaya untuk menganjurkan pengakuan terhadap nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat majemuk. Penerbitan isu multikultural untuk menimbulkan sensasi dan keuntungan ekonomi justru akan memberikan dampak negatif terhadap surat kabar itu sendiri sebab etnis dan agama yang tersinggung akan memberikan reaksi keras kepada surat kabar itu. Selain itu, penerbitan berita multikultural untuk menimbulkan sensasi juga memberikan dampak negatif terhadap negara dan masyarakat, sebab masyarakat akan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada prasangka etnis dan agama tertentu.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Universitas Lancang Kuning dan University of Malaya Kuala Lumpur yang telah memberikan bantuan dana dalam melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Keputusan Dewan per Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. 2007, Jakarta, Sekretariat Dewan Pers.

Lent, A.J., 1990, *The Development of Multicultural Stability in ASEAN: The Role of Mass Media*, Journal of Asia-Pacific Communication, Vol 1.

Mus Chairil Samani (ed), 1996, *Tatasusila Kewartawanan Malaysia, Diskusi Etika Kewartawanan*, Bangi: jabatan Ko-

munikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Prajarto, N., 2004, Komunikasi Multikultural dalam Perspektif HAM, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta, Volume 2 Nomor 2, Mei - Agustus 2004.

Voakes et al., 1996, Diversity in the News. A Conceptual and Methodological Framework, *Journalism & Communication Quarterly*, Vol 73, N0 3.

Watson, C.W., 2000, *Multiculturalism*, Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Widestedt, 2005, *News Media, Diversity Codes and The Politics of Representation*, Kertas Kerja pada International Communication Association, New York, May 26-30.

Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia

Arif Wibawa, Subhan Afifi dan Agung Prabowo
Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta, Jl. Babarsari No.2
HP: 08156873054 / e-mail: wibawaarif@yahoo.com

Abstract

The transition from analog to digital broadcasting offers significant changes. Digital technology and the convergence of the various digital media will introduce many more options besides the traditional one-to-many form of communication that we understand by “television” today, even the new business model. Research of the business model is important to make the transition more efficient. This study used a socio-technical perspective to investigate the complex relations between the social and technical aspects of digital broadcasting, diversity, and interface between different driving forces and policy. Socio-technical approach was used to seek the inter-relations among technological subsystem (infrastructure, equipment, service and applications), social subsystem (market, users and industry) and environment subsystem (regulations and policy). Focus group discussion, consultancy, questionnaire and policy study was used in data collection. This research founded that business model has considered to support the local economic that giving impact on television advertising resources. On the other hand, TVRI has developed their business model based on public station as institutions that answer and providing the demand of the audiens. TVRI could be Multiplexer as a service provider that provide it could be as a community television which was limited spread.

Abstrak

Migrasi penyiaran televisi analog ke teknologi penyiaran televisi digital membawa perubahan yang radikal dalam industri penyiaran. Konvergensi media dalam penyiaran televisi digital menjadi semakin tajam dan intensif. Konvergensi media ini mengakibatkan berkembangnya model bisnis yang sama sekali baru. Model bisnis penyiaran televisi digital yang baru perlu diantisipasi sejak dini dengan studi yang mendalam mengenai banyak hal yang terkait dengan industri penyiaran. Implikasi sosial, ekonomi, politik bahkan budaya sangat besar dalam model bisnis yang baru ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-technical* dalam mencermati perkembangan baru ini. Pendekatan *socio-technical* melihat interrelasi antara ketiga subsistem sekaligus yaitu subsistem teknologi (berupa infrastruktur, pelayanan, aplikasi) subsistem sosial (pasar, pelanggan dan industri) dan subsistem lingkungan yang berupa regulasi, kebijakan dan masyarakat. Dalam memperoleh data penelitian ini menggunakan teknik: konsultasi, *focus group discussion*, kuesioner dan studi kebijakan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa model bisnis hrs mempertimbangkan daya dukung ekonomi masyarakat lokal yang pada gilirannya akan berpengaruh pada iklan sebagai sumber daya hidup stasiun televisi. Sementara itu untuk TVRI, dibutuhkan model bisnis tersendiri yang mampu mengembangkan TVRI sebagai stasiun televisi yang mampu memberi jawaban bagi kebutuhan penonton akan televisi. TVRI juga dapat sebagai Multiplexer dengan catatan, TVRI juga harus bersedia menampung televisi komunitas yang berjangkauan terbatas.

Kata kunci : TV Digital, Konvergensi, Model Bisnis, Regulasi penyiaran, Socio-technical approach.

Pendahuluan

Dunia penyiaran televisi (TV) di Indonesia akan segera memasuki era digital. Pemerintah, melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:07/P/M.KOMINFO/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah menetapkan standar DVB-T (*Digital Video Broadcasting-Terrestrial*) sebagai standar penyiaran televisi digital terrestrial tidak bergerak di Indonesia. Penetapan tersebut telah menggariskan arah perkembangan penyiaran televisi digital di Indonesia ke depan.

Selanjutnya, pemerintah juga telah mempersiapkan pelaksanaan datangnya era penyiaran digital dengan mempersiapkan tiga *working group* yang dipercaya untuk melakukan perumusan konsep-konsep dasar bagi pengembangan penyiaran televisi digital di Indonesia melalui Keputusan Menteri Kominfo No. 500/KEP/M.KOMINFO/11/2007. Ketiga *working group* tersebut adalah: *Working Group* Regulasi Sistem Penyiaran Digital, *Working Group* Master Plan Frekuensi Penyiaran Digital dan *Working Group* Teknologi Peralatan. Sampai saat ini, ketiga *working group* tersebut masih bekerja, hasilnya ada beberapa yang sudah disampaikan kepada kalangan terbatas untuk dilakukan pemerhatian dan evaluasi.

Kepastian proses digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/P/M.Kominfo/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, tertanggal 5 Agustus 2008. Dalam peraturan menteri tersebut digariskan uji coba yang akan dilakukan mengubah pola penerimaan televisi pelanggan. Dalam uji coba yang dilakukan ada beberapa hal yang akan dievaluasi, antara lain, model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan, program siaran dan fitur layanan televisi digital, serta kinerja perangkat dan sistem.

Terdapat tiga tahap yang akan dilalui dalam pelaksanaan uji coba tersebut. Tahap pertama akan dimulai 2008 -2012 meliputi tahap uji coba; penghentian izin lisensi baru untuk TV analog setelah beroperasinya penyelenggara infrastruk-

tur TV digital; dimulai lisensi baru untuk penyelenggara infrastruktur TV digital; pemetaan lokasi dimulainya siaran digital dan dihentikannya siaran analog; mendorong industri elektronik dalam negeri dalam penyediaan peralatan penerima TV digital.

Tahap kedua, ditargetkan mulai tahun 2013-2017 dengan kegiatan meliputi penghentian siaran TV analog di kota-kota besar dilanjutkan dengan daerah regional lain;serta intensifikasi penerbitan izin bagi *mux operator* yang awalnya beroperasi analog ke digital.

Tahap ketiga atau tahap terakhir merupakan periode dimana seluruh siaran TV analog dihentikan, siaran TV digital beroperasi penuh pada band empat dan lima, dan kanal 49 ke atas digunakan untuk sistem telekomunikasi nirkabel masa depan.

Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog memang dapat dipahami. Teknologi penyiaran digital telah menjadi tren teknologi global sehingga harus diikuti apabila bangsa Indonesia tidak ingin tertinggal dan terkecil. Sementara itu, data saat ini di Indonesia terdapat 11 TV berizin siaran nasional, 97 TV berizin regional, 30 TV berlangganan (60 persen TV kabel, 20 persen satelit dan 20 persen Terrestrial) serta ada sekitar 300 izin baru yang tak terlayani karena sudah tak tersedia lagi kanal TV (Antara News,2008) Teknologi penyiaran digital kemudian menjadi jawaban yang masuk akal karena teknologi ini dapat memperbanyak kanal televisi.

Standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terrestrial dipilih disebabkan sistem ini dipandang paling menguntungkan karena menawarkan beberapa kelebihan. Dibandingkan dengan sistem ATSC (*Advanced Television Sistem Committee*) yang mengembangkan standar single carrier 8-VSB (*8-level vestigial side-band*) dan dipakai di negara Amerika Serikat, Kanada dan Argentina, Sistem standar ISDB-T (*integrated serviced digital broadcasting*), juga teknologi T-DMB (*terrestrial digital mobile broadcasting*) dari Korea dan DMB-T (*digital mobile broadcasting terrestrial*) dari China, standar DVB-T diyakini mampu memberikan

solusi efisiensi *bandwidth* dengan teknologi *multiplexing*.

Teknologi *multiplexing* ini memungkinkan dilakukannya pelebaran kanal frekuensi saluran televisi. Dalam sistem analog, satu kanal hanya bisa diisi satu frekuensi, sedangkan dalam sistem digital satu kanal bisa diisi dengan lebih dari enam frekuensi sekaligus. Hal ini dimungkinkan karena dalam sistem digital pelebaran frekuensi bisa dilakukan. Apalagi apabila ada penambahan varian DVB-H (*handheld*) mampu menyediakan tambahan sampai enam program siaran lagi, khususnya untuk penerimaan bergerak (*mobile*). Penyiaran televisi digital juga memiliki keunggulan yaitu *signal*-nya lebih tahan terhadap *noise* dan kemudahannya untuk diperbaiki, tidak ada lagi antrian atau penolakan ijin siaran bagi rencana pendirian televisi nasional maupun lokal karena keterbatasan frekuensi. Penyiaran TV digital teresterial juga dapat diakses oleh sistem penerimaan *fixed* dan *mobile TV*. Teknologi penyiaran digital akan mengakibatkan konvergensi media menjadi semakin tajam. Konvergensi antarteknologi terjadi antara teknologi penyiaran (*broadcasting*), teknologi komunikasi (telepon), dan teknologi informasi (IT).

Model bisnis baru yang mencakup pola hubungan antar pelaku bisnis penyiaran, desain struktur bisnis penyiaran dan mekanisme dari penyelenggaraan menjadi hal yang perlu dikaji secara seksama. Model bisnis dan cakupan bisnis dari industri televisi digital akan meningkat secara radikal dan dalam bentuk yang sama sekali berbeda seperti digambarkan oleh Weber dan Tom berikut:

Televisi digital membawa perubahan fundamental pada bagaimana TV diproduksi, diedit dan disiarkan. TV digital mempersyaratkan perubahan infrastruktur secara massif untuk pembuatan dan transmisi sinyal digital, termasuk juga penggantian pesawat TV analog ke pesawat digital (di AS lebih dari 200 juta pesawat TV analog harus diganti) (Weber dan Tom; 2007: xvii).

Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penyiaran televisi di masa depan akan membutuhkan terobosan kebijakan baru. Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah ada yaitu

UU N0 32 Tahun 2002 sebentar lagi akan memerlukan perubahan yang radikal sekaligus mendasar, tetapi yang terjadi di Indonesia, persiapan migrasi televisi analog ke teknologi digital tidak tampak dilakukan dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Hal ini tampak pada kurang dilakukannya serangkaian studi yang mendalam pada beberapa aspek yang berkaitan dengan migrasi dan penerapan teknologi televisi digital. Di samping itu, sosialisasi dan transparansi mengenai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penerapan televisi digital tidak banyak sampai kepada masyarakat.

Model bisnis pada penyelenggaraan sistem penyiaran TV digital sama sekali berbeda dengan model penyiaran analog. Dalam model bisnis yang baru ini akan banyak terlibat pemain-pemain baru. Di samping itu, penyiaran digital akan membawa banyak dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial dan bahkan budaya. Regulasi penyiaran juga akan banyak mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya kapasitas bisnis penyiaran. Jadi, perubahan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital bukanlah hal yang sederhana seperti ditulis Tadayoni & Skuby (1999, 2) berikut: “*The shift to digital broadcasting is not simple, however, as it introduces a range of interrelated political, economic and technical challenges. Some of these challenges are specific to the mode of distribution satellite, cable or terrestrial with the latter having special problems and potentials*”.

Perubahan model bisnis ini juga mengakibatkan perubahan terhadap regulasi penyiaran yang telah ada. Dengan tegas Tadayoni dan Skuby lebih lanjut mengatakan:

Technological innovations like digitalization, audio and video coding technologies, computerization and broadband infrastructure, such as cable and satellite networks, make service provision across the sectoral boundaries possible. This also imposes new political and regulatory challenges and makes re-thinking and re-design of the existing regulatory framework for communication a necessity.

Guna menyusun model bisnis penyiaran baru perlu mempertimbangkan banyak hal. Se-

lain banyak mempertimbangkan aspek teknologi, standarisasi teknologi masih perlu juga mempertimbangkan aksesibilitas penonton, pertumbuhan bisnis, implikasi sosial, politik dan budaya di tengah masyarakat. Studi mengenai model bisnis penyiaran digital telah mulai dikembangkan di Eropa. Studi yang telah dilakukan di Eropa, penelitian ini hendak mengembangkan model bisnis penyiaran digital yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Studi mengenai model bisnis penyiaran di Eropa yang dilakukan oleh Braet dan Ballon (2008:211), menunjukkan bahwa model bisnis penyiaran digital membutuhkan pencerminan terhadap beberapa elemen sebagai berikut :

(1). *Organization design phase. The organization design involves defining a business scope (what customers will we try to reach and how), identifying distinctive competences, and taking business governance decision (make versus buy decision),* (2). *Technological design phase. The technology design involves defining the technology scope with (what technical design are we trying to develop and how), identifying the systemic competence that will contribute to the business strategies, and deciding on the IT governance (how will we develop or acquire the needed technical competences)* (3). *Service design phase. The service design involves choosing a specific value proposition towards the user, which implies choosing for a specific strategic scope,* (4). *Financial design phase. In a final phase, the financial modalities are formalized in binding contracts that clearly describe each partner's responsibilities, and the financial or other benefits they will receive in return.*

Fase organisasi lebih banyak fokus pada peran berbeda dari masing-masing *partner*, apa sumberdaya yang diberikan oleh masing-masing pemain dalam bisnis tersebut. Tak kalah penting adalah apa model kerjasama yang muncul di dalam penyediaan konten penyiaran yang dimungkinkan. *Stakeholder* yang diperkirakan terlibat dalam model penyiaran digital adalah meliputi tiga bagian penting: pelaku bisnis, peran dalam bisnis dan hubungan bisnis antar aktor. Lebih lanjut Braet dan Ballon (2008:221) menulis :

Business actors can be physical persons or corporations that participate in the creation of economic value, through the mobilization of tangible resources or intangible resources within a business value network. Business roles are logical groups of business processes that are fulfilled by one or more actors. Business actors provide value to or derive value from the business roles they play. Finally, business relationships are the contractual exchanges of products or services for financial payment or other resources.

Dalam desain teknologi yang menjadi fokus adalah keputusan untuk mengadopsi standar teknologi seperti apa jenis jaringan yang diadopsi dan perangkat lunak seperti apa yang akan dikembangkan. Perlu dipertimbangkan lebih saksama bagaimana jaringan itu dibangun untuk dapat mengantisipasi perkembangan jaringan dan dapat dioperasikan secara komersial.

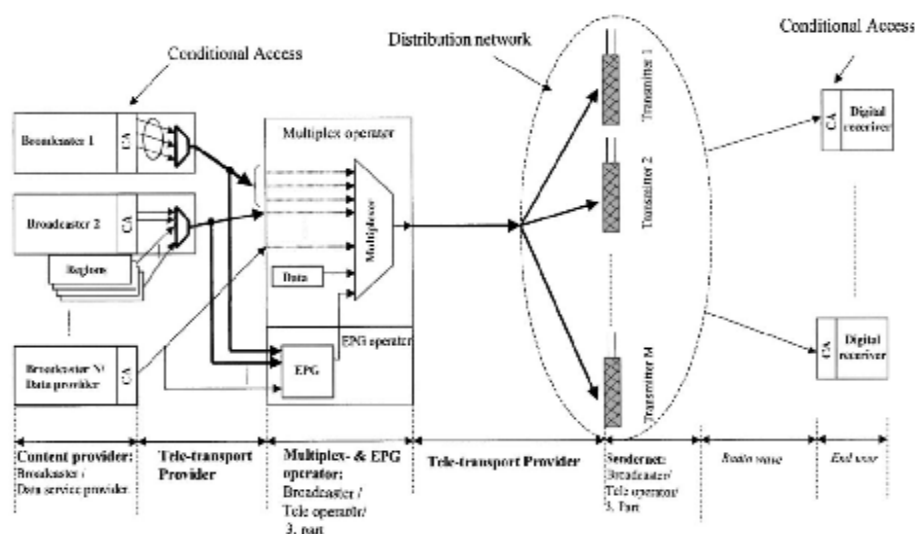
Desain pelayanan konten lebih mengedepankan karakteristik khusus dalam pengembangan layanan kepada penonton televisi digital, misal seberapa interaktifkah layanan yang akan disediakan oleh stasiun televisi. Pelayanan terhadap konten televisi memang dapat dipetakan dari yang interaktifnya rendah sampai pada tingkat interaktifnya tinggi. Pelayanan yang mungkin disediakan dalam penyiaran digital adalah interaktif *channel* yang memberikan ruang bagi penonton untuk meminta informasi khusus tentang prakiraan cuaca, informasi lokal mengenai agenda kota, dan lain-lain. Dalam hal pelayanan interaktif ini perlu dipertimbangkan beberapa kriteria yang diajukan oleh Braet dan Ballon seperti di bawah ini : *The following criteria were used to describe the ways in which the service package was presented to the endusers: (1). User involvement. This refers to the degree of interactivity experienced by users. User involvement can vary from low (no end-user involvement/interaction) to middle (user can give input, e.g. vote), to high (user can generate and post his own content). The degree of user involvement depends on the network characteristics, the chosen return channel and the implementation of interactive technologies from the technologies design,* (2). *Prod-*

uct bundles. This criterion describes the kind of product bundles that is offered to the end user. This can be package (user takes a subscription on a collection of channels, and does not have the authority to add or delete channels), 'modules' (user can take a subscription on individual channels or theme-packages). 'Individual views (user can chose individual shows), or hybrid (mixes of the above).

Desain finansial berkaitan dengan biaya pembangunan jaringan, perjanjian pembagian keuntungan, perjanjian *sharing* dan skema bisnis dalam kaitannya dengan konsumen. Kriteria di bawah ini dipakai sebagai pembuatan keputusan finansial : *The following criteria were used to describe the financial design decisions: (a) Cost sharing agreements. This first financial criterion describes how different actors carry the costs of the service rollout. Three cost categories are taken into account. First, the device cost refers to the primary purchase cost of the handsets and to what degree the consumer has to pay the entire cost of the handset, or whether device subsidies are allowed. Second, the network infrastructure costs refer to the cost of building the transmission infrastructure. Third, the content and application costs refer to which partner carries what part of the content and/or application development cost. Besides the traditional approach, where content is aggregated by a traditional broadcaster, and appli-*

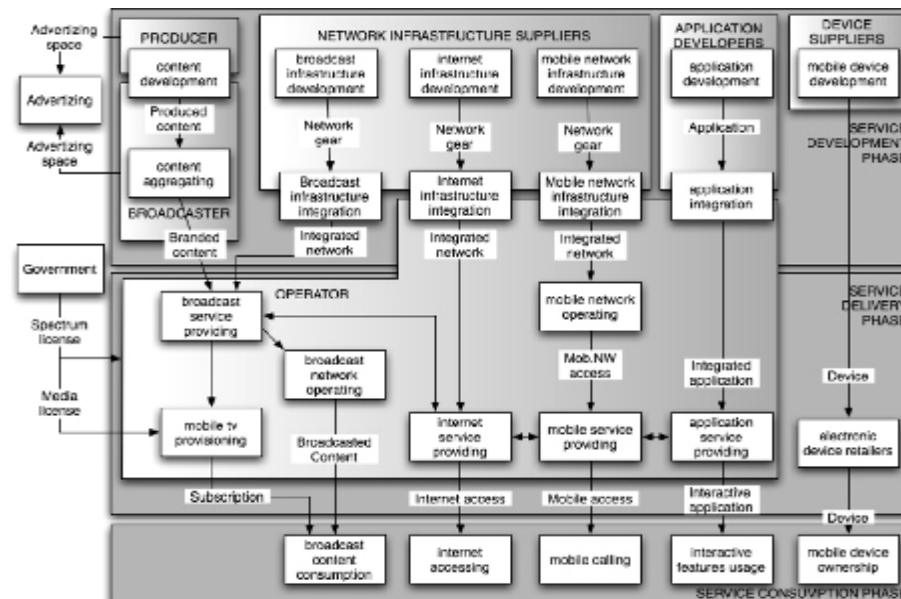
cations are developed by or on behalf of a mobile network operator, these efforts (and subsequent costs) could also be borne by other actors. For instance, a MNO could develop mobile TV content by purchasing and aggregating programs under his own brand, or even by building or acquiring a TV station of one's own, (b) End-user billing. This criterion describes the ways in which the user pays for the services provided. The billing formula will depend on the kinds of product bundles offered, but does not follow directly from that criterion. For example, being able to select individual shows does not necessarily imply pay-per-view pricing. Three basic end-user billing models can be distinguished: subscription based, pay-per-use and free-to-air with advertisements. Between these three pure forms of revenue generation, any number of hybrid combinations can also arise, (c) Revenue sharing agreements. The last criterion describes the ways in which the service supplier(s) agree on how the revenues generated through end-user billing are distributed throughout the value network, including the broadcasters, other content providers, and the mobile network operators.

R. Tadayoni, K. E. Skouby (1999:7) mencoba melihat pengembangan model bisnis dalam penyiaran digital melalui tiga isu penting yaitu, distribusi, akses dan teknologi. Dalam isu distribusi penting dilihat apakah penyiaran digital tersebut



Gambar 1. The OSA model.

Sumber : Tadayoni & Skuby (1999:6)



Gambar 2. Generic Mobile Digital TV value network (with sample actors).

Sumber : Braet dan Ballon (2008:9)

memanfaatkan satelit, kabel atau terestrial. Ketiga moda distribusi tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Distribusi dengan cara teresterial memiliki kelebihan:

The signal can be received using simple roof or in-house antenna. The end consumer is not forced to invest in cable connections or satellite dishes. This provides simple access opportunity for all population. There is possibility for simple portable and mobile reception. Regionalisation of the signals can be made in a cost-efficient manner. This means that targeting the signal towards limited areas (regional and local TV) can be done in a cost-efficient form.

Dalam isu akses, Tadayoni membaginya ke dalam akses terhadap *signal* dan akses terhadap konten. Akses terhadap *signal* berkaitan dengan jangkauan, sedangkan akses terhadap konten berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana khalayak mampu menjangkau konten siaran televisi digital. Isu yang penting dalam akses ini adalah, *Conditional Access*, *Electronic Program Guide*, and *Application Program Interface*.

Adapun model bisnis yang digambarkan oleh Tadayoni & Skuby (1999:6) yang disebut *Open System Architecture* (OSA model) adalah Gambar 1.

Dalam model itu digambarkan beberapa komponen yang memiliki fungsi penting dalam distribusi penyiaran digital. Empat fungsi dasar dijelaskan melalui model itu yaitu: *content*, *multiplex*, *infrastructur* and *user interface*. Lebih jauh Tadayoni & Skuby (1999:6) menjelaskan :

(1). *Content*. A TV-station or a data service provider will typically perform this function. Other organizations are likely to develop including combining the traditional functions. The extent to which other providers than TV-stations will be allocated capacity is, however, typically a political question. The Conditional Acces is located at content provider, but CA could also rest with the multiplexoperator; (2). *Multiplex*. This fuction is only partly determined by technical requirements. The multiplexoperator makes the final multiplexing, but the function can be divided in two sub-functions: (1) a technical function, simply multiplexing incoming programs and (2) an administrative/economic function: management of capacity not immediately used by content providers. The latter function is not determined by the general techno-organizational structure of DVB, but might be given substance based on political, economic and organizational considerations including actual and future pros-

pects for development of a competitive market, etc

Model bisnis yang lebih detail dikembangkan oleh Braet dan Ballon (2008, 9) untuk penyiaran digital yang dikembangkan berbasis pada teknologi DVB-H untuk mobile *broadcasting* seperti pada Gambar 2.

Dalam model ini digambarkan secara rinci masing-masing bagian dan bagaimana hubungan antar masing-masing bagian ini. Dari paparan model ini dapat diketahui posisi masing masing stakeholder dan apa bentuk-bentuk layanan konten yang ditawarkan oleh masing-masing *provider*. Dalam model yang lengkap ini mudah diketahui bagaimana skema arus informasi yang akan terjadi dalam situasi yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-technical approach*. Pendekatan *socio-technical approach* adalah perspektif yang memiliki *framework* sangat baik dalam melakukan investigasi hubungan timbal balik yang terjadi antara aspek teknis dan proses sosial. Pendekatan sosio-teknis ini sangat luas digunakan dalam mendesain bekerjanya sistem. Pendekatan ini membantu dalam menjelaskan interaksi antara artefak sosial dan artefak teknik. Lebih khusus lagi, pendekatan ini merupakan metode yang baik dalam rangka mendesain ulang organisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan secara optimal desain organisasi dan komponen-komponen organisasi untuk bekerja dengan baik. Seperti yang ditegaskan oleh D.H. Shin (2006,18) berikut ini:

In particular, socio-technical sistem theory has been employed as a successful method of organizational redesign. The objective of socio-technical sistem theory is to develop an optimal organizational design that enables the three STS components of the organizational sistem to work well together. These components are the social subsystem, technical subsystem, and the environment. With these components, socio-technical perspective largely has been used to investigate the integration of technology,

processes, people and organizational structure.

Terdapat tiga subsistem dalam pendekatan sosio-teknik ini yaitu: *Technical Subsystem (infrastructure, equipment, application and service)*, *Social Subsystem (market, customer and industry)*, dan *environment (regulation, policy and society)*. Melalui tiga perspektif inilah akan dicari hubungan atau keterkaitan antar ketiganya. Penelitian ini memfokuskan hubungan atau kaitan antara ketiganya. Pada akhirnya, penelitian ini memahami dan menjelaskan bagaimana interaksi teknologi DVB-T, pasarnya, industri dan regulasinya dengan pendekatan sosio-tekniknya.

Dari ketiga subsistem di atas dianalisis hubungan interrelasinya dan kemudian disusun sebuah skenario hubungan antar ketiganya. Sub-sistem teknologi dianalisis *infrastructure, equipment, application service*. Dalam Subsystem sosial dianalisis pasar, *customer* dan industrinya. Sedangkan dalam subsistem regulasi dianalisis regulasi, kebijakan dan publik atau khalayak.

Sumber data diperoleh melalui penelitian langsung dan dokumen-dokumen yang ada berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang berkaitan dengan penyiaran televisi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya berdasarkan pada: (1). Konsultasi. Konsultasi dilakukan untuk membuat peta tentang yang mungkin dapat digambarkan pada industri penyiaran digital. Peta industri ini didasarkan dengan konvergensi media yang dimungkinkan. Konsultasi dilakukan tidak hanya terhadap kalangan industri pertelevisian seperti pengelola stasiun televisi, Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah, Penyedia teknologi penyiaran, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) saja tetapi juga dengan kalangan Masyarakat Telekomunikasi, masyarakat televisi publik dan masyarakat televisi komunitas dan organisasi-organisasi masyarakat yang besar, (2). *Focus Group Discussion* (FGD). Dari peta industri penyiaran yang telah tergambar melalui konsultasi tadi kemudian lebih dikerucutkan ke dalam sebuah aplikasi industri yang lebih konkrit melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD ini dilakukan terhadap kelompok *stakeholder* industri penyiaran yang ada di beberapa kota besar yang terpilih melalui berbagai

pertimbangan di seluruh Indonesia, (3). Kuesioner. Kuesioner disebar kepada publik luas di beberapa kota besar terpilih di Indonesia. Kuesioner diperlukan untuk memperoleh data kuantitatif terhadap tanggapan dan keinginan publik terhadap penyiaran televisi *digital*. Data ini diperlukan sebagai langkah awal dalam memahami keinginan publik yang berguna dalam penyusunan kebijakan, (4). Analisis Kebijakan. Analisis kebijakan diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah di dalam mengatur industri penyiaran di Indonesia. Analisis ini dimulai dengan mencermati seluruh kebijakan penyiaran yang telah disusun oleh pemerintah baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Dari analisis keputusan tersebut kemudian dianalisis proses dan mekanisme kebijakan tersebut disusun. Analisis tersebut menghasilkan temuan *roadmap* kebijakan penyiaran yang dapat dimanfaatkan untuk dasar pijakan didalam penyusunan kebijakan penyiaran digital.

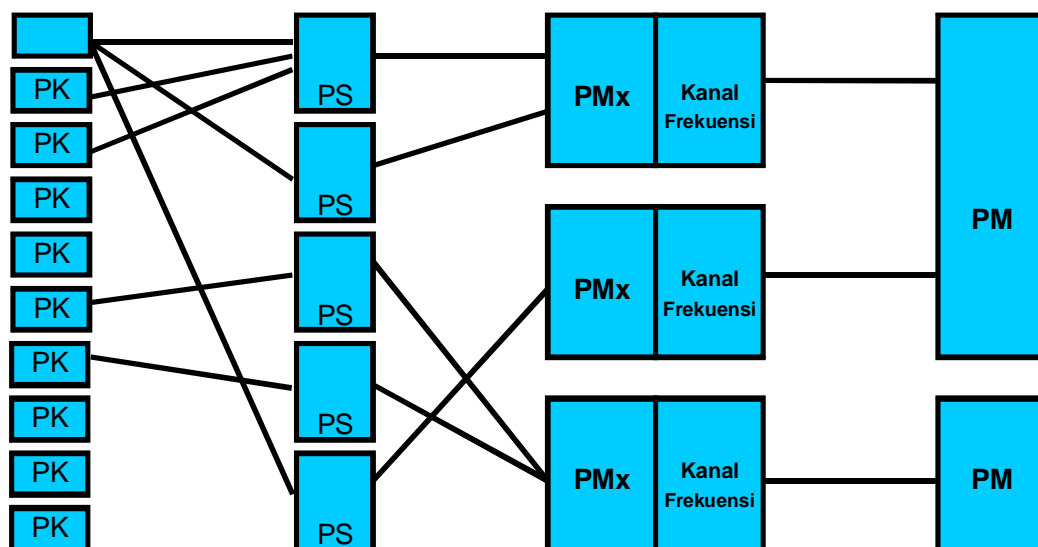
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital akan menghasilkan model bisnis penyiaran yang baru. Model bisnis penyiaran digital akan mengakibatkan struktur bisnis

yang sama sekali berbeda dengan struktur bisnis penyiaran televisi analog. Dalam model bisnis penyiaran televisi analog, pemain bisnis lebih berupa pemain tunggal. Stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran sekaligus berperan sebagai pemroduksi *content* dan mentransmisikan sendiri program siarannya. Dalam situasi seperti itu, struktur bisnisnya bersifat “vertical”, semua dikuasai oleh penyelenggara siaran.

Struktur bisnis penyiaran televisi analog yang semula bersifat “vertical” ini akan berubah menjadi “horizontal” dalam struktur bisnis penyiaran televisi digital. Sebagai akibat dari struktur bisnis yang bersifat “horizontal” ini akan muncul pemain-pemain baru karena rantai bisnis menjadi semakin panjang. Struktur “horizontal” dalam bisnis penyiaran digital menjadi akibat sifat teknologi dalam penyiaran digital. Teknologi penyiaran digital yang memungkinkan dalam satu kanal bisa memuat sekaligus enam sampai delapan frekuensi, tidak memungkinkan hanya dikuasai oleh satu pemain. Pemisahan rantai layanan dalam bisnis penyiaran TV digital harus dilakukan. Pemisahan tersebut tampak dalam skema arsitektur layanan pada Gambar 3.

Dari blok diagram pada Gambar 3, dapat dijelaskan tentang siapa “pemain” dan apa “tugas dan wewenang” masing-masing terkait dengan penyelenggaraan TVD-TT :



Gambar 3. Arsitektur Layanan TVD-TT dalam 1 (satu) Wilayah Jangkauan Siaran

(Sumber : Buku Putih, Depkominfo, 2009)

Penyedia Konten (PK). Penyedia konten memproduksi siaran-siaran seperti : berita, siaran pendidikan, program anak-anak, program budaya dan kesenian, penyuluhan masyarakat, iklan, dsb. Konten dapat diproduksi oleh individu, “*production house*” atau Penyelenggara Program Siaran.

Penyelenggara Program Siaran (PS); Penyelenggara Program Siaran berfungsi menggabungkan program-program siaran dari Penyedia Konten sesuai dengan susunan dan jadwal tertentu untuk dipancarkan melalui Penyelenggara Multiplekser. Penyelenggara Program Siaran wajib mematuhi aturan-aturan konten yang telah ditetapkan dalam UU RI No. 32 Tahun 2002 dan PP No. 50 Tahun 2005. Penyelenggara Program Siaran wajib memiliki lisensi IPP yang akan diatur tersendiri.

Penyelenggara Multiplekser (PMx). Penyelenggara Multiplekser berfungsi menggabungkan beberapa program siaran dari Penyelenggara Program Siaran untuk kemudian dipancarkan ke penonton melalui suatu sistem peralatan transmisi (pemancar, sistem antena dan menara). Jumlah penyelenggara multiplekser dalam satu zona layanan disesuaikan dengan “Master Plan” TVD-TT yang ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Penyelenggara Program Siaran dapat mengajukan permohonan izin baru sebagai Penyelenggara Multiplekser, namun mengingat jumlahnya tidak sebanyak jumlah PS, maka pemberian izin atau lisensi dilakukan melalui mekanisme seleksi.

Penyedia Menara (PM). Penyedia Menara adalah perusahaan yang menyediakan menara untuk menyiarkan siaran dari beberapa Penyelenggara Multipleks. Menara yang digunakan, wajib mengikuti standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengembangan Model Bisnis Penyiaran TV *Free to Air Public* dan *Free to Air Swasta*

Untuk melakukan pengembangan Model bisnis penyiaran TV *Digital Free to Air Public* dan *Free to Air Swasta* perlu dilakukan kajian dalam hal sumber daya iklan, konten, struktur industri televisi dan regulasi.

Sumber Daya Iklan

Iklan sebagai sumber daya utama dalam industri televisi merupakan penggerak roda industri televisi. Sampai saat ini, banyaknya stasiun televisi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan persaingan untuk memperoleh iklan menjadi sangat ketat. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan industri televisi semakin hari harga iklannya menjadi semakin mahal. Semakin mahalnya harga iklan di televisi ini tentunya menyebabkan tidak lagi kompetitifnya media televisi dibandingkan dengan media lainnya.

Menurut identifikasi AGB Nielson (Bulletin AGB Nielson Media Research, Maret, 2009) empat hal tersebut adalah; pertama, penurunan rating rata-rata; kedua, peningkatan jumlah stasiun televisi; ketiga pertumbuhan populasi TV dan keempat, harga iklan (*rate card*) dan inflasi.

Pertama penurunan *rating* rata-rata. Dalam empat tahun terakhir, rating total menurun dari 13,8% menjadi 13,5% pada tahun 2007, dan semakin turun menjadi 12,6 pada tahun 2008. Pada Januari dan Februari 2009, rata-rata rating adalah 13,2 %. Penurunan angka ini mengindikasikan tren bahwa TV bukanlah media hiburan rumahan utama lagi; kini ada ponsel dan internet, yang mengalihkan bola mata penonton dari TV. Hiburan luar rumah seperti menonton di bioskop pun tampak bertumbuh. Pertumbuhan pusat perbelanjaan juga telah menarik keramaian, terutama diakhir pekan. Selain itu kampanye penghematan listrik pemerintah telah menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah kawasan, yang berakibat lebih lanjut pada penurunan kepermisaan TV.

Kedua, peningkatan jumlah stasiun TV. Kompetisi menyebabkan stasiun TV menjadi semakin sulit mendapatkan satu persen *rating*. Misalnya, jika sepuluh tahun lalu, program nomor satu bisa memperoleh rating hingga 30%, kini program dengan *rating* teratas hanya bisa meraih rating 5%-9%.

Ketiga, pertumbuhan populasi TV. Populasi TV individu berusia lima tahun ke atas di 10 kota survey telah tumbuh dari 39 juta menjadi 46,7 juta sejak 2006. Sebagai akibatnya, satu poin rating yang bisa diraih oleh stasiun TV sebenarnya mewakili jumlah penonton yang

bertambah dari tahun ke tahun. Jadi jika rating 1% mewakili 390 ribu orang pada tahun 2006, pada tahun 2009, rating tersebut mewakili 467 ribu orang. Dari sini saja kenaikan *Cost Per Rating Point* (CPRP) sebesar 20% bisa dibenarkan.

Keempat, harga iklan (*rate card*) dan inflasi. Sementara harga iklan stasiun TV memperlihatkan kenaikan antara 3% dan 5% dari 2006 ke 2008, tingkat inflasi meningkat tajam menjadi 11,06% pada tahun 2008 seiring terjadinya krisis ekonomi global. Semuanya kemudian berpengaruh pada faktor 'biaya' dalam CPRP.

Tren kenaikan harga iklan televisi yang tercermin dalam kenaikan harga CPRP di atas memperlihatkan bahwa persaingan stasiun televisi menjadi semakin ketat. Artinya peluang hidup stasiun televisi yang ada menjadi semakin kecil. Peluang hidup yang semakin kecil ini akan diperburuk lagi dengan kenyataan bahwa ke depan tidak ada stasiun televisi nasional, stasiun televisi yang ada hanyalah stasiun televisi berjaringan. Dengan adanya jaringan televisi, pemasang/produsen barang dan jasa iklan tentunya akan memilih memasang iklan pada jaringan televisi yang paling besar. Akibatnya, stasiun televisi kecil menjadi semakin sulit untuk bertahan hidup.

Bisa dibayangkan, bagaimana kompetisi antar stasiun televisi di era penyiaran digital. Kompetisinya akan sangat ketat lagi karena semakin banyak stasiun televisi di setiap daerah. Di era penyiaran digital bisa terdapat lebih dari enam ratus stasiun televisi. Enam ratus stasiun televisi tersebut semuanya membutuhkan iklan untuk menopang kehidupannya.

Analisis Kompetisi

Tingkat kompetisi stasiun televisi yang sangat ketat dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh kenaikan jumlah stasiun televisi yang ada juga tampak dalam analisis *Niche* yang dilakukan terhadap enam stasiun televisi yang ada saat ini dan yang berjaringan nasional. Teori *Niche* merupakan teori ekologi yang menggambarkan bagaimana sekelompok makhluk hidup menggantungkan dan memperebutkan sumber kehidupannya. Teori *Niche* ini dibagi menjadi dua, yaitu *niche of breadth* dan *niche overlap*.

Niche of Breadth menunjukkan suatu tingkat hubungan antara suatu populasi atau makhluk hidup dengan sumber-sumber penunjangnya dalam suatu komunitas. Suatu makhluk hidup disebut spesialis apabila hanya menggantungkan kehidupannya terhadap satu jenis penunjang, disebut generalis jika sumber kehidupannya beraneka ragam, serta disebut moderat yang bukan merupakan keduanya. Sementara *niche overlap* adalah derajat kesamaan ekologi atau persaingan antara dua populasi atau makhluk hidup dalam memperebutkan suatu sumber penunjang kehidupan.

Teori *Niche* tersebut dapat digunakan untuk melihat persaingan dalam industri televisi. Dianalogikan bahwa televisi adalah makhluk hidup yang memperebutkan sumber kehidupannya yaitu : *capital/modal* (misalnya pemasukan dari iklan), *types of content* (jenis isi media) dan *types of audience* (jenis khalayak sasaran).

Berdasarkan hasil penelitian persaingan antarindustri televisi di atas menunjukkan ketatnya persaingan yang ada dalam industri televisi swasta. Dengan sejumlah televisi swasta yang ada sekarang persaingan sudah sangat ketat dengan angka *Niche of Breadth* berkisar antara 4,8079 sampai 6,0422. Bisa diprediksikan persaingan yang semakin ketat di era televisi digital nanti dimana jumlah stasiun televisi semakin banyak.

Analisis Investasi

Di tengah kompetisi yang sangat ketat dalam industri televisi akan menyebabkan investasi di dalam industri ini semakin sulit untuk segera mendapatkan *revenue* yang menjanjikan. Dalam kondisi persaingan seperti ini, tingkat bertahan hidup stasiun televisi sebelum memperoleh keuntungan dari usahanya adalah berkisar sembilan sampai sepuluh tahun. Tingkat kesulitan investasi dalam industri televisi tergambar dalam analisis investasi terhadap dua stasiun televisi lokal mendapatkan gambaran sebagai berikut.

Kelayakan bisnis televisi analog yang ada saat ini menjadi sangat penting untuk memperkirakan dan menentukan bagaimana prospek bisnis televisi digital selain perilaku penonton. Adapun hasil perkiraan investasi di televisi, khususnya untuk televisi lokal, televisi lokal diam-

bil sebagai contoh investasi karena nantinya tidak ada televisi yang bersiaran nasional akan tetapi tetap bersiaran lokal.

Hasil analisis keuangan yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi lokal dalam memperkirakan *Payback Period (PbP)* menunjukkan investasi akan memperoleh dana kembali selama delapan tahun tiga bulan. Penghitungan *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* pada sebuah stasiun televisi lokal menunjukkan bahwa kemampuan memperoleh laba dimulai pada tahun kesembilan. Adapun yang dimaksud dengan ROA adalah perbandingan antara pendapatan atau laba dan aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Asumsi yang digunakan untuk mengukur kekuatan aset untuk 10 tahun ke depan adalah pertumbuhan jumlah aset yang dimiliki stasiun TV bedasar prediksi penggunaan *equity*. Sedangkan ROE adalah pertumbuhan antara pendapatan atau laba dan modal sendiri dari perusahaan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal sendiri dalam sebuah perusahaan. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat suku bunga pinjaman dan jumlah pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang dimiliki sebuah stasiun TV.

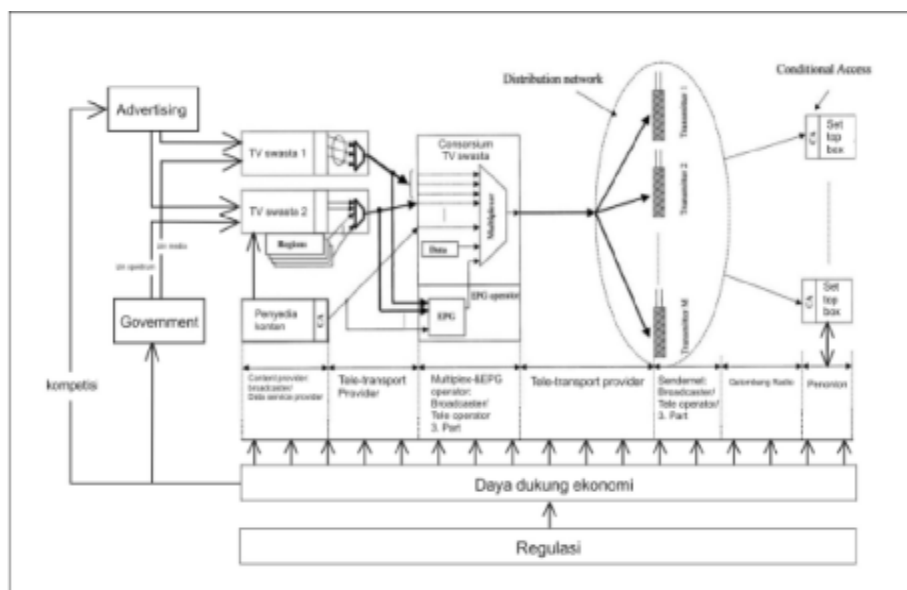
Berdasarkan analisis keuangan di atas maka sesuai dengan rencana kerja sepuluh tahun stasiun swasta tersebut, tahun 2013 adalah tahun di mana pertimbangan keuangan bahkan keun-

tungan dapat dicapai (tahun ke-10). Investasi industri televisi, apalagi di daerah masih akan sangat berat untuk mencapai *break event point*.

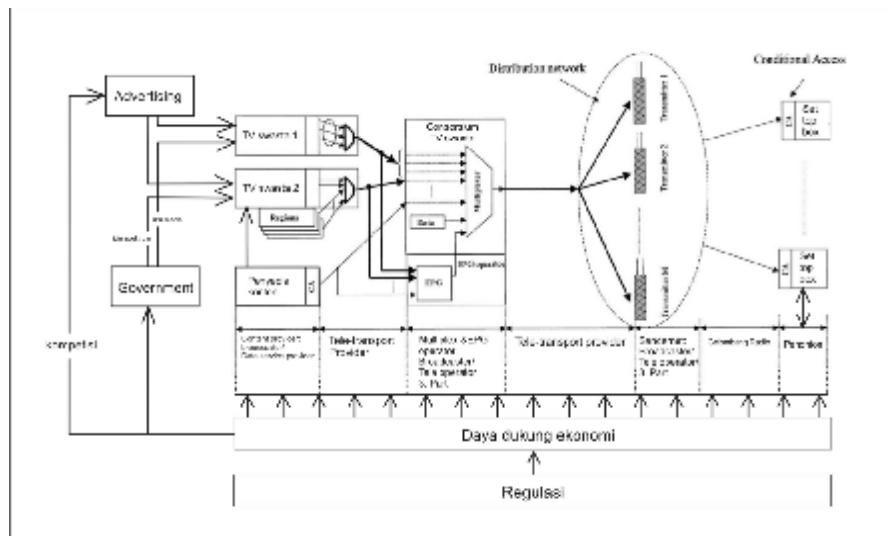
Analisis Penonton Televisi

Riset terhadap penonon televisi dilakukan untuk mendapatkan gambaran pasar dari industri televisi dan bagaimana perilaku penonton televisi. Perilaku penonton televisi penting untuk memperkirakan bagaimana penerimaan atau penolakan penonton televisi terhadap kehadiran sistem penyiaran digital di Indonesia. Temuan riset menunjukkan; penonton televisi mayoritas diberbagai kota menunjukkan ketidakpuasan terhadap program acara televisi. Angka ketidakpuasan itu berkisar antara 57% sampai 67%. Sedangkan mereka yang merasa belum puas berkisar antara 33% sampai 46%. Mereka yang belum puas mengaggap program siaran televisi tidak mendidik, terlalu dibesar-besarkan tidak bermutu, dan tidak masuk akal. Sedangkan mereka yang merasa puas mengatakan program siarannya sudah cukup menghibur dan mendidik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakpuasan terhadap program acara televisi swasta cukup tinggi yaitu 59% - 68%. Ketidakpuasan terhadap program acara televisi swasta disebabkan karena program acaranya dinilai tidak bermutu. Hanya sedikit sekali responden yaitu



Gambar 4. Model Bisnis Penyiaran TV Digital Publik



Gambar 5. Model Bisnis Penyiaran TV Swasta Digital

antara 2% sampai 9% yang mengatakan program acara televisi bermutu.

Temuan pada penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan pada stasiun televisi juga berhubungan dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa siaran televisi di Indonesia kurang bermutu dan tidak bermutu. Sebanyak 57,58% responden menyatakan bahwa televisi di Indonesia kurang bermutu dan 4,04% tidak bermutu.

Sementara itu, penelitian ini menemukan hal yang cukup menarik yaitu, program acara TVRI dianggap oleh penonton televisi sebagai kurang bermutu oleh 57,58% responden dan 4,04% responden menyatakan bahwa TVRI tidak bermutu. Namun, jumlah responden yang menganggap bahwa TVRI bermutu ada 38,38% responden. Angka ini jauh di atas responden yang menonton TVRI pada program acara TV Swasta. Artinya, harapan penonton televisi di Indonesia untuk memperoleh program acara di TVRI masih cukup tinggi. Kepercayaan penonton bahwa TVRI mampu menyuguhkan tontonan yang bermutu masih cukup besar.

Model Bisnis Penyiaran TV Digital Pengembangan untuk TV Publik

Sejumlah riset di atas menemukan beberapa hal sebagai berikut: kompetisi penyelenggara

ra siaran saat ini sangat ketat. Iklan yang menjadi sumber daya ekonomi bagi stasiun televisi *free to air* menjadi sangat kecil porsinya apabila diperebutkan oleh banyak stasiun televisi yang menyelenggarakan siaran lokal. Daya dukung ekonomi di suatu daerah dimana stasiun televisi itu berada sangat penting sebagai acuan penyelenggaraan stasiun televisi.

Dari hasil penelitian penonton, menunjukkan TVRI sebagai televisi publik tidak banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Sebagai televisi publik, sebenarnya TVRI mengemban misi yang mulia untuk menyediakan informasi bagi masyarakat. Tidak populernya TVRI di tengah persaingan dengan televisi swasta memprihatinkan mengingat pada awalnya, TVRI diharapkan sebagai penyeimbang TV swasta dengan tayangan sosial ketimbang komersial.

Teknologi siaran dan sumber daya manusia yang dimiliki TVRI, menjadi aset yang sangat berharga bagi pengembangan penyiaran di Indonesia. Teknologi digital yang memungkinkan pemanfaatan pemancar tunggal untuk mentransmisikan *signal* televisi dapat menggantikan peralatan pemancar TVRI.

Secara teknologi, model bisnis televisi digital harus memasukkan *Electronic Programme Guide (EPG)* sebagai nilai tambah yang mampu memberi informasi yang sifatnya interaktif bagi penonton televisi. Berkaitan dengan TVRI, model

bisnisnya harus disusun tersendiri di mana TVRI tidak dipisahkan baik sebagai Penyelenggara Siaran maupun sebagai Operator Mux atau *multiplekser*.

Dalam model bisnis di atas TVRI menjadi *multiplekser* yang menyediakan frekuensi untuk televisi komunitas dan televisi pendidikan yang lebih berorientasi kepada publik. Iklan komersial juga diperbolehkan bertumpu pada kepentingan publik. TVRI mampu menjangkau semua wilayah siaran yang ada dan membenak stasiun TVRI di daerah-daerah yang dipandang perlu untuk didirikan stasiun TVRI.

Dalam model ini teknologi dan SDM TVRI yang besar masih dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun demikian, ijin pendirian TVRI di suatu daerah ditentukan juga berdasar pada potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Model bisnis pada Gambar lima memperlihatkan alur yang mempertimbangkan banyak hal. Model bisnis di atas merupakan asimilasi dari model yang sangat teknis dengan model yang berkaitan dengan lingkungan, struktur industri televisi, daya dukung ekonomi dan sumber daya televisi *free to air* yaitu iklan. Untuk televisi publik penyedia menara cukup dari satu pihak saja yang dapat menampung konsorsium TVRI dan TV komunitas. Sedangkan untuk televisi swasta bentuk konsorsium merupakan bentuk yang tepat untuk lebih dapat mengatur kompetisi. Penyedia menara untuk televisi swasta bisa terdiri lebih dari satu pihak saja.

Dalam model bisnis ini, dalam memberikan ijin penyelenggaraan televisi digital *free to air* baik yang publik maupun yang swasta pemerintah perlu mempertimbangkan daya dukung ekonomi masyarakat lokal yang pada gilirannya akan berpengaruh pada iklan sebagai sumber daya hidup stasiun televisi.

Simpulan

Berdasarkan hasil riset di atas, penelitian ini merekomendasikan sebuah model bisnis yang memperhatikan aspek-aspek daya hidup stasiun televisi. Digitalisasi bukan berarti membuka kran selebar-lebarnya untuk tumbuhnya begitu banyak stasiun televisi memenuhi *mux* yang ada tapi tidak

memberi kemanfaatan yang maksimal kepada masyarakat, bahkan kemudian mati atau bangkrut. Hal tersebut justru akan membuat masyarakat lebih kecewa karena sudah mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat mengakses siaran TV digital.

Dalam memberikan ijin siaran bagi penyelenggara siaran di setiap wilayah layanan haruslah diperhitungkan daya dukung ekonomi di wilayah tersebut untuk mengatur sumber daya iklan yang mungkin dapat diperoleh oleh stasiun televisi di daerah tersebut. Pemain lokal tentunya lebih diutamakan. Pemain besar sebaiknya dibatasi untuk dapat menjangkau banyak wilayah layanan.

Sementara itu untuk TVRI, dibutuhkan model bisnis tersendiri yang mampu mengembangkan TVRI sebagai stasiun televisi yang mampu memberi jawaban bagi kebutuhan penonton akan televisi. Model bisnis yang direkomendasikan adalah, TVRI juga diperbolehkan untuk memperoleh iklan. Sebagai Penyelenggara Siaran TVRI juga dapat sebagai *Multiplekser* dengan catatan, TVRI juga harus bersedia menampung televisi komunitas yang berjangkauan terbatas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi RI yang telah memungkinkan dilakukannya penelitian berjudul "Pengembangan Model Bisnis Penyiaran TV Digital di Indonesia" melalui Program Hibah Penelitian Insentif Tahun 2009-2010 yang menjadi dasar bagi penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ketua dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN "Veteran Yogyakarta. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu penelitian dan publikasi di Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN "Veteran" Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Braet, Olivier, Ballon, Pieter, 2008, Cooperation Models for Mobile Television in Europe, *Telematics and Informatics* 25 (2008), 216-236.

- Dong H Shin, 2006, *Socio-Technical Challenges in The Development of Digital Multimedia Broadcasting : A Survey of Korean Mobile Television Development, Technological Forecasting and Sosial Change*, 73 (2006), 1144-1160.
- Drury, Godon, Markarian, Garik, Pickavance, Keith, 2001, *Coding and Modulation for Digital Television*, Kluwer Academic Publishers, Norwell Massachusetts.
- G.C. Feng, Charles , T.Y. Lau , David J. Atkin ,*, Carolyn A. Lin, *Exploring the evolution of digital television in China: An interplay between economic and political interests*, Telematics and Informatics, 2008.
- Haliman, Supardi, *Regulasi Sistem Penyiaran di Indonesia: Studi Kasus Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio FM di Kepulauan Riau*, 2007, Pararaton, Yogyakarta
- Strabhaar, LaRose, 2000, *Media Now, Communication Media in Information Age*, Wadsworth, Belmont USA.
- Sudibyo, Agus, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LkiS, 2004, Jakarta.
- Tadayoni, Reza, Skuby, Knud, Erik, 1999, *Terrestrial Digital Broadcasting : Convergence and Its Regulatory Implications*, Telecommunications Policy 23 (1999) : 175-199.
- T.Marsden.,Christopher., G, Verhulst, Stefan, *Convergence in European Digital TV Regulation*, Balckstone Press Limited, 2000.
- Weber, Joseph, Newberry, Tom, 2007, *IPTV Crash Course*, McGraw Hill, New York:
- Usulan Working Group Masterplan Frekuensi, 2008
- Green Paper, Penyiaran, Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, 2008.
- Bulletin AGB Nielson, Maret 2009).
- Studi ROA dan ROE dua Stasiun Televisi di Yogyakarta.

Reporting on ‘Monas Incident’ in the Mass Media Construction

Gatut Priyowidodo

Prodi Ilmu Komunikasi - Fikom Universitas Kristen Petra

Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya 60236, HP. 081363481533

email: gatutpriyowidodo@yahoo.com dan <http://gatutpriyowidodo.blogspot.com>

Abstract

The purposes of this research is 1) to know news construction to FPI versus AKKBB (Aliansi Kerukunan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan-Reconciliation Alliance for Religion Freedom and Faith) conflict to enjoinder of Ahmadiyah teaching; 2) To know media construction to implementation religion teaching purification movement in pluralism state; 3) To know media construction in placing relationship between state and religious organization as a civil society strength in supporting of harmonious believers life. Research method is with discourse analysis. It was focused on media news about FPI on Suara Pembaruan and Republika at edition on June 2-12, 2008.

Based on the component observed, thematic, schematic, semantic, syntax, stylistic and rectories, the research findings is firstly, news construction a media is very determined by media ideology. Suara Pembaruan (Christian Values) emphasize that FPI performs harshness to people rights in implementing latitudinarian. Republika (Islamic Values) assess that FPI does not make harshness but is implementing practice of Islam teaching purification. Second, practices of religion teaching purification do not represent wrong action. Third, state is assessed very irresolute in implementing of its function. State does not give enough protection to weak people.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi konstruksi berita tentang FPI versus AKKBB (Aliansi Kebebasan untuk Kerukunan Beragama dan Berkeyakinan) - dalam kasus konflik pelanggaran ajaran Ahmadiyah, (2) untuk mengidentifikasi konstruksi media massa terhadap pelaksanaan gerakan pemurnian ajaran agama di negara pluralisme, (3) untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media dalam menempatkan hubungan antara negara dan organisasi keagamaan sebagai kekuatan masyarakat sipil untuk mendukung kehidupan yang harmonis orang beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana. Fokus pada berita media tentang FPI atau Insiden Monas di *Suara Pembaruan* dan *Republika* dalam periode publikasi antara 02-12 Juni, 2008. Komponen yang diamati mencakup, tematik, skematik, semantik, sintaksis, gaya dan rectories. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, konstruksi berita dari media sangat ditentukan oleh ideologi media tersebut. *Suara Pembaruan* (bernuansa nilai Kristiani) menekankan bahwa FPI melakukan kekerasan terhadap hak-hak orang dalam melaksanakan kebebasan beragama. *Republika* (menekankan nilai Islami) menilai bahwa FPI tidak membuat kekerasan tetapi menerapkan praktek pemurnian ajaran Islam. Kedua, praktek pemurnian ajaran agama tidak merupakan tindakan yang salah. Ketiga, negara dinilai sangat tidak tegas dalam melaksanakan fungsinya. Negara tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada mereka yang lemah.

Key words : *organizational communication, media construction, purification*

Introduction

Purification movement occurs almost in all religions. Their struggle is based one objective, namely to purify religion practices currently executed. In the Catholic Church environment, some of the people call themselves left-wing faction radical movement ACORN (Vadum, 2009:18), a Catholic organization related to a Catholic community supporting Obama. In Iran, there was also radicalism movement called itself Sunni Radicalism (Sivan, 1989:1). It means that each organization is directed to support revitalization of struggle direction conducted by previous organizations at that time or even having been implemented by the State.

They assume that current religious or social practices do not meet their ideals. It is why they must come forward to take the role. The state is regarded as too permissive and more compromise so that the law of enforcement becomes so loose. They have no other choices than take actions based on their own versions. Such actions are then regarded as contradictory to positive laws produced by the state, and later create another problem.

In Indonesia, growth of social organizations bringing purification themes is active since the collapse of Soeharto in 1998. Muhtadi (2009:623) identify some organizations like MMI (*Majelis Mujahidin Indonesia*), HT (*Hisbut Thahrir*), and *Front Pembela Islam* (Islamic Defenders' Front – FPI) as those that rise in this period.

Although their activities are often regarded as close to violence dimension, however, those activities are, in fact, regarded as interesting for media. Unconsciously, the media also promotes and introduces these organizations to public. In relation to this research, the researcher only focused on actions taken by *Front Pembela Islam* as a social organization obtaining very significant media coverage. When Monas Incident occurred on June 1, 2008, four news media then created pollings to get public opinion on FPI and proposal for its dissolution. However, some people still wish to defend FPI. Following is the quote from the polling made by four media on June 10, 2008:

Based on communication phenomena, in fact, some value the existence of FPI although some group of people think it harms them. Moreover, respondents of NU Online, as a media for Nahdlatul Ulama, as moderate Islamic organization agree that FPI must be defended for more than 50%.

However, at least other 10 Islamic public organizations consisting of *LAKPESDAM NU*, *Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)*, *Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama*, *Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)*, *Ikatan Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)*, KSMU, JUSTICIA, LS3, ILHAM, and INSIDE still declare to dissolve FPI. However, in fact, FPI still exists for the next years (2010). It creates impression that although media states FPI as alternative power to conduct coercive efforts against other groups of community, in which they think members of FPI are regarded deviating.

The inquiry with topic of purification movement and media construction making at least using two theories. Purification movement and media construction theories are as a perspective to analysis. But the whole construction of the theories which are used here is in interpretive paradigm.

Religious purification, in fact, can be studied from various dimensions. Moreover, if it is correlated to radicalism movement. However, purification is not equal to radicalism. Purification in peaceful and elegant ways is conducted by moderate religious groups. Radicalism forms can be found in class-difference level (Stark, 1964), music (Warnaby, 1995), ideology (Shepard, 1987), education (Smith, (1970), economy, grassroot (Rubin, 1994), and religion (Berki, 1972; Sivan, 1989).

Purification is a partial terminology any effort to purify old methods both in the ways of thinking and acting. Artificially, according to Mutohharun (2008:68), Islamic purification movement tries to search for the purity of Islamic doctrines. There are two main themes visible in the purification movement: First, sources of Islamic doctrines (Al-Qur'an and *Sunnah*) become very important object to return as main reference in the religious life. It means that religious life becomes closer to "established Islam" than "popular Islam." Second,

Tabel 1. Respondents' Responds

Detik.Com	Respondents' Responds	
	(Yes/Agree)	(No/Reject)
Do you agree to dissolve FPI?	21,221 (56.01%)	16,667 (43.99%)
Total Respondents	37,888 Polling Participants	

Liputan 6Com	Respondents' Responds	
	(Yes/Agree)	(No/Reject)
“Record on violence actions by <i>Front Pembela Islam</i> (FPI) is sufficiently long. At last, its members were involved in attacking members of <i>Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan</i> (AKKBB). Several parties requested to dissolve FPI” Do you agree to dissolve FPI?	41% or 62,093	59% or 89,126
Total Respondents	151,219 Polling Participants Notes: Remaining 272 (0%),	

Republika Online	Respondents' Responds	
	(Yes/Agree)	(No/Reject)
Do you agree to dissolve FPI?	12,8%,	85,3%
Total Respondents	(Unidentified Polling Participants) Notes: 1.8 % stated to have no care	

NU Online	Respondents' Responds	
	(Yes/Agree)	(No/Reject)
“FPI's existence is defended to remove sinful acts and to fight against liberal group”.	59%	21%
Total Respondents	(Unidentified Polling Participants) Notes: 1% stated to have no knowledge	

Source: www.hidayatullah.com, June 10 2008

individual freedom spirit to utilize rationalities along with their consequences become higher. It is absolutely required for any efforts on Islamic doctrine dynamization. During its growth, this purification is not only aimed at removing superstition (*takhyul*), *bid'ah*, and *khurafat*. Purification efforts in the development of contemporary Islam are related to various global discourses like terrorism, moderatism, Islamic local knowledge, and fundamentalism-radical movement.

Because of such comprehension, various reactions arise related to such movement. Islamic scholars of Islamic boarding school (*pesantren*), according to Ghazali (2009) complained about purification movement due to potentials to make Indonesian local Islamic matters collapse. For those scholars, there are no pure and non-pure Islam. Islam is always local and indigenous. By modifying statement of Junaid al-Baghdadi (w. 297 H), those scholars think that Islam is multicolored.

Those cementing various Islamic expressions, according to the Islamic scholars, are basic values of the religion (*maqashid al-syari'at*).

While the media construction perspective is not something new anymore. This theory was developed from the social construction theory of Peter L. Berger and Luckmann (1966) and later criticized because it does not contain the mass media as an influential variable in the social construction of reality. According to Bungin (2008 :194-195) the social construction of mass media has four stages namely (a) phase of construction materials prepare, (b) phase of construction distribution, (c) phase of establishment construction and (d) confirmation stage.

Three important factors in mass media construction theory is media impartiality to capitalism, quasi impartiality to people and alignments to the public interest (Bungin, 2008: 196). Who is the role player behind the media is influential. They (individuals, institutions, social groups, religious interests) are actors who determine media policy and direction of the media. They have an important role to determine the objectivity of news according to their own version. Some research results below provide concrete evidence for the justification.

Researches on media construction for social realities have been conducted by previous communication scholars. Political party constructions by media (Hamad, 2004), gender ideology (Hanifah, 2004), violence construction among young people by media (Hopf, 2008), policies on education (Aliyah, 2006) are only examples to mention some of them. However, that specifically studies social-religious organization with purification mission has not yet conducted by many scholars. However, it does not mean there is no such study. Research by Farida (2004) on *Jaringan Islam Liberal* (Liberal Islamic Network) and reports by *Gatra* and *Sabilli* magazines are to answer opinions of the two magazines with different ideologies against existence of *Jaringan Islam Liberal* (JIL) established on 2001. It is also the same as study conducted by Subandini (2001) emphasizing on media construction, especially *Waspada* and *Kompas* towards reports on the organization claiming itself as *Gerakan Aceh Merdeka* (Free Aceh Movement).

Thus, where is position of research on media construction towards social organization claiming itself as FPI? Of course, this study was intended to enrich media study on religious-based organizations. Religious-social organization like FPI is very interesting to study since in the last ten years, FPI has been covered by media almost monthly, especially for any actions with violence dimension. The actions are interesting, especially if they are closely related to sinful acts, night entertainment, transgender, difference of religious ideologies, even those related to orders related to worship house.

Starting from discourses on purification movement as well as any actions conducted by mass or members of FPI, this organization is very interesting to explore from empirical dimension. For example, based on philosophically logical dimension in conflicts (Hidayatullah, 2008) as well as symbolically Islamic movements (Al-Zastrouw Ng, 2006), it is proven that FPI is phenomenal. It is why medias, disregarding their ideologies, always get sufficient reportings either at negative or positive side.

This study is directed to study on purification movement or religious radicalism empirically. However, it only emphasizes on media coverage related to the movement in order to describe media construction on socio-political realities currently developing.

Question of research and Research objectives

Question of research includes: 1) How media performs news construction to FPI versus AKKBB conflict to case of enjoinder of Ahmadiyah teaching? 2) How implementation religion teaching purification movement in pluralism state? 3) How media places relationship between state and religious organization as a civil society strength to support of harmonious believers life?

Research objectives are 1) to know news construction to FPI versus AKKBB conflict to case of enjoinder of Ahmadiyah teaching. 2) To know media construction to implementation religion teaching purification movement in pluralism state. 3) To know media construction in placing relationship between state and religious organization as a civil society strength in supporting of harmonious believers life.

Research Method

Research method is with *Discourse Analysis* (van Dijk, 1998; Fairclough and Wodak, 1997) media news about FPI. Media elected is *Suara Pembaruan* Daily and *Republika* Daily at edition 2-12 June 2008).

In this discourse analysis, problem level defines analysis level and also applied research method (Hamad, 2004). The problem level is sociocultural practice, its analysis level is macro, the method is literature, assisted by depth interviews with a number of social and political experts. Whereas for discourse practice, its analysis level is meso, its research method is *depth interview* with media executives assisted by literature and finally its problem level is text, analysis level is micro and its research method is eclectic text. Special for this study, the researcher focuses on news text on actions taken by FPI. The observed components include thematic (text), schematic (text), semantic (background, paragraph), syntax (sentence), stylistic (word) and rectories (metaphore, disclaimer). All news can be read in below table:

Finding and Discussion

FPI as Organization Profile

Coinciding with 63rd anniversary of the Independence Day for the Republic of Indonesia, a number of *Habib, ulama* (Islamic scholars), located in *Pondok Pesantren Al Um*, Kampung

Utan, Ciputat, Jakarta, declared the establishment of organization named *Front Pembela Islam*. According to Al-Zastrouw (2006, in Husnaini, 2006)), there are three matters motivating the establishment of FPI including, first, long sufferings experienced by Indonesian Islamic community as a consequence of violation to human rights conducted by the controllers. Second, obligation for each muslim to keep and to defend Islamic grade and status as well a Islamic community. Third, obligation for each muslim to maintain goods and to prevent sinful actions. Based on those three matters, FPI made physical pressure to fight against any sinful actions directly.

It is not surprising that they continuously practice coercive actions to clean existing sinful actions. Started from investigating actions related to slaughtering of several *ulamas, kyai, ustadz*, and Islamic teachers in Central Java and East Java, they continued by appeal on *Jihad* to ninja troops (October 1998), violence actions continue. Finally, the submitted their aspirations directly to Special Session of People's Consultative Assembly (MPR) on November 13, 1998 with seven demands as follows: (1). Annulment of Pancasila as sole ideology, (2). Annulment of P4, (3). Annulment of Five Packages of Political Laws, (4). Annulment of Dual-Functions of ABRI from Legislative and Executive Bodies, (5). Human rights appreciation, (6). Responsibility of former President of the Republic of Indonesia Soeharto, (7). Apology of Golkar as Responsible Party for the New Order.

Table 2. News Title which be Analyzed

No.	Suara Pembaruan edition	News Title
1.	2 June 2008	"Tumpas Premanisme"
2.	3 June 2008	"Habib Riziq Harus Bertanggungjawab"
3.	3 June 2008	"Pemerintah Harus Bubarkan FPI"
4.	5 June 2008	"Habib Rizieq Ditahan Munarwan Diminta Menyerah"
5.	5 June 2008	"Kaum Muda Tolak Kekerasan Agama Mendagri Tegur FPI dan AKKBB"
6.	6 June 2008	"Munarman "Dilindungi" Petinggi (Judul kecil dikolom samping: Dekat dgn ormas Keagamaan)"
7.	7 June 2008	"Kekerasan Monas Tidak Terkait Ahmadiyah"

Republika Daily		
No.	Republika edition	News Title
1.	2 June 2008	“Masyarakat Diimbau tak Lakukan Provokasi”
2.	4 June 2008	“Akar Masalahnya Ahmadiyah: Pemerintah Dinilai Tidak Tegas terhadap Ahmadiyah”
3.	5 June 2008	“Umat Islam Diminta Bersatu: Semua Pimpinan Ormas Diharapkan Menahan Diri”
4.	6 June 2008	“14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi, Pemerintah Seharusnya mencermati Akar Masalah”
5.	7 June 2008	”Uztadz Jeffry:Sby harus Adil”
6.	10 June 2008	“Aktifitas Ahmadiyah Dilarang”
7.	11 June 2008	“Ajak Pengikut Ahmadiyah Kembali: SKB Perlu Aturan Penjelas”
8.	12 June 2008	, “NU Siap Dakwahi Ahmadiyah, MUI akan membentuk tim Pemantau Pelaksanaan SKB”

Souce : Suara Pembaruan Daily

In 2004, FPI gained praise when tsunami disaster attacked Nanggroe Aceh Darussalam, in which FPI immediately sent volunteers. FPI got good name as volunteers staying for most time and ready to be assigned in most serious areas including to keep the holiness of Great Mosque Baiturrahman, Aceh. However, such good name did not last for a long time. After social actions in Aceh, they again took violence actions. Finally, it occurred on June 1, 2008. FPI mass attacked those of *Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan* (AKK-BB) those mostly consist of mothers and children around Monas (National Monument). Mass of AKK-BB, at that time, was at demonstration protest Joint Decree on Ahmadiyah. Not only hitting people, mass of FPI also damaged cars parked around the location.

Although the leader of FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab had once been arrested and put on trial at Central Jakarta District Court on April – May 2003, all those matters never shifted or weakened militancy of its troops or members to take violence actions. In fact, who are members of this organization? According to Al-Zastrouw, as quoted by Husaini (2006), its membership is actually classified into four categories. First, *habaib* and *alim ulama*. They are elite

group in FPI being leaders as well as policy directors for other members of FPI. Second, intellectual and academician group consisting of university students, lecturers, and researchers from non-religious people. Third, hoodlums and street boys. Members of this group are recruited by leaders of FPI through personal approach and then directed to conduct sweeping, invasions, and demonstrations fighting against sinful acts. Fourth, common people, namely any people usually active in islamic forums held by FPI.

In fact, for the implementation of all field actions in field, FPI strengthened itself by paramilitary troops called *Laskar Pembela Islam* (Islam Defender Soldiers). Its command structure is equal to that applicable to soldiers. It is started from the highest level to the lowest one.

IMAM BESAR (GREAT LEADER) and His Vice = The Highest Leader of Troops from the rank in LPI, IMAM (LEADER) = Commander of troops for several provinces, WALI (GUARDIAN) = Commander of troops equal to level I/province, leader at this level is usually called specified regional War Commander, QOID = Commander of troops for either regency or municipality level, AMIR = Commander of troops at sub-district level, generally the head of several *rois*, ROIS = Commander at Village level, each group consists

of minimum 22 people. In case of more, it will be divided into other *rois*, JUNDI = New member without rank.

Ironically, although they know the structure of LPI/FPI, security apparatus or soldiers took no actions but paying close attention when FPI acted. The question is, is it right that TNI (Indonesian Military Forces) backups all FPI's activities? If yes, they do, it becomes clearer why security apparatus often control without concrete actions when members of FPI acted.

News construction to FPI versus AKKBB conflict to case of enjoiment of Ahmadiyah teaching

Post June 1, 2008 incident, *Republika* and *Suara Pembaruan* created different news frequencies. *Republika* (8 news) and *Suara Pembaruan* (7 news). It means that such different numbers emphasize not only different level of attention but also indicate what agenda played in related to this issue. Monas incident on June 1, 2008 was actually a common demonstration. Just like other demonstrations held in Indonesia. However, since AKKBB brought a theme related to the freedom of religious life and it was interpreted as pro-Ahmadiyah, a conflict was unavoidable.

What happened on June 1, 2008 morning had added a series of violence conducted by some members of FPI. Various reactions shown by *Suara Pembaruan* created a stigma that the organization lead by Habib Rizieq should be responsible for this. From rethorical dimension, it was close to what Governor of *Lembaga Pertahanan Nasional* (Lemhanas) (National Defense Agency) Muladi said:

"Habib Rizieq must be summoned and responsible the incident proportionally so that such conflict will not happen in future. It is sufficiently critical. Just summon Habib Rizieq within 3 x 24 hours for handing over the actor. In case such action was not taken, the Police should find the actor itself for enforcement proportionally," said Muladi in Jakarta, Tuesday (6/3).

About 24 organizations joined in *Gerakan Masyarakat Pembubaran FPI* (GMPF) (People Movement for FPI Dissolution) said if the gov-

ernment had sufficient evidences to dissolve FPI. "If the government is assertive, coercive actions to dissolve it can be taken," confirmed GMPF that was signed by 38 names. The GMPF coalition consists of, among others, *GP Ansor*, *Baitul Muslimin Indonesia*, *PBNU*, *YLBHI*, *Garda Bangsa*, *PMII*, *PMKRI*, *PPA*, *GMNI*, *Barisan Merah Putih*, *National Leadership Institute*, *Gema Budhi*, *PSIK Paramadina* and *Setara Institute*, (Suara Pembaruan, June 3).

It must be acknowledged that stimulant factor why FPI coercively dispersed the demonstration in Monas was related to the State's uncertainty on Ahmadiyah. Ahmadiyah is considered as non-Islamic ideology since its practices deviate from Islamic teaching. At that time, the government was in process to issue a regulation at level of Joing Decree between Minister of Religious Affairs having authorities on religious affairs and Minister of Domestic Affairs having authorities on social order. Both must be synchronized for easy implementation.

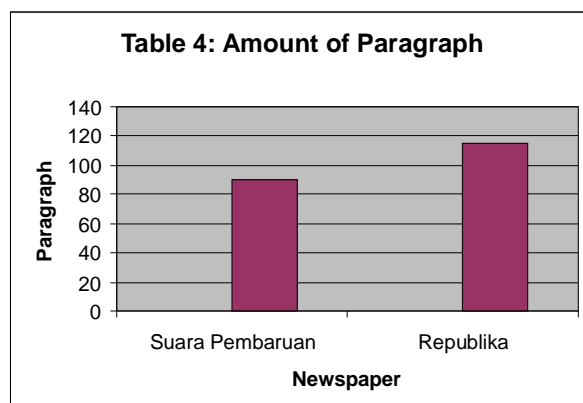
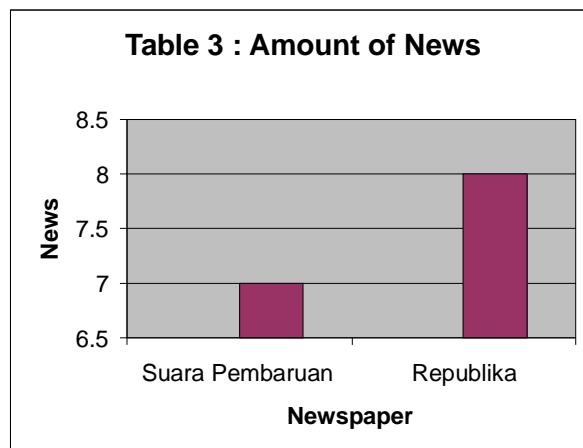
In fact, FPI found the momentum on June 1, 2008 when AKKBB held such action where it included elements of Ahmadiyah. It was regarded as a form of protection to Ahmadiyah. While waiting for the governmental decree related to this issue, the government, in fact, was very slow. It is why, in line with militancy of the FPI's struggle, this problem was solved by itself by coercively dispersing the demonstration.

Republika contains at least 115 paragraph news (3 June 2008-12 June 2008). But all the headlines directed to adjust the Ahmadiyah in a weak position or blame. Monas incident occurred because the Ahmadiyah is a stimulant factornya. Certainly this is very different, with emphasis given by the *Suara Pembaruan*.

Of course, by semantic, the incident did not come in accident. There is a background, detil of event being basis why the incident happened. However, once more, 90 paragraphs of the news created by *Suara Pembaruan* explored no reasons of the incident. FPI attacked AKKBB due to element of Ahmadiyah in AKKBB. Why should Ahmadiyah be the reason? *Suara Pembaruan* also did not disclose it clearly. However, by stylistic, the demand is clarified. Munawarwan who was

the Commander of Islamic Troops for *Front Pembela Islam* component would surrender if the government dissolve Ahmadiyah (*Suara Pembaruan*, June 7, 2008). Sure is different from the *Republika*, that the root problem of this conflict is the Ahmadiyah (*Republika*, June 4, 2008). Why be a factor stimulant Ahmadiyah conflict? According Rosadi (2008) that the FPI considered infidels if someone is committing an offense in beliefs, deeds and words. One of the violations it is believed the apostles after Muhammad. Relevance here, why FPI is not very tolerant of Ahmadiyah. Because, acknowledges the existence of the prophet after Muhammad (ie Mirzha Ghulam Ahmad of India). The comparison of news and paragraph both newspapers as below table :

At this level, these two medias had different touching points. *Republika* emphasized that Monas incident was not an independent problem. As if it wished to get justification, it confirmed that Monas incident is a reflection of liberal movement and dogmatic movement manifesting their fights (*Republika*, June 3, 2008).



The root is the government did not take clear position towards Ahmadiyah. Moreover, rethorically, *Republika* stated:

“The Government of Indonesia is in a tremble after interventions of four countries so that it does not brave enough to take a stance towards Ahmadiyah. A member of *Wantimpres* (President Consideration Board) could humiliate an *ulama* before public with such vulgar words: opportunist, insolent, etc. We applauded in respect. Moreover, by the power of money, they could advertise anywhere by accusing others as threats for Indonesia. Islamic people were crashed to the state: obsolete voice of Soeharto’s regime. Paranoid and evil” (*Republika*, June 3, 2008). Overcoming such situations, Muslims must unite (*Republika*, June 5 2008).

Ahmadiyah is a stream of Islam from Lahore (India) and came to Indonesia in 1925. In fact, *Rabithah Alam al Islami* of Pakistan declared Ahmadiyah as non-Islam in 1974, therefore, Indonesian Islamic scholars (*ulama*) struggle to do the same. It is why several hardline Islamic gorups by their purification spirits are very intollerant to Ahmadiyah that is regarded as non-Islam. It is the reason why FPI intensely requested the government to dissolve Ahmadiyah. If we study the thematic and semantic dimensions, Monas incident will be clear.

Media construction to implementation religion teaching purification movement in pluralism state.

Regretting statements related to Monas incident on June 1, 2008 came from all domestic community’s elements. Nahdlatul Ulama, GP Ansor, DPR, Umat Bergama, *Mahkamah Konstitusi* (Supreme Court on Constitution), to common people. They assumed the state was weak to face FPI. Such illustration is clearly given by *Suara Pembaruan* and *Republika* (June 3, 2008) stating that that action is gansterism and the state let it (June 5, 2008). But, *Republika* only mentions that people are suggested not to provoke.

Managing pluralistic state is not easy. The government is impossible to pay close attention to



Figure 1

Exp: example of any actions conducted by mass or members of FPI,

one faction or one group only. It is why purification movement must be placed in such diversity corridor. The State's task is to protect all religion followers. By syntax, it was what Sri Sultan said that commitment of this nation founders was establishing this country not on behalf of ethnic groups, religion, race, and group. Indonesia is based on awareness and availability to multicultural/plurality conditions. "*Bhinneka Tunggal Ika* (Diversity in Unity) is not only a slogan but must be implemented as a guide of national and state lives," (*Suara Pembaruan*, June 3, 2008).

Any organization bringing purification themes may be in and not rude (*Republika* June 6, 2010). International world was also sympathetic to the said incident on June 1, 2008. Rethorically, US Embassy of Jakarta stated that "Such bad action will seriously impact on the freedom on religious life and gathering in Indonesia, as well as increase any worries on security."

However, such rethorical dimension was closed by syntax that US Embassy welcomed the statement of President Susilo Bambang Yudhoyono requesting to take legal actions against them who should be responsible to the violence. "We insisted the Government of Indonesia to uphold the freedom of religious lives for all its citizens as mandated by the constitution," stated the US Embassy (*Suara Pembaruan*, June 3, 2008). Figure 1, 2 and 3 show some violence actions in Monas Tragedy on June 1st 2008.

Media construction in placing relationship between state and religious organization as a civil

society strength in supporting of harmonious believers life.

In Indonesia, religion and state have special relationship. Although Indonesia is the biggest muslim country on the world but Islam is not the State religion. Indonesia acknowledges six religions including Islam, Christian, Catholic, Hindu, Buddha and Konghucu. The State protects all religion followers. It is why Pancasila is a principle for all. By syntax dimension, *Suara Pembaruan* (June 3, 2008) clearly emphasized that:

"Pancasila upholds pluralism in the frame of Unity State of the Republic of Indonesia, *diversity in unity*. The first principle of Pancasila clearly states *Ketuhanan Yang Maha Esa* (the Great Unity of God). Meaning that each person may select them own belief and each person must respect other's belief. Forcing one religion to other is contradictory to Pancasila".

Religious organization may grow well in Indonesia. Formally, Islam has MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) (the Council of Indonesian Islamic Scholars), Christian has PGI (*Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia*) (the Alliance of Indonesian Churches), Catholic has KWI (*Konferensi Waligereja Indonesia*) (the Conference of Indonesian Church Guardians), Hindu has PHDI (*Parisada Hindu Dharma Indonesia*), Buddha has Walubi and Konghucu has MAKIN. Outside those organizations, there are many other religious organizations. All may express their respective roles and functions.

Religion is a power of civil society to provide awareness and enlightenment for all citizens. Therefore, the state must open sufficiently conducive public room for them. The state is no more relevant to create repressive condition that only reduces creativity spirit of its people's organization. If the State has arranged and provided freedom, and then certain group deviates, it will be the State's duty to take clear action. The State stands on all groups. *Suara Pembaruan* and *Republika* quoted opinion of Haris Ashar, an activist of Kontras (*Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan*) (Commission for Missing Person and Violence):

"Currently, the government is impressed to let people joining organization always haunting free-

dom of religious life and beliefs, even in democracy. "The government may not only arrest people conducting violence but also analyze ideology of their organization. If ideology of the organization is anti-democracy and -pluralism, it must be annulled," he said while requesting the government firmly protects pluralism.

In case of such civil society strengthening, *Suara Pembaruan* explicitly has opinion that any organization contradictory to justice spirit with hoodlum style must be destroyed (June 2, 2008). On the contrary, *Republika* emphasizes to not easily judge organization. By semantic, this media has opinion:

"It is the easiest way to voice and to act 'dissolve, imprison, arrest, capital punishment' Islam-labelled people. Moreover, it is easier to say 'harming plurality and not suitable to democratic and humanity values'. Even in Indonesia. The ruling parties, military generals, mass media, business world, and NGO activists are controlled more by any people far from Islamic voices. They could be Muslims. However, they live in different atmosphere or are tempted by financial flow and scholar facilities or travels to various countries in international forums".

Confirmations of the two medias clearly show their interests or ideologies. *Suara Pembaruan* (Christian) clearly shows anxiety to inequity. Whereas *Republika* (Islam) as majority also enjoyed no specialities. Both of them are running their respective agendas to conduct ideological investigation to find their common enemy. If national elements live in distrust, all of us will suffer damages.

Conclusion

The conclusion of this research is: Firstly, news construction a media is very determined by media ideology. *Suara Pembaruan* (Christian Values) emphasize that FPI performs harshness to people rights in implementing latitudinarian. *Republika* (Islamic Values) assess that FPI does not make harshness but is implementing practice of Islam teaching purification. Second, practices of religion teaching purification do not represent wrong action. But its mechanism, according to

both medias must still at adhering law. Third, state is assessed very irresolute in implementing of its function. State does not give enough protection to weak people. State, ought to have pattern of well-equilibrium relationship with civil society organizations, as manifestation of democratic state. And finally, researcher awares that this research has a limitation. This study is only focused on two medias which have different ideology. For the next research must be aimed to combination of neutral media and also different method.

Acknowledgements

I would like to give acknowledge the support provided by Hassan Abubakar, Ph.D and Prof Che Su bt Mustaffa, Ph.D. as inspiring persons to research. I want to thank Prayudi, Ph.D for his useful comment of earlier version of this paper and also for Henny SPW, MA as proofreader. R. Alexander Mallian for assistance with the research reported in this article, and also to all collegians in Communication Depart. Petra Christian University, Surabaya.

Bibliography

- Al-Zastrouw Ng., 2006, *Gerakan Islam Simbolik: politik kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS
- dalam Husnaini M., 2006, "Gerakan Islam Simbolik: politik kepentingan FPI" resensi buku <http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&>
- Aran, G., Nurit S. & Eyal A., 2008, 'Fundamentalism and the masculine body: The case of Jewish Ultra-Orthodox men in Israel' *Religion*, Volume 38, Issue 1, March, pp 25-53
- Berki, R.N., 1972, 'Marcuse and the Crisis of the New Radicalism: From Politics to Religion?' *The Journal of Politics*, Vol. 34, No. 1 Feb., pp. 56-92
- Bungin, B., 2008., *Konstruksi Sosial Media Massa, Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, Prenada, Jakarta.

- Calhoun, C., 1988, 'Populist Politics, Communications Media and Large Scale Societal Integration' *Sociological Theory*, Vol. 6, No. 2 (Autumn), pp. 219-241
- Dijk, T.A.V., 1998, "Opinion and Ideologies in the Press" in Allan Bell and Peter Garrett *Approaches to Media Discourse*, Oxford, Blackwell.
- Edgell, S. V. D., 1986, 'Radicalism, Radicalization and Recession: Britain in the 1980s' *The British Journal of Sociology*, Vol. 37, No. 4 (Dec), pp. 479-512
- Farida, A.R., 2004, *Konstruksi realitas Islam Liberal dalam media cetak : Analisis Framing Majalah Gatra dan Sabili* thesis Jakarta: UI
- Ghazali, A.M., 2009, 'Menyambut Ulah NU ke 83 NU dan Passing Over Pemikiran' <http://islamlib.com/id/artikel/nu-dan-passing-over-pemikiran/> 26/01/2009
- Hamad, I., 2004, *Konstruksi realitas politik dalam media massa: studi pesan politik dalam media cetak pada masa pemilu 1999* thesis, UI, Jakarta.
- Hanifah, U., 2004, *Konstruksi Ideologi Gender Pada Majalah Wanita (Studi Analisis Wacana Kritis Pada Majalah UMMI)* thesis (unpublished) UI, Jakarta.
- Hanks, R.R., 2007, 'Dynamics of Islam, identity, and institutional rule in Uzbekistan: Constructing a paradigm for conflict resolution' *Communist and Post-Communist Studies*, Volume 40, Issue 2, June, pp 209-221
- Hidayatullah, S., 2008, 'Agama dan kekerasan (Nalar Filosofis dalam Konflik Front Pembela Islam (FPI) dan Ahmadiyah di Indonesia)' Lap Penelitian Fak Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Himmatul, A., 2006, 'Konstruksi realitas kebijakan pendidikan nasional di media massa: Analisis framing terhadap wacana kebijakan Ujian Nasional di surat kabar Kompas' <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=108870>
- Ho, Christina, 2007, 'Muslim women's new defenders: Women's rights, nationalism and Islamophobia in contemporary Australia' *Women's Studies International Forum*, Volume 30, Issue 4, July-August, pp 290-298
- Hopf, W.H., Günter L. H., Rudolf H. W., 2008, 'Media Violence and Youth Violence: A 2-Year Longitudinal Study' *Journal of Media Psychology*, Volume 20, Issue 3, pp 79-96
- Mallian, R.A., 2009., 'Obyektifitas Pemberitaan Kasus Konflik Ahmadiyah dengan FPI di Surat kabar Nasional', thesis (unpublished) Fikom-UK Petra, Surabaya.
- Muhtadi, B., 2009, 'The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia' *Asian Journal of Social Science* 37 pp 623-645
- Mutohharun, J., 2008, 'Dilema Gerakan Pemurnian Islam' *Ishraqi, Jurnal Penelitian Keislaman*, 4 (1). pp. 68-87
- Rosadi, A., 2008, *Hitam Putih FPI*, Nun Publisher, Jakarta.
- Rubin, J.W., 1994, 'COCEI in Juchitan: Grassroots Radicalism and Regional History' *Journal of Latin American Studies*, Vol. 26, No. 1 (Feb.,), pp. 109-136
- "Sejarah 75 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia" Sumber: Situs Ahmadiyah www.alislam.org.
- Shepard, W., 1987, 'Fundamentalism' Christian and Islamic', *Religion*, Volume 17, Issue 4, October pp 355-378
- Sivan, E., 1989, 'Sunni Radicalism In The Middle East And The Iranian Revolution' *Int. J. Middle East Studies*. 2, pp 1-30
- Smith, H.D.W., 1970, 'The Origins of Student Radicalism in Japan' *Journal of Contemporary History*, Vol. 5, No. 1, Generations in Conflict, pp. 87-103
- Stark, R., 1964, 'Class, Radicalism, and Religious Involvement in Great Britain' *American Sociological Review*, Vol. 29, No. 5 (Oct.), pp 698-706
- Subandini, N.S., 2001, Pemberitaan surat kabar terhadap masalah Aceh (analisa isi terhadap masalah gerakan Aceh merdeka pada harian umum Waspada dan harian umum Kompas) Thesis, UI, Jakarta.
- Vadum, M., 2009, 'Left-Wing Radicalism in the Church: Catholic Campaign for Human

- Development'. *Human Events*, The Week of October 19.
- Warnaby, J., 1995, 'A New Left-Wing Radicalism in Contemporary German Music?' *Tempo, New Series*, No. 193, German Issue (Jul.,), pp. 18-26.
- Media**
- Detiknews, 2008. June 1
<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/inSdex.php/Search.html?act=tampil&id=7353>.
<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=71919>
<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75063>
- Republika, 2008, "14 OKP: Jangan Ada Diskriminasi, Pemerintah Seharusnya mencermati Akar Masalah" June 6
- Republika, 2008, "Umat Islam Diminta Bersatu: Semua Pimpinan Ormas Diharapkan Menahan Diri" June 5.
- Republika, 2008, "Ajak Pengikut Ahmadiyah Kembali: SKB Perlu Aturan Penjelas" June 11.
- Republika, 2008, "Akar Masalahnya Ahmadiyah: Pemerintah Dinilai Tidak Tegas terhadap Ahmadiyah" June 4.
- Republika, 2008, "Aktifitas Ahmadiyah Dilarang" June 10.
- Republika, 2008, "Masyarakat Diimbau tak Lakukan Provokasi" June 2,
- Republika, 2008, "NU Siap Dakwahi Ahmadiyah, MUI akan membentuk tim Pemantau Pelaksanaan SKB" June 12.
- Republika, 2008, "Uztadz Jeffry: Sby harus Adil" June 7.
- Suara Pembaruan, 2008, "Habib Rizieq Ditahan Munarwan Diminta Menyerah" June 5
- Suara Pembaruan, 2008, "Kaum Muda Tolak Kekerasan Agama Mendagri Tegur FPI dan AKKBB" June 5.
- Suara Pembaruan, 2008, "Munarman "Dilindungi" Petinggi (Judul kecil dikolom samping: Dekat dgn ormas Keagamaan)" June 6
- Suara Pembaruan, 2008, "Tumpas Premanisme" June 2
- Suara Pembaruan, 2008, "Habib Rizieq Harus Bertanggungjawab" June 3
- Suara Pembaruan, 2008, "Kekerasan Monas Tidak Terkait Ahmadiyah" June 7
- Suara Pembaruan, 2008, "Pemerintah Harus Bubarkan FPI" June 3
- TEMPO *Interaktif*, 2008, "10 Organisasi Unjuk Rasa Tuntut Pembubaran FPI" Selasa, June 3
www.hidayatullah.com, 2008, June 10

Faktor *Parasocial Interaction* dalam Mempengaruhi Pemaknaan Iklan Televisi Komersial sebagai Sebuah Realitas

Yuliana Riana P./Rino FB.

Dosen STIKOM The London School of Public Relations-Jakarta

Jl. KH Mas Mansyur Kav.35 Jakarta Pusat 10220

Hp. 08129639550 / e-mail : yuliana_riana@yahoo.com

Hp. 0811856473 / e-mail : rino.fb@lspr.edu

Abstract

People watch television because they can see in detail events, news and advertisement. Some people are influenced by the ads they see on the television and some people are not. Being realistic in television advertisement has a different meaning with the reality of actual events. Some people agree with the advertisement that they see on television and purchase the products. For them, the advertisement are real, there is no doubt in their meaning. The question is: What factors influence people when they see advertisement on television and influences their perception to be real? Are the factors; personal involvement inventory, source credibility, television viewing motive, parasocial interaction, and perceived homophily measure? This research uses quantitative approach, within positivistic paradigm. The paper researches the causal relationship between dependent (perceived reality) and independent (personal involvement inventory, source credibility, television viewing motive, parasocial interaction, and perceived homophily measure) variable. The statistical analysis used Structural Equation Modeling (SEM). The conclusion is personal involvement inventory, source credibility, parasocial interaction, and perceived homophily measure has influenced people to perceive the meaning of ads as reality. Intensity watching of ads on television and motivation to watch has influenced the personal involvement inventory. There is influence of watch motivation to perceive homophily measure but there is no influence of parasocial interaction to perceive homophily measure.

Abstrak

Penelitian ini fokus pada pemaknaan iklan komersial di televisi. Iklan komersial di televisi menarik bagi penonton karena visualisasinya yang utuh. Gambaran realitas di dalam iklan televisi berbeda dengan realitas sesungguhnya. Buat sebagian orang, tayangan iklan di televisi menjadi gambaran realitas yang sesungguhnya sehingga tertarik membeli produknya. Oleh karena itu, penentuan faktor-faktor yang membuat iklan dapat dianggap sebagai realitas dan kemudian mempengaruhi persepsi penonton tentang realitas menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dalam paradigma klasik. Analisis data menggunakan *confirmatory faktor analysis* (CFA) dan *path analysis* (PA) dengan *Structural Equation Modeling* (SEM). Kesimpulannya adalah personal involvement inventory, source credibility, parasocial interaction, and perceived homophily measure mempengaruhi pemaknaan iklan di televisi sebagai realitas dan faktor yang dominan dalam mempengaruhi pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai realitas adalah parasocial interaction scale.

Kata kunci: konstruksi realitas, iklan, media televisi.

Pendahuluan

Perkembangan periklanan di Indonesia telah membawa wacana penting di masyarakat yang tidak hanya menimbulkan persoalan sosial tetapi juga budaya. Menurut Piliang (2003:279) persoalan sosial dan budaya yang muncul di masyarakat seringkali berkaitan dengan tanda yang digunakan di dalam iklan, citra yang ditampilkan, informasi yang disampaikan, makna yang didapat, serta bagaimana semua faktor itu berpengaruh terhadap persepsi, pemahaman serta menjadi 'acuan' bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak laku. Dengan demikian, persoalan iklan ini telah menjadi persoalan publik dan demi kepentingan publik, media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi yang sehat.

Pada bulan Oktober 2009, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang penayangan iklan permen anak-anak bermerek "Sukoka" (akronim dari SUsu KOpi KAndy) yang di dalam tayangannya memuat adegan vulgar yang erotis. Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia pada bulan April 2008 juga telah melarang tayangannya iklan operator seluler XL yang dianggap merendahkan martabat manusia dengan menggambarkan manusia yang menikah dengan binatang (monyet dan kambing). Tidak hanya itu, KPI juga meminta agar tayangan iklan layanan supranatural oleh Deddy Corbuzier dan Mama Lauren serta iklan SMS REG Supranatural atau Mistik, tayangannya dipindah menjadi setelah jam 22.00. KPI mengingatkan semua perusahaan operator telepon selular untuk tidak membuat iklan yang hanya menonjolkan produk berharga murah saja, tanpa memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan lainnya. Ditinjau dari sisi etika kemanusiaan dan kode etik periklanan, pelarangan itu merupakan suatu keniscayaan yang memang harus dilakukan

Penelitian yang dilakukan Gorn and Goldberg (1980) di Inggris menunjukkan pengaruh negatif iklan khususnya bagi anak-anak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sekalipun untuk anak-anak, repetisi iklan yang sifatnya terus menerus akan mendorong konsumsi individu terhadap produk tersebut (Gunter, 2005:104). Priya, Rajat Kanti dan Seema Sharma (2010:163)

dalam penelitiannya di India mencatat bahwa pengaruh iklan televisi terhadap perilaku membeli tidak hanya berlaku bagi anak-anak (usia 5-11 tahun), tetapi juga remaja seiring dengan perkembangan kemampuan kognitifnya.

Bagaimana kondisi di Indonesia? Yayasan Jurnal Perempuan pernah melakukan penelitian terhadap 100 orang perempuan di Jakarta mengenai 'remaja putri melek media'. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan konsep cantik yang digambarkan oleh media yaitu: kurus, tinggi, langsing, dan berambut lurus. Namun, ketika melihat jawaban mereka atas pertanyaan tentang alasan penggunaan tentang produk kosmetik tertentu (n = 83 orang) hanya tujuh orang yang menekankan pada fungsi produk kosmetik (untuk membersihkan kulit dari debu, serta menghindari iritasi pada kulit). Selebihnya menggunakan kosmetik untuk alasan kecantikan memutihkan dan menghaluskan serta agar kulit segar, cantik, dan wangi. Artinya, banyak perempuan yang sebenarnya secara konseptual tidak sepaham dengan media tentang definisi cantik, tetapi pada prakteknya mereka mengikuti logika pasar yang diiklankan secara intens melalui media (Syahreza, 2007:131).

Tentu saja tidak semua iklan yang ditayangkan di televisi adalah negatif, banyak juga iklan dibuat melalui riset yang mendalam dan pertimbangan yang matang sehingga isinya dapat menanamkan nilai-nilai yang positif di masyarakat. Salah satunya adalah iklan rokok Sampoerna Hijau, yang terkenal dengan *tagline*: 'Asyiknya Rame-Rame'. Iklan ini dibuat melalui riset yang menggunakan *focus group discussion (FGD)* dan akhirnya menemukan sejumlah karakter spesifik dari konsumen rokok yaitu orang yang sederhana, senang bergaul, bersahabat, solider dan rendah hati (Kartajaya, 2005:409).

Twittchel (1996) menyebutkan bahwa salah satu keistimewaan iklan di TV adalah bersifat *magical*. Proses bagaimana 'things' itu menjadi bermakna dalam benak penonton adalah sesuatu yang bersifat magis. Ketika penonton membeli produk sebenarnya ia berharap bahwa sesuatu akan terjadi seperti yang dilihat diiklan. Realitas (di)iklan tentang merek mobil tertentu

membuat seseorang merasa seolah-olah menjadi *person* yang dia inginkan, saat ia mengendarai mobil tersebut (Borchers, 2005:359). Terjadilah proses persuasi seperti yang diharapkan oleh produsen mobil agar penonton kemudian tertarik membeli mobil tersebut. Dalam proses persuasi, pesan iklan merupakan salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian khusus.

Realitas itu ditampilkan dalam dua hal: pertama, realitas itu sendiri yang 'berbicara' bagi banyak orang serta persepsi orang tentang realitas itu. Namun, dalam perkembangannya realitas tidak lagi mengalami proses seperti itu, realitas ditampilkan melebihi realitas itu sendiri. Hal inilah yang oleh Jean Baudrillard disebut sebagai *hyperrealism*, yaitu *a way of understanding and talking about the mass of disconnected culture* (Allan, 2006:343). Realitas itu melampaui kenyataan hidup sehari-hari yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam pemahaman itu, media televisi yang digunakan untuk menayangkan iklan yang *hyperrealism* telah menjadi satu kajian yang menarik untuk melihat bagaimana realitas itu ditampilkan dalam bentuk yang *hyper*. Ditinjau berdasarkan perspektif komunikasi, maka persoalannya masyarakat memahami dan kemudian menerima iklan komersial sebagai sebuah kenyataan atau sebaliknya masyarakat akan menganggap bahwa iklan itu hanya sebuah ilusi. Pada dasarnya, sebuah iklan menampilkan realitas tentang sebuah produk atau jasa yang ditawarkan, atau sebaliknya (yang ditawarkan) adalah sebuah topeng realitas (Piliang, 2003:279). Kredibilitas iklan akan berpengaruh terhadap produk yang ditawarkan melalui iklan tersebut sehingga penentuan faktor-faktor yang membuat iklan dapat dianggap sebagai realitas dan dapat dipercaya menjadi sangat penting. Untuk itu disusun pertanyaan penelitian menjadi (1) Faktor apa saja yang mempengaruhi pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai sebuah realitas?; (2) Faktor apa yang dominan mempengaruhi pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai sebuah realitas?

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai sebuah realitas serta

mengetahui faktor dominan yang mempengaruhinya.

Perceived Realism Scale merupakan skala yang fokus pada seberapa besar kepercayaan penonton bahwa iklan yang ditontonnya itu adalah realitas. Menurut Paul Messaris (1997), di dalam Borchers (2005), terdapat dua faktor yang menyebabkan orang akan beranggapan sebuah tayangan iklan TV komersial itu adalah realitas, yaitu jika ia mampu menarik perhatian dan menyentuh emosi penonton. Upaya sederhana untuk menarik perhatian penonton adalah dengan menggunakan iklan yang menatap mata penonton karena sifat sebagai manusia adalah *we look at people who are looking at us*. Tayangan yang menyentuh emosi penonton adalah tayangan yang harus membuat penonton dapat mengidentifikasi dirinya adalah sama dengan individu yang dilihat di dalam iklan. Oleh karena itu, penggunaan manusia agar iklan dapat dianggap sebagai realitas menjadi sangat penting.

Rubin et al (2004:273-371) terdapat lima faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap makna iklan sebagai realitas atau ilusi bagi individu, yaitu Pertama adalah *Personal Involvement Inventory* yang merupakan konsep penting di dalam penelitian tentang iklan, karena ia menjadi variabel penjelas tentang apakah iklan itu relevan atau tidak bagi konsumen berdasarkan persepsi konsumen tentang keterlibatan dirinya di dalam iklan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munson & McQuarrie (1987) didapatkan bahwa keterlibatan (*involvement*) menjadi faktor penentu untuk munculnya ketertarikan atau motif dari individu (dalam melihat iklan sebagai sebuah realitas atau ilusi). Selain faktor motif menonton iklan, salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan penonton terhadap iklan adalah intensitas menonton iklan (*familiarity*). Konsep ini menggambarkan bahwa semakin sering individu menonton iklan tertentu di televisi, akan semakin familiar atau cepat merasa akrab dengan iklan tersebut (Zhang, 2004:25). Oleh Munson & McQuarrie (1987) perasaan semakin familiar dengan iklan ini akan meningkatkan rasa keterlibatan dirinya di dalam iklan.

Berdasarkan penelitian dari Priya, Raja Kanti dan Seema Sharma (2010:162) kredibilitas

iklan untuk dianggap sebagai realitas yang dapat dipercaya akan menentukan pengaruh iklan tersebut terhadap penonton. Skala kredibilitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh McCroskey, seperti dikutip dari Rubin, Palmgreen dan Sypher (2004:332), yang hendak menunjukkan bagaimana iklan dapat dimaknai sebagai sebuah realitas oleh individu jika datang dari sumber yang kredibel. Di dalam konsep McCroskey sebelumnya (1966), sumber yang kredibel hanya dibagi menjadi dua komponen, yaitu otoritas serta karakter. Setelah mengalami perkembangan, sumber kredibel itu dibagi menjadi lima hal yaitu *sociability, extroversion, competence, composure*, serta *character*.

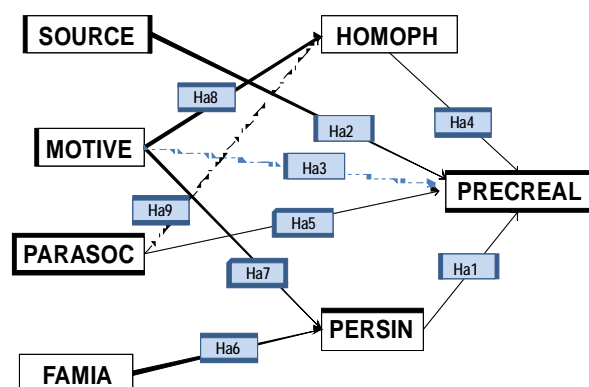
Konsep *television viewing motive* ini bermula dari penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak di Inggris untuk melihat kenapa mereka menonton televisi (Greenberg, 1974). Setelah mengalami perkembangan, konsep ini digunakan di Amerika oleh Rubin (1977, 1979) untuk subyek yang sama yaitu anak-anak, dan diadaptasi dalam penelitian ini dengan membagi motif menonton itu antara lain *relaxation, information, entertainment*, dan *escape*. Motif melihat iklan ini menjadi penting sekalipun pertanyaannya tidak diajukan bukan kepada anak-anak, sifatnya yang universal sebagai alasan yang juga berlaku bagi setiap orang dalam melihat tayangan iklan. Motif ini menjadi variabel yang dapat berpengaruh langsung ke anggapan tentang iklan itu realitas atau ilusi, tetapi juga berpengaruh tidak langsung melalui keterlibatan penonton di dalam iklan dan anggapan adanya kesamaan/kemiripan dengan bintang iklan yang digunakan (Munson & McQuarrie, 1987;

McCrosky, Richmond, & Daly, 1975 & Greenberg, 1974).

Faktor keempat adalah *Parasocial Interaction*. Konsep ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang pada saat ia melihat tayangan iklan tertentu di televisi, maka dia merasa sangat dekat atau intim dengan apa yang ditampilkan. Dalam konsep ini ingin dilihat apakah rasa keintiman ini dapat mempengaruhi individu untuk menganggap sebuah iklan itu sebagai realitas. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Horton & Wohl (1956) dikatakan bahwa faktor ini sampai mampu membuat seolah-olah individu itu sedang bercakap-cakap, *face to-face* dengan orang yang sebenarnya hanya dia lihat di layar kaca. Perasaan intim dengan pemeran iklan dan kemungkinan adanya motif tertentu dalam melihat iklan akan mempengaruhi variabel *perceived homophily measure* (Rosengren & Windhal, 1972; Levy, 1979; McCrosky, Richmond, & Daly, 1975 & Greenberg, 1974).

Faktor terakhir yang menentukan apakah tayangan iklan akan dianggap sebagai realitas adalah *Perceived Homophily Measure*. Konsep *homophily* yang dikemukakan oleh McCrosky, Richmond, & Daly (1975) ingin menunjukkan suatu tingkatan kemiripan atau kesamaan atas sikap, sifat, serta respon yang diberikan antara penonton iklan dengan pemeran iklan yang ditontonnya. Jika terdapat banyak kesamaan, maka individu penonton akan menganggap iklan itu sebagai sebuah kenyataan.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah hipotesis di dalam kerangka penelitian seperti yang ada pada gambar satu.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian menggunakan survei. Desain penelitian dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh atau hubungan yang ada diantara variabel-variabel yang diteliti dan bersifat eksplanasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penelitian dilakukan

terhadap mahasiswa-mahasiswi (S1) sejumlah 140 mahasiswa. Rentang usia responden antara 17-23 tahun dengan rata-rata berada di usia 18 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *judgement sampling* dengan pertimbangan kemudahan untuk mendapatkan anggota sampel. Kepada setiap responden diberikan kuesioner yang berisi 66 pernyataan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Jawaban setiap responden diukur menggunakan skala pengukuran sikap Likert dan *semantic differential scale*. Skala Likert dibuat menggunakan lima dimensi dimulai dari skor (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga skor (5) “Sangat Setuju”.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk memperoleh data primer. Selanjutnya data dianalisis menggunakan *confirmatory faktor analysis (CFA)* dan *path analysis (PA)* yang menjadi bagian dari teknik analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan program LISREL versi 8.52. Dilakukan uji validitas dengan tujuan untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam mengukur variabel laten. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menentukan konsistensi pengukuran (Ghozali, 2005:317). Teknik analisis data yang di-

gunakan adalah regresi berganda untuk mengetahui terjadinya pengaruh di antara variabel penelitian.

Definisi konsep dari setiap variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : *Personal Involvement Inventory*: pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian tentang keterlibatan dengan iklan sehingga iklan itu relevan atau tidak; *Source Credibility*: pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian tentang penting dan bergunanya iklan sehingga dapat dimaknai sebagai sebuah realitas; *Television Viewing Motive*: pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian tentang motif melihat iklan sebagai sesuatu yang penting; *Parasocial Interaction*: pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian tentang perasaan sangat dekat atau intim dengan apa yang iklan tampilkan sehingga menganggap iklan itu sebagai realitas; *Perceived Homophily Measure*: pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian tentang tingkatan kemiripan atau kesamaan atas sikap dan sifat dengan pemeran iklan (endorser) yang ditontonnya. Jika terdapat banyak kesamaan, maka individu penonton akan menganggap iklan itu sebagai sebuah kenyataan; *Perceived Realism*:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
1. <i>Personal Involvement Inventory/PERSIN</i>	(1) Keterkaitan individu di dalam iklan (2) Relevansi iklan (3) Bobot iklan	Perbedaan Semantik
2. <i>Source Credibility/ SOURCE</i>	(1) Emosi (2) Kognitif (3) Nurani	Perbedaan Semantik
3. <i>Television Viewing Motive / MOTIVE</i>	(1) Relaksasi (2) Kebiasaan (3) Waktu (4) Entertainment (5) Interaksi Sosial (6) Informasi (7) Inspirasi hidup (8) Pelarian	Skala Likert
4. <i>Parasocial Interaction/PARASOC</i>	(1) Pemeran Iklan (2) Isi Iklan	Skala Likert
5. <i>Perceived Homophily/ HOMOP</i>	(1) Pikiran (2) Perilaku	Perbedaan Semantik
6. <i>Perceived Realism/ PRECEAL</i>	(1) Gambaran real	Skala Likert
7. <i>Familiarity/ FAMIA</i>	(1) Televisi (2) Iklan di televisi	Skala Likert

Sumber : diolah oleh peneliti

pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian tentang kepercayaan penonton bahwa iklan yang ditontonnya itu adalah realitas; *Familiarity*: pemberian skor oleh responden berdasarkan penilaian kekerapan terpapar iklan. Semakin sering individu menonton iklan tertentu di televisi, maka individu penonton akan menganggap iklan tersebut relevan.

Konsep ini dapat diukur sesuai dengan indikator dan skala pengukuran yang telah ditentukan, maka konsep ini diturunkan menjadi variabel yang kemudian dioperasionalkan ke dalam tabel satu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ringkasan hasil pengujian terhadap sembilan hipotesis yang dibuat ditampilkan seluruhnya di tabel 2 dengan pembahasan terhadap hasilnya masing-masing adalah sebagai berikut :

Hipotesis Ha1 : Pengaruh *personal involvement inventory* terhadap *perceived realism*. Nilai *t* *personal involvement inventory* terhadap *perceived realism* lebih besar dari nilai *t* tabel sebesar 1,96 , yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Besarnya pengaruh *personal involvement inventory* terhadap *perceived realism* adalah 0,31 yang dilihat pada nilai *standardized solution*-nya. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin sering responden menonton iklan, maka semakin tinggi rasa terlibat (*involvement*) terhadap iklan dan penonton akan memaknai iklan sebagai sebuah realitas.

Hipotesis Ha2 : Pengaruh *source credibility* terhadap *perceived realism*. Nilai *t* *source credibility* terhadap *perceived realism* lebih besar dari 1,96 , hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai *standardized solution* pengaruh *inventory* terhadap *perceived realism* adalah 0,26. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kredibilitas iklan tersebut maka semakin besar makna iklan itu dalam menggambarkan realitas yang sesungguhnya.

Hipotesis Ha3 : Pengaruh *television viewing motive* terhadap *perceived realism*. Nilai *t* *television viewing motive* terhadap *perceived realism* lebih kecil dari 1,96 , hal ini menunjukkan

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan, artinya tidak ada kaitan antara motif menonton iklan dengan pemaknaan tentang iklan sebagai realitas. Berdasarkan kuesioner, motif menonton iklan didominasi oleh alasan untuk bersantai (relaksasi) dan mendapatkan hiburan (*entertainment*) sehingga penonton menganggap tayangan iklan memang tidak seharusnya untuk menggambarkan realitas.

Hipotesis Ha4 : Pengaruh *perceived homophily* terhadap *perceived realism*. Nilai *t* *perceived homophily* terhadap *perceived realism* lebih besar dari 1,96 , hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai *standardized solution* pengaruh *perceived homophily* terhadap *perceived realism* adalah 0,16. Nilai positif menunjukkan bahwa penilaian semakin tinggi tingkat kemiripan atau kesamaan atas sikap dan sifat antara pemeran iklan (*endorser*) yang ditontonnya dengan dirinya, maka individu penonton akan menganggap iklan itu sebagai sebuah kenyataan.

Hipotesis Ha5 : Pengaruh *parasocial interaction* terhadap *perceived realism*. Nilai *t* *parasocial interaction* terhadap *perceived realism* lebih besar dari 1,96 , hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai *standardized solution* pengaruh *parasocial interaction* terhadap *perceived realism* adalah 0,33. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin kuat perasaan sangat dekat atau intim dengan apa yang iklan tampilkan, membuat penonton menganggap iklan itu sebagai realitas. Hal ini dapat terjadi karena penonton seolah-olah merasa sangat dekat sehingga ikut menjadi bagian di dalam iklan tersebut. Dari 5 faktor yang mempengaruhi anggapan iklan sebagai realitas, maka pengaruh *parasocial interaction* ini menjadi faktor yang berpengaruh paling besar.

Hipotesis Ha6 : Pengaruh *familiarity* terhadap *personal involvement inventory*. Nilai *t* *familiarity* terhadap *personal involvement inventory* lebih besar dari 1,96 , hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai *standardized solution* pengaruh *familiarity* terhadap *personal involvement inventory* adalah 0,27. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin

sering individu menonton iklan (terpaan iklan) tertentu di televisi membuat individu penonton merasa semakin terlibat di dalam iklan tersebut.

Hipotesis Ha7 : Pengaruh *television viewing motive* terhadap *personal involvement inventory*. Nilai *t television viewing motive* terhadap *personal involvement inventory* lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Nilai *standardized solution* pengaruh *television viewing motive* terhadap *personal involvement inventory* adalah 0,43. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin besar motif menonton iklan maka penonton akan semakin merasa terlibat di dalam iklan tersebut. Pengaruh motif terhadap perasaan terlibat di dalam iklan lebih besar daripada pengaruh intensitas menonton. Hal ini dapat timbul akibat rasa bosan penonton yang terlalu sering melihat iklan tersebut. Variabel motif ini mempunyai pengaruh langsung terhadap anggapan iklan sebagai realitas dan berpengaruh tidak langsung melalui variabel *personal involvement inventory* dan variabel *perceived homophily*.

Hipotesis Ha8: Pengaruh *television viewing motive* terhadap *perceived homophily* Nilai *t television viewing motive* terhadap *perceived*

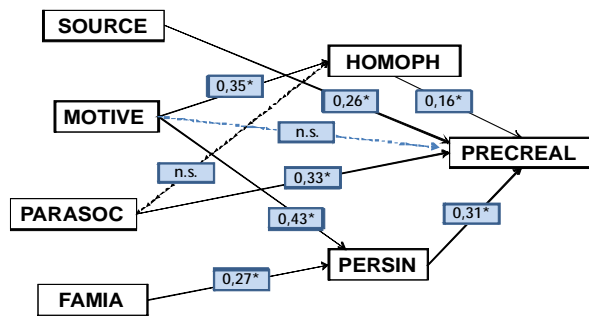
homophily lebih besar dari 1,96 , hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan. Nilai *standardized solution* pengaruh *television viewing motive* terhadap *perceived homophily* adalah 0,35. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin besar motif untuk menonton iklan akan semakin banyak kesamaan yang penonton lihat antara dirinya dengan iklan di televisi.

Hipotesis Ha9 : Pengaruh *parasocial interaction* terhadap *perceived homophily*. Nilai *t parasocial interaction* terhadap *perceived homophily* lebih kecil dari 1,96, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang menunjukkan bahwa perasaan sangat dekat atau intim dengan iklan tidak membuat penonton merasa memiliki tingkat kemiripan atau kesamaan atas sikap dan sifat dari pemeran iklan yang ditontonnya. Perasaan kedekatan dengan bintang iklan dapat ditimbulkan dari sifat personal yang ramah atau hangat dari pemeran iklan, namun tidak dapat membuat penonton merasa harus menjadi mirip atau sama dengan sifat dan sikap si pemeran iklan tadi. Variabel *parasocial interaction* ini juga mempunyai pengaruh langsung terhadap *perceived realism* maupun pengaruh tidak langsung melalui *perceived homophily*.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil Pengujian	
		Nilai T-Value	Signifikansi *
1.	Ha1 : ada pengaruh <i>personal involment inventory</i> terhadap <i>perceived realism</i>	- 4,02	Signifikan
2.	Ha2 : ada pengaruh <i>source credibility</i> terhadap <i>perceived realism</i>	-3,60	Signifikan
3.	Ha3 : ada pengaruh <i>television viewing motive</i> terhadap <i>perceived realism</i>	0,27	Tidak Signifikan
4.	Ha4 : ada pengaruh <i>perceived homophily</i> terhadap <i>perceived realism</i>	-2,43	Signifikan
5.	Ha5 : ada pengaruh <i>parasocial interaction</i> terhadap <i>perceived realism</i>	4,29	Signifikan
6.	Ha6 : ada pengaruh <i>familiarity</i> terhadap <i>personal involment inventory</i>	-3,63	Signifikan
7.	Ha7 : ada pengaruh <i>television viewing motive</i> terhadap <i>personal involment inventory</i>	-5,73	Signifikan
8.	Ha8 : ada pengaruh <i>television viewing motive</i> terhadap <i>perceived homophily</i>	-3,72	Signifikan
9.	Ha9 : ada pengaruh <i>parasocial interaction</i> terhadap <i>perceived homophily</i>	0,74	Tidak Signifikan

* *two tailed test, taraf signifikansi 5%, dengan t tabel 1,96*



* two tailed test, taraf signifikansi 5%, dengan t tabel 1,96; n.s.= tidak signifikan

Gambar 2. Diagram Jalur (Path Analysis)

Terdapat empat faktor yang menyebabkan penonton memaknai iklan sebagai suatu realitas yaitu 1) relevansi iklan, 2) iklan penting dan berguna; 3) pemeran iklan (*endorser*) memiliki kesan baik; 4) perasaan intim/dekat dengan kondisi yang ditampilkan di dalam iklan. Pengaruh yang dominan adalah *parasocial interaction*. Perasaan dekat atau intim yang terbentuk ketika penonton melihat iklan terjadi karena penonton melihat bahwa baik pemeran maupun iklannya sendiri memiliki unsur mudah dipahami, dan pemeran iklannya menjadi figur yang menarik buat ditonton karena dirasakan mempunyai kedekatan emosi dengan dirinya. Contohnya iklan susu merek tertentu yang mengasosiasikan susu sebagai pengganti makanan bayi, maka buat ibu yang sedang mempunyai anak yang mengalami kesulitan makan (faktor emosional). susu ini akan dianggap sebagai solusi terbaik bagi dirinya. Selain memiliki perasaan terikat secara emosional, iklan seperti ini juga mempunyai pesan yang mudah dipahami dan selanjutnya dapat diikuti oleh para ibu. Langkah kongkret penonton dengan mengikuti pesan yang disampaikan oleh iklan menunjukkan bahwa penonton memaknai iklan sebagai suatu realitas, bahkan tidak hanya realistis, tetapi juga baik untuk diikuti dengan membeli produknya.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa *parasocial interaction* menjadi faktor yang dominan menyebabkan penonton memaknai iklan sebagai realitas mendukung pandangan yang dikemukakan oleh Paddy Scannell, Sosiolog Inggris yang banyak membahas tulisan Georg Simmel, mengemukakan formula bahwa *television*

should address the anyone of the audience as someone. Dengan demikian audiens akan *recognize that television host or presenter is addressing him or her* (Turnock, 2007:169). Iklan yang dimaknai oleh penonton sebagai realitas adalah iklan yang membuat individu seolah-olah ‘menemukan’ dirinya di dalam iklan tersebut. Fenomena ini yang disebut dengan *advertising personalities*, meminjam istilah *television personalities*, yang sering digunakan untuk televisi (Turnock, 2007:172). Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa model iklan rokok Sampoerna Hijau, yang terkenal dengan *tagline*: ‘Asyiknya Rame-Rame’ dapat berhasil. Penggunaan metode yang jarang dilakukan perusahaan lain yaitu *customer insight* melalui kehidupan sehari-hari *customer*-nya untuk memahami *unstated needs* dan *expectations* para perokok akhirnya menemukan sejumlah karakter spesifik dari konsumen rokok yaitu orang yang sederhana, senang bergaul, bersahabat, solider dan rendah hati, yang kemudian dituangkan ke dalam iklan. Hasilnya iklan ini menjadi populer karena iklan yang disampaikan mirip dengan kondisi kekinian atau realitas yang ada di masyarakat saat itu. Penelitian tentang dampak kampanye pencegahan kanker di Amerika menunjukkan bahwa tayangan melalui televisi mempunyai pengaruh lebih besar terhadap upaya pencegahan kanker daripada melalui koran. Tayangan di televisi, melalui figur yang digunakan, sangat relevan bagi setiap orang dalam menggambarkan perilaku pemicu kanker seperti intensitas penggunaan *handphone* yang tinggi, serta konsumsi berlebih terhadap makanan yang mengandung daging sapi (Niederdeppe et al, 2010). Kedekatan penonton terhadap tayangan iklan TV komersial sangat terasa jika tayangan tersebut mempunyai relevansi yang besar dalam kehidupannya sehari-hari.

Faktor pembentuk *personal involvement inventory* adalah *television viewing motive* maupun *familiarity*. Artinya adalah motif menonton iklan dan intensitasnya baik dalam menonton televisi maupun iklan, membuat penonton memiliki perasaan terlibat dengan iklan yang ditonton, namun perasaan terlibat dengan iklan ini dirasakan penonton lebih besar karena motif penonton yang sesuai dengan iklan di-

bandingkan karena intensitas menontonnya. Faktor kebosanan menonton iklan yang sama terus menerus, haus akan hiburan, dan perasaan untuk lepas sejenak dari beban hidup sehari-hari dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Sementara *perceived homophily measure* hanya dipengaruhi oleh motif menonton. Tingkat kesamaan individu dengan iklan yang ditonton hanya dipengaruhi oleh motif individu dalam menonton iklan dan bukan karena perasaan akrab atau intim dengan pemeran iklannya.

Diagram jalur (*path diagram*) merupakan suatu model yang diturunkan berdasarkan pada persamaan-persamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Diagram jalur di atas menampilkan tingkat signifikansi pengaruh antar variabel. Pengaruh yang tidak signifikan memiliki garis penghubung yang terputus-putus dan pengaruh yang signifikan memiliki garis penghubung yang tidak terputus-putus. Terdapat empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap *perceived realism* yaitu *personal involvement inventory*, *source credibility*, *perceived homophily* dan *parasocial interaction*. Terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh terhadap *personal involvement inventory* yaitu *familiarity* dan *television viewing motive* serta terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh terhadap *perceived homophily* yaitu *parasocial interaction*.

Uji keabsahan model dilakukan untuk melihat apakah model penelitian di atas mampu menggambarkan realitas yang ada. Dengan keluarnya hasil diagram jalur di dalam program SEM, menunjukkan bahwa hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap setiap indikator untuk setiap variabel telah berhasil dilalui. Selanjutnya dilakukan uji keabsahan model melalui *p value* (nilai *p*) $0,93 > 0,05$, artinya model fit. Nilai *Root mean square error of approximation* (RMSEA) $0,00 < 0,05$ *close fit*. Nilai $\chi^2/\text{degrees of freedom}$ (df) $0,43 < 5$, model fit. Nilai NFI $0,99 > 0,90$, model fit. Nilai CFI $1 > 0,90$, model fit. Nilai IFI $0,91 > 0,90$, berarti model *fit*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model baik dalam menggambarkan kondisi yang diinginkan di dalam penelitian ini dan dapat direplikasi untuk penelitian selanjutnya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, faktor – faktor yang mempengaruhi secara langsung dan signifikan pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai sebuah realitas adalah *personal involvement inventory*, *source credibility*, *perceived homophily measure*, dan *parasocial interaction*. Kondisi ini menggambarkan bahwa rasa keterlibatan terhadap iklan, kredibilitas iklan, tingkat kemiripan atau kesamaan atas sikap dan sifat pemeran iklan (*endorser*) dengan diri penonton, dan munculnya perasaan sangat dekat atau intim dengan apa yang iklan tampilkan, membuat penonton menganggap iklan itu sebagai realitas. Faktor *personal involvement inventory* (rasa keterlibatan) yang terbukti mempengaruhi pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai sebuah realitas muncul karena kebiasaan individu yang sering menonton iklan di televisi (*familiarity*) dan motif menonton iklan (*television viewing motive*) yang didominasi oleh kebutuhan untuk relaksasi dan hiburan. Motif menonton iklan yang didominasi oleh alasan untuk bersantai (relaksasi) dan mendapatkan hiburan (*entertainment*) didukung dengan kebiasaan sering menonton iklan memunculkan rasa keterlibatan terhadap iklan dan selanjutnya individu penonton akan memaknai iklan sebagai sebuah realitas. Oleh karena itu, faktor motif mempengaruhi secara tidak langsung pemaknaan tentang iklan sebagai realitas. Faktor lain yang juga dipengaruhi oleh motif menonton adalah *perceived homophily measure*. Penonton merasa mirip dengan iklan yang ditonton berdasarkan motif untuk memenuhi kebutuhan yang didominasi oleh relaksasi, dan hiburan, bukan pada sikap-sikap yang diperlihatkan di dalam iklan. Penonton akan merasa mirip dengan gambaran di iklan jika tayangan itu sesuai dengan kebutuhannya.

Kedua, pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi pemaknaan mahasiswa tentang iklan komersial sebagai realitas adalah *parasocial interaction*. Kedekatan dan keintiman yang dirasakan oleh penonton yang ditimbulkan oleh

pemeran iklan yang digunakan akan menjadikan iklan itu menjadi tampak realistis. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priya, Baisya, dan Sharma (2010) terhadap remaja di India dan Nobuko Kawashima (2006) di Jepang, yang menyebutkan bahwa penggunaan *celebrity endorsement* dalam iklan di televisi akan membuat iklan lebih kredibel selanjutnya baru berpengaruh terhadap perilaku membeli penonton. Tidak setiap kondisi atau pemeran iklan di televisi mampu membangun kedekatan atau keintiman dengan penonton. Akibatnya iklan umumnya menggunakan bintang (*celebrity*) sebagai *endorser* untuk melakukan hal ini. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa penonton mahasiswa tidak menganggap kemiripan/kesamaan sebagai hal yang berpengaruh besar untuk menganggap iklan sebagai realitas. Penonton pada usia ini justru sedang mencari jati diri dan tidak senang dianggap menyamakan dirinya dengan orang lain. Namun, anggapan ini hanya berlaku khusus pada kelompok mahasiswa, tetapi tidak pada kelompok masyarakat yang lebih besar.

Responden yang diambil dari kalangan mahasiswa memiliki sifat homogenitas yang tinggi sehingga pemberlakuan hasil penelitian ini untuk kelompok masyarakat yang berbeda adalah terbatas. Pengujian terhadap kelompok responden yang berbeda disertai dengan jumlah sampel yang lebih besar kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat dilakukan analisis terhadap isi iklan menggunakan semiotik atau analisis teks, untuk melihat isi iklan. Metode ini mengetahui bagaimana yang berpengaruh terhadap anggapan iklan itu sebagai realitas; kajian terhadap iklan yang bersifat *netvertising* (iklan melalui media yang berbasis pada teknologi internet seperti *blog*, *website* dan sebagainya); selain memasukkan kemungkinan adanya pengaruh dari kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat yang menjadi dimensi dari iklan sebagai gambaran sebuah realitas.

Ucapan Terimakasih

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua beserta Pimpinan

STIKOM The London School of Public Relations-Jakarta sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Khususnya juga kepada para responden atas segala masukan dan kritikan yang diberikan sehingga penelitian tentang pemaknaan iklan TV komersial sebagai sebuah realitas ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Allan, Kenneth, 2006, *Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds*, Pine Forge Press, United Kingdom.
- Borchers, Timothy A, 2005, *Persuasion In The Media Age*, Second edition, McGrawHill, United States.
- Eastman, Susan Tyler (editor), 2000, *Research in Media Promotion*, Lawrence Erlbaum, United States.
- Ghozali, Imam, 2005, *Structural Equation Modeling: Teori, Konsep, Aplikasi Dengan Program LISREL 9.54*, BP Undip, Semarang.
- Gunter, Barrie. Et al., 2005, *Advertising to Children On TV: Content, Impact, and Regulation*, Lawrence Erlbaum, United States.
- Kartajaya, Hermawan et.al., 2005, *4-G Marketing: A 90 Year Journey Of Creating Everlasting Brand*, Markplus & Co., Jakarta.
- Kasiyan, 2008, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, 2004, *Cakap Kecap*, Galang Printika, Yogyakarta.
- Piliang, Yasraf Amir, 2003, *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.
- Rubin, Rebecca B., Philip Palmgreen & Howard E. Sypher, (editor) 2004, *Communication Research Measures : A Source Book*. Lawrence Erlbaum, United States.

- Syahreza, Andre, 2007, *The Innocent Rebel: Sisi Aneh Orang Jakarta*, Gagas Media, Ciganjur.
- Turnock, Rob, 2007, *Television and Consumer Culture: Britain and The Transformation of Modernity*. TJ International Ltd., United Kingdom.
- Vestergaard, Torben, Kim Schroder, 1989, *The Language Of Advertising*, Basil Blackwell ltd., United Kingdom.

Jurnal

- Chattopadhyay, Tuhin, 2010, "The Information Processing of Advertisements by Urban Young Men of India". *Journal of Global Business Review* II (3), Diakses melalui <http://www.sagepublications.com>. Pages 449-462.
- Kawashima, Nobuko, 2006, "Advertising Agencies, Media And Consumer Market: The Changing Quality Of TV Advertising In Japan", *Journal Media Culture & Society*. Diakses melalui <http://www.sagepublications.com>. Pages 393-410.
- Niederppe, Jeff, Erika Franklin Fowler, Kneth Goldstein, James Pribble, 2010, "Does Local television news coverage cultivate fantastic beliefs about cancer prevention?" *Journal of Communication* Vol.60 Number 2. Pages 230-253.
- Priya, Pankaj, Rajat Kanti Baisya dan Seema Sharma, 2010, "Television Advertisements and Children's Buying Behavior", *Journal of Marketing Intelligence and Planning* Vol.28 No.2. Diakses melalui <http://www.sagepublications.com>. Pages 151-169.
- Zhang, Jie, Ali A. Ghorbani, 2004, "Familiarity and Trust: Measuring Familiarity with a Web Site", Citeseer^x Digital Library. (diakses melalui <http://citeseerx.ist.psu.edu/about/site>), Pages 23-28.

Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel - Palestina dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng

Achmad Herman/Jimmy Nurdiansa
Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Univ. Tadulako Palu
Kampus Bumi Kaktus Tondo Sulteng
Telp. 081524198759 / Email : achmad_herman@yahoo.com.

Abstract

Nowdays, many complex conflicts occurs in the whole world for years. One of the biggest is conflict between Palestine and Israel. It is been happened for almost six decades and get the world attention, it becomes headline and hot topic in the world wide mass media, one of them is newspaper. But in fact, news about this conflict is different one to other and sometimes subjective and unneutral. Based on that condition, this research existed, it is about how newspaper (Kompas daily and Radar Sulteng) communicate the conflict to the audience. To analyze the differences, researcher using framing analysis through framing's framework who explained by Robert N. Entman. The framing analysis's framework consisting of Defining Problems, Causes's Diagnosis, Make Judgement's Moral, and Treatment Recommendations. In the result, there is a distinctive way to communicates the conflict between both daily, particularly about making judgement's moral.

Abstrak

Saat ini, di seluruh dunia persoalan konflik menjadi begitu kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu konflik terbesar adalah antara Israel dan Palestina. Konflik ini kemudian mendapat perhatian dunia karena terjadi hampir sampai enam dekade. Banyak konflik yang disorot oleh media massa di seluruh dunia salah satunya media cetak. Namun, dalam berita sebenarnya dari media massa tentang konflik ini berbeda dan kadang-kadang subjektif dan tidak netral. Karena itu, penelitian ini dilakukan, yaitu melihat bagaimana media massa tentang konflik (harian Kompas dan Radar Sulteng). Untuk menganalisis perbedaan ini, peneliti menggunakan analisis framing dengan mengambil kerangka framing yang dijelaskan oleh Robert N. Entman. Kerangka analisis framing yang terdiri dari *Defining Problems, Causes's Diagnosis, Make is Judgement's Moral, and Treatment Recommendations*. Pada akhir penelitian ini, ditemukan bahwa ada komunikasi yang berbeda diantara keduanya khususnya tentang penilaian moral.

Kata Kunci : bingkai, konflik, media massa

Pendahuluan

Konflik merupakan permasalahan sosial yang dihadapi oleh banyak negara. Banyak di antara konflik tersebut sudah mengarah pada

disintegrasi dan telah menjadi masalah yang berkepanjangan selama ini, mulai dari kalangan elit, kalangan cendekiawan dan masyarakat awam. Permasalahan seperti ini bahkan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa

secara keseluruhan. Penyebab terjadinya mungkin hanya diakibatkan oleh hal yang sifatnya tidak terlalu penting, dan berdampak pada hancurnya berbagai sarana dan prasarana yang telah demikian susahny dibangun, serta muncul-nya berbagai suasana psikologis yang tidak kondusif untuk hidup secara berdampingan.

Konflik biasa terjadi ketika ada pertemuan antara dua atau lebih suku bangsa pada suatu wilayah atau dalam suatu pemukiman, dan akan terjadi kontak serta interaksi antar mereka, baik interaksi secara fisik maupun melalui lambang-lambang atau simbol-simbol. Sebagai suatu unsur kebudayaan, interaksi seperti itu adakalanya berakhir dengan pertentangan. Kedua kondisi sosial seperti itu senantiasa terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok etnis dalam masyarakat tersebut. Dikarenakan kepentingan-kepentingan yang berbeda itupula kemudian masing-masing pihak ingin mengklaim daerah kekuasaannya untuk lebih memperkuat kedudukan mereka sebagai sebuah komunitas.

Perebutan kekuasaan bukan saja terjadi pada sebuah komunitas kecil dalam sebuah negara, namun seringkali pula terjadi antara dua negara dan kerap menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Hal ini kemudian menjadi alasan utama konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel – Palestina.

Konflik Israel – Palestina adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah (dengan mengenyampingkan Perang Salib), dan konflik tersebut tidak bisa hanya dilihat dari kejadian 5 atau 10 tahun belakangan. Konflik tersebut telah merambah ke dunia internasional. Di mata dunia, konflik berkepanjangan dari kedua negara ini terus menerus menjadi bahan perbincangan yang selalu aktual. Salah satu tindakan yang jelas dilakukan oleh dunia internasional adalah dengan menjadikan peristiwa ini sebagai isu hangat yang pantas untuk dijadikan berita, yang bukan saja sebagai cara agar dunia tahu apa yang terjadi, namun juga agar lebih banyak pihak lagi yang bisa memberi solusi.

Konflik Israel – Palestina telah memenuhi semua nilai berita, dari segi keluarbiasaan peristiwa ini telah merenggut korban jiwa yang banyak.

Dari segi akibat, konflik ini berdampak sangat buruk bagi kehidupan rakyat kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian dari nilai berita kedekatan (*proximity*) karena secara psikologis semua orang yang menyaksikan atau membaca berita ini akan memiliki keterikatan pikiran, perasaan atau kejiwaan dengan objek peristiwa tersebut. Nilai berita terakhir yang dikandung dari peristiwa ini adalah *human interest* dimana orang yang mengkonsumsi berita mengenai peristiwa ini akan merasa tersentuh seluruh jiwa, emosi dan empatinya,

Tidak semua peristiwa tersebut dianggap penting oleh hampir semua institusi media di tanah air. Biasanya yang menjadi berita penting di harian lokal maupun nasional itu adalah berita-berita politik dan ekonomi karena kedua topik tersebut adalah masalah dan perhatian utama di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada pemberitaan mengenai kenaikan BBM, harga kebutuhan pokok yang melonjak, skandal korupsi yang menimpa anggota dewan hingga kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu mendapat perhatian lebih dari media. Topik-topik itu selalu menjadi berita hangat yang siap menghiasi halaman pertama di media cetak. Kemudian, pada akhir tahun di bulan Desember 2008 sebuah peristiwa dahsyat kembali menjadi perhatian utama dari media yaitu peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Palestina. Selama hampir dua bulan penuh berita mengenai penyerangan ini menjadi berita utama.

Salah satu faktor yang juga menjadikan konflik Israel – Palestina ini banyak menjadi bahan liputan berita adalah karena nilai berita yang dikandung oleh peristiwa ini, yaitu konflik. Konflik merupakan salah satu nilai berita yang tinggi yang banyak digunakan oleh media massa untuk menarik minat pembacanya. Hal lain yang juga patut diperhatikan adalah bahwa dalam pemberitaannya masing-masing media mempunyai caranya sendiri dalam mengulas berita mengenai konflik Israel – Palestina ini.

Perbedaan tersebut berangkat dari pembingkai (*framing*) yang jelas berbeda dari media yang satu dengan media yang lainnya dikarenakan perbedaan latar belakang medianya. Perbedaan ini terlihat dari banyak hal. Pemilihan sudut pandang (*angle*) penulisan berita, pemilih-

an judul dan diksi dalam isi berita, tampilan foto dan grafis yang digunakan oleh media cetak yang satu pasti berbeda dengan media cetak lainnya. Misalnya saja, dalam pemberitaan mengenai konflik Israel - Palestina di harian Kompas pada tanggal 7 Januari 2009, dengan judul Berita "Pecah Pertempuran Kota" dilampirkan sebuah foto yang memperlihatkan seorang ibu dan anak perempuan yang berjalan melewati reruntuhan rumah-rumah sambil berpegangan tangan dan berbicara satu sama lain. Sedangkan pada tanggal yang sama dengan pemberitaan peristiwa yang sama, Radar Sulteng memuat sebuah berita tentang konflik Israel - Palestina dengan judul berita "Tank Israel Tembak Komandannya" dilampirkan tidak hanya satu foto melainkan dua buah foto.

Foto yang terdapat pada harian yang pertama memperlihatkan gambar seorang ibu yang sedang mendekap putrinya dan berlindung di balik meja karena mendengar tanda akan adanya serangan roket. Kemudian pada foto yang kedua memperlihatkan seorang ibu yang menangis melihat rumahnya yang hancur akibat terkena serangan roket. Melihat foto yang ditampilkan oleh kedua harian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa foto dalam harian yang pertama lebih memfokuskan pada sisi kerusakan yang ditimbulkan. Sementara foto yang ada di harian yang kedua lebih memfokuskan pada sisi kemanusiaan, dalam hal ini adalah emosi dari para korban konflik tersebut. Contoh di atas semakin memperjelas bahwa sebuah objek berita yang sama dapat diberitakan secara berbeda oleh setiap media massa yang meliputnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap berita yang dimuat di harian Kompas dan Radar Sulteng yang di dalamnya terdapat sejumlah berita yang kompleks dan layak untuk diteliti. Melalui kedua harian tersebut pula peneliti berusaha melihat bingkai yang digunakan oleh kedua media.

Analisis *framing* merupakan sebuah metode penelitian mengenai media massa yang dasar penelitiannya berasal dari teori Konstruksi Sosial. Dalam teori ini dipaparkan bahwa, realitas yang dilihat atau baca di media massa tersebut bukan merupakan realitas seperti yang benar-

benar terjadi, melainkan sebuah proses konstruksi dari media-media yang bersangkutan.

Konsep mengenai teori ini diperkenalkan oleh Sosiolog Interpretatif Peter L. Berger. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi (Eriyanto, 2007: 15). Pandangan teori ini secara jelas menggambarkan bahwa realitas itu bersifat subjektif, yang artinya bahwa, sebuah realitas akan dipandang berbeda dari satu individu dengan individu yang lain. Perbedaan padangan ini dikarenakan setiap individu mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial yang berbeda.

Dalam penjelasan *ontologi paradigma konstruktivis*, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian, kebenaran atas suatu realitas sosial bersifat nisbi yang berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Secara sosial, realitas dipandang sebagai hasil ciptaan manusia kreatif yang dilakukan melalui proses konstruksi terhadap dunia sosial yang ada disekitarnya. Dunia sosial itu sendiri menurut George Simmel dalam (Bungin 2004:3) "realitas dunia sosial itu berdiri sendiri di luar individu, yang menurut kesan kita bahwa realitas itu "ada" dalam diri sendiri dan hukum yang menguasainya."

Lebih lanjut lagi mengenai realitas sosial dan konstruksi sosial ini oleh Bungin (2004: 3) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif dinyatakan demikian:

Pada kenyataannya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna menentukan realitas sosial dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Jadi, individu mengkonstruksikannya dalam dunia realitas, serta memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya.

Dalam buku tersebut pula, Berger dan Luckmann (Bungin, 2004: 5-6) menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman "kenyataan" dan "pengetahuan", yakni :

Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam berbagai realitas dan diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa berbagai realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Dalam beberapa literatur yang ada, dijelaskan bahwa pada dasarnya analisis *framing* merupakan salah satu metode analisis data yang digunakan untuk melihat bagaimana media massa seperti surat kabar ataupun televisi membingkai realitas yang ada, untuk dimuat atau disiarkan sebagai berita.

Analisis *framing* ini berangkat dari teori konstruksi sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger bersama dengan Thomas Luckman. Dalam teorinya yang tersebut dinyatakan bahwa realitas tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Akan tetapi merupakan sebuah bentuk dan dikonstruksi. Hal ini menjadikan sebuah realitas bisa bermakna ganda. Ini berarti bahwa setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.

Pan dan Kosicki juga menyatakan bahwa makna dari *framing* secara mendasar tidak bisa dipisahkan dari asumsi teori Konstruktivisme, yang menekankan bahwa setiap individu mengklasifikasikan, mengkonstruksi dan mengorganisasikan pengalaman pribadinya secara aktif dan unik berdasarkan skema interpretasinya atau referensi pembingkai yang ada dalam pikirannya (Sasangka, 2006: 73).

Dari teori Konstruksi Sosial tersebut maka muncul sebuah pemahaman mengenai bagaimana sebuah realitas atau peristiwa tersebut dibentuk oleh media-media yang bersangkutan mengenai peristiwa yang terjadi disekitar kita melalui sebuah konsep analisis *framing*.

Jika dilihat dari perspektif komunikasi, analisis *framing* mengarah kepada sebuah metode analisis media yang dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Kemudian, berdasarkan konsep psikologi, *framing* dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu dari suatu isu mem-

peroleh alokasi sumber kognitif individu lebih besar (Sobur, 2006: 162-163).

Untuk menerapkan analisis framing dalam melihat bagaimana konstruksi yang dilakukukan oleh media yang bersangkutan, maka salah satu model yang bisa digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Dalam buku Analisis Framing yang ditulis oleh Eriyanto (2007: 188) dikatakan bahwa dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka Robert N. Entman (Eriyanto, 2007: 189-191) membagi perangkat *framing* ke dalam empat elemen yaitu: *Pertama. Define Problems* (pendefinisian masalah). Ini merupakan elemen yang pertama kali dapat terlihat mengenai framing. Elemen ini merupakan bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

Kedua. *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah). Elemen ini merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*).

Ketiga. *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral). Elemen ini merupakan elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/ memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

Keempat. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat

dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah keseluruhan berita konflik Israel dan Palestina di Harian Kompas dan Radar Sulteng. Sampel dalam riset penelitian *framing* lebih dikenal dengan istilah korpus sehingga korpus dalam penelitian ini adalah keseluruhan berita mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina yang dimuat di harian Kompas dan Radar Sulteng edisi 19 Desember 2008 – 18 Februari 2009.

Alasan memilih Kompas dan Radar Sulteng yaitu untuk melihat fenomena konflik Israel – Palestina dibingkai dalam berbagai liputan seperti *hard news*, *soft news*, *feature*, opini serta foto baik dalam skala nasional maupun lokal. Kompas dipilih sebagai representasi media nasional yang liputannya sarat dengan nuansa kebijakan-kebijakan politis. Sedangkan Radar Sulteng merupakan media lokal yang juga berada dibawah jaringan Jawa Pos (JPNN).

Selain itu, pemilihan edisi 19 Desember 2008 – 18 Februari 2009 didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadinya kembali perseteruan memanas pada akhir tahun 2008, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2008. Israel melancarkan Operasi *Oferet Yetsuka*, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Serangan tersebut merupakan awal dari rangkaian serangan lainnya yang menimbulkan banyak sekali korban, baik dari pihak militer maupun rakyat sipil, dari anak-anak hingga para lanjut usia. Korban tewas yang jatuh akibat serangan ini mencapai 1.330 orang (Harian Kompas Edisi 23 Januari 2009) dan sekitar 100 orang diantaranya adalah anak-anak.

Edisi dipilih sebelum peristiwa berlangsung (pemicu konflik), ketika peristiwa berlangsung (situasi konflik) dan setelah peristiwa berlangsung (proses mediasi atau upaya perdamaian). Objek penelitian tidak berdasarkan pada judul-judul tertentu, akan tetapi lebih dititikberatkan pada sejauh mana konflik tersebut diinformasikan kepada khalayak dengan berbagai model liputan seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Adapun untuk menuntun kejelasan penelitian ini maka diuraikanlah model *framing* Entman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Framing Harian Kompas

(a). Pemicu Konflik. Dari keseluruhan berita yang telah dianalisis (sebanyak 47 berita), kebanyakan Kompas membingkai permasalahannya adalah mengenai situasi perang antara Palestina dan Israel dengan beberapa variasi permasalahan yang lain. Sementara penyebab masalah bisa dilihat pada awal-awal pemuatan berita konflik ini. Penyebab permasalahan yang dibingkai oleh Kompas adalah Palestina yang digambarkan sebagai pemicu lahirnya konflik baru setelah gencatan senjata yang lama telah habis masa berlakunya. Selanjutnya, pada setiap perkembangan baru konflik tersebut yang menjadi penyebab masalahnya datang dari kedua belah pihak baik dari Israel maupun Palestina.

Sama seperti penyebab masalahnya, pada awal-awal berita konflik ini dimuat, penilaian moral selalu Kompas dijatuhkan kepada Palestina yang secara moral dinilai sebagai pihak yang berkelakuan buruk karena keengganan mereka untuk berdamai atau sekedar menyetujui usulan gencatan senjata. Hal yang menonjol adalah bahwa, ketika yang menjadi penyebab masalahnya adalah Israel, maka Kompas kemudian membingkai nilai moral pada Israel sebagai sebuah tindakan balasan atau mempertahankan diri dari serangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak Palestina, ada semacam dalih dari semua tindakan yang mereka lakukan sementara ketika Palestina yang menjadi penyebab masalah tidak disebut alasan penyerangannya atau dalih dilakukannya serangan tersebut.

Pada beberapa bagian berita, Palestina juga digambarkan sebagai pihak yang keras dan kejam yang terlihat dari pemakaian kata-kata yang kurang enak didengar, sesekali Israel juga dibingkai dengan cara yang serupa tapi dengan intensitas yang kurang. Namun demikian, diakhir-akhir pemuatan berita konflik ini, penilaian moral Kompas cukup netral dengan menjatuhkan penilaian moral kepada kedua belah pihak yang bertikai. Hal ini jelas memperlihatkan ketika salah

satu pihak atau keduanya menjadi penyebab masalah maka satu hal yang sering ditinggalkan. Kompas membentangkan bahwa, tindakan-tindakan seperti balas-membalas serangan tidak semestinya dilakukan karena jumlah korban yang jatuh baik yang luka-luka hingga korban tewas akan semakin banyak dan krisis kemanusiaan akan semakin parah.

Secara umum, saran penyelesaian masalah yang ditinggalkan Kompas adalah gencatan senjata yang mengarah pada perwujudan perdamaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian solusi seperti ini paling banyak muncul karena berita yang dimuat bertema konflik. Namun, pada beberapa judul berita, solusi yang ditawarkan bukan hanya gencatan senjata, seperti penghentian serangan atau stop kekerasan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, permasalahan yang diambil oleh harian Kompas merupakan permasalahan yang menyangkut konflik antara Israel dan Palestina tersebut. Kemudian, penyebab masalah yang ditinggalkan oleh Kompas lebih condong ke arah Palestina. Selain itu, pada beberapa bagian berita terlihat bahwa Kompas cenderung untuk memihak ke Israel. Hal ini seperti yang terlihat pada penilaian moral yang ada, bahwa beberapa kali posisi Israel yang melakukan kesalahan seperti ini dimaklumi karena ada alasan tertentu.

Penjelasan tersebut di atas bisa dilihat pada hasil analisis masalah pada contoh berita tanggal 22 Desember 2008 dengan judul: *Konflik Di Gaza Sulit Dibendung* yaitu:

Define Problems. Berita ini masih merupakan kelanjutan berita sebelumnya yaitu mengenai serangan yang dilakukan oleh pihak

Hamas yang tidak ingin memperpanjang masa kesepakatan gencatan senjata antara Israel-Palestina. Permasalahan berita ini juga bisa dilihat dari *lead*nya berikut ini:

Pasca berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas, konflik sengit di wilayah Gaza semakin sulit dibendung. Belasan roket dan mortir dilaporkan meluncur dari Gaza. Israel, Minggu (21/12), tengah mempertimbangkan melancarkan operasi militer besar-besaran ke wilayah jalur Gaza.

Diagnoses Causes. Penyebab masalah yang ditinggalkan oleh Kompas pada berita ini adalah Hamas yang terlebih dahulu melakukan serangan karena tidak memperpanjang kesepakatan gencatan senjata yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2008 tersebut seperti yang terlihat pada kutipan beritanya di bawah ini:

Gaza semakin tegang sejak Hamas tidak mau memperpanjang gencatan senjata dengan Israel. Kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak enam bulan lalu itu berakhir Jumat, 19 Desember. Jika Hamas tidak juga menghentikan serangan roketnya, Israel tidak punya pilihan lain selain menyerang balik. "harus diperjelas. Serangan yang menyakitkan ke Gaza pasti akan terjadi," kata Menteri Kesejahteraan Sosial Israel Isaac Herzog (Kompas edisi 22 Desember 2008, Hal. 10).

Make Moral Judgement. Penilaian moral dalam berita ini sekali lagi dijatuhkan kepada pihak Hamas, yang dianggap melakukan serangan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Intinya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Hamas adalah hal yang tidak semestinya dilakukan, dan memperpanjang masa gencatan senjata jus-

Tabel 1. Frame Berita Konflik Di Gaza Sulit Dibendung

<i>Define Problems</i>	Penyerangan Hamas ke pihak Israel karena tidak ingin memperpanjang kesepakatan gencatan senjata
<i>Diagnoses Causes</i>	Hamas
<i>Make Moral Judgement</i>	Hamas tidak seharusnya melakukan serangan
<i>Treatment Recommendation</i>	Hamas menghentikan serangan serta mempertimbangkan untuk memperpanjang masa kesepakatan gencatan senjata

Sumber: data diolah, 2009

tru yang lebih baik mereka lakukan. Di lain pihak, tekanan yang dialami oleh Israel memaksa mereka untuk menyerang balik.

Kelompok bersenjata di Gaza menembakkan minimal 10 roket, Minggu. Sebaliknya, pasukan Israel melancarkan serangan udara dan menewaskan satu orang serta melukai tiga orang. Ada beberapa menteri Israel yang meminta segera digelar operasi militer membalas serangan Hamas. “jika kami terus-terusan diserang seperti ini, kami harus balas. Paling tidak agar dapat mengurangi kekuatan mereka,” kata Menteri Perdagangan dan Industri Israel Eli Yishai (Kompas edisi 22 Desember 2008, Hal. 10).

Treatment Recommendation. Saran penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Kompas pada berita ini adalah agar Hamas segera menghentikan serangan dan memperpanjang masa gencatan senjata. Saran penyelesaian masalah tersebut seperti yang terlihat pada kutipan berita di bawah ini:

Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice mengingatkan, berbagai serangan kepada Israel hanya akan melukai masyarakat di Palestina. “Hamas harus mulai berkonsentrasi menghindari kekerasan. Ancaman kekerasan terhadap Israel hanya akan menyengsarakan dan menambah penderitaan rakyat Gaza.” ujarnya.

(b). Situasi Konflik. Umumnya *framing* yang ditonjolkan adalah keadaan serta kronologis kejadian perang antara Israel dan Palestina. Mulai dari awal serangan seperti apa hingga siapa saja yang terlibat di dalam. Berikut ini adalah contoh berita tanggal 5 Januari 2009 dengan judul *Israel Masuki “Jantung” Gaza*.

Define Problems. Pendefinisian masalah yang ada dalam berita ini masih seputar serangan Israel ke Palestina, namun kali ini banyak membahas mengenai proses penyerangan yang dilakukan oleh Israel. Salah satu contohnya seperti yang terlihat pada penggalan beritanya di bawah ini:

Puluhan tank bertugas sebagai pembukaan jalan pasukan Israel menerobos perbatasan. Berupaya mencegah Israel masuk Gaza, Sabtu malam para pejuang Hamas gencar menembakkan roket dan mortir. Akan tetapi, upaya itu tidak banyak gunanya. Ribuan tentara dan tank kini telah masuk dan mengepung Gaza...Infanteri dan tank-tank mulai masuk ke wilayah bekas kawasan permukiman Yahudi di Netzarim, 3 kilometer selatan Gaza City. Selain itu, dilaporkan terjadi baku tembak sengit di utara Gaza City dan Beit Lahiya, Bait Hanun serta Jabaliya. Serangan Netzarim itu otomatis menutup Gaza City, kota dengan penduduk terbesar (400.000 jiwa), dari wilayah Jalur Gaza yang lain (Kompas edisi 5 Januari 2009, hal. 1).

Pada kutipan di atas, Dalam isi berita ini, selanjutnya dibahas mengenai dampak dari serangan-serangan ini. Hal ini bisa dilihat pada kutipan di bawah ini:

Dalam satu hari sekitar 23 orang tewas (17 warga sipil) dan 200 orang terluka. Secara keseluruhan, serangan Israel sejak pekan lalu telah menewaskan 485 orang (80 anak-anak) dan mengakibatkan 2.500 orang terluka (Kompas edisi 5 Januari 2009, hal 1).

Diagnoses Causes. Israel berkali-kali dijadikan sumber berita mengenai serangan-serangan yang mereka lakukan. Dari sumber-

Tabel 2. *Frame* Berita Israel Masuki “Jantung” Gaza

<i>Define Problems</i>	Keadaan perang serta kronologisnya
<i>Diagnoses Causes</i>	Israel
<i>Make Moral Judgement</i>	Titik berat penilaian moral jatuh kepada Israel namun sebenarnya kedua pihak mempunyai peran terhadap konflik ini
<i>Treatment Recommendation</i>	Diplomasi dari negara-negara untuk menghentikan agresi militer Israel ke Palestina

Sumber: data diolah, 2009

sumber berita yang diambil kebanyakan datang dari pihak Israel yang menyatakan strategi seperti apa yang akan mereka lakukan. Dengan kata lain, jika sumbernya datang dari Israel, maka Kompas menggambarkan sebagai pihak yang aktif menyerang, sementara jika sumbernya datang dari Hamas maka Kompas menggambarkan sebagai pihak yang pasif dan hanya bersifat membalas serangan.

Dalam pernyataan secara tertulis dari Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dijelaskan bahwa Israel akan mengambil alih lokasi yang digunakan untuk menembakkan mortir dan roket. Israel juga berencana menghancurkan infrastruktur Hamas...Serangan Israel dari darat di dukung kekuatan udara dan laut yang telah menghancurkan Gaza sejak pekan lalu. "siapa saja yang menyembunyikan teroris beserta senjata di dalam rumahnya akan kami anggap teroris," sebut pernyataan tertulis militer Israel (Kompas edisi 5 Januari 2009, hal. 1).

Sementara itu pada bagian lain berita ini pihak Hamas juga diberi kesempatan menjelaskan mengenai keadaannya, seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini:

Menanggapi serangan darat Israel, juru bicara di Hamas, Ismail Radwan, menegaskan Hamas dipastikan akan membalas serangan-serangan Israel. Militer Israel harus "membayar mahal" karena telah berani masuk ke Gaza. "Gaza akan menjadi kuburan kalian semua" ujarnya dengan keras (Kompas edisi 5 Januari 2009, hal. 15).

Make Moral Judgement. Penilaian moral pada berita ini lebih di jatuhkan kepada kedua belah pihak, yang saling balas-membalas serangan

tanpa memikirkan jumlah korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun, secara keseluruhan pihak Israel lebih membawa pengaruh besar dalam berita ini.

Treatment Recommendation. Saran penyelesaian masalah yang diberikan oleh Kompas yang dibingkai dalam berita ini adalah melakukan diplomasi dari negara-negara lain untuk menghentikan agresi militer Israel ke Palestina. Kutipan di bawah ini memperlihatkan saran penyelesaian yang dibingkai oleh Kompas.

... Presiden diminta melobi pemimpin negara-negara Arab dan Uni Eropa untuk bersama-sama mendesak menghentikan agresi Israel ke Palestina (Kompas edisi 5 Januari 2009, hal. 15).

(c.) Proses Mediasi dan Upaya Perdamaian. Pada bagian ini terlihat bahwa ada beberapa masalah yang ingin dibingkai oleh Kompas yang berusaha untuk memperjelas posisi dari masing-masing pihak yang sedang bertikai di mana pihak yang dirugikan adalah pihak Israel sementara yang diuntungkan adalah pihak Hamas atau Palestina. Di sini juga Hamas diposisikan sebagai pihak yang tidak terlalu mengambil peran dalam proses gencatan senjata. Sehingga terkesan bahwa Hamas tidak menginginkan gencatan senjata sementara Israel sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berita tanggal 11 Januari 2009 dengan judul *Diplomasi Gagal, Perang Berlanjut* sebagai berikut:

Define Problems. Mengetengahkan masalah tentang upaya perdamaian atau gencatan senjata yang diupayakan oleh pihak di luar Israel dan Palestina yang tidak berjalan dengan lancar, seperti yang terlihat pada kutipan berita di bawah ini:

Tabel 3. Frame Berita Diplomasi Gagal, Perang Berlanjut

<i>Define Problems</i>	Gencatan senjata dan pertahanan keamanan
<i>Diagnoses Causes</i>	Mesir dan Palestina
<i>Make Moral Judgement</i>	Mesir seharusnya menyetujui salah satu isi dari kesepakatan gencatan senjata dan tindakan Palestina hanyalah merupakan sikap bertahan untuk membalas
<i>Treatment Recommendation</i>	Kesepakatan dari pihak Mesir

Sumber: data diolah, 2009

Pada perundingan di Kairo, Mesir, Israel akhirnya tidak bisa menerima usulan gencatan senjata itu karena Mesir menolak kehadiran pasukan asing di perbatasan Rafah-Gaza. Padahal, Israel menginginkan kehadiran pasukan asing itu untuk benar-benar mengefektifkan pencegahan penyelundupan senjata melalui terowongan rahasia yang menghubungkan perbatasan Mesir dengan wilayah Jalur Gaza itu (Kompas edisi 11 Januari 2009, hal. 1).

Kemudian berita yang berjudul “Bendung Israel” adalah masalah yang diangkat adalah situasi terkini perang antara Israel dan Palestina. Pada sub judul ini banyak dibahas mengenai bagaimana serangan-serangan yang dilakukan kedua belah pihak, serangan-serangan balasan, strategi serangan serta pernyataan sikap dari kedua belah pihak mengenai keadaan ini.

Para pejuang Palestina juga dilaporkan masih mampu meluncurkan 10 roket, yang jatuh di kota Ashkelon. Salah satu roket menghujam ke sebuah bangunan apartemen di kota itu, mencederai dua orang dan menyebabkan kerusakan besar terhadap struktur bangunannya...Di sisi lain, helikopter tempur Israel masih pula menembakkan rudal ke sejumlah sasaran di distrik Tuffah, bagian timur laut Gaza City. Kepulan asap hitam masih menyelimuti langit Gaza City dan Rafah akibat gempuran Israel atas berbagai tempat strategis di dua kota tersebut (Kompas edisi 11 Januari 2009, hal. 15).

Selanjutnya, pada judul “Untungkan Hamas” mengambil masalah tentang pihak Hamas mendapatkan keuntungan dari gagalnya semua diplomasi untuk gencatan senjata yang sudah dilakukan berbagai pihak.

Diagnoses Causes. Pada bagian pertama yang mengambil masalah tentang gagalnya upaya perdamaian atau gencatan senjata, penyebab masalahnya dijabarkan kepada Mesir yang tidak menyetujui beberapa hal sehingga perundingan gencatan senjata gagal menemui jalan ke luar atau tidak mencapai gencatan senjata. Hal tersebut seperti yang terlihat pada kutipan di bawah ini:

Harian terkemuka Israel, *Haaretz*, mengungkapkan, perundingan antara juru runding Israel, Amos Gilad dan Kepala Intelijen Mesir Omar Sulaiman gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata yang lebih menguntungkan Israel. ...Menurut *Haaretz*, Mesir hanya berjanji akan meningkatkan kontrolnya di sepanjang perbatasan Jalur Gaza-Mesir dan akan berunding dengan Hamas soal aksi penyelundupan senjata itu. Namun Mesir menolak keras penempatan pasukan Internasional di sepanjang perbatasannya dengan jalur Gaza (Kompas edisi 11 Januari 2009: hal15).

Cara Kompas membingkai siapa yang menjadi penyebab masalah di sini memberi kesan bahwa Mesir lebih cenderung memihak pada Palestina dengan sikapnya yang menolak persetujuan penempatan pasukan internasional pada perbatasan daerahnya dengan Gaza yang secara tak langsung membiarkan penyelundupan senjata ke wilayah Palestina. Dengan adanya penyelundupan senjata tersebut maka akan semakin sulit tercipta gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

Selanjutnya, di bagian berita dengan sub judul “Bendung Israel”, penyebab masalahnya adalah Palestina. Terkesan bahwa pihak Palestina lebih agresif karena dalam berita ini banyak dipaparkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Palestina serta bagaimana mereka mengatasi serangan dari pihak Israel. Kutipan di bawah ini menggambarkan mengenai hal tersebut:

Pejuang Palestina juga masih terus terlibat baku tembak sengit di sekitar Beit Lahiya, arah utara Gaza City. Salah seorang pemimpin Hamas, Muhammad Nazal, mengklaim, para penembak jitu Hamas, hari Jumat lalu berhasil menembak empat tentara Israel di Beit Lahiya yang menambah korban tewas dari tentara Israel dari 8 menjadi 12 korban, sejak agresi dimulai pada 27 Desember lalu (Kompas edisi 11 Januari 2009, hal. 15).

Make Moral Judgement. Pada berita ini, secara tidak langsung Kompas membingkai Mesir sebagai pihak yang dijabarkan pilihan moral. Berbicara mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir sudah

Tabel 4. Frame Berita Diroket Hamas, Israel Geram

<i>Define Problems</i>	Situasi dan kondisi serta proses peperangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah antara Israel dan Palestina
<i>Diagnoses Causes</i>	Israel
<i>Make Moral Judgement</i>	Israel tidak sepatutnya melakukan hal tersebut, jika dilihat dari jumlah korban yang semakin bertambah.
<i>Treatment Recommendation</i>	Memaksa Israel untuk menghentikan serangan mereka melalui demo-demo

Sumber: data diolah, 2009

seharusnya bagi Mesir untuk dapat bersikap netral dan tidak menguntungkan salah satu pihak, namun pada kenyataannya Mesir seperti berpihak pada Palestina dengan tidak menyetujui salah satu syarat gencatan senjata yang sudah ditetapkan. Beberapa kutipan yang sudah disertakan di atas sudah cukup mewakili bagaimana penilaian moral yang dijatuhkan kepada Mesir.

Treatment Recommendation. Dari semua bagian dari berita ini, saran penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Kompas adalah dengan menyetujui kesepakatan isi dari gencatan senjata khususnya bagi Mesir yang dengan demikian, akan segera mewujudkan gencatan senjata yang sebenarnya.

Framing Harian Radar Sulteng

(a). Pemicu Konflik. Hampir sama dengan Kompas, sebagian besar permasalahan yang diangkat oleh Radar Sulteng menyangkut situasi perang antara Palestina dan Israel dengan beberapa variasi permasalahan yang lain. Kemudian untuk penyebab dari berita-berita tentang konflik ini, Radar Sulteng banyak membingkainya datang dari pihak Israel, dan Palestina dominan dijadikan sebagai korban. Namun, masih ada beberapa berita yang penyebab masalahnya adalah Palestina atau Hamas. Perbedaan yang paling signifikan antara Kompas dan Radar Sulteng pada pembingkaiannya penilaian moralnya.

Secara umum pula penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Radar Sulteng sama dengan yang ditawarkan oleh Kompas yaitu gencatan senjata yang mengarah pada perwujudan perdamaian antara kedua belah pihak. Dari sini kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa, sikap

harian Radar Sulteng terhadap konflik ini bisa terlihat dari pembingkaiannya berita-beritanya yang cenderung berpihak kepada Palestina dan membingkai pihak Israel sebagai penyebab dari konflik yang terjadi.

Penjelasan tersebut di atas bisa dilihat pada hasil analisis masalah pada contoh berita tanggal 3 Januari 2009 yang berjudul *Diroket Hamas, Israel Geram* di bawah ini:

Define Problems. Dalam berita ini, yang menjadi pokok permasalahan yang dikonstruksi oleh harian Radar Sulteng adalah mengenai situasi perang dan kondisi yang ada di wilayah Timur Tengah yang disertai dengan penggambaran kronologi perangnya seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini:

Pada hari ke enam kemarin, target Israel masih dipusatkan ke rumah-rumah para pemimpin Hamas. Jumat malam, serangan jet tempur F 16 meluluhlantakkan petinggi Hamas Nizar Rayyan. Selain menewaskan Rayyan, bombardier itu juga membunuh 10 di antara 12 anaknya ... Bukan hanya mengancam, Hamas juga terus membalas serangan Israel dengan melontarkan roket ke wilayah Negara Yahudi itu. Sampai kemarin sudah lebih dari 360 roket dilepaskan dengan jarak terjauh mencapai Beersheba, kota yang berjarak 25km dari Tel Aviv, ibu kota Israel. Serangan terbaru Hamas menggunakan roket Fajr-3 buatan Iran yang menghantam instalasi nuklir Israel di Dimona, 20 km sebelum Beersheba harian Radar Sulteng edisi 3 Januari 2009, hal. 1).

Diagnoses Causes. Dalam berita ini, penyebab masalah adalah Israel. Pembingkaiannya oleh Radar Sulteng tersebut seperti yang terlihat pada kutipan berita berikut ini "Jumat kemarin (2/

1) seperti menjadi ‘hari kemarahan’ dunia terhadap agresi militer Israel ke Jalur Gaza”. Dari kutipan tersebut, bisa dilihat pemerintahan dunia merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Israel sehingga permasalahan tersebut bisa muncul.

Make Moral Judgement. Pembungkahan Radar Sulteng terhadap penentuan nilai moral yang ada dalam berita ini terlihat pada kutipan berikut “Di Jalur Gaza, bombardir Israel tidak berkurang meski jumlah korban tewas telah mencapai korban tewas telah mencapai 422 orang dan melukai hampir 2.500 orang”. Dari kutipan tersebut nilai moral yang ingin ditekankan oleh Radar Sulteng adalah bahwa Israel tidak sepatutnya melakukan hal tersebut, jika dilihat dari jumlah korban yang semakin bertambah. Salah satu tekanan yang mesti diperhatikan mengapa hal ini tidak pantas dilakukan oleh Israel adalah dengan melihat penggunaan kata ‘meski’ yang ada dalam kutipan di atas. Kata ‘meski’ berarti berusaha untuk membandingkan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Kata ‘meski’ digunakan ketika ada dua hal yang saling bertentangan sedang terjadi dan pertentangan tersebut adalah mengenai hal yang sifatnya berkebalikan.

Penekanan nilai moral mengapa Israel tidak harus melakukan serangan juga bisa dilihat pada penggunaan istilah, yang ditampilkan pada awal berita, yaitu istilah “hari kemarahan”. Selain istilah ini bisa menjawab mengapa Israel dijadikan sebagai penyebab permasalahan yang ada dalam berita ini, namun juga bisa dijadikan sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang telah dilakukan Israel selama ini.

Treatment Recommendation. Saran penyelesaian masalah yang dilakukan oleh harian Radar Sulteng adalah dengan menghentikan kekerasan dan penyerangan yang telah mereka lakukan. Hal ini bisa dilihat pada sebagian isi berita yang menggambarkan bagaimana reaksi dunia terhadap serangan Israel tersebut. Berikut merupakan kutipan yang akan memperjelas pembungkahan tersebut.

Mulai di Sydney, Australia sampai London, Inggris, puluhan sampai ribuan orang menunjukkan solidaritas mereka kepada warga Palestina dengan mengecam serangan brutal Israel yang sudah berlangsung hampir sepekan itu (harian Radar Sulteng edisi 3 Januari 2009, hal. 1)

(b). Situasi Konflik. *Define Problems.* Pada berita ini permasalahan mengenai isi berita juga menyangkut tentang kronologis kejadian konflik antara Israel dan Palestina, hampir sama dengan yang menjadi permasalahan pada berita yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam berita tanggal 5 Januari 2009 yang berjudul *Kota Gaza Terkepung* maka kronologis kejadian tersebut bisa dilihat dari kutipan berikut ini:

Barisan tank Israel bergerak maju memecah diri menjadi dua. Sebagian menyerbu kota-kota di sekitar kota Gaza dan kota-kota di utara, Beit Lahiya dan Jabaliya. Sebagian lagi menuju kota-kota di selaran seperti Rafah, yang berbatasan dengan Mesir. ... Sumber di Militer Israel menyebutkan, angkatan darat Israel sebetulnya menyerbu Gaza dari tiga arah, yakni wilayah Gaza Utara, Tengah dan

Tabel 5. *Frame* Berita Kota Gaza Terkepung

<i>Define Problems</i>	kronologis kejadian konflik antara Israel dan Palestina
<i>Diagnoses Causes</i>	Hamas
<i>Make Moral Judgement</i>	Apa yang sudah dilakukan oleh Palestina merupakan usaha untuk mempertahankan diri serta upaya pembalasan atas apa yang sudah Israel lakukan sebelumnya
<i>Treatment Recommendation</i>	Menghentikan serangan

Sumber: data diolah, 2009

**Tabel 6. Frame Berita Konflik Gaza:
Israel Semakin Ngawur, Obama Masih Membisu**

<i>Define Problems</i>	Kebijakan presiden baru Amerika Serikat Barack Obama tentang konflik Israel-Palestina
<i>Diagnoses Causes</i>	Barack Obama, karena tidak segera mengambil tindakan terhadap konflik Israel-Palestina
<i>Make Moral Judgement</i>	Barack Obama tidak seharusnya bersikap pasif terhadap konflik Israel-Palestina
<i>Treatment Recommendation</i>	Barack Obama harus segera menyatakan sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina

Sumber: data diolah, 2009

Selatan. Taktik itu untuk mengisolasi kota Gaza, yang menjadi benteng terakhir pejuang Hamas. Penguasaan wilayah utara bertujuan menghentikan tembakan roket ke wilayah Israel. Sedangkan pasukan infanteri Israel di Gaza Tengah dan Selatan bertugas untuk memutus suplai senjata dan logistik ke pejuang Hamas, di kota Gaza yang biasanya datang dari Mesir dan Jordania (harian Radar Sulteng edisi 5 Januari 2009, hal. 1).

Diagnoses Causes. Penyebab masalahnya datang dari pihak Hamas, sebab dalam isi berita yang bersangkutan Radar Sulteng banyak menceritakan tentang Hamas yang terus menyerang pihak Israel hingga menyebabkan jatuhnya korban dari pihak Israel. Pembungkahan terhadap siapa yang menjadi penyebab permasalahan bisa dilihat dari kutipan beritanya berikut ini:

Janji Hamas untuk menciptakan neraka bagi pasukan Israel yang masuk ke wilayahnya di Jalur Gaza menjadi kenyataan. Ribuan pasukan infanteri didukung ratusan tank, artileri, helikopter dan pesawat tempur melintasi perbatasan pada malam hari Sabbath (hari suci bangsa Yahudi). Para aggressor itu langsung disambut tembakan meriam dan lontaran roket dari pejuang-pejuang Hamas (harian Radar Sulteng edisi 5 Januari 2009, hal. 1).

Make Moral Judgement. Meski pada berita ini yang menjadi penyebabnya adalah pihak Hamas, namun hal tersebut merupakan sebuah keharusan yang dianggap oleh pihak Hamas mesti dilakukan, mengingat serangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Israel. Dengan kata lain, hal

tersebut merupakan usaha untuk mempertahankan diri serta upaya pembalasan atas apa yang sudah Israel lakukan sebelumnya. Penilaian moral lainnya dijumpai kepada Israel, yang dibingkai oleh Radar Sulteng sebagai pihak yang tidak memikirkan korban-korban yang jatuh akibat serangan mereka. Hal ini bisa dilihat dari kutipan berikut ini “kepanikan warga dalam menyelamatkan nyawa itu seperti tidak dihiraukan Israel”.

Treatment Recommendation. Penyelesaian masalah yang disarankan oleh harian Radar Sulteng adalah sama seperti berita sebelumnya, yaitu dengan menghentikan serangan. Dalam berita ini dipaparkan bahwa solusi tersebut sudah dibicarakan namun sulit untuk direalisasikan.

Duta Besar Perancis untuk PBB Jean Maurice Ripert yang memimpin dewan dalam bulan ini, menyatakan bahwa DK PBB tidak dapat mencapai kesepakatan untuk segera menghentikan peperangan di Jalur Gaza. “tidak ada kesepakatan formal antara Negara anggota, tapi perhatian kami dengan eskalasi korban dan memburuknya situasi serta meluasnya pertempuran segera kami tindak lanjut,” ujar Ripert dalam jumpa pers di markas PBB di New York.

(c). Proses Mediasi dan Upaya Perdamaian. *Define problems.* Dalam berita tanggal 1 Januari 2009 (*Konflik Gaza: Israel Semakin Ngawur, Obama Masih Membisu*) ini Harian Radar Sulteng mengidentifikasi masalah yang ada yaitu permasalahan mengenai kebijakan presiden baru Amerika Serikat Barack Obama tentang konflik Israel-Palestina. Pada saat terpilih

menjadi presiden AS yang baru, Barack Obama menyatakan akan mengambil sikap yang tegas terhadap konflik Israel-Palestina. Beberapa peristiwa penyerangan terhadap Palestina seperti saat Israel membombardir Gaza yang menewaskan lebih dari 380 warga Palestina, presiden AS Barack Obama belum memberikan sikapnya atau tindakan yang seharusnya dia lakukan. Hal ini terlihat dari kutipan berita berikut ini:

Di mana Barack Hussein Obama saat Israel membombardir Gaza sehingga menewaskan lebih dari 380 warga Palestina? Sampai hari kelima serangan kemarin (31/12), presiden terpilih AS itu sama sekali belum bersuara. Ini sangat aneh. Padahal bulan lalu, ketika sebelas teroris muda menyerang Mumbai, dia langsung mengeluarkan pendapatnya bersama seluruh tim transisi (Harian Radar Sulteng edisi 1 Januari 2009, Hal. 1).

Kebijakan presiden Barack Obama mengenai konflik Israel-Palestina, diharapkan oleh negara-negara Arab akan berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden-presiden AS terdahulu. Keputusan kebijakan diharapkan yang kebanyakan tidak berpihak kepada Palestina secara khusus, dan dunia Arab pada umumnya. Hal tersebut seperti yang dikutip dari cuplikan berita berikut ini:

Awalnya, dunia Arab sedikit gembira atas terpilihnya Obama November lalu. Mereka percaya, kebijakan Obama akan berbeda dengan kebijakan Bush yang segera lengser (harian Radar Sulteng edisi 1 Januari 2009, Hal. 6).

Diagnoses causes. Dalam keseluruhan berita ini, Barack Obama diposisikan sebagai pelaku (aktor) penyebab masalah. Dari permasalahan yang ada yaitu mengenai kebijakan Obama yang seharusnya mengambil tindakan yang tegas atau setidaknya memberikan sejumlah *statement* atau pernyataan yang bisa membungkam atau menghentikan serangan Israel kepada Palestina, khususnya mengenai serangan Israel. Dalam berita ini pula, secara tersirat ditunjukkan bahwa jika saja, Obama langsung memberikan pernyataan seperti yang dia lakukan terhadap peristiwa penyerangan oleh teroris di Mumbai beberapa saat sebelumnya, maka sedikit perubahan

positif mengenai konflik Israel-Palestina bisa tercapai. Namun yang terjadi malah sebaliknya, banyak hal yang mengindikasikan bahwa Obama belum bisa bersikap bijak mengenai permasalahan konflik di Timur Tengah ini. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan berita berikut ini:

... diamnya Obama memang diharapkan oleh Israel. "jika dia terus menerus diam, maka bungkamnya itu akan dilihat dunia internasional dan memiliki dampak operasional berupa dukungan terhadap perang Israel di Gaza," (Radar Sulteng Edisi 1 Januari 2009, Hal. 6)...Tapi, sinyal pertama tidak menunjukkan Obama ingin mengubah keadaan itu. "jika Obama ingin menegaskan pendiriannya, pasti dia sudah mengatakan sesuatu karena dia bisa berbicara apa saja asal dia menginginkannya," lanjut Walih (Radar Sulteng edisi 1 Januari 2006, hal. 6).

Make Moral Judgement. Penilaian atas Obama sebagai sumber masalah ini datang dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Obama yang dinilai kurang mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah. Penilaian moral yang dikenakan kepada Obama menekankan bahwa tindakan tersebut tidak pantas dia lakukan jika mengingat indikasi-indikasi yang menandakan bahwa Obama nantinya akan memberikan solusi terbaik bagi perdamaian di Timur Tengah. Khususnya kebijakan menyangkut masalah konflik Israel-Palestina yang berlangsung selama kurang lebih enam dekade belakangan.

Berikut kutipan dari berita tersebut yang memberikan indikasi bahwa kebijakan Obama tidak akan jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya:

Keputusan Obama untuk membentuk tim kebijakan luar negerinya, khususnya Hillary Clinton sebagai menteri luar negeri dan Rahm Emmanuel sebagai kepala staf Gedung Putih, memperkuat estimasi bahwa kebijakan luar negeri AS di kawasan itu tak akan berubah...Mustafa Al Sayed dari Universitas Kairo berkata, "Saya sangat pesimistis karena begitu melihat orang-orang yang mengitari presiden terpilih Obama, saya langsung tahu mereka adalah sahabat-sahabat Israel yang tidak akan berani berseberangan dengan

posisi pemerintah Israel.”... “menurut saya, para sahabat Israel (dalam pemerintahan Obama) akhirnya berhasil dan itu akan membuat pengaruh AS di kawasan Timur Tengah semakin anjlok,” papar Sayed. (Harian Radar Sulteng Edisi 1 Januari 2009, Hal. 6).

Treatment recommendation. Dari semua pemaparan penyebab dan peran dari Obama dalam berita ini, dapat dilihat bahwa jenis penyelesaian masalah yang ingin disarankan oleh harian Radar Sulteng adalah, Barack Obama mesti mengambil tindakan yang tegas dan tidak sepihak dalam menyikapi konflik Israel-Palestina ini. Kebijakan presiden mesti segera diambil oleh Obama jika ingin konflik Israel-Palestina ini tidak terus berlanjut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas maka ada beberapa faktor yang terlihat berbeda dalam memberitakan masalah konflik yang terjadi antara Israel – Palestina di Harian Kompas dan Radar Sulteng yakni *pertama*, cara menyajikan pemberitaan konflik yang terjadi antara Israel – Palestina seperti *hardnews*, opini dan *feature*. Kompas cenderung tidak memberikan pernyataan yang meringankan posisi Palestina, begitu pun sebaliknya. *Kedua*, secara garis besar penyebab masalah yang dibingkai oleh harian Kompas lebih dominan ke pihak Palestina, sementara harian Radar Sulteng lebih dominan menjadikan Israel sebagai penyebab masalahnya.

Ketiga, perbedaan yang signifikan dari pembingkai kedua media ini adalah pada penilaian sikap-sikap moral yang dijatuhkan kepada pihak Israel atau Palestina. Kompas cenderung memberikan dalih moral bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah sesuatu yang memang terpaksa dilakukan karena pihak Palestina yang memulai konflik. Sebaliknya, Radar Sulteng memfokuskan pada kesalahan-kesalahan Israel yang dianggap sebagai penyebab awal dari semua masalah ini dan menjadikan Palestina sebagai korbannya, sehingga posisi Israel selalu dijelek-jelekkan

Keempat, adalah faktor *locality*. Artinya, Harian Kompas melihat peristiwa ini dalam perspektif yang lebih luas yakni skala nasional, sedangkan Radar Sulteng melihatnya dalam perspektif yang lebih sempit yakni skala lokal.

Akan tetapi, terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua harian ini juga memberikan solusi yang mutlak dilakukan yaitu perdamaian. Dengan kata lain, kedua belah pihak mesti melakukan gencatan senjata atau perjanjian-perjanjian perang yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak serta bisa meringankan penderitaan para korban perang.

Ucapan Terima kasih

Kami ucapkan terima kasih pada Dikti atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini serta pihak media Radar Sulteng. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Jimmy Nurdiansa yang bersedia membantu terlaksananya proses penelitian ini serta beberapa teman-teman staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan (ed), 2004, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W., 1994, *Research Design: Qualitative & Quantitative*, USA: Sage Publications.
- Eriyanto, 2007, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS.
- Kriyantono, Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda.
- Novianti, Dewi, Wacana Media dalam Kasus Bom Bali: Pertarungan Wacana Harian Republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 Januari – April, 2006.

- Sasangka, Danarka, Framing The Coca-colanization: Subvertisement of Solidarity Movement for Palestinian as The Challenging Discourse, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 Januari – April, 2006.
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard Jr., 2005, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*, Jakarta: Kencana.
- Sobur, Alex, 2006, *Analisis Teks Media*, Bandung: Rosda.
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Lkis.
- Surat Kabar**
- Radar Sulteng edisi 1 Januari 2006, halaman 1, 6.
- Kompas edisi 22 Desember 2008, halaman 10.
- Kompas edisi 11 Januari 2009, halaman 15.
- Kompas edisi 23 Januari 2009

Bingkai Berita Kasus Dugaan Korupsi Aliran Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada *detik.com* dan *Tempo Interaktif*

Dewi Novianti

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No. 2
Telp. 08157904082, email : dewinovianti_upn@yahoo.co.id

Abstract

The corruption case that was interested to analyze was the suspected corruption of the flow of Indonesian Liquidity Fund. This case involved two obligors: Anthony salim and Sjamsul Nursalim. The anti climax of the case was the release of the two suspects as the court was unable to prove the act of corruption and all debts of the suspects to the government were considered settled. Research method used was framing analysis. This research investigates how two online news media (detik.com and tempo interaktif) construct the presented news in relation to the issue above. The framing of the two online news media in relation to the corruption case tended to be negative. This can be seen from the elements of syntaxes, thematic, detail, meaning, sentence structure, rhetoric, lexicon, metaphor. The negative tendency was also found in the news titles that the online news media adopted, such as Former officials were questioned, BLBI case shows no progress, No further additional time for BLBI investigation, Attorney general stops BLBI investigation. Nonetheless, both online news media presented fair news coverage indicated through the usage of news sources. Both online news media tended to question the result of Supreme Court that declared both suspects were proved not guilty of act of corruption. Both media adopted straight news and tended to deligitimise the existing power

Abstrak

Kasus korupsi menarik untuk diteliti adalah adanya dugaan korupsi pada aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini melibatkan dua obligor sebagai tersangka yakni Anthony salim dan Sjamsul Nursalim. Sebagai antiklimaks dari kasus ini, kedua tersangka akhirnya dibebaskan dengan alasan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan utang kedua tersangka kepada pemerintah dianggap sudah lunas. Metode dalam penelitian ini adalah analisis framing yaitu menganalisis bagaimana dua media online yakni detikcom dan Tempo interaktif mengkonstruksikan pesan melalui berita yang disajikan terkait kasus di atas. Bingkai (*Frame*) yang dikonstruksi oleh kedua media cenderung negatif. Hal ini bisa dilihat dari elemen sintaksis, tematik, detil, maksud, bentuk kalimat, retorik/stilistik, leksikon, metafora. Judul-judul yang diambil oleh kedua media ini juga bersifat lugas seperti; Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan; Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI; Kejaksaan Hentikan Penyelidikan BLBI, dan sebagainya. Kedua media tersebut berusaha memaparkan secara *fair coverage* dari narasumber yang disajikan namun cenderung menyudutkan hasil keputusan Kejaksaan Pusat bahwa kedua tersangka dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti melakukan korupsi. Kedua media ini cenderung mendelegitimasi kekuasaan.

Kata Kunci : Korupsi, bantuan likuiditas bank Indonesia, analisi framing, ideologi

Pendahuluan

Era keterbukaan membuat berbagai media berlomba untuk menyampaikan informasi terkini akurat dan terpercaya. Salah satunya adalah media internet yang dapat melayani khalayak dengan interaktifitas tinggi. Media internet ini mulai digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan informasi khalayak.

Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Internet mengubah komunikasi dengan beberapa cara yang mendasar. Media massa tradisional pada dasarnya menawarkan model komunikasi “satu-untuk-banyak”. Sedangkan internet memberikan model-model tambahan: “banyak-untuk-satu” (*e-mail* ke satu alamat sentral, banyaknya pengguna yang berinteraksi dengan satu *website*) dan “banyak untuk banyak” (*e-mail*, *milis*, kelompok-kelompok baru). Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya (Severin&Tankard, 2007:444-445).

Adanya keterbukaan pada era reformasi, membuat berbagai informasi aktual yang pada era Orde Baru sering dianggap terlarang mulai bermunculan. Salah satu fakta yang banyak terungkap di media massa era reformasi adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai lini kehidupan bangsa ini. Sedemikian kompleks dan banyaknya permasalahan korupsi di Indonesia menjadikan pemerintah membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK didasari atas pertimbangan aparat penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, Kejaksaan dan hakim belum maksimal dalam melakukan usaha pemberantasan korupsi.

Salah satu kasus yang menarik yang ditangani oleh KPK adalah dugaan korupsi aliran dana Bank Indonesia. Aliran dana Bank Indonesia Rp100 miliar berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Laporan dengan nomor 115/S/I-IV/11/2006 itu dikirim ke KPK pada 14 November 2006. Dalam laporan

itu disebutkan, melalui rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 diputuskan meminta Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) menyediakan dana sebesar Rp100 miliar untuk dua keperluan.

Pertama, pencairan dana Rp68,5 miliar untuk membantu proses hukum kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan lima mantan dewan gubernur dan mantan direksi BI, juga melalui sejumlah cek berdasarkan keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 22 Juli 2003. Dana bantuan hukum itu diberikan kepada Soedrajat Djiwandono (mantan Gubernur BI), Iwan R Prawiranata (mantan Deputy Gubernur BI), Heru Soepratomo (mantan Deputy Gubernur BI), Hendrobudiyanto (mantan direksi BI), dan Paul Sutopo (mantan direksi BI). Mereka terjerat hukum dalam kasus BLBI, kredit ekspor, dan kasus lainnya sehubungan dengan penanganan krisis ekonomi 1997-1998.

Kedua, Rp 31,5 miliar diserahkan kepada Komisi IX DPR periode 1999-2004 untuk pembahasan dan diseminasi sejumlah UU tentang BI. Hasil audit menyebutkan dana untuk Komisi IX DPR periode 1999-2004 dicairkan melalui tujuh cek.

Dana yang mengalir ke Senayan (anggota DPR) itu berasal dari YPPI. Pencairannya melalui tujuh cek yang dikeluarkan bertahap mulai 30 Juni hingga delapan Desember 2003. Pencairan melalui tim sosialisasi yang terdiri atas tiga pejabat BI, yakni Oey Hoey Tiong yang saat itu menjabat Deputy Direktur Direktorat Hukum, Rusli Simanjuntak (kepala biro gubernur), dan Asnar Ashari. Setelah tujuh cek senilai Rp31,5 miliar itu dicairkan, langsung diserahkan ke DPR. Pencairan tersebut merupakan realisasi hasil keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada tiga Juni 2003.

Setelah setahun menerima surat temuan-an BPK tersebut, KPK baru mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) pada September 2007. Diikuti pemeriksaan sejumlah pejabat dan mantan pejabat BI yang diduga mengetahui aliran dana tersebut.

Hasil audit BPK itu menunjukkan secara nyata bahwa telah terjadi gratifikasi dalam kasus aliran dana BI. Sudah ditemukan pihak pemberi dan tujuan atau motivasi pemberian itu kepada para

anggota DPR yang sedang melakukan revisi UU BI. (<http://www.media Indonesia.com>).

Kasus aliran dana BI ini sebenarnya merupakan buntut dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menyisakan misteri: siapa yang bertanggung jawab? Para pengemplantang dana BLBI masih berkeliaran di luar negeri dan terus menikmati uang negara triliunan rupiah. Penggunaan dana YPPI atas rekomendasi rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni 2003 dimaksudkan untuk penyelesaian masalah BLBI dan pembahasan amendemen UU No 23 Tahun 1999 tentang BI. Saat itu, masih terjadi perdebatan siapa yang bertanggung jawab terhadap dana BLBI, apakah pemerintah atau BI. Dengan demikian, DPR merasa perlu membentuk tim khusus untuk mempelajari kasus ini. Pembentukan tim dimaksudkan untuk mencari titik terang kasus BLBI. Selama ini kasus BLBI menjadi beban BI sehingga laporan keuangan BI dinyatakan *disclaimer*.

Kasus BLBI boleh dibilang bukan hanya merugikan negara triliunan rupiah, namun telah memakan korban paling tidak tiga Gubernur BI. Penanganan yang tak kunjung selesai menimbulkan pesimisme berbagai pihak bahwa skandal ini bisa terungkap.

Tim jaksa BLBI diberi kesempatan bekerja selama tiga bulan. Ternyata waktu yang diberikan belum cukup untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya diperpanjang dua bulan hingga Desember 2007. Waktu tambahan ini pun ternyata tak mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Bahkan Kejaksaan pada awal tahun ini sempat meminta perpanjangan penyelidikan selama dua bulan hingga Februari 2008. Penyelidikan kasus ini memakan waktu lama mengingat bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak. Bahkan sebagian bukti sudah hangus. Kasus BLBI berawal pada 1 November 1997. Saat itu (*International Monetary Fund*) IMF menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menutup 16 bank tanpa persiapan yang memadai, akibat krisis moneter yang terjadi di beberapa kawasan. Tak pelak, masyarakat berbondong-bondong ke bank (*rush*) untuk menarik tabungan mereka, kemudian menyimpannya di rumah masing-masing atau di bank-bank asing di dalam maupun di luar negeri. Akibat

penarikan dana masyarakat pada bank-bank di Indonesia tersebut, terjadi *capital outflow* ke luar Indonesia lebih dari USD 8 miliar.

Ada tiga tahapan yang berpotensi merugikan keuangan negara dari kasus ini, mulai dari tahap penyaluran, penyerahan aset, hingga tahap penjualan aset. Oleh karena itu, Pejabat pemerintah dan pejabat BI yang memutuskan penutupan 16 bank itu harus diperiksa. Awalnya, skema BLBI diberikan kepada 48 bank pada Desember 1998. Namun, berdasarkan audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun (<http://www.okezone.com>).

Menilik kasus tersebut peran media massa sangat berpengaruh dalam pemberitaan dan pembentukan opini khalayak. Seperti yang dikemukakan oleh Dennis McQuail (1987, 51-53) media telah menjadi sumber yang dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dari citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.

Selain kemampuan media untuk menyihir pembaca, pendengar dan penontonnya seperti disebutkan di atas awak media menurut Gamson dan Modigliani (Novianti, 2006:41) juga dapat menerapkan standar kebenaran, matrik objektivitas, serta batasan-batasan etika tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Awak media juga dapat membatasi atau menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberi porsi pemberitaan yang berbeda antara satu sumber berita dengan sumber berita yang lainnya, serta mengemas suatu wacana berita dengan perspektif, gaya bahasa, retorika, dan *commonsense* yang mereka kehendaki. Mereka juga lazim menguraikan gagasannya, menggunakan gaya bahasanya sendiri, serta mendistribusikan retorika-retorika untuk meneguhkan keberpihakan atau kecenderungan tertentu. Semuanya itu tidak terlepas dari ideologi media. Ideologi merupakan prinsip untuk mendasari tingkah laku seseorang atau suatu bangsa dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan ideologi adalah keseluruhan motivasi dalam bertindak, sebab ideologi menentukan tingkah laku kehidupan sosial, ekonomi dan politik (Novianti, 2006:43).

Berita kasus dugaan korupsi BI periode Juli 2007 sampai dengan Februari 2008 salah satu contoh atau cara situs internet *detik.com* dan Tempo interaktif dalam menerapkan ideologi yang mereka anut melalui pemberitaan-pemberitaannya. Setiap berita yang dimuat oleh media massa merupakan sebuah konstruksi realitas yang dikemas sesuai dengan kebijakan media tersebut. Bagaimana sebuah media mengambil sikap atas terjadinya sebuah kasus dan mengemasnya dalam sebuah berita sehingga dapat diketahui kecenderungan media tersebut.

Ideologi media khususnya *detik.com* dan Tempo interaktif sulit dihilangkan dalam berita-berita yang dimuat. Konsep ideologi menurut pendekatan konstruksionisme dapat membantu menjelaskan bagaimana bisa wartawan membuat liputan berita memihak satu pandangan, menempatkan satu pandangan lebih menonjol dibandingkan pandangan kelompok lain dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua peran yang dimainkan media. Pertama, media adalah sumber dari kekuasaan hegemonik, di mana kesadaran khalayak dikuasai. Kedua, media juga dapat menjadi sumber legitimasi, di mana lewat media mereka yang berkuasa dapat memanfaatkan untuk kepentingannya. Hal ini terkait dengan Teori Hegemoni yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Teori ini berisi tentang pengendalian masyarakat oleh elit atau kelas yang mementingkan diri sendiri. Kelas Penguasa kurang dapat memberikan penjelasan yang baik (pada kelas yang terhegemoni) dalam mencapai keuntungan dengan menggunakan kekuatan media (McQuail, 1987:188).

Dominasi media massa dalam kehidupan masyarakat tidak saja dalam bentuk perangkat keras semata, melainkan juga dalam bentuk penyajian isi. Isi yang disajikan oleh media sering dibentuk sedemikian rupa, sehingga bisa menimbulkan rasa percaya khalayak yang mengkonsumsi berita tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Adoni dan Mane (1984:324) dalam artikelnya yang berjudul *Media and The Constructing Of Reality*, salah satu realitas sosial yang dibangun adalah realitas sosial simbolik (*symbolic reality*) yakni bentuk-bentuk simbolik dari realitas sosial objektif yang biasanya diketahui

khalayak dalam bentuk karya seni, fiksi serta isi media.

Penelitian ini berangkat dari adanya pertanyaan mendasar seputar terjadinya kasus dugaan korupsi aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana *detik.com* dan Tempo interaktif membingkai kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI sebagai suatu *symbolic reality* dalam pemberitaan mereka.

Metode Penelitian

Metode yang dipilih ketika meneliti topik apapun akan tergantung pada pertanyaan yang dicoba untuk dijawab dalam penelitian tersebut. Ketika yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah tentang isi berita, tipe penelitian yang signifikan untuk menjelaskannya adalah tipe penelitian kualitatif (Tuchman dalam Jensen & Jankowski, 1991:80).

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi dengan konteks *framing*. Tidak Seperti analisis isi konvensional yang secara tipikal difokuskan pada muatan isi teks berita yang manifes, analisis *framing* lebih difokuskan pada komentar-komentar interpretatif disekitar isi manifes tersebut (Mc Cauley & frederick, 1996:2).

Objek analisis dalam penelitian ini adalah teks berita pada *detik.com* dan Tempo interaktif seputar kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI. Digunakannya teks berita sebagai analisis karena data teks merupakan cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Media yang menjadi obyek penelitian adalah *detik.com* dan Tempo Interaktif.

Judul-judul berita yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut : Berita *detik.com*: (1). Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan, (2). Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI, (3). Kemas: 7 Bulan Kejagung Siang Malam Selidiki BLBI. Berita Tempo Interaktif: (1). Bambang Subianto Kembali Diperiksa, (2). Badan Kehormatan Segera Panggil Anggota Dewan yang Terkait Aliran Dana BI, (3). Kejaksaan Hentikan Penyelidikan BLBI.

Periode waktu yang dipilih dalam penelitian ini adalah dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Februari 2008. Rentang waktu ini diambil berdasarkan alasan bahwa Kejaksaan sudah mulai menyelidiki kasus ini sejak 23 Juli 2007. Tim jaksa BLBI diberi kesempatan bekerja selama tiga bulan. Ternyata waktu yang diberikan belum cukup untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya diperpanjang dua bulan hingga Desember 2007. Waktu tambahan ini pun ternyata tak mampu menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Bahkan Kejaksaan pada awal tahun 2008 sempat meminta perpanjangan penyelidikan selama dua bulan hingga Februari 2008. Penyelidikan kasus ini memakan waktu lama mengingat bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan perangkat *framing* yang dikembangkan dari model Pan Zhongdan dan Gerald M Kosicki. Model *framing* milik Pan dan Kosicki berusaha menggabungkan dimensi sosiologis dan psikologis dimana *framing* kemudian menjadi sebuah pusat organisasi ide wartawan untuk menyajikan berita kepada khalayak. Pan dan Kosicki juga memiliki pandangan tentang berbagai cara wartawan untuk melakukan penonjolan terhadap suatu peristiwa. Cara atau perangkat tersebut dapat menjadi cara analisis data berkaitan dengan penelitian tentang cara media mengemas berita.

Teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumentasi untuk mendapatkan data dan materi penelitian yang berkaitan dengan sajian berita tentang kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Data yang telah terkumpul kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang telah ditentukan. Kategorisasi data berdasarkan pada perangkat *framing* yang telah dikembangkan oleh Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Model yang dikembangkan oleh Pan dan Kosicki berasumsi bahwa setiap berita memiliki *frame* yang merupakan representasi dari ideologi wartawan dan media. Model *framing* milik Pan dan Kosicki sampai saat ini dianggap sebagai model yang cukup lengkap dan banyak digunakan dalam penelitian analisis *framing*.

Perangkat *framing* dibagi menjadi empat struktur besar, yakni: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat perangkat tersebut dapat dijabarkan pada tabel 1.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dua media *online* yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *detik.com* dan Tempo Interaktif, membongkar kasus dugaan penyelewengan aliran dana BLBI secara sama. Temuan teks perangkat *framing* menunjukkan kedua media *online* membongkar secara negatif kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI. Keduanya mengkonstruksikan pesan melalui berita

Tabel 1: Struktur Perangkat *Framing*

STRUKTUR	PERANGKAT <i>FRAMING</i>	UNIT YANG DIAMATI
SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup.
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W + 1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	Detail Maksud Nominalisasi Koherensi Bentuk kalimat Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	Leksikon Grafis Metafora Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber : Nugroho, Eriyanto, *Surdiasis, ISAI, 1999, Jakarta, h. 30-31*

yang diangkat lebih memperkuat dugaan adanya korupsi dan penyelewengan dana BLBI. Ini bisa dilihat dari perangkat *framing* detil dan maksud. Detil memaparkan keseriusan KPK dalam menangani kasus BLBI ini dengan menemukan sejumlah bukti kuat yang dapat menyeret para tersangka kasus BLBI. Berkas temuan ini diserahkan ke Badan Kehormatan DPR disebabkan ada anggota dewan yang diduga terlibat aliran dana dari Bank Indonesia Rp 31,5 miliar.

Sedangkan elemen maksud dari berita dengan judul *Badan Kehormatan Segera Panggil Anggota Dewan yang Terkait Aliran Dana BI* adalah semakin terangnya jalan untuk menuju terselesaikannya kasus aliran dana BI. Besar harapan rakyat, dana yang diduga disewewangkan akan kembali dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Harapan ini diwujudkan dari kinerja Tim KPK yang telah menemukan sejumlah bukti penting yang akan menguak kasus ini. Bukti inilah nantinya akan menyeret beberapa nama termasuk diantaranya anggota DPR yang diduga terkait kasus BLBI.

Kasus dugaan korupsi aliran dana BLBI menyisakan tanda tanya besar. Walaupun kasus ini pada akhirnya oleh Kejaksaan Agung ditutup karena dianggap tidak terbukti adanya korupsi pada kedua *obligor* baik Anthony Salim maupun Syamsul Nursalim. Keduanya dianggap cukup kooperatif dan telah memenuhi semua prosedur yang ada. Hasilnya, keduanya dianggap telah melunasi seluruh utang mereka kepada Pemerintah. Anthony Salim mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL), sementara Sjamsul Nursalim mendapat surat penyelesaian utang atau *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) atau perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI melalui penyerahan aset.

Fenomena ironi ini menelan dana triliunan rupiah yang seyogianya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kenyataan sebaliknya menyejahterakan sekelompok kecil orang. Akhir cerita tampak dipaksakan dua hari sebelum diumumkan kasus ini dinyatakan ditutup, yakni tanggal 27 Februari 2008, ada berita bahwa Badan Kehormatan DPR berjanji memanggil Hamka Yandhu, anggota DPR dari Partai Golkar, yang diduga terkait aliran dana dari Bank Indone-

sia Rp 31,5 miliar, awal Maret. Pemanggilan dilakukan setelah Badan Kehormatan menerima hasil pemeriksaan KPK. Dua hari kemudian tepatnya tanggal 29 Februari 2008 kasus ini dipetieskan.

Akhir dari drama pengadilan aliran dana BLBI adalah Utang kedua obligor Taipan Anthony Salim dan Sjamsul Nursalim dianggap lunas. Jumlah utang BLBI Anthony Salim sebesar Rp 29 triliun sudah lunas dengan cara penyerahan 92,8 persen saham Bank Central Asia (BCA) kepada pemerintah. Sedangkan utang perusahaan afiliasi BCA sebesar Rp 52,7 triliun belum lunas. Utang itu dibayar dengan cara menyerahkan saham 108 perusahaan Anthony kepada pemerintah. Namun belakangan, nilai aset perusahaan itu turun menjadi Rp 19 triliun. Akhirnya Anthony Salim mengantongi SKL

Sedangkan obligor Sjamsul Nursalim berutang Rp 47 triliun. Utang itu dibayar dengan menyerahkan aset Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Rp 18,85 triliun. Sisanya dibayar tunai Rp 1 triliun dan penyerahan aset Dipasena, Gajah Tunggal Tire dan Gajah Tunggal Petroseal

Walhasil, Sjamsul Nursalim mendapat surat penyelesaian utang atau MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*). Namun, saat pemerintah akan menjual aset tersebut, nilainya turun menjadi Rp 3,4 triliun.

Kronologis kasus aliran dana BLBI ini perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton tetapi juga bisa berfungsi sebagai kontrol. Oleh karena itu, pemberitaan di media massa haruslah mampu menyampaikan secara (*fair coverage*) adil berimbang. Namun demikian, dalam ranah riil mediapun tidak bisa betul-betul *fair coverage* dalam mengkonstruksi pesan. Berita yang disampaikan dibingkai (*frame*) sesuai dengan ideologi media itu sendiri. *Detik.com* dan *Tempo* interaktif misalnya, kedua media inipun ketika membingkai pesan tidak terlepas dari ideologi kedua media.

Detik.com dan *Tempo* Interaktif dalam menyampaikan berita terkesan lugas dan *to the point*. Ini disebabkan kedua media tersebut bersifat *online*. Media bersifat *online* ini memang disampaikan secara singkat dengan tujuan agar pa-

ra pembaca langsung dengan mudah menangkap intinya. Di samping itu khalayak sasaran mereka adalah orang-orang sibuk, mobilitas tinggi, kalangan menengah ke atas, dan terpelajar, sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk mengonsumsi berita. Khalayak sasaran seperti ini ingin mengetahui berita secara simpel, mudah dicerna, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Karena sifatnya yang *online*, sehingga dapat diakses di mana saja kapan saja, membuat mudah para pembacanya.

Judul-judul yang diambil oleh kedua media ini juga bersifat lugas seperti; Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan; Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI; Kejaksan Hentikan Penyelidikan BLBI, dan sebagainya.

Bingkai (*Frame*) yang dikonstruksi oleh *detik.com* maupun Tempo Interaktif terkait kasus dugaan korupsi pada aliran dana BLBI ini cenderung memposisikan diri sebagai *counter hegemony*. Hal ini bisa dilihat dari elemen sintaksis, tematik, detil, maksud, bentuk kalimat, retorik/stilistik, leksikon, metafora. Seperti bingkai pada *detik.com*; *Kemas beralih*, bukti-bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak. Bahkan sebagian bukti hangus terbakar. Hal itu membuat penyelidikan BLBI menjadi lama.

Kata beralih bermakna membuat alasan yang dibuat-buat atau istilah sarkasmenya alasan yang tidak masuk akal atau menyangkal. Sebenarnya kata beralih bisa saja diganti dengan kata beralasan atau menyatakan. Komunikator memilih diksi tersebut ingin menggiring pembacanya ke arah negatif terhadap pernyataan Kemas yang mengatakan bukti-bukti penting terkait penyerahan aset obligor sulit dilacak padahal bukti ini merupakan bukti kunci yang dapat menguak tabir kasus penyelewengan dana BLBI yang jumlahnya tidak sedikit. Serta ada sebagian bukti yang hangus terbakar. Apa sebab terbakarnya bukti tidak dijelaskan, apakah murni kecelakaan sehingga menyebabkan bukti tersebut terbakar, ataukah ada sebab lain yakni bukti tersebut sengaja dibakar oleh oknum tertentu yang bermaksud menghilangkan jejak bukti.

Sedangkan *counter hegemony* dari Tempo Interaktif bisa dilihat pada leksikon berikut;

Sebelumnya, Kwik Kian Gie menuding Bambang Subianto tahu persis soal BLBI. Pasalnya, kata Kwik, Bambang membidani lahirnya lembaga yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kata menuding yang dicetak tebal sebagai bentuk penekanan dari kata menuduh. Menuding dalam makna denotatif (arti sesungguhnya) adalah menunjuk ke arah wajah orang lain dikarenakan marah. Kwik digambarkan oleh komunikator menuduh secara keras kepada Bambang sebagai orang yang tahu persis kasus BLBI. Tuduhan ini diikuti oleh fakta bahwa Bambang telah membidani lahirnya BPPN.

Sebelumnya, Kwik Kian Gie menuding Bambang Subianto tahu persis soal BLBI. Pasalnya, kata Kwik, Bambang membidani lahirnya lembaga yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Kata membidani yang dicetak tebal merupakan bentuk metafora. Membidani berarti membantu proses melahirkan, maksudnya di sini adalah orang yang membantu terwujudnya lembaga yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bambang Subianto sebagai salah satu tokoh penggagas munculnya BPPN cikal bakal lahirnya BLBI yang membawa dampak penyelewengan sejumlah besar dana pemerintah ke beberapa bank.

Dari kedua contoh di atas tampak di mana kedua media *online* tersebut cenderung membingkai secara negatif. Dari diksi yang mereka pilih seperti pada *detik.com* kata beralih, sementara Tempo Interaktif memilih diksi menuding, membidani. Pilihan kata menunjukkan bingkai berita. Bingkai yang dikonstruksi kedua media juga cenderung mengajak emosi pembacanya turut mengadili jalannya pemeriksaan dan penyelidikan kasus BLBI ini. Kedua media ini mencoba memaparkan fakta berdasarkan data-data yang mereka peroleh. Namun fungsi *gate keeping* tidak bisa dihindari, walaupun sudah dikemas secara berhati-hati tetapi tetap saja media tidak bisa menghindari ideologi yang mereka usung.

Baik *detik.com* khususnya Detiknews maupun Tempo Interaktif sama-sama media yang memposisikan diri sebagai media yang fokus pada

berita politik yang bersifat *straight news*. Sehingga ideologi yang mereka usung adalah ideologi politik media. Kedua media ini cenderung mendelegitimasi dari kekuasaan yang ada ini berarti pula kedua media *online* tersebut berusaha memposisikan diri sebagai *counter hegemony* dari kekuasaan yang ada. Ini terlihat dari pemberitaan kedua media *online* tersebut dengan menyatakan bahwa tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan banyak dipanggil sebagai saksi ada 67 orang saksi yang dimintai keterangan. Bahkan secara gamblang dari judul berita *Bambang Subianto Kembali diperiksa* menyebut nama. Bambang adalah mantan menteri Keuangan di era Pemerintahan BJ Habibie. Bahkan ada tuduhan keras dari Kwik Kian Gie mantan Menteri Koordinator Perekonomian terhadap Bambang sebagai tokoh yang membidani lahirnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang merupakan cikal bakal lahirnya BLBI. Fakta dan data yang dipaparkan kedua media ini terkesan sengaja membuka tabir kronologis kasus BLBI ini dengan memaparkan jumlah angka yang fantastis yakni triliunan rupiah. Angka yang sangat besar itu di mata masyarakat awam tentulah sangat mengejutkan. Apalagi setelah aset-aset dari para obligor diserahkan kepada pemerintah ternyata setelah dijual angka tersebut menurun sangat drastis. Sementara para pengemplang dana BLBI telah mengantongi surat lunas. Tidak bisa dibayangkan betapa kecewanya rakyat bangsa ini. Uang triliunan rupiah raib begitu saja sementara para obligor dianggap tidak bersalah.

Seolah-olah kedua media *online* tersebut ingin menyampaikan bahwa pengadilan sesungguhnya adalah rakyat, bukan Kejaksaan Agung. Sementara media adalah pihak pencari fakta dan data, kemudian menyampaikannya kepada rakyat atau pembaca. Silahkan rakyat atau pembaca yang menilai sendiri. Namun, tanpa disadari ternyata media pun tidak bisa lepas dari ideologi yang mereka usung sehingga ketika mereka mengemas berita sebenarnya mencoba menggiring pembacanya pada suatu tujuan tertentu

Simpulan

Kasus dugaan korupsi pada aliran dana BLBI telah usai digelar. Kasus ini akhirnya ditutup

walaupun menyisakan kecewa banyak pihak termasuk DPR. Uang triliunan rupiah raib tidak kembali sementara para obligor lepas dengan mengantongi surat keterangan lunas. Pihak Kejaksaan berusaha mengkonter bahwa sesungguhnya kedua obligor telah melunasi utang hanya saja nilai aset menurun tajam setelah dijual kembali oleh pemerintah. Semuanya ini dapat diikuti melalui media yang memberitakan kasus tersebut.

Sebagai media *online* kedua media tersebut mengkonstruksi pesan secara lugas dan *to the point*. Ini sengaja dilakukan karena sifatnya yang *online* dan sasaran khalayaknya yang bersifat mobil, tidak punya banyak waktu, dari kalangan terpelajar, dan dari kalangan menengah ke atas. Khalayak sasaran seperti ini ingin mengetahui berita secara simpel, mudah dicerna, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Oleh karena sifatnya yang *online*, sehingga dapat diakses dimana saja kapan saja, membuat mudah para pembacanya.

Bingkai (*Frame*) yang dikonstruksi oleh kedua media ini cenderung sama yakni membingkai secara negatif kasus BLBI. Bingkai ini tidak muncul dengan sendirinya tetapi dikonstruksi oleh awak media melalui proses *gate keeping*. Dalam proses inilah nilai-nilai ideologi media dibangun. Kedua media dalam penelitian ini baik detikcom maupun Tempo interaktif mengusung ideologi politik media. Ini tampak dari posisi kedua media yang fokus pada berita politik yang bersifat *straight news*. Kedua media ini cenderung mendelegitimasi dari kekuasaan yang ada dengan demikian kedua media tersebut berfungsi sebagai *counter hegemony* dari kekuasaan yang ada. Delegitimasi ini terlihat dari pemberitaan mereka dengan menyatakan bahwa tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan banyak dipanggil sebagai saksi. Bahkan Kwik Kian Gie mantan Menteri Koordinator Perekonomian menuding Bambang (mantan Menteri Keuangan era pemerintahan BJ Habibie) sebagai tokoh yang membidani lahirnya BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang merupakan cikal bakal lahirnya BLBI.

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pembaca diharapkan bisa menyikapi berita ini secara bijaksana. Bijaksana di sini maksudnya pembaca tidak hanya percaya begitu saja berita dari satu media tetapi perlu ada

pembandingan untuk mampu melihat lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya duduk permasalahan kasus BLBI ini. Di samping itu para pembaca diharapkan mampu menilai bagaimana sesungguhnya media mengkonstruksi pesan berdasarkan nilai ideologi yang mereka anut.

Saran kepada pihak media, diharapkan dalam menggali berita hendaknya bisa lebih dalam lagi misalnya dengan mewawancarai banyak nara sumber dan bersifat *fair coverage* sehingga akan lebih menarik pembaca.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis wilayah V Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Adoni, Hanna & Sherill Mane, Juli 1984, *Media And The Social Construction Of Reality*, dalam Communication Research Vol.II, Sage Publication.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Eriyanto, 2001, *Analisis Wacana, : Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Hidayat, Dedy N., 1999, Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi, *Jurnal ISKI*, Vol.3 April, Jakarta.
- McQuail. Denis, 1987, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Novianti, Dewi, 2006, Wacana Media dalam Kasus Bom Bali (Pertarungan Wacana Harian republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4 No. 1, Jurusan Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto, Frans Surdiasis, 1999, *Politik Media Mengemas Berita*, ISAI, Jakarta.
- Pan, Zhondang and Gerald M. Kosicki, 1993, “Framing Analysis: An Approach to News Discourse” dalam *Political Communication* Vol 10 no.1.
- Severin, Werner J., James W. Tankard, Jr, 2007, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media massa*, kencana, Jakarta.
- Sudibyo, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LKiS, Yogyakarta.
- Van Dijk, Teun A., 1997, *Political Discourse and Political Cognition*, Aston University.
- Sumber Lain :**
- <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9302>, *Citra Indonesia Di Mata Dunia*.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Bambang Subianto Kembali Diperiksa. Senin, 10 September 2007 | 15:47 WIB.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Badan Kehormatan Segera Panggil Anggota Dewan yang Terkait Aliran Dana BI. Rabu, 27 Pebruari 2008 | 18:56 WIB.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Kejaksaaan Hentikan Penyelidikan BLBI. Jum’at, 29 Pebruari 2008 | 12:36 WIB.
- <http://www.detik.com>. Banyak Mantan Pejabat Diperiksa, Kasus BLBI Ada Kemajuan, Senin, 10/09/2007 16:33 WIB.
- <http://www.detik.com>. Tak Ada Perpanjangan Waktu Lagi Bagi Penyelidikan BLBI, Selasa, 15/01/2008 19:27 WIB.
- <http://www.detik.com>, Kemas: 7 Bulan Kejagung Siang Malam Selidiki BLBI, Jumat, 29/02/2008 14:25 WIB.

Pemaknaan Isu Pemanasan Global dan Lingkungan di Media oleh Kaum Perempuan Urban

Billy K. Sarwono

Departemen Ilmu Komunikasi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Kampus Universitas Indonesia, Depok 16434. Telp: +6221 788-49018
HP. 0811992786, Email: billysarwono@gmail.com

Abstract

The media has shown little participation of women in handling the impact of global warming, although women have considerably done significant roles in decreasing the impact of this phenomenon. It is interesting to comprehend how urban women building their meaning toward environment news. This research is aiming to increase awareness raising in women toward climate change. The data is collected by using Focus Group Discussion and the result is analyzed by applying critical constructionism paradigm and ecofeminism perspective. The result shows that: (1) there are three kinds of women audience: (a) their jobs are related with environment, (b) their jobs are not related with environment but they are concern with environment preservation (c) their jobs are not related with environment and they are not concern with climate change effects. (2) For second and third groups, preserving environment means keeping environment clean which unrelated with reducing global warming impacts activities. (3) Those two groups develop meanings in parallel with media: for them, women are being responsible for nature conservation, and the socialization process of environment friendly acts should be initiated from home/family. Sure enough, pro environment group build different meaning. In short, informants' meanings were vary and depended on perspectives, traits, and behavior of each group.

Abstrak

Perempuan dan lingkungan merupakan dua hal yang saling terkait karena dalam kesehariannya selalu bersentuhan, namun media belum menganggap penting peran informan dalam pemberitaan pemanasan global. Riset ini meneliti bagaimana pemaknaan perempuan urban terhadap pembingkaihan peran informan dalam isu tersebut? Hal ini mengingat besarnya partisipasi informan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Pengumpulan data menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan dianalisis menggunakan perspektif *social constructionism* serta ekofeminis. Hasil penelitian: pertama, terdapat tiga kelompok informan : (a) pekerjaannya terkait dengan lingkungan, (b) pekerjaannya tidak terkait dengan lingkungan namun peduli lingkungan, (c) pekerjaannya tidak terkait lingkungan dan tidak peduli lingkungan. Kedua, mayoritas pemahaman terhadap pelestarian lingkungan sebatas menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, kelompok yang profesinya tidak terkait lingkungan memaknai fenomena tersebut dalam konteks global dan kepedulian terhadap perubahan iklim masih sebatas gaya hidup. Pemaknaan informan searah dengan pemberitaan media yang memposisikan perempuan dalam ranah domestik. Kelompok ini percaya sosialisasi ramah lingkungan merupakan tanggung jawab perempuan berawal dari rumah. Sebaliknya, kelompok berprofesi terkait lingkungan memaknai pemanasan global dalam konteks lokal dan nasional. Informan yakin sosialisasi peduli lingkungan tidak selalu dimulai dari rumah, namun dilakukan secara intensif melalui media, pemerintah, sekolah maupun kegiatan di tempat kerja.

Kata kunci: media dan gender, perempuan, pemanasan global dan lingkungan, studi pemaknaan.

Pendahuluan

Aktivitas perempuan seringkali tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Contohnya, usaha perempuan desa dalam mendapatkan air bersih bagi keluarga maupun bagi ternaknya (Mosse, 1996: 180); juga pergumulan petani perempuan akibat musim kemarau yang panjang, serta kepedulian mereka terhadap pencemaran karena mereka yang terlebih dulu terkena dampak pencemaran lingkungan yang tidak sehat (Ortner dalam Corbett 2006, Kirk & Okazawa-Rey, 1998:406). Warren (2000:4-5) memberi contoh bagaimana perempuan Afrika dan Asia harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan kayu bakar ketika terjadi penggundulan hutan. Demikian juga, McCracken (Mosse, 1996:186) menceritakan bahwa perempuan dalam gerakan *Chipko* (pendekapan) di India berusaha mendekap pohon-pohon yang akan ditebang oleh suami mereka guna mendapatkan uang tunai. Karena itu, bagi sebagian perempuan, tidak ada cara lain untuk mempertahankan hidup mereka kecuali berusaha lebih memahami dan menyelamatkan pohon, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan ternak, bahan bakar, obat-obatan dan bahan baku kerajinan tangan.

Dwi (2008:120-121) menjelaskan ada empat alasan yang menyebabkan keterkaitan itu: pertama, secara fisiologis perempuan terlibat dalam waktu yang lebih lama dengan spesies kehidupan di mana perempuan-lah yang merawat masa depan manusia. Kedua, posisi perempuan di wilayah domestik merupakan tempat bayi-bayi ditransformasikan menjadi makhluk kultural. Ketiga, psikologi perempuan sebagai ibu mem-buahkan cara berpikir yang lebih relasional, konkrit dibanding dengan laki-laki. Alasan terakhir, kaum perempuan yang bertanggungjawab terhadap wilayah domestik punya banyak andil dalam mengurangi jumlah sampah dengan melakukan program *4R: reduce, reuse, recycle dan restore*. Di Indonesia, pelibatan perempuan dalam strategi pembangunan belum begitu lama dilakukan. Arivia (2006: 385) menunjukkan bahwa biasanya kegiatan penyuluhan penyediaan air bersih dari PDAM, di Palu, Sulawesi Tengah, hanya diberikan

kepada kaum laki-laki; tetapi sejak tahun 1997 kaum perempuan sebagai pengguna dan pengelola air mulai dilibatkan da-lam kegiatan tersebut dan telah menunjukkan efektivitasnya.

Walaupun aktivitas perempuan sangat dekat dengan lingkungan, namun pemberitaan isu lingkungan jarang menggunakan perempuan sebagai narasumbernya. Kalaupun ada beberapa narasumber perempuan, maka sebagian besar adalah selebritis yang penonjolan pemberitaannya lebih ditekankan pada sosok keartisannya daripada pengetahuan, wawasan dan kepeduliannya tentang kerusakan lingkungan hidup (Sarwono, 2009). Apa yang terjadi ketika dampak perubahan iklim sudah tak terbendung lagi, dan diperlukan partisipasi yang lebih besar dari kaum perempuan dalam mengurangi dampak pemanasan global, sementara media sebagai sumber informasi mengabaikan peran perempuan? Bagaimana khalayak perempuan perkotaan memaknai isu perubahan iklim di media?

Perempuan perkotaan menarik untuk diteliti mengingat pencemaran udara lebih banyak terjadi di perkotaan, demikian pula jumlah penduduk kota lebih banyak daripada penduduk desa, sehingga jumlah sampah di perkotaan juga jauh lebih tinggi daripada di pedesaan. Selain itu, menurut Atmakusumah (1996:55), masalah lingkungan di Indonesia cenderung dikaitkan dengan *brown problem* yang menekankan pencemaran udara atau polusi daripada *green problem* yang menekankan pentingnya penyelamatan hutan. Bisa jadi pencemaran lingkungan dianggap merupakan masalah lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat kota, tempat kelompok dominan bermukim, sebaliknya *green problem* lebih banyak terkait dengan masalah *non human*, terjadi jauh dari kota dan diasumsikan hanya menyangkut sebagian kecil masyarakat. Studi lain (Sarwono, 2010a) menunjukkan bahwa pemberitaan tentang isu lingkungan selama *United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC)* di Bali dan Kopenhagen sangat sedikit dan peran perempuan dalam konferensi tersebut diabaikan, padahal peran kaum perempuan dalam mengatasi dampak pemanasan global sangat penting. Berdasarkan pemikiran

tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkritisi pemaknaan perempuan perkotaan terhadap isu pemanasan global.

Permasalahan di atas didasarkan pada beberapa pemikiran. Pertama, terkait produksi dan reproduksi teks; kedua berhubungan dengan *reception studies* dan ketiga, peneliti menggunakan pemikiran ekofeminisme. Pemahaman terhadap teks media dan produksi (teks), secara terpisah tidak mempunyai arti, dengan demikian kedua hal itu secara kuat terhubung dalam proses pemaknaan produksi, yang terjadi di semua tingkatan (Sarwono, 2006). Dalam memproduksi teks, terjadi kontradiksi, konflik antara kepentingan organisasi untuk mendapatkan keuntungan besar, dengan kepentingan profesional yang selalu memperhatikan etika dan estetika penyajian hasil. Dengan demikian dalam proses *encoding*, teks media tidak merupakan hasil dari sistem ideologi yang tertutup tetapi mencerminkan kontradiksi produksi, karena itu teks media membawa beberapa makna dan terbuka untuk diinterpretasikan (*polysemic*). Hasil studi tentang bagaimana jurnalis mengkonstruksi isu lingkungan menunjukkan bahwa penekanan isu lingkungan tidak terlepas dari bagaimana jurnalis memahami pentingnya isu lingkungan, apakah isu lingkungan lebih terkait pada persoalan ilmu pengetahuan, ataukah perhitungan untung rugi ataukah sosial politik yang dikaitkan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global (Sarwono & Sunarto, 2010).

Struktur pemaknaan *encoding* yang serupa terjadi dalam proses *decoding*, di mana khalayak juga tidak harus selalu mempunyai interpretasi yang sama dengan produsen, tetapi dia boleh memaknainya secara berbeda. Jadi konsep *polysemic* mengasumsikan khalayak sebagai produser makna juga. Namun pada umumnya, sebagian besar teks dapat dibaca dengan cara *preferred* atau *dominant reading*. Hal ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode yang bisa diterima umum, sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan itu dengan pesan yang sudah diterima umum. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Menurut Hall (van Zoonen, 1997:42), penulis bisa jadi mengguna-

kan kode-kode profesional atau kode-kode budaya, posisi politik yang diyakini dan menjadi kepercayaan pembaca, sehingga ketika pesan dalam bentuk kode-kode itu sampai di tangan pembaca akan terjadi kesesuaian.

Dasar berpikir kedua yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perkembangan studi komunikasi tentang pengaruh media yang menunjukkan ada pergeseran pemikiran dari *seeing is believing* menjadi *believing is seeing*; dalam arti khalayak memaknai sesuatu bukan diawali dari program yang dilihatnya tetapi diawali dengan konteks sosial atau karakter sosial yang sudah ada sebelumnya pada diri mereka (Curran 2002:117). Demikian pula Coleman (2002:13) menjelaskan bahwa berbagai variasi pemaknaan khalayak itu bukan merupakan efek media, melainkan karena perbedaan latar belakang pengalaman dan kultural khalayak. Dengan demikian, pemaknaan itu sejalan dengan persepsi awal seseorang dan media berpengaruh ketika searah dengan anggapan awal individu; dalam hal ini juga individu bukan sekedar aktif melakukan seleksi terhadap program (Hagen & Wasko, 2000: 1; Curran, 2002:127-139) namun aktif mengkonstruksi makna. Selain itu, aktif di sini tidak mempunyai arti yang sama dengan pengertian bahwa khalayak itu *powerful*, karena khalayak mempunyai keterbatasan (*the range of readings*) yang menentukan, ketika makna dipahami terkait dengan posisi wacana dan posisi sosial khalayak.

Perkembangan *reception studies* di atas diawali oleh Morley (Croteau, 2003:274) yang memfokuskan studinya pada khalayak dengan berbagai perbedaan kelas (sosial ekonomi, posisi, latar belakang) dan peranan sosialnya yang mana semua faktor itu merupakan mediator utama dalam proses pemaknaan, bukan sebagai faktor yang mempengaruhi pemaknaan tetapi sebagai *key provider* untuk memaknai pesan. Namun dia juga menambahkan bahwa hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisir dan kelas sosial tidak bisa secara konstan memprediksi interpretasi seseorang. Di samping berbagai faktor itu, maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah umur, ras, etnis dan gender dari khalayak yang ditelitinya (Croteau 2003:277). Keberagaman identitas sosial tersebut dianggap sebagai alat kultural bagi pemaknaan

khalayak, dan salah satunya yang berhubungan dengan media adalah *discursive resources*, seperti berbagai konsep, asumsi, bahasa yang dikaitkan dengan subkultur dan perspektif politik tertentu. Misalnya, perspektif feminis yang dimiliki seorang individu bisa melengkapinya dalam membuat pemaknaan yang berbeda daripada orang yang tidak memiliki sensitivitas gender.

Khusus perkembangan *reception studies* yang terkait dengan khalayak perempuan, Press (Croteau, 2003:278) menjelaskan bahwa perempuan kelas menengah cenderung mempunyai latar belakang yang sama dengan produser media kelas menengah, dan mengabaikan kejanggalan gambaran yang menyimpang serta menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang normal karena sesuai dengan perspektif mereka. Selanjutnya, penelitian *reception studies* berkembang dari fokus terhadap ideologi menjadi pertanyaan yang terkait kenikmatan menggunakan media, khususnya *genre* yang bernuansa feminin seperti novel-novel percintaan, yang dilakukan oleh Radway. Studi yang dilakukan Bobo (Croteau & Hoynes, 1997: 236-255) dan McRobbie (Croteau & Hoynes 2003:292-293) melihat adanya hubungan antara penggunaan media dan identitas gender; studi itu juga mengidentifikasi bahwa komunikasi massa merupakan sumber penting dalam praktek atau kegiatan kultural sehari-hari. Dalam studi tentang penggunaan TV oleh kelompok perempuan, Press (Hagen & Wasko 2000:42) melihat pentingnya pengalaman hidup dari perempuan itu yang mendorongnya menggunakan media (televisi), dan bagaimana pengalaman tersebut menolong khalayaknya menginterpretasikan hubungan sosial aktivitas media.

Kerangka berpikir lain dalam penelitian ini adalah ekofeminisme. Menurut Salleh (Tong, 2005:

361) ekofeminisme adalah pengembangan pemikiran feminis yang menyatakan bahwa krisis lingkungan global diasumsikan merupakan hasil dari kebudayaan patriarki. Ekofeminisme pada dasarnya merupakan analisis yang menghubungkan institusi sosial yang maskulin dan perusakan terhadap lingkungan fisik. Pemikiran ini didasarkan pada pemikiran barat yang memfemininkan bumi karena bumi dianggap seperti perempuan yang memproduksi kehidupan. Sehingga muncul berbagai istilah seperti hutan yang masih perawan, kandungan yang terdapat dalam bumi, perkosaan terhadap bumi dan lainnya. Lebih lanjut, inti dari perspektif ini meliputi konsep dualism yang bertentangan namun dilihat sebagai pasangan: *culture/nature, mind/body, male/female, civilized/primitive, sacred/profane, subject/object, self/other*. Menurut Plumwood (Kirk & Osakawa-Rey 1998: 409) cara berfikir ini merupakan logika dari sistem hirarki seperti kolonialisme, rasisme, seksisme dan militarisme yang tergantung pada ide *otherness*, musuh dan subordinat untuk menunjukkan superioritas dan dominasi.

Pemahaman mengenai ekologi feminis lebih diperkuat melalui pemahaman paradigma lingkungan (Corbett 2006:282) yang menekankan bahwa manusia merupakan satu dari begitu banyak makhluk di dunia dan setiap makhluk (tumbuhan, binatang dan lainnya) mempunyai hak yang sama untuk hidup karena ada interdependensi di antara mereka. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan keragaman, kompleksitas, integritas, harmoni dan stabilisasi di antara semua makhluk tersebut sehingga keberlanjutan dan konservasi alam lebih penting daripada kemajuan pembangunan bagi manusia semata.

Dari berbagai *theoretical framework* di atas maka asumsi teoritis dari penelitian ini adalah: pemaknaan seseorang terhadap isu

Tabel 1. Terpaan Isu Perubahan Iklim

Konsep	Kelompok yang Profesinya Terkait Lingkungan	Kelompok Peduli lingkungan	Kelompok Belum Peduli Lingkungan
Terpaan Media	Media cetak: Kompas, Media Indonesia, Tempo, Green Magazine, TV: MetroTV, DAI, National Geography, Online: facebook, internet.	Media cetak: Tabloid, Radio: Elshinta, Hard Rock, Life FM, TV, DVD Al Gore, Billboard: iklan DKI.	Komunikasi tatap muka: RT, charity bazaar, penyuluhan.

Tabel 2. Isu Perubahan Iklim di Media

Konsep	Kelompok yang Profesinya Terkait Lingkungan	Kelompok Peduli lingkungan	Kelompok Belum Peduli Lingkungan
Frekuensi:	Tidak banyak atau jarang.	Sangat kurang.	Tidak tahu persisnya.
Isu lingkungan dan perubahan iklim	Masalah hutan, kebakaran hutan, buah-buahan mengandung pestisida, gaya hidup – <i>go green</i> , pemanasan global, kekeringan, nasib petani & nelayan akibat pemanasan global, asap akibat kebakaran hutan, <i>species</i> hutan,	Gempa bumi, kebakaran hutan, pencurian kayu. Penanaman pohon, polusi, <i>Car free day</i> , penggunaan aerosol.	Tidak ada jawaban.
Isi & cara penulisan media	Terlalu serius, bahasanya kurang populer, penjelasan terlalu ilmiah dan <i>abstract</i> , tidak langsung mengenai sasaran, kemasan harus menarik dan bermutu, isunya tidak seksi.	Kemasan tak menarik, tidak bisa menggugah bahaya pemanasan global	Tidak ada jawaban.

lingkungan tidak terlepas dari konteks sosial, latar belakang, karakter khalayak, terpaan media dan juga perspektif mereka. Mereka yang mempunyai perspektif ekofeminis dan atau mempunyai sensitivitas gender cenderung mempedulikan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dan akan melakukan resistensi terhadap domestifikasi perempuan dibandingkan dengan mereka yang belum memiliki sensitivitas gender.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma penelitian *critical constructionism* (Heiner, 2006 : 9-11) untuk mengetahui bagaimana problem sosial dikonstruksikan, digambarkan dan disuguhkan kepada publik tentunya akan merefleksikan kepentingan kelompok masyarakat elit dan sekaligus mengorbankan kepentingan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui *Focus Group Discussion* atau *FGD* (Wimmer & Dominick, 2006:128-129), dan sebagai data pendukung menggunakan analisis *framing* terhadap artikel pemanasan global (Sarwono, Sunarto & Asteria, 2009: 43-63).

Pemilihan anggota kelompok *FGD* dilakukan melalui tiga tahap: pertama dengan menseleksi calon peserta perempuan yang mengetahui adanya perubahan iklim dan pemanasan global. Tahap berikutnya meminta mereka untuk mengisi kuesioner yang antara lain

berisi pengetahuan tentang isu pemanasan global, kepedulian terhadap pemeliharaan alam, penggunaan kosmetik ataupun alat pembersih rumah tangga yang mengandung aerosol, dan aktivitas yang terkait dengan *4 R*. Berdasarkan jawaban informan dalam kuesioner, peneliti membagi mereka dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, mereka yang profesi atau pekerjaannya banyak terkait dengan lingkungan, seperti anggota LSM, staf Kementerian Lingkungan Hidup, dosen Lingkungan. Kelompok kedua adalah mereka yang pekerjaannya tidak terkait dengan lingkungan namun mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan kelompok ketiga adalah mereka yang belum peduli lingkungan. Jumlah informan dalam *FGD* sebanyak 17 orang perempuan dan pelaksanaannya dilakukan pada pertengahan Agustus 2008 di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.

Pengorganisasian data dilakukan dengan menggunakan *analytical framework approach*, yaitu dengan melakukan pemisahan data berdasarkan perbedaan konsep (Patton 2002:431-534). Tahap analisis data penelitian ini dengan menggunakan *thematic coding* (Jensen 2002: 251), yaitu dengan membuat identifikasi, perbandingan dan mempertentangkan makna elemen, ketika sebuah konsep tertentu itu muncul dan muncul kembali dalam konteks yang berbeda. Jadi sebuah konsep yang sama akan mempunyai pemaknaan yang berbeda karena penekanan kon-

Tabel 3. Pemahaman Terhadap Lingkungan dan Pemanasan Global

Konsep	Kelompok yang Profesinya Terkait Lingkungan	Kelompok Peduli lingkungan	Kelompok Belum Peduli Lingkungan
Pemahaman konsep lingkungan	Manusia, hewan, tumbuhan, air dan oksigen.	Jumlah sampah, perilaku tidak membuang sampah, kebersihan, tanaman rumah, pertambahan penduduk, daerah resapan, kerusakan lingkungan.	Kerja bakti, kebersihan, berbagai aktivitas terkait sampah: mobil sampah, buang sampah, pembakaran sampah.
Latar belakang peduli lingkungan	- Melalui pendidikan di sekolah, kampus; - Ajaran ibu sejak kecil.	- Menyukai tanaman - Menyukai alam - Memanfaatkan barang bekas secara regular.	- Menjaga kebersihan lingkungan demi kesehatan.
Lokasi terjadinya pemanasan global	Di desa: - Sumber mata air berkurang - Kerusakan lingkungan karena eksploitasi lingkungan Di Kota - Polusi udara menyebabkan muncul berbagai penyakit - Kenaikan jumlah sampah organik & non organik.	Terjadi di New York dan kutub (gunung es mencair.	- Gempa di Sumba
Perilaku mengurangi dampak pemanasan global	- Kesadaran memilah sampah; - Mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja; - Mengajarkan dan mengajak orang lain peduli lingkungan (seperti kurangi penggunaan tas plastik, membuat kampung percontohan, melakukan penelitian.	- Belum memilah sampah secara konsisten; - Melakukan 4R karena pertimbangan ekonomis; - Kesadaran lingkungan dimulai dari diri sendiri, namun aktivitas peduli lingkungan harus dilakukan oleh semua masyarakat secara bersamaan.	- Melakukan 4R karena pertimbangan ekonomis - Memilah sampah ketika ada anjuran RT saja. - Tahu ada polusi udara namun tidak peduli.

teks yang berbeda. Adapun uji kualitas data atau (*goodness criteria*) yang digunakan dalam penelitian mengikuti pemikiran Guba & Lincoln (Denzin & Lincoln 1994: 393–402), bahwa keterandalan data dilihat dalam: (a) konteks historis (*historical situatedness*), di mana persoalan pelestarian lingkungan hidup dan pemanasan global di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan kapitalisme global dalam mengeksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan peningkatan modal. (b) *Erosian of ignorance and misapprehension*, di mana hasil penelitian ini dapat memberikan penyadaran

kepada kaum perempuan akan arti penting keterlibatan mereka dalam mengatasi dampak pemanasan global dan pemeliharaan lingkungan hidup. (c). *Action stimulus* yang mana hasil penelitian ini untuk merangsang tindakan terkait lingkungan hidup merupakan aspek keterandalan yang lainnya.

Analisis singkat tentang hasil *framing* media terkait isu lingkungan (Sarwono, Sunarto, Asteria, 2009: 43–63) menunjukkan ada perbedaan pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis laki-laki dan perempuan. Hasil *framing* yang dilakukan jurnalis perempuan adalah sebagai

**Tabel 4. Pemaknaan Khalayak Terhadap Peran Perempuan
Dalam Isu Pemanasan Global dan Isu Lingkungan**

Pembingkai Posisi Perempuan dalam isu lingkungan di media	Kelompok Pertama	Kelompok Kedua	Kelompok Ketiga
Peran Perempuan di media <u>tidak</u> penting	Resistensi	Resistensi	Resistensi
Status seorang selebriti perempuan punya nilai tambah sebagai role model dibanding dengan status lain.	Negosiasi	Dominan	-
Ibu berperan membentuk kebiasaan ramah lingkungan yang di mulai dari rumah.	Negosiasi	Dominan	Dominan
Perempuan adalah sosok yang bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan.	Negosiasi	Dominan	Dominan

berikut: pertama, reporter tidak menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam pemberitaan lingkungan. Kedua, hanya beberapa narasumber perempuan yang dipakai oleh jurnalis perempuan. Ketiga, penulis perempuan mempunyai kepedulian terhadap hak dan kelangsungan hidup masyarakat lokal, dan terakhir, penulis masih menempatkan peran perempuan yang belum sejajar dengan laki-laki.

Sementara itu, *framing* yang dilakukan jurnalis laki-laki menggambarkan beberapa hal. Pertama, etika ramah lingkungan harus mulai dibangun dari kebiasaan-kebiasaan di rumah. Kedua, sosok ibu digambarkan tidak lagi mempedulikan kebersihan, pertumbuhan dan kesehatan anak-anaknya; namun, perempuan dianggap pihak yang paling bersalah dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesehatan anak-anak. Terakhir, para selebriti dan *socialite* memiliki lebih banyak nilai tambah untuk dimanfaatkan sebagai *role model* terhadap usaha mengatasi kerusakan lingkungan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyajian hasil penelitian dimulai dari latar belakang informan, terpaan media terhadap isu pemanasan global, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman terhadap kelestarian lingkungan dan perilaku mengurangi dampak pemanasan global; dan diakhiri dengan pemaknaan khalayak terhadap isu perubahan iklim.

Pendidikan informan berkisar dari tingkat diploma sampai dengan pascasarjana. Sebagian besar informan berstatus menikah dan tiga orang

belum menikah. Informan yang tergabung dalam kelompok pertama aktif dalam mensosialisasikan pola hidup ramah lingkungan dan juga mendapat info perubahan iklim dari media cetak dan TV. Kelompok kedua tidak pernah melakukan sosialisasi *green life style* namun secara individu mempunyai hobi memelihara tanaman di rumahnya; bahkan di antara mereka ada yang bergabung dalam kelompok pencinta alam, dan mayoritas dari mereka cukup konsisten melaksanakan konsep 4R. Kelompok ketiga mempunyai sikap dan perilaku belum peduli lingkungan, hampir tidak pernah terterpa berita tentang pemanasan global dan hanya sedikit memahami fenomena tersebut.

Terpaan media para informan yang terkait dengan perubahan iklim adalah sebagai berikut: kelompok pertama lebih banyak menggunakan koran dan internet, sedangkan kelompok dua banyak menggunakan tabloid dan radio. Bagi kelompok ketiga, sumber informasi tentang dampak pemanasan global dan pelestarian lingkungan adalah kepala keluarga dan teman. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel di atas menunjukkan kalau kelompok pertama bisa menjelaskan dengan gamblang banyaknya isu pemanasan global dan dampaknya dalam pemberitaan di media, walaupun menurut mereka jumlah dan frekuensi itu belum segencar infotainment. Kelompok kedua merasa info perubahan iklim sangat kurang, dan bila ada, maka info itu tentang bencana alam, ataupun peristiwa yang menghebohkan seperti pencurian kayu atau gerakan penanaman pohon. Kelompok ketiga tidak tahu pasti berapa banyak isu lingkungan

dalam media, dan mayoritas anggota kelompok tidak bisa mengingat isu apa yang disajikan dan ditayangkan dalam program atau rubrik apa.

Menurut kelompok pertama, belum banyaknya informasi perubahan iklim di media karena isu lingkungan dianggap tidak “seksi”, informasi yang disajikan terlalu serius dan topiknya tidak populer. Sehingga isu pemanasan global hanya populer bila itu merupakan sebuah bencana, dan kalau pun bukan bencana maka media cenderung mengemasnya sebagai gaya hidup, paket wisata atau hiburan, atau pun isu yang terkait dengan kesehatan dan sebagai trend gaya hidup.

Data dalam tabel memperlihatkan bahwa mayoritas informan kelompok pertama memahami lingkungan sebagai jagat yang terdiri dari kelompok manusia dan non manusia seperti binatang, tumbuhan, udara, air dan lain sebagainya yang biasanya dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dan lebih mudah untuk dieksploitasi. Kelompok kedua memahami masalah lingkungan sebatas pada keseharian mereka, seperti banyaknya sampah yang ada, menjaga kebersihan, memelihara tanaman, membuat resapan dan lainnya. Kelompok ketiga memahami lingkungan lebih sempit lagi, sebatas pada menjaga kebersihan dan persoalan sampah.

Ketika ditanyakan, dimana lokasi terjadinya pemanasan global? Maka kelompok dua dan menganggap fenomena itu terjadi di kota lain, bahkan di pulau atau negara lain, seperti fenomena gunung es mencair yang terjadi di kutub utara, kebakaran hutan terjadi di luar P. Jawa, sebagaimana dikemukakan kelompok kedua. Sebaliknya kelompok pertama menjawab bahwa hal itu terjadi di kota tempat tinggalnya dan bukan di tempat lain. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan hasil studi Sarwono (2010b) yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia belum memberi perhatian pada masalah *non human*, akibatnya isu lingkungan dan perubahan iklim belum dianggap penting.

Bagaimana seseorang memahami pentingnya lingkungan tidak terlepas dari latar belakang mereka. Kelompok pertama memperoleh pendidikan sejak kecil dalam keluarga dan pendidikan formal di sekolah, sedangkan kelompok kedua mempunyai kepedulian setelah beranjak

dewasa yang diperoleh dari lingkungan seperti organisasi Mapala atau setelah menikah dengan memelihara tanaman; dan kelompok ketiga mempunyai kepedulian yang berbeda karena menjaga lingkungan diartikan sebagai menjaga kebersihan demi kesehatan. Karena pemahaman yang berbeda itu, maka kepedulian terhadap lingkungan pun berbeda. Kelompok pertama mengajarkan pengetahuan peduli lingkungan kepada keluarga, teman sekerja dan tetangga. Kelompok kedua menjaga lingkungan secara individual dan konsistensi perilaku ramah lingkungan tergantung dari *peer group* dan keluarganya. Akan Kelompok ketiga, walaupun mereka belum memahami pentingnya lingkungan tapi mereka adakalanya melaksanakan konsep *4R* seperti menghemat penggunaan air & listrik serta menggunakan kertas bekas untuk mencetak *draft* secara bolak balik; namun motivasi penghematan itu lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomis.

Framing isu pertama: Peran perempuan dalam isu global warming dan pemeliharaan lingkungan di media tidak penting. Mayoritas peserta FGD melakukan pemaknaan resistensi terhadap ‘posisi perempuan yang dianggap tidak penting dalam isu lingkungan’. Peserta lain dari kelompok pertama berpendapat bahwa media bias gender dalam media. Sedangkan kelompok kedua menegaskan bahwa posisi perempuan dalam isu lingkungan tidak *eye-catching*, walaupun perempuan berperan penting dalam mengurus dan rumah tangga yang selalu bersentuhan dengan lingkungan; seperti membersihkan rumah, memelihara tanaman. Bahkan kelompok ketiga menyadari bahwa sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam memanfaatkan barang bekas dan mengolahnya kembali menjadi kerajinan tangan, namun upaya itu jarang disajikan oleh media.

Framing Isu 2: Bila perempuan muncul dalam pemberitaan isu global warming dan pelestarian lingkungan, maka pada umumnya mereka adalah artis. Kelompok pertama melakukan pemaknaan negosiasi terhadap *framing* isu kedua, kelompok kedua melakukan pemaknaan dominan dan kelompok ketiga tidak memberikan pemaknaan, karena mereka tidak memperhatikan narasumber yang menjadi acuan bagi isu ling-

kungan, apakah mereka adalah artis atau bukan. Pemaknaan negosiasi pada kelompok pertama terlihat dari sebagian informan yang mempunyai pemahaman serupa dengan media bahwa artis perempuan merupakan *role model* dalam perilaku ramah lingkungan, sementara itu ada juga informan yang mempunyai pemaknaan yang tidak sejalan dengan media, namun sosialisasi bisa dilakukan lewat pendidikan, hukum, dan adanya *role model*.

Framing isu 3: Sosialisasi kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari rumah dan ibu bertanggungjawab melakukan sosialisasi. Kelompok pertama yang melakukan pemaknaan negosiasi berpendapat bahwa sosialisasi tidak selalu dimulai oleh ibu dari rumah bahkan bisa saja dilakukan melalui pendidikan atau program pemerintah; namun beberapa anggota lainnya dalam kelompok yang sama berpendapat bahwa mestinya ibu punya peran penting dalam mensosialisasi perilaku ramah lingkungan. Pemaknaan kelompok 2 berbeda dengan kelompok pertama.

Framing isu 4: Perempuan adalah sosok yang bertanggungjawab atas pemeliharaan lingkungan. Hasil pemaknaan informan terhadap isu keempat ini serupa dengan pemaknaan terhadap isu ketiga. Hal ini bisa dimengerti karena bagi kelompok pertama, yang memiliki sensitivitas gender lebih tinggi daripada kelompok lain, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai tanggung jawab melestarikan lingkungan. Sebaliknya, kedua kelompok lainnya mempunyai pemaknaan yang berbeda. Singkat kata, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang, pengetahuan dan pengalaman informan ketika berinteraksi dengan lingkungan akan menyebabkan perbedaan dalam memahami realitas dan aktivitas peduli lingkungan. Kelompok pertama merasa mempunyai tanggung jawab serta termotivasi untuk mengajarkan pengetahuan dan sikap peduli lingkungan kepada orang lain. Kelompok kedua memiliki kesadaran dan motivasi namun kepedulian tersebut hanya terbatas bagi kepentingan diri sendiri dan belum disosialisasikan kepada orang lain. Kelompok ini memahami masalah lingkungan dalam area yang masih berada “di luar” dirinya dan belum menyatu di dalam

dirinya. *Sense of belonging* kelompok ketiga masih minim karena pengetahuan akan masalah lingkungan dianggap berada “jauh” dari dirinya dan hanya terkait pada bencana alam semata.

Perbedaan reaksi setiap kelompok tersebut di atas bisa dijelaskan dengan menggunakan teori psikologi ekologi (*ecological psychology*) (Barker dalam Sarwono, 1995:127). Perbedaan cara berpikir menyebabkan pemahaman mengenai masalah lingkungan menjadi berbeda pula. Pada kelompok pertama yang telah mengetahui adanya beragam jenis lingkungan alamiah seperti biotik & abiotik, dan dimodifikasi atau buatan dan sosial) maka pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungannya lebih holistik. Dalam hal ini, individu tersebut mengetahui jika salah satu unit dalam sistem lingkungan terganggu maka keseluruhan akan terpengaruh. Sementara pada kelompok kedua, mereka baru mengetahui jenis lingkungan dimodifikasi dan sosial, sebagaimana teori kekurangan beban dalam kajian psikologi lingkungan yang mana aktivitas menanam tanaman di depan rumah masih terbatas sebagai kebutuhan maupun hobi. Sedangkan pada kelompok ketiga, mereka baru memiliki pengetahuan lingkungan secara umum dari jenis lingkungan dimodifikasi dan mereka baru mulai mepedulikan lingkungan jika sudah ada peristiwa besar.

Dengan demikian, pemahaman terhadap dampak pemanasan global dan pelestarian lingkungan yang didasarkan pada pengetahuan, kepercayaan dan norma atau nilai-lah yang menentukan seorang individu dalam membuat keputusan untuk perlu atau tidak melakukan aktivitas peduli lingkungan. Walaupun pada dasarnya, secara alamiah, perempuan dalam kesehariannya telah bersentuhan dengan lingkungan, namun perbedaan gaya hidup, keakraban dengan kondisi lingkungan, keakraban sosial, dan kelas sosial melatarbelakangi perempuan mempengaruhi respon yang berbeda terhadap pelestarian lingkungan.

Tampak bahwa dalam kelompok 3 sikap peduli lingkungan didasarkan pada pertimbangan ekonomi yang menekankan unsur keuntungan atau *benefit* dari setiap tindakannya dianggap sebagai bagian dari rutinitas sebagaimana dalam etika

lingkungan yang disebut androposentris atau egoisme. Perilaku atau pertimbangan ini dikritik oleh ekofeminisme yang mengharap agar manusia dapat menjaga dan merawat lingkungan dengan cara berempati terhadap sekitarnya demi keberlanjutan dan kehidupan yang lebih harmonis. Sebagai makhluk sosial, para informan tersebut di atas cenderung mempertimbangkan dan memperhatikan dukungan sistem dan orientasi pada orang lain ketika memutuskan aktivitas peduli lingkungan yang dipicu oleh adanya keinginan konformistis. Itulah sebabnya, aktivitas lingkungan dalam kelompok kedua dan ketiga hanya dilakukan selama ada program pemerintah atau jika memang orang lain juga melakukan. Dengan kata lain, masih diperlukan kontrol eksternal untuk peduli lingkungan karena *sense of belonging* secara internal dari diri pribadi individu tersebut belum tumbuh. Data menunjukkan bahwa hanya ada satu pemaknaan resistensi yang dilakukan para informan terhadap isu ‘posisi perempuan yang dianggap tidak penting dalam berita lingkungan’. Walaupun ketiga kelompok punya pemaknaan resistensi, namun alasan mereka berbeda. Kelompok pertama melakukan resistensi karena media dianggap bias gender, sementara itu resistensi kelompok kedua lebih disebabkan karena peran perempuan tidak cukup menarik perhatian khalayak dan kelompok ketiga lebih menitikberatkan pada aktivitas perempuan di luar pemberitaan media.

Mengapa hanya satu pemaknaan resistensi dan yang lain merupakan pemaknaan negosiasi atau dominan? Hal ini bisa dikaitkan dengan latarbelakang mayoritas informan yang dibesarkan pada masa Orde Baru (Orba). Menurut pemerintah Orba, perempuan Indonesia seharusnya bertanggung jawab terhadap tugas domestik di samping bekerja. Selain itu, walaupun pemerintah mengakui hak dan kewajiban mereka sama, namun perempuan punya peranan yang khas yang berbeda dari laki-laki karena kodrat mereka pada dasarnya berbeda. Jadi peranan perempuan yang paling mendasar adalah berada di keluarga dengan anak-anak dan suami. Peranan itu dianggap penting dalam pembangunan karena tanpa keluarga yang sehat dan kuat, tujuan pembangunan akan sulit sekali dicapai. Jadi perempuan boleh

bekerja asalkan tidak melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Filosofi tersebut jelas tertuang dalam GBHN 1978 (Binny Buchori dan Ifa Soenarto dalam Mayling Oey-Gardiner, 1996: 173-176). Ideologi tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi sebuah proses “*house-wifization* (perempuan yang di-ibu-rumah-tanggakan)”, di mana perempuan boleh bekerja, tapi pekerjaannya tetap dianggap sebagai pekerjaan sampingan sehingga mereka digaji lebih rendah karena mereka telah mendapatkan gaji utama dari suami, dan gaji yang diperoleh perempuan tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan saja.

Mengapa para informan tidak bisa melepaskan diri dari kultur patriarki? Sebagaimana dipaparkan informan dari kelompok dua: “budayanya sudah begitu”, hal ini berarti apa yang sudah menjadi nilai dan norma sulit diubah. Mengapa? Karena sosialisasi posisi perempuan sudah begitu tertanam, dan mengakar pada diri mereka; dan hal ini bukan saja diwarnai oleh iklim politik ketika mereka dibesarkan, tetapi juga norma-norma agama dan budaya patriarki yang diwariskan oleh orang tua mereka. Bisa jadi, perempuan yang sudah terbiasa mematuhi nilai-nilai moral secara ketat jarang berniat membebaskan diri dari nilai-nilai moral yang mengungkungnya. Alhasil, hampir semua informan memaknai bahwa tugas memelihara lingkungan memang merupakan tanggung jawab mereka dan secara naluriah mereka merasakan bahwa ibu-lah yang mendidik anak-anak, ibu pula yang akan mengajarkan perilaku ramah lingkungan. Dengan kata lain, perspektif informan atau *discursive resources* terhadap domestifikasi perempuan mempunyai peranan besar dalam pemaknaan. Temuan ini sejalan dengan pemikiran kelompok revisionis bahwa pemaknaan khalayak akan sama dengan pemberitaan media bila searah dengan anggapan awal individu. Hasil ini juga memperkuat asumsi bahwa resistensi perempuan perkotaan terhadap ideologi dominan masih lemah (Sarwono, 2004:1).

Dilihat dari perspektif ekofeminis, masalah subordinasi, eksploitasi dan penindasan yang dilakukan terhadap perempuan mempunyai arti yang sama dengan perlakuan terhadap alam. Karena ekofeminis mempersoalkan kesetaraan

di antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan antara human dan *non human*. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa baik institusi media maupun sebagian khalayak informan belum memiliki perspektif ekofeminis ataupun sensitivitas gender. Bila awak media masih didominasi laki-laki yang cenderung menggunakan konsep *housewifization* dan media belum menjadi sarana bagi kelompok perempuan untuk berkiprah di dunia publik, maka kesetaraan ini hanya bisa tercapai bila konsep pembagian kerja menurut gender berubah. Selama konsep itu tidak berubah maka kesetaraan tidak pernah tercapai. Demikian pula konsep human dan *non human* tidak akan berubah selama masih ada arogansi terhadap bahwa sewajarnya alam dieksploitasi demi kenikmatan hidup manusia. Cara berpikir demikian perlu diubah dengan menekankan tanggungjawab manusia untuk menjaga, merawat lingkungan dan dengan berempati terhadap alam sekitarnya demi keberlanjutan dan kehidupan yang lebih harmonis.

Simpulan

Dilihat dari konsep *multiple readings* sebagai yang dikemukakan oleh Hall, maka dalam kasus penelitian ini tidak ditemukan *oppositional reading* yang berarti. Karena nilai-nilai patriarki masih dilanggengkan oleh budaya, media massa dan pemerintah. Dengan kata lain pemaknaan beragam tidak banyak terjadi karena lingkungan atau sistem tidak mendukung seseorang untuk melakukan pemaknaan yang berbeda. Adapun konsep *power* yang diberikan pada khalayak untuk memberikan pemaknaan yang beragam hanya berlaku apabila budaya, media dan pemerintah dan kegiatan individu khalayak itu memungkinkan dia melakukan hal itu.

Sebagian kaum perempuan masih belum menyadari adanya bias gender dan meleak lingkungan yang mulai menggugah kesadaran mereka akan dampak pemanasan global, akibatnya mereka hanya memproduksi nilai-nilai kelompok dominan yang melihat lingkungan sebagai berkah yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia tanpa mempertimbangkan dampak eksploitasi tersebut bagi kelestarian alam di masa

mendatang. Padahal dalam kultur yang masih menekankan perempuan sebagai pemelihara kelestarian lingkungan, maka kaum ini pula-lah yang harus menyelamatkannya.

Dampak pemanasan global sudah tidak dapat dihindari, kegiatan penyuluhan bagi kaum perempuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim harus terus dilakukan dan tidak bisa mengandalkan sosialisasi lewat media semata. Karena media merupakan organisasi yang kompleks yang mempunyai standard berita, kepentingan ekonomi, politik dan sosial. Karena itu pendidikan ramah lingkungan harus dimulai sejak dini yang didukung oleh regulasi dan komitmen pemerintah dalam usaha mengurangi dampak pemanasan global yang terwujud dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelompok yang terpinggirkan. Singkat kata, mengubah perilaku untuk menjadi sadar lingkungan hanya bisa dilakukan melalui berbagai lintas tataran: individu, masyarakat, kultural.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Dikti Diknas RI yang telah memungkinkan dilakukannya penelitian ini melalui skema Penelitian Hibah Strategis Nasional Tahun 2008 yang menjadi dasar bagi penulisan artikel ini. Terimakasih kepada forum konferensi *AMIC (Asian Media Information and Communication Center)*, Singapore, yang telah member kesempatan seminar tentang tema ini pada bulan Juni 2010.

Daftar Pustaka

- Arivia, Gadis, 2006, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Atmakusumah, 1996, *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*, : Yayasan Obor, Jakarta.
- Coleman, Robin R. Means, 2002, *Say It Loud*, Routledge, New York.
- Corbert, Julia B., 2006, *Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Message*, Island Press, Wahington D.C.

- Cox, Robert, 2006, *Environmental Communication and the Public Sphere*, Sage Publication, Thousand Oaks, CA.
- Croteau, David & William Hoynes, 1997, *Media/Society: Industries, Image and Audiences*, Second Edition, Pine Forge Press, Thousand Oaks, CA.
- Croteau, David & William Hoynes, 2003, *Media/Society: Industries, Image and Audiences*, Third Edition. Pine Forge Press, Thousand Oaks, CA.
- Curran, James, 2002, *Media and Power*, London: Routledge.
- Denzin, Norman & Yvonna S. Lincoln (Eds.), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Dwi Susilo, Rachmat, 2008, *Sosiologi Lingkungan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gardiner, Mayling Oey, 1996, (eds), *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hagen, Ingunn & Janet Wasko, 2000, *Consuming Audience? Production and Reception in Media Research*, Cresskill, New Jersey: Hampton Press.
- Heiner, Robert, 2006, *Social Problems: An Introduction to Critical Constructionism*. Oxford University Press, New York.
- Jensen, Klaus Bruhn & Nicholas W. Jankowski, 2002, *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*, Routledge, New York.
- Kirk, Gwyn & Margo Okazawa-Rey, 1998, *Women's Lives: Multicultural Perspectives*, Mayfield Publishing Co. Mountain View, CA.
- Mosse, Julia Cleves, 1996, *Gender & Pembangunan* (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Patton, Michael Quinn, 2002, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, Third Edition, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Sarwono, Billy K., 2004, Pemaknaan Karir Politik Presiden Perempuan dalam Masyarakat Patriarki, *Jurnal Thesis* Volume III no-mor 2 Mei-Agustus, 2004, Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, Depok.
- Sarwono, Billy K., 2006, Conflict Concerning Working Women Existence in Media Industry (A Study on Cultural Production on A Female Radio in East Java) *Media – Asia Research Group 2006 Conference* — Miri, Sarawak Malaysia Februari, 2006.
- Sarwono, Billy K., 2009, Media Coverage of Climate Change: A Content Analysis of UNFCCC Coverage by Indonesian Newspapers, *Media Climate Workshop*, Maret 2009, Istanbul, Turkey.
- Sarwono, Billy K; Sunarto & Donna Asteria, 2009, Perempuan dan Ekologi: Suatu Studi Resepsi terhadap Perempuan Jakarta, *Hasil Penelitian Hibah Strategis Nasional 2008*, Universitas Indonesia, Depok.
- Sarwono, Billy K., 2010a, Media Coverage of Climate Change: A Content Analysis of UNFCCC Coverage by Indonesian Newspapers, *Media Climate Workshop*, February, Tampere – Finland.
- Sarwono, Billy K., 2010b, Indonesia: The Marginalised Motherland, Makalah akan dipresentasikan dalam *Media Climate Workshop*, November, 2010 Bergen-Norway.
- Sarwono, Billy K. & Sunarto, 2010, Journalists' Construction on Reporting Climate Change: A Study of an Elite Indonesian Newspaper Coverage on UNFCCC in Bali 2007 and Copenhagen 2009, *International Association Media Communication Research Conference*, Braga, Portugal 2010.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1995, *Psikologi Lingkungan*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Tong, Rosemarie, 2005, *Feminist Thought – A Comprehensive Introduction*, Mackays of Chatahm PLC, Kent.
- Van Zoonen, Liesbet, 1994, *Feminist Media Studies*, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Warren, Karen J., 2000, *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It is Why It Matters*, Rowman & Littlefield Publisher, New York.

Wimmer, Roger D. & Joseph R. Dominick, 2006, *Mass Media Research: An Introduction*. Thomas Wadsworth, Belmont, CA.

Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Puji Lestari/Machya Astuti Dewi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’
Yogyakarta, Jl. Babarsari no 2 Yogyakarta
Hp. 08156874669 / e-mail : pujilestariginting@yahoo.co.id

Abstract

Public communication phenomenon shows that there is gap between women and men. It caused by cross culture position which there is perspective differences tend to gender discriminative and linguistics culture differences. It is interested to study in order to anticipate that gap. Communication theory that discuss gender and communication issues that is: Genderlect Styles (Deborah Tannen); Standpoint Theory (Sandra Harding and Julia Wood); and Muted Group Theory (Cheris Kramarae). The research is aim to find PUG communication model which appropriate to staff and official condition of Provincial Department of DIY. Used research method is qualitative method with data collecting technique use Focus Group Discussion (FGD) and communication model trial. Pengarusutamaan Gender (PUG) and Anggaran Responsive Gender (ARG). The result obtained communication model of PUG-ARG is tested for two days. Source is from competent LSM, and interesting training model. The result of pre test showed that research subject was already understand about gender and gender responsive, but they were not implement it yet in work program, and the result of post test showed that the training participant from representation of Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo and Sleman regency department felt satisfy to material, method, and resource person. The result of PUG-ARG training could be implemented in each department. This model could smooth communication process making work process which responsive gender and implemented to program planning, implementation, and evaluation, and supported by all department personnel which have sufficient knowledge concerning PUG, for public harmonization and welfare, especially in DIY Province administration.

Abstrak

Fenomena komunikasi di masyarakat menunjukkan adanya gap antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan oleh posisi lintas budaya (*cross culture*), ada perbedaan perspektif diskriminatif gender dan perbedaan budaya linguistik. Penelitian ini bertujuan menemukan model komunikasi PUG yang sesuai dengan kondisi di Dinas Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan teori : *Genderlect Styles*,; *Standpoint Theory*, dan *Muted Group Theory* . Metode penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data *Focus Group Discussion* (FGD) dan ujicoba model komunikasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model komunikasi PUG-ARG yang diujicobakan, mengerti tentang gender dan responsive gender, namun belum mengimplementasikan dalam program kerja, dan hasil post test ternyata para peserta pelatihan dari perwakilan dinas Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman merasa puas dengan materi, metode, narasumber. Hasil pelatihan PUG-ARG dapat diimplementasikan di dinas masing-masing. Model ini dapat memperlancar dalam proses komunikasi pembuatan program kerja yang responsive gender dan diimplementasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta didukung oleh personil di semua dinas yang memiliki pengetahuan memadai tentang PUG, demi keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pemerintahan Provinsi DIY.

Kata kunci : komunikasi gender, Pengarusutamaan gender (PUG), Anggaran responsive gender (ARG)

Pendahuluan

Posisi perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses perencanaan pembangunan masih lemah. Data yang ditemukan oleh *Indonesia Rapid Decentralization Appraisal* (IRDA) menunjukkan bahwa akses masyarakat DIY dalam menentukan prioritas program pembangunan masih sangat rendah (Aksara, 2010). Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar usulan warga masyarakat termasuk perempuan lebih merupakan masukan yang ditampung saja, baik di tingkat desa atau kelurahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), maupun tingkat kabupaten dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang). Formulasi kebijakan sangat diwarnai oleh pola komunikasi *top down*, bukan *bottom up*. Pada saat Rakorbang di kabupaten, keputusan birokrat terlihat dominan, karena pejabat tersebut yang lebih berkuasa atas dana pembangunan. Model komunikasi *top down* dipilih pemerintah daerah dengan alasan efisiensi waktu dalam proses perumusan kebijakan (Idea, 2007). Fenomena yang patut menjadi keprihatinan adalah mulai dari desa atau kelurahan dan kecamatan yang lebih banyak diundang untuk hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah laki-laki, sehingga akses perempuan sangat kecil. Di tingkat kabupaten jumlah perempuan yang ikut menentukan program prioritas pembangunan amatlah kecil (Partini, 2004: 321).

Peneliti menemukan kendala implementasi PUG di Provinsi DIY lebih disebabkan oleh model komunikasi dalam sosialisasi yang kurang mengenai sasaran yaitu masih banyak ketimpangan antara kaum laki-laki dan perempuan di dinas-dinas Provinsi DIY. Dengan kata lain model komunikasi yang searah yang bersifat *top down* tersebut menyebabkan sosialisasi PUG-ARG menjadi kurang seimbang. Para pejabat lebih banyak dipegang kaum laki-laki, sementara program kerja dan anggaran juga disusun oleh kaum laki-laki yang kurang responsive gender. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman dinas-dinas pemerintah dalam memaknai apa sesungguhnya

PUG itu. Sebagian besar dinas masih keliru dalam menafsirkan program PUG sebagai program untuk kaum perempuan (Aksara, 2010). Hal itu nampak dalam jawaban sewaktu dilakukan FGD dengan dinas-dinas di provinsi DIY. Ketika fasilitator meminta kepada seluruh wakil dari dinas di provinsi DIY untuk menceritakan pelaksanaan program PUG di dinas masing-masing hampir seluruh peserta mengemukakan program-program untuk kaum perempuan yang dirancang oleh masing-masing dinas. Wakil dari Dinas Pariwisata misalnya, mengungkapkan beberapa program kegiatan tahun 2009 untuk perempuan, yaitu pelatihan kuliner masyarakat di kawasan Goa Mulo Gunung Kidul, Pantai Depok Bantul dan Trimulyo Bantul, pemilihan Dimas Diajeng DIY, Jogja *Fashion Week*, peringatan hari pangan sedunia, gelar batik "*Confidence with Beautiful Batik*", dan gelar makanan tradisional. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemukakan program pembinaan perempuan korban PHK yang dilatih membuat dan ketrampilan di bidang boga agar memiliki kemandirian ekonomi. Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi DIY menuturkan mengenai program pemberdayaan untuk kelompok wanita nelayan di tiga kabupaten agar bisa membantu suami, yaitu budidaya rumput laut dan budidaya ikan di lahan pasir oleh perempuan (FGD, 19 Agustus 2009). Pemaknaan bahwa PUG adalah identik dengan program untuk kaum perempuan tentu saja keliru karena program untuk perempuan belum tentu berperspektif gender. Alokasi anggaran untuk PUG sebagian dialokasikan untuk memajukan kaum perempuan. Menurut konsep ARG harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan perempuan saja. Pegawai laki-laki yang belum setara dengan perempuan, maka ARG juga ditujukan untuk program-program peningkatan PUG untuk pegawai laki-laki.

Kendala yang ditemukan pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG oleh dinas-dinas di provinsi DIY belum berjalan baik karena komunikasi gender yang kurang efektif. Berbagai program telah dirancang dan dilakukan sebagai bentuk sosialisasi mengenai arti penting PUG termasuk melalui media massa (Dewi, 2009). Berkaitan dengan hal itu perlu

dilakukan penelitian mengenai model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG yang merumuskan model alternatif untuk sosialisasi PUG-ARG agar program PUG di provinsi DIY dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan paparan tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana model komunikasi yang tepat untuk melakukan sosialisasi PUG dalam mengatasi kendala-kendala PUG di Provinsi DIY ?

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Instruksi Presiden atau Inpres No. 9 Tahun 2000). Dalam Inpres tersebut seluruh jajaran eksekutif yaitu, Gubernur, Bupati, Walikota harus melaksanakan PUG dalam semua tahapan pembangunan (Soeparman, 2006:35).

PUG merupakan strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan proyek di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi atau aspek gender yaitu melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subjek dan objek) yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memanfaatkan hasil pembangunan. Pada prinsipnya PUG menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya, demokrasi, pemerataan, keadilan dan kesetaraan (Silawati, 2006).

Otonomi Daerah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang adil bagi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan. Strategi yang selama ini dilakukan adalah melalui pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Dengan demikian keinginan, permasalahan, dan aspirasi laki-laki dan perempuan dapat diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hasil yang dicapai dapat

memberikan dampak yang sama bagi laki-laki dan perempuan (Sulistyo dan Dhatik Fatimah, 2010).

Manfaat dari model komunikasi PUG-ARG ini adalah: (1) Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya baik perempuan dan laki-laki. (2) Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender dapat membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. (3) PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. (4) PUG mengantar kepada pencapaian Keadilan dan Kesetaraan Gender serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. (5) Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial politik, Ekonomi suatu bangsa. (6) Dapat diidentifikasi apakah laki-laki & Perempuan memperoleh akses yang sama kepada Sumber Daya Pembangunan. (7) Laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan. (8) Laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. (9) Laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Dalam rangka menyatukan gagasan dari berbagai pihak tentang PUG-ARG, perlu disusun rencana tindak yang terkoordinasi. Berbagai upaya yang dilakukan dapat terlaksana secara optimal, asal ada proses komunikasi yang lancar antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (khususnya Pusat Studi Wanita) dan segenap masyarakat untuk melaksanakan PUG dan ARG.

Pembahasan mengenai gender dan komunikasi, dapat digunakan kerangka teori sebagai acuan, yaitu : *Genderlect Styles* (dari Deborah Tannen); *Standpoint Theory* (dari Sandra Harding dan Julia Wood); dan *Muted Group Theory* (dari Cheris Kramarae).

Menurut *Genderlect Styles* (Griffin, 2006:470), Deborah Tannent mendiskripsikan

ketidakmengertian (*misunderstanding*) antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan fakta bahwa fokus pembicaraan perempuan adalah koneksitas, sementara laki-laki pada pelayanan status dan kemandiriannya. *Genderlect Styles* membicarakan gaya bercakap-cakap -bukan apa yang dikatakan tetapi bagaimana mengatakannya. Tannen meyakini bahwa terdapat *gap* antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan masing-masing berada pada posisi lintas budaya (*cross culture*), untuk itu perlu mengantisipasi berkenaan dengan *gap* itu. Kegagalan mengamati perbedaan gaya berbicara dapat membawa masalah yang besar. Perbedaan-perbedaan itu terletak pada: (1) Kecenderungan feminis versus maskulin, hal ini harus dipandang sebagai dua dialek yang berbeda: antara superior dan inferior dalam pembicaraan. Komunitas feminis – untuk membangun *relationship* dan menunjukkan responsif. Komunitas maskulin – menyelesaikan tugas; menyatakan diri; dan mendapatkan kekuasaan. (2) Perempuan berhasrat pada koneksi versus laki-laki berhasrat untuk status. Koneksi berhubungan erat dengan kedekatan, status berhubungan erat dengan kekuasaan (*power*). (3) *Raport talk versus report talk*. Perbedaan budaya linguistik berperan dalam menyusun kontak verbal antara laki-laki dan perempuan. *Raport talk* adalah istilah yang digunakan untuk menilai obrolan perempuan yang cenderung terkesan simpatik. *Report talk* adalah istilah yang digunakan menilai obrolan laki-laki yang cenderung apa adanya, pokoknya sampai. Berkenaan dengan kedua nilai ini, Tannen mendeskripsikan temuan-temuan yang dikategorikan sebagai berikut, (Griffin, 2006:474): (a). *Public speaking versus private speaking*, dalam kategori ini ditemukan bahwa perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi. Sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat pembicaraan publik, laki-laki menggunakan pembicaraan sebagai pernyataan fungsi perintah; menyampaikan informasi; meminta persetujuan. (b). *Telling a story*, cerita-cerita menggambarkan harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai si pencerita. Pada kategori ini laki-laki lebih banyak bercerita dibanding perempuan-khususnya tentang *guyonan*. Cerita *guyonan* merupakan suatu cara maskulin

menegosiasikan status. (c). *Listening*, perempuan cenderung menjaga pandangan, sering *manggut-manggut*, bergumam sebagai tanda telah mendengarkan dan menyatakan kebersamaannya. Laki-laki dalam hal mendengarkan berusaha mengaburkan kesan itu- sebagai upaya menjaga statusnya. (d). *Asking questions*, ketika ingin bicara untuk menyela pembicara, perempuan terlebih dahulu mengungkapkan persetujuan. Tannen menyebutnya sebagai kooperatif-sebuah tanda *raport* simpatik daripada kompetitif. Pada laki-laki, interupsi dipandang oleh Tannen sebagai *power* atau kekuasaan untuk mengendalikan pembicaraan. Dengan kata lain, pertanyaan dipakai oleh perempuan untuk memantapkan hubungan, dan untuk memperhalus ketidaksetujuan dengan pembicara, sedangkan laki-laki memakai kesempatan bertanya sebagai upaya untuk menjadikan pembicara menjadi lemah. (e). *Conflict*, perempuan memandang konflik sebagai ancaman dan perlu dihindari. Laki-laki biasanya memulai konflik namun kurang senang memeliharanya.

Tannen berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan berkomunikasi yang dihadapi oleh pria dan wanita sama halnya dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang dengan latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Ini menjelaskan mengapa perbedaan kelamin tetap masih menimbulkan masalah dalam komunikasi. Teori Tannen memperlihatkan keterkaitan antara komunikasi antargender di Indonesia. Teori-teori ini dapat dipakai untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam komunikasi antargender yang banyak diwarnai oleh nilai-nilai budaya dan agama (Basalama, 2010:836).

Menurut *Standpoint Theory* (Griffin, 2006:482), Sandra Harding dan Julia T. Wood sepakat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perspektif terpisah, dan tidak memandang sebagai sesuatu yang setara. Lokasi-lokasi yang berbeda dalam hirarki sosial mempengaruhi apa yang dilihat. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan sebagai minoritas mempersepsi dunia secara berbeda daripada kelompok yang berkuasa atau mayoritas laki-laki. *Standpoint* merupakan tempat dari mana melihat pemandangan dunia dan apapun sudut

pandangannya. Sinonim dari istilah ini adalah *view-point, perspective, outlook and position*.

Dasar filosofi teori ini adalah perjuangan kelas seperti filsafat kaum proletar karya Karl Marx dan Friederich Engels (Griffin, 2006, 482). Sandra Harding dan Julia T. Wood menganjurkan adanya perjuangan terhadap diskriminasi gender. Tokoh tersebut tidak mencirikan perbedaan *gender* pada insting atau biologis atau intuisi, tetapi perbedaan itu sebagai hasil harapan-harapan budaya dan perlakuan kelompok dalam hal menerima kelompok yang lain. Budaya tidak dialami secara identik, budaya adalah aturan hirarkhi sehingga kelompok yang mempunyai posisi cenderung menawarkan kekuasaan, kesempatan pada anggota-anggotanya. Dalam hal ini teori ini menyatakan bahwa perempuan terposisikan pada hirarkhi yang rendah dibanding posisi laki-laki. Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi di mana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, dan simbolis.

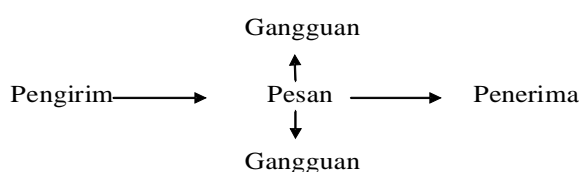
Menurut *Muted Group Theory* atau Teori Kelompok Bungkam (West and Turner, 2008: 200), Griffin, 2006:494), Cheri Kramarae memandang pembicaraan laki-laki dan perempuan sebagai pertukaran yang tidak setara antara pihak yang mempunyai kekuasaan di masyarakat dan yang tidak. Berdasarkan analisisnya bahwa perempuan kurang bisa mengartikulasikan diri atau memperjuangkan diri dibanding laki-laki di sektor publik. Hal ini disebabkan kata dalam bahasa dan norma-norma yang digunakan itu telah dikendalikan oleh laki-laki. Sepanjang pembicaraan perempuan sebagai tentatif dan *sepele*, posisi dominan laki-laki aman. Kramarae yakin bahwa kebisuan perempuan itu cenderung menipis, kontrol dalam kehidupan akan meningkat. Cheri Kramarae mengemukakan asumsi-asumsi dasar dari teori ini sebagai berikut: (1) Perempuan menanggapi dunia secara berbeda dari laki-laki karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian pekerjaan. (2) Berdasarkan dominasi politiknya, sistem persepsi laki-laki menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas bagi pemikiran alternatif perempuan. (3) Agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah

perspektif ke dalam sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki.

Kramarae (dalam West and Turner, 2008: 200) mengemukakan sejumlah hipotesis mengenai komunikasi perempuan berdasarkan beberapa temuan penelitian. (1) Perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dibanding laki-laki. (2) Perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan. (3) Perempuan telah menciptakan cara-cara ekspresinya sendiri di luar sistem laki-laki yang dominan. (4) Perempuan cenderung untuk mengekspresikan lebih banyak ketidakpuasan tentang komunikasi dibanding laki-laki. (5) Perempuan seringkali berusaha untuk mengubah aturan-aturan komunikasi yang dominan dalam rangka menghindari atau menentang aturan-aturan konvensional. (6) Secara tradisional perempuan kurang menghasilkan kata-kata baru yang populer dalam masyarakat luas; konsekuensinya, mereka merasa tidak dianggap memiliki kontribusi terhadap bahasa. (7) Perempuan memiliki konsepsi humoris yang berbeda dari pada laki-laki.

Teori-teori tersebut ada relevansinya dengan fenomena masyarakat khususnya para pegawai di lingkungan dinas-dinas Provinsi DIY. Budaya masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan masih mewarnai proses komunikasi pada sebagian besar dinas-dinas di Provinsi DIY. Hal tersebut dapat memicu berbagai persoalan komunikasi yang lain, seperti pemilihan pejabat, pembagian tugas, dan lain-lain, maka perlu ditawarkan solusi yang terbaik melalui penelitian ini.

Model komunikasi paling sederhana yang dapat digunakan untuk menganalisis proses sosialisasi PUG-ARG adalah adanya pengirim, pesan, dan penerima seperti gambar berikut ini :



Gambar 1. Model Komunikasi Linear

(Sumber : diadaptasi dari West & Turner, 2007: 11).

Model ini menunjukkan tiga unsur esensi komunikasi yaitu pengirim, pesan, dan penerima, bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh seorang dapat mengirimkan pesan, tetapi bila tidak ada yang menerima atau yang mendengar, komunikasi tidak akan terjadi. Model komunikasi yang terperinci, dengan unsur-unsur penting dalam suatu proses sosialisasi yaitu: Sumber, pesan, dan penerima.

Sumber (*source*) atau pengirim mengendalikan berbagai pesan yang dikirim, susunan yang digunakan, dan saluran mana yang akan digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Mengubah pesan ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol verbal atau nonverbal yang mampu memindahkan pengertian, seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka, gerakan dan sebagainya. Langkah berikutnya sumber mengirimkan pesan melalui berbagai saluran komunikasi lisan. Manfaat komunikasi lisan, antarpribadi adalah kesempatan untuk berinteraksi antara sumber dan penerima, memungkinkan komunikasi nonverbal (gerakan tubuh, intonasi suara, dan lain lain) disampaikannya pesan secara tepat, dan memungkinkan umpan balik diperoleh. Sedangkan komunikasi tertulis dapat disampaikan melalui media seperti: memo, surat, laporan, catatan, buletin, surat kabar, dan sebagainya. Komunikasi tulisan mempunyai kelebihan dalam penyediaan laporan atau dokumen untuk kepentingan masa mendatang.

Proses selanjutnya adalah penerimaan pesan oleh pihak penerima. Pada umumnya penerimaan pesan melalui panca indera. Banyak pesan penting yang tidak diterima oleh seseorang karena orang tersebut tidak menerima pesan karena kesalahan dalam memilih media yang tepat, atau hambatan lainnya, seperti salah persepsi. Pada penyampaian maupun penerimaan pesan sering terdapat hambatan-hambatan komunikasi.

Proses *decoding* menyangkut pemahaman simbol-simbol yang dipergunakan oleh pengirim (sumber). Ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang, kebudayaan, pendidikan, lingkungan, praduga dan gangguan di sekitarnya. Hambatan dapat terjadi apabila muncul perbe-

daan budaya yang menyebabkan perbedaan persepsi.

Proses terakhir adalah umpan balik. Setelah pesan diterima dan diterjemahkan, penerima memberikan respons, jadi komunikasi adalah proses yang berkesinambungan dan tak pernah berakhir. Inilah yang disebut bahwa komunikasi yang efektif dapat menimbulkan interaksi yang baik dalam melaksanakan tujuan komunikasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat sebagai penelitian evaluatif, yaitu akan mengevaluasi pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam era Otonomi Daerah di provinsi DIY untuk dijadikan dasar pemetaan hambatan-hambatan yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan Program PUG di provinsi DIY. Dari hasil evaluasi dirumuskan model komunikasi alternatif untuk sosialisasi PUG di provinsi DIY agar implementasi PUG berjalan lebih baik.

Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) provinsi DIY. Wawancara menggali informasi mengenai program-program pelatihan PUG yang dilakukan oleh BPPM. Dari wawancara ini peneliti mendapatkan data mengenai kegiatan pelatihan PUG yang dirancang untuk diselenggarakan tahun 2010.

Selanjutnya dilangsungkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang subjek-subjek penelitian sebagai berikut: (1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) provinsi DIY. (2) Kepala Bappeda provinsi DIY. (3) Forum PUG di DIY. (4) Forum agama. (5) Narasumber pelatihan PUG di DIY. (6) Aktivis perempuan dari LSM IDEA & Aksara. (7) Pusat Studi Wanita (PSW) UPN.

Data yang dikumpulkan melalui FGD meliputi masukan dari para peserta mengenai materi dan metode pelatihan PUG yang tepat guna dan tepat sasaran. Sementara itu data sekunder dihimpun dari beberapa sumber tertulis sebagai berikut: (1) Laporan kegiatan sosialisasi PUG

oleh BPPM provinsi DIY. (2) Laporan kegiatan advokasi PUG dari LSM-LSM perempuan. (3) Data internet mengenai program-program pelatihan PUG di berbagai tempat, di dalam negeri Indonesia, maupun di luar negeri.

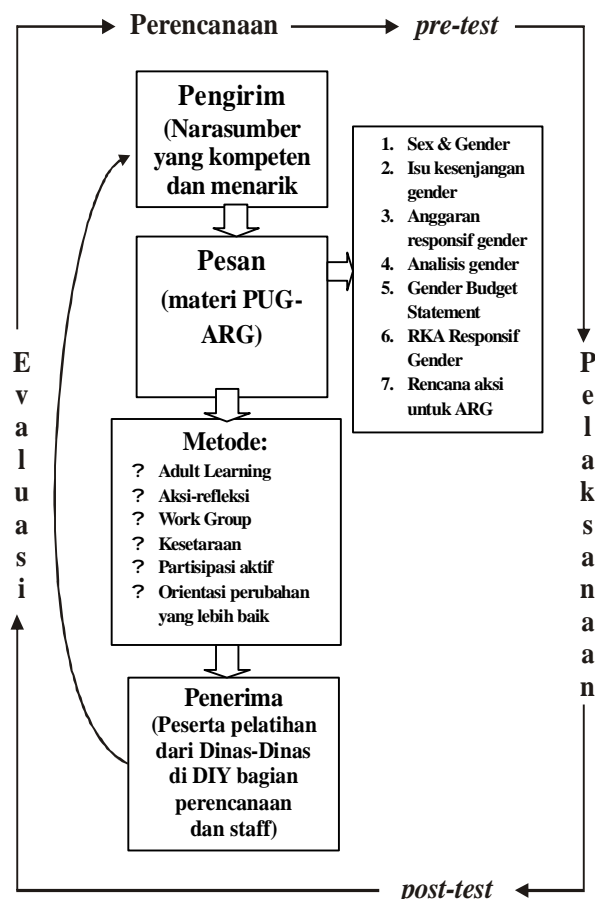
Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Pertama-tama keseluruhan data disajikan dalam display data, kemudian direduksi mana yang relevan dan mana yang tidak dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk kemudian dibuat kategorisasi. Tahap berikutnya adalah membuat interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian berupa model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG di provinsi DIY.

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15/2008 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 119/2009, menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan (Zakiah, 2009).

Pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat dan kalangan perguruan tinggi. Peran aktif dari masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya, sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan. Adanya keterbatasan sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan dan luasnya wilayah, serta besarnya kebutuhan masyarakat. Hal ini menuntut adanya sinergi yang harmonis dari semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang adil dengan melaksanakan strategi PUG.

Pelaksanaan PUG dilakukan guna menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Apakah kebijakan dan program atau kegiatan pembangunan di DIY sudah responsive



Gambar 2. Model Komunikasi dalam Sosialisasi PUG-ARG di Provinsi DIY.

gender? Hal ini dapat dicermati melalui proses pembangunan dalam: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi masyarakat secara adil.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Model Komunikasi PUG-ARG di Provinsi DIY

Penelitian terdahulu (Lestari, Machya, dan June, 2009) menunjukkan bahwa program PUG di provinsi DIY belum berjalan baik. Berbagai pelatihan PUG sudah sering dilakukan dengan tujuan agar semua dinas dapat merespon dengan baik program PUG. Berdasarkan masukan dari hasil FGD dengan wakil-wakil Dinas di seluruh DIY dan kalangan aktivis LSM yang telah berulang kali mengikuti atau melakukan pelatihan PUG dirumuskanlah model alternatif. Model yang ditawarkan oleh penelitian ini bertujuan agar pro-

gram PUG di provinsi DIY dapat berjalan baik yaitu model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG bagi aparat dinas-dinas di seluruh kabupaten di provinsi DIY dengan materi dan metode yang benar-benar mengarah kepada pemahaman seutuhnya mengenai arti penting PUG-ARG. Sosialisasi berupa pelatihan disertai tindakan konkret mengimplementasikan PUG-ARG dalam program-program masing-masing Dinas Pemerintah. Model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.

Model ini menunjukkan empat unsur esensi komunikasi yang saling berkaitan yaitu pengirim, pesan, metode, dan penerima, apabila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Sebagai contoh pemberi materi pelatihan PUG-ARG dapat mengirimkan pesan, tetapi bila tidak ada yang menerima atau yang mendengarkan, komunikasi tidak akan terjadi.

Model komunikasi yang terperinci, dengan unsur-unsur penting dalam pelatihan PUG-ARG tersebut yaitu : (1). Sumber mempunyai gagasan, pemikiran atau kesan tentang PUG-ARG di Yogyakarta, (2). Gagasan diterjemahkan atau disandikan ke dalam kata-kata dan simbol-simbol verbal dan nonverbal, (3). Gagasan disampaikan atau dikirimkan dengan metode kepada penerima, (4). Penerima menangkap simbol-simbol secara verbal dan nonverbal, (5). Simbol diterjemahkan kembali atau diartikan kembali menjadi suatu gagasan oleh peserta pelatihan, (6). Penerima yaitu peserta pelatihan mengirimkan berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Berbagai pertanyaan, tanggapan dan hasil *post test* menunjukkan adanya umpan balik.

Sumber (*source*) atau pengirim mengendalikan berbagai pesan yang dikirim, dan metode yang digunakan untuk mengirim pesan tersebut. Mengubah pesan ke dalam berbagai bentuk simbol-simbol verbal atau nonverbal yang mampu memindahkan pengertian, seperti kata-kata percakapan atau tulisan, angka, gerakan, permainan, dan sebagainya.

Metode pada gambar 2 menunjukkan bahwa model komunikasi dalam sosialisasi PUG-

ARG di DIY mencakup metode : Adult Learning, Aksi-refleksi, Work Group, Kesetaraan, Partisipasi aktif, Orientasi perubahan yang lebih baik. *Adult Learning* (pembelajaran bagi orang dewasa), artinya proses komunikasi yang menganggap bahwa orang yang diberi pelatihan sudah mengerti tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan bisa disebabkan oleh faktor biologis atau faktor bawaan sejak lahir dan konstruksi sosial budaya setempat. Perbedaan kedua inilah yang didiskusikan dengan Aksi-Refleksi. Aksi yang dilakukan melalui berbagai program pemerintah, diikuti refleksi atas program-program yang sudah dijalankan, apakah sudah responsif gender, adil gender atau masih bias gender. Prinsip Kesetaraan Gender harus diperhatikan dalam model komunikasi PUG ini, melalui metode *Work Group* (kerja kelompok) pelatihan PUG dapat membuat perencanaan program kerja yang *responsive* dan adil gender pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Prinsip orientasi perubahan yang lebih baik dilakukan guna mencapai tujuan organisasi yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan partisipasi aktif setiap anggota organisasi yang terlibat (Aksara, 2010).

Gambar 2 mendeskripsikan proses penyampaian pesan dalam pelatihan PUG-ARG di DIY. Proses komunikasi akan mudah diterima oleh anggota organisasi apabila pesan-pesan yang disampaikan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Pesan dalam model komunikasi dalam sosialisasi PUG ini diatur dari materi dasar tentang sex dan Gender, Isu Kesenjangan Gender di DIY, Anggaran Responsif Gender, Analisa Gender, *Gender Budget Statement*, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Responsif Gender, dan Rencana Aksi untuk Anggaran Responsive Gender (ARG). Pesan yang lengkap dari materi dasar sampai keahlian untuk menyusun program kerja dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja responsive gender, dapat memperlancar komunikasi pengarusutamaan gender di Provinsi DIY (Aksara, 2010).

Proses komunikasi dalam pelatihan terdiri dari tiga tahapan: (1) persiapan atau perencanaan, (2) pelaksanaan pelatihan, dan (3) evaluasi pelatihan.

Tahap Persiapan atau Perencanaan

Pada tahap persiapan pelatihan peneliti bekerjasama dengan seksi PUG Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat provinsi DIY menyeleksi peserta yang akan diundang dalam pelatihan. Seleksi dilakukan dengan melihat berkas-berkas daftar nama peserta pelatihan PUG yang pernah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM). Dengan mempertimbangkan kriteria bahwa peserta yang akan diundang haruslah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, maka ditetapkanlah bahwa dari masing-masing kabupaten atau kota di DIY diambil satu dinas sebagai sampel. Dari masing-masing Dinas ini diundang 2 orang, terdiri dari 1 orang dari level pengambil kebijakan dan 1 orang staf. Dalam perkembangannya wakil dari Kota Yogyakarta akhirnya tidak diundang karena kota Yogyakarta telah memiliki reputasi yang bagus dalam implementasi PUG. Dengan demikian peserta yang diundang adalah wakil-wakil dari kabupaten Sleman (2 orang), kabupaten Bantul (2 orang), kabupaten Kulonprogo (2 orang), dan kabupaten Gunungkidul (2 orang) yang masing-masing terdiri dari 1 orang pengambil kebijakan dan 1 orang staf. Komposisi jenis kelamin juga diperhatikan, sehingga dari keseluruhan jumlah peserta yang diundang terdapat komposisi yang berimbang antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki. Pada tahap persiapan ini pula dibahas mengenai materi-materi yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta sehingga implementasi PUG di Dinas-Dinas pemerintah bisa berjalan baik. Materi-materi sengaja dipilih agar tepat sasaran dan tujuan, namun efisien dalam pelaksanaan. Hal ini terutama dengan pertimbangan bahwa personil yang menduduki kapasitas pengambil kebijakan tidak akan bisa berlama-lama meninggalkan tugas-tugasnya di kantor. Selanjutnya pada tahap persiapan ini peneliti bersama-sama dengan seksi PUG BPPM memilih-milih fasilitator dan narasumber yang diharapkan dapat membuat suasana pelatihan santai dan menyenangkan, sehingga peserta tidak jenuh dan materi diserap dengan baik.

Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Setelah tahapan persiapan selesai, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilangsungkan selama dua hari. Materi-materi yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut: Hari pertama: (1) Perbedaan seks dan gender. (2) Isu kesenjangan gender di DIY. (3) Anggaran responsif gender dan ABK. Hari kedua: (1) Analisis gender. (2) *Gender Budget Statement*. (3) RKA Responsif Gender. (4) Rencana aksi untuk ARG. Pada sesi pertama hari pertama, para peserta dibuka pemahaman dan wawasan mereka bahwa seks dan gender adalah berbeda. Fakta mengatakan bahwa Gender : (1) Perempuan sebagai pendamping dan laki-laki sebagai pemimpin (Gender). (2) Lebih banyak guru perempuan dari pada laki-laki, tetapi lebih banyak kepala sekolah laki-laki dari pada perempuan (Gender). (3) Tingkat informasi yang lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan (Gender). (4) Pada proses bencana, perempuan lebih lemah dalam menghadapi bencana karena dalam menghadapi bencana tidak hanya kekuatan fisik namun juga ketahanan (Gender). (5) Dalam pekerjaan yang sama, upah perempuan lebih rendah dari pada laki-laki (Gender). (6) Perempuan halus, laki-laki tidak (Gender). (7) Pengaruh hormonal laki-laki saat masa puber (Gender). (8) Ibu membelikan anak perempuannya baju warna *pink*, sedangkan baju untuk budi warna biru (Gender). Materi-materi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan teori *Genderlect Styles* yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu terletak pada: (1) Kecenderungan feminis versus maskulin, (2) Perempuan berhasrat pada koneksi versus laki-laki berhasrat untuk status, (3) *Raport talk versus report talk* (Griffin, 2006:470).

Materi tentang Seks bahwa: (1) Perempuan melahirkan (Seks). (2) Angka kematian perempuan yang tinggi akibat hamil, diharapkan angka kematian perempuan sama dengan laki-laki (Seks).

Materi tentang seks dan gender: (1) Perempuan menstruasi dan merasakan sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan (Seks dan Gender). (2) Saat menstruasi, payudara anak perempuan mulai membesar, maka seorang ibu

mulai membelikan *Breast Holder* (BH) (Seks dan Gender).

Pada penyampaian materi pertama juga dijelaskan bahwa seks adalah jenis kelamin biologis. Ada beberapa perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan menstruasi, laki-laki memiliki jakun, perempuan menyusui, laki-laki tidak dapat menyusui, perempuan memiliki rahim dan berkapasitas melahirkan, sementara laki-laki tidak bisa mengandung. Seks atau jenis kelamin adalah kodrati yang dimiliki sejak lahir.

Pengertian Gender berbeda dengan jenis kelamin. Seringkali orang menyebut gender adalah jenis kelamin sosial. Dalam hal ini ada persoalan konstruksi sosial, peran, akses, konstruksi agama, konstruksi budaya sangat berperan. Fokus Gender adalah laki-laki dan perempuan. Gender bisa berubah dari waktu- ke waktu sesuai tempat dan budaya. Hal ini senada dengan *Standpoint Theory* (Griffin, 2006:482), bahwa perempuan terposisikan pada hirarkhi yang rendah dibanding posisi laki-laki. Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi di mana kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material, dan simbolis (sosial budaya).

Konstruksi gender dibedakan oleh sifat, peran dan fungsi, serta posisi. Peran perempuan di sektor domestik, sedangkan laki-laki berperan di sektor publik. Proses konstruksi gender yang pertama adalah identitas seks yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa; kedua adanya konstruksi gender yang dibuat oleh manusia seperti atribut gender (Maskulin, Feminim), peran gender, beban gender, hingga status gender. Apakah laki laki dan perempuan mendapatkan kesetaraan dalam mengakses informasi merupakan salah satu permasalahan dalam gender. Empat hal utama permasalahan gender adalah persoalan akses, peran, manfaat, kontrol.

Beberapa contoh ketidakadilan gender misalnya: laki-laki mendapat pendidikan yang lebih tinggi, karena laki-laki akan mencari pekerjaan untuk keluarga; perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga dalam pekerjaan tetapi suami memiliki tunjangan untuk keluarga dalam posisi perusahaan; ada persoalan pengupahan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa

contoh ketimpangan gender, laki-laki memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dari pada perempuan, persoalan subordinasi yang menempatkan perempuan sebagai pendamping dalam rumah tangga yang cenderung tidak ditanya pendapatnya, adanya pelabelan tentang perempuan yang lemah, tidak pantas melakukan pekerjaan berat, adanya persoalan marjinalisasi yang mengesampingkan perempuan, adanya beban ganda bahwa seorang perempuan bergerak dalam sektor publik dan domestik, dan yang terakhir adanya kekerasan secara psikologis dan fisik yang menimpa perempuan (Data KDRT yang menimpa perempuan sebanyak 91% sedangkan yang dialami oleh laki – laki 9%).

Pada sesi kedua peserta diperkenalkan dengan profil kesenjangan gender di provinsi DIY. Profil Gender DIY jauh lebih tinggi dari pada nasional pada tahun 2006, namun masih banyak persoalan yang terjadi di Yogyakarta. Beberapa isu gender di DIY: (1) Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. (2) Akses pendidikan dasar. (3) Akses layanan kesehatan. (4) Akses perlindungan pekerja perempuan. (5) Kekerasan perempuan dan anak. (6) Minimnya perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Meskipun banyak kemajuan dalam pembagian peran pada jabatan publik, berbagai ketimpangan masih sering terjadi yaitu: (1) Kecenderungan pemisahan ruang publik antara laki laki dan perempuan. (2) Posisi kunci di jabatan publik masih banyak didominasi oleh laki-laki. (3) Perimbangan jumlah pegawai. (4) Perempuan di pos tradisional (administrasi, kesehatan, pendidikan).

Dari data yang diperoleh tahun 2005, jumlah antara perempuan dan laki-laki yang bekerja di instansi pemerintah masih sangat tidak seimbang. Masih lebih banyak jumlah laki-laki. Keterwakilan perempuan di legislatif dari tahun 1994-2004, tertinggi dipegang oleh kabupaten Sleman. Hal ini senada dengan *Muted Group Theory* atau Teori Kelompok Bungkam (West and Turner, 2008: 200), Griffin, 2006:494), bahwa: (1) Perempuan menanggapi dunia secara berbeda dari laki-laki karena pengalaman dan aktivitasnya berbeda yang berakar pada pembagian pekerja-

an. (2) Berdasarkan dominasi politiknya, sistem persepsi laki-laki menjadi lebih dominan, menghambat ekspresi bebas bagi pemikiran alternatif perempuan. (3) Agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah perspektif ke dalam sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki.

Tahap Evaluasi Pelatihan

Pada tahap ini dilakukan penilaian atas proses perencanaan dan pelaksanaan, baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta pelatihan. Penyelenggara yaitu tim peneliti bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di DIY melakukan evaluasi bersama. Hasilnya bahwa proses perencanaan (materi atau pesan, metode, media atau sarana dan prasarana, fasilitator, pemilihan peserta, tempat, waktu, dan sebagainya) sudah baik dan tidak ada masalah. Hal ini dikroscek dengan hasil evaluasi dari peserta melalui angket (*post test*), bahwa hampir semua merasa puas mengikuti pelatihan PUG dengan model tersebut. Hasil *post test* jugadiketahui bahwa peserta sudah mengerti semua materi yang diberikan, sudah mampu membuat program kerja yang responsive gender, dan akan menindaklanjutinya pada SKPD masing-masing. Jadi hasil pelatihan dengan model komunikasi pelatihan PUG seperti ini dapat langsung diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing.

Simpulan

Program sosialisasi PUG yang pernah dilakukan di provinsi DIY belum sepenuhnya membawa dampak yang menggembirakan bagi kondisi hidup perempuan di provinsi DIY, terutama di tingkat kabupaten, posisi perempuan masih relatif marginal. Paling tidak hal ini terlihat dari kondisi hidup perempuan di kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Sementara itu di kota Yogyakarta kondisi perempuan relatif sudah bagus, karena program PUG terimplementasikan dengan baik di kota Yogyakarta.

Berdasarkan evaluasi berbagai pelatihan PUG yang sudah pernah dilakukan di provinsi DIY

terlihat bahwa berbagai sosialisasi yang sudah dilakukan tersebut terdapat beberapa kendala kurangnya komunikasi misalnya: aspek pemberi pesan, pesan atau materi, metode, maupun segmen penerima pesan atau peserta pelatihan belum tepat sasaran. Kelemahan yang ditemukan dari hasil penelitian mengapa pelatihan PUG tidak berhasil guna adalah karena peserta yang hadir selalu berganti-ganti dan terlebih lagi peserta bukan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Hal ini berakibat usai pelatihan materi-materi yang telah diperoleh peserta selama pelatihan tidak bisa ditindaklanjuti.

Penelitian ini mencoba menawarkan model komunikasi dalam sosialisasi PUG-ARG dengan harapan dapat lebih berhasil guna dalam mendorong kesetaraan gender. Aspek utama yang ditekankan dari model komunikasi PUG-ARG ini adalah peserta haruslah orang yang memiliki kewenangan atau terlibat dalam pembuatan keputusan, terutama berkaitan dengan anggaran. Materi juga sengaja diringkas dan dipilih materi-materi yang secara langsung bisa mengubah nasib perempuan.

Dari hasil penelitian ini setidaknya terlihat adanya indikator keberhasilan. Hal ini terlihat dari antusiasisme peserta pelatihan yang sangat bersemangat mengikuti seluruh materi. Indikator lain adalah bahwa seluruh peserta menyerap dengan baik seluruh materi, terbukti dari jawaban-jawaban yang diberikan dalam *post test*. Indikator penting lain adalah adanya komitmen dari seluruh peserta untuk menindaklanjuti hasil yang sudah didapatkan dalam pelatihan. Peserta berkomitmen untuk mulai mencermati anggaran di Dinas masing-masing dan merevisi anggaran yang lebih responsif gender.

Saran

Peneliti menyarankan kepada semua pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan, terutama Bappeda dan BPPM agar secara terus-menerus melakukan pelatihan-pelatihan PUG dalam format yang lebih ringkas, tapi berhasil guna. Setiap tahap pelatihan berlangsung dua hari dan kemudian dilanjutkan di lain waktu dengan durasi waktu dua hari juga,

dan demikian seterusnya hingga peserta sudah mencapai tahap *advance*. Dalam hal ini peserta haruslah orang yang sama, yaitu orang yang memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesetaraan gender dan yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan dan terlibat dalam perumusan anggaran.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dirjen Dikti Diknas RI yang telah membiayai penelitian berjudul “Pengarutamaan Gender (PUG) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” melalui skema Penelitian Hibah Kompetitif Penelitian sesuai Prioritas Nasional Batch I Tahun 2009-2010 yang menjadi dasar penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dekan FISIP, ketua dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPN “Veteran” Yogyakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, serta peserta FGD dan pelatihan PUG-ARG dari dinas-dinas di Provinsi DIY yang telah membantu proses penelitian tentang PUG di DIY. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu penelitian dan publikasi di Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN “Veteran” Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Aksara, LSM, 2010, *Alat-Alat Analisa Anggaran*. Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) kerjasama LPPM UPN-BPPM DIY, 4-5 Agustus 2010.
- Aksara, LSM, 2010, *Sex dan Gender : Jenis Kelamin Sosial dan Biologis*, Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) kerjasama LPPM UPN-BPPM DIY, 4-5 Agustus 2010.
- Aksara, LSM, 2010, *Indikator Anggaran Responsif Gender*. Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) kerjasama LPPM UPN-BPPM DIY, 4-5 Agustus 2010.
- Basalama, Nonny, 2010, *An Analysis of Communication Difficulties Across Culture and Gender*, *Jurnal INOVASI*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2010 ISSN 1693-9034.
- BPPM, 2009, *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DIY*, BPPM, Yogyakarta.
- Dewi, Machya Astuti, 2009, *Media Massa dan Penyebaran Isu Perempuan*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi B*, Volume 7 Nomor 3.
- Griffin, EM., 2006, *A First Look At Communication Theory*, Mc Graw Hill, New York.
- IDEA, 2007, *Diskusi 16 Hari Tanpa kekerasan, Kantor Pemberdayaan Perempuan*, Yogyakarta, 10 Desember 2007.
- Lestari, Machya, dan June, 2009, *Kendala Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka Otonomi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan penelitian Hibah Kompetitif sesuai Prioritas nasional Batch I.
- Partini, 2004, *Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, Volume 7, Nomor 3.
- Silawati, Hartian, 2006, *Pengarutamaan Gender: Mulai dari Mana?* dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 50.
- Soeparman, Surjadi, 2006, *Mengapa Gender-mainstreaming Menjadi Aksi Nasional?* dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 50.
- Subiyantoro, Eko Bambang, 2006, *Mengintip Perspektif Gender Dalam Dokumen APBD dalam Jurnal Perempuan* edisi 46.
- Sulistyo, Susilo Budhi & Dati Fatimah, 2010, *Potret Yogyakarta dan Isu Kesenjangan Gender*, LSM AKSARA, Yogyakarta.
- Zakiah, Wasingatu, 2009, *Sekilas Tentang Gender Budget: Bahan Pemantik Workshop Analisis PUG Bidang Kesejahteraan Sosial*, IDEA, Yogyakarta,

West, Richard & Lynn H. Turner, 2007, *Introducing Communication Theory*, McGraw-Hill Companies. New York.

West, Richard & Lynn H. Turner, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, buku 2, Ter-jemahan, Editor Nina Setyaningsih, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

Two Ways Communication: Sebuah Model Pembelajaran dalam Komunitas Samin di Sukolilo Pati

Rini Darmastuti/Mustika Kuri Prasela

Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711, telp (0298) 321212

Hp. 08156595814/e-mail: rindarmas@yahoo.com, mustikakuri@staff.uksw.edu

Abstract

Learning process which is called school by Samin community is still going until today. It is called 'sinau nulis'. For them, learning is not determined on the process of knowing alphabet and numbers, but more over knowing as lifelong learning. That is learning on how to survive in life and everything that is needed to stand strong when they have to cope with challenges. Then so, 'sinau nulis' is only a small part of what they interpret as learning. However, learn to read and learn to write is an important part of the daily life of the Samin Community. For the sake of trading transaction and communication through media, they learn reading and writing competence of Bahasa Indonesia. While formal school is using classical method of learning which is in a way can be deemed as an one way of communication process where the teacher teaches students without any significant degree of chance to respond directly, the process of Samin lifelong learning is interestingly recognized as a practice of two ways communication. Hence, this paper will firstly describe some findings regarding the pattern of two way communication in 'sinau nulis' and then secondly promote that model as a resolution of way of learning.

Abstrak

Proses pembelajaran yang sering disebut oleh komunitas Samin sebagai sekolah masih berlangsung sampai saat ini. Proses pembelajaran ini sering disebut dengan '*Sinau Nulis*'. Dalam kehidupan mereka, belajar bukan hanya dipahami sebagai proses untuk mempelajari huruf dan angka, tetapi dipahami sebagai pembelajaran seumur hidup. Secara khusus, berarti belajar tentang bagaimana bertahan hidup dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tetap kuat dalam menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, '*Sinau Nulis*' hanya dilihat sebagai bagian kecil dari apa yang mereka pahami sebagai belajar. Meski demikian, belajar membaca dan menulis tetap merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari komunitas Samin. Hal ini terjadi karena pada saat ini mereka mulai menggunakan HP, teknologi dan sepeda motor. Untuk bertransaksi dan menggunakan media massa, mereka membutuhkan kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Sayangnya proses belajar baca dan tulis yang saat ini mereka selenggarakan belum bisa menyebar ke seluruh komunitas karena keterbatasan guru, tempat dan waktu. Sisi yang menarik untuk dicermati adalah ppada saat proses pembelajaran seumur hidup ini dipraktekkan dengan system komunikasi dua arah. Sehingga lebih lanjut, tulisan ini akan menggambarkan beberapa temuan tentang fakta komunikasi dua arah dalam proses '*sinau nulis*'.

Kata Kunci : komunitas Samin, *sinau nulis*, komunikasi dua arah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia dewasa ini. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat serta dalam era globalisasi pada saat ini, pendidikan menjadi satu keharusan dalam kehidupan setiap orang. Tanpa pendidikan seorang individu akan tertinggal dan tergilas oleh kemajuan jaman. Akibat yang sangat fatal adalah individu itu tidak dapat bertahan dalam persaingan yang sangat ketat pada saat ini. Tetapi sayangnya, pendidikan dan proses pembelajaran ini tidak dirasakan dan tidak dilakukan oleh semua masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat dan tidak semua komunitas mengenyam bangku pendidikan secara formal. Salah satu komunitas yang tidak mengijinkan anggota komunitasnya mengenyam bangku pendidikan secara formal adalah komunitas Samin yang ada di Sukolilo, Pati. Ketakutan adanya pengaruh negatif dari masyarakat luar terhadap kepercayaan komunitas Samin merupakan salah satu alasan mengapa anggota komunitas ini tidak diijinkan mengikuti pendidikan secara formal. *'Yen wis pinter lak yo mengko kanggo minteri wong'* (Kalau sudah pintar nanti pasti digunakan untuk membodohi orang). Demikian alasan yang digunakan mengapa mereka tidak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal (Sumber: wawancara dengan Gunarti secara informal pada tanggal 7 Juni 2008).

Alasan di atas membawa satu dampak yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan anak-anak komunitas Samin. Anak-anak komunitas Samin yang berusia sekolah akhirnya tidak disekolahkan di sekolah formal seperti anak-anak usia sekolah pada umumnya. Bagi anak-anak yang berusia sekitar 5 – 10 tahun, jam-jam efektif yang seharusnya mereka gunakan untuk menimba ilmu di sekolah-sekolah formal, akhirnya mereka gunakan untuk bermain-main dengan saudara-saudaranya. Sedangkan untuk anak-anak yang usianya sekitar 11 – 15 tahun, waktu-waktu efektif untuk sekolah itu digunakan untuk membantu orang tua di sawah atau di dapur. Sikap Masyarakat Samin ini merupakan manifestasi dari falsafah hidup mereka. Berawal dari sikap pemberontakan terhadap penjajahan Belanda di Indonesia pada

tahun 1890 yang dipimpin oleh Samin Surosentiko, pada perkembangannya gerakan ini berubah menjadi gerakan sosial yang berlandaskan pada agama Adam. Ajaran agama Adam menjadi falsafah hidup dan dasar untuk bertindak serta bertindak laku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Setelah penjajah Belanda meninggalkan negeri ini, komunitas Samin menunjukkan sikap yang eksklusif dan menutup diri karena penolakan pemerintah dan masyarakat terhadap keberadaan dan kepercayaan mereka. Sikap eksklusif ini ditunjukkan dengan penolakan terhadap institusi pernikahan yang dilakukan pemerintah serta menolak menyekolahkan anaknya dalam pendidikan formal. Alasannya, supaya anak-anak dan keturunan mereka tidak terpengaruh oleh ajaran dan kepercayaan masyarakat dari luar komunitas Samin.

Pengetahuan dan informasi mereka dapatkan dari pemimpin yang mereka anggap sebagai *'opinion leader'* terhadap setiap pesan yang masuk dalam kehidupan mereka. Pemimpin menjadi orang yang paling penting dalam sirkulasi pesan dan informasi. Akibatnya, *'transfer of knowledge'* serta proses pembelajaran terjadi melalui pemimpin bukan melalui pendidikan formal.

Pola komunikasi kelompok yang terbentuk dalam komunitas ini adalah pola komunikasi tersentral yang menjadikan pemimpin sebagai pusat dan sumber informasi yang paling penting (Darmastuti, 2005:36). Tetapi di sisi yang lain, televisi sebagai satu media yang paling penting dalam era globalisasi ini, ternyata mampu menembus benteng kehidupan masyarakat Samin dan membawa pengaruh dalam kehidupan mereka. (Darmastuti, 2006:325). Fenomena ini menjadi satu fenomena yang cukup unik. Di satu sisi mereka tidak mau menyekolahkan anaknya karena takut terpengaruh oleh masyarakat luar, tetapi di sisi yang lain informasi dari televisi tidak mereka tolak.

Bagaimanapun juga mereka memiliki cara bertahan hidup yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Berawal dari karakteristik kebudayaan yang berbeda dari masyarakat yang mengaku dirinya *'modern'*, serta kepemilikan komunikasi terpusat di dalam kelompok, ternyata

sekalipun tidak sekolah, komunitas ini tetap belajar dalam kesehariannya. Mereka tetap pintar (masuk akal) dan anak-anak dengan sukarela mau belajar. Belajar nampaknya dipahami sebagai sosialisasi cara hidup di dalam komunitas ini. Satu sudut pandang menarik dari kajian komunikasi untuk memotret pembelajaran ini adalah membidiknya dari proses model *two ways communication* atau selanjutnya akan disebut komunikasi dua arah. Pertanyaan konsep komunikasi di dalam proses pembelajaran tersebut berbunyi, 'bagaimana model komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran komunitas Samin?'

Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan tersendiri. Di tengah persaingan kehidupan yang sangat ketat pada saat ini serta dalam era globalisasi dimana persaingan bukan lagi dalam taraf lokal, generasi muda Samin yang tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup menjadi satu keprihatinan yang perlu diberi perhatian secara khusus. Berdasarkan pemikiran inilah maka artikel jurnal dengan judul "*Two Ways Communication: Sebuah Model Pembelajaran dalam Komunitas Samin, di Sukolilo, Pati*" ini ditulis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh DIKTI melalui sumber dana Hibah bersaing dengan judul 'Pemetaan Model Pembelajaran berbasis 'two ways communication' dalam kehidupan komunitas Samin'. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama dengan judul 'Pola Komunikasi Komunitas Samin' serta penelitian yang kedua dengan judul 'Pengaruh Terpaan Televisi terhadap Pola Komunikasi Komunitas Samin'.

Adapun alur pembahasan dalam tulisan ini dimulai dengan pengenalan metode penelitian yang dipakai untuk memetakan proses komunikasi dua arah dalam komunitas Samin. Kemudian diikuti dengan penggambaran mengenai proses pembelajaran yang terjadi tanpa mengkajinya dari sudut pandang komunikasi dua arah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi deskripsi secara utuh mengenai komunitas Samin serta pandangan hidup mereka. Bahasan tersebut kemudian diikuti dengan penggambaran konsep belajar menurut komunitas Samin yang berisi diantaranya mengenai belajar menurut komunitas Samin, serta pelaku dan materi

belajar. Dua hal tersebut kemudian dianalisa menurut konsep komunikasi pembelajaran dua arah yang diturunkan dari konsep interaksionisme simbolik George Herbert Mead dan komunikasi pedagogik dari Frederic Kron.

Metode Penelitian

Tulisan model pembelajaran dengan komunikasi dua arah ini diperoleh melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif serta metode etnografi komunikasi. Etnografi berasal dari dua kata *Ethno* dan *grafos*. Denzin (1994:25) mengatakan "*Ethnography, then, refers to social scientific description of people and the cultural basis of their people-hood*".

Fungsi dari pendekatan etnografi menurut Mulyana (2003:161) bermaksud untuk menguraikan suatu budaya secara menyeluruh yang menyangkut semua aspek budaya yang mereka miliki, baik itu yang bersifat material seperti artefak budaya yang terdiri dari bangunan, lingkungan, perabotan, pakaian maupun alat-alat yang mereka gunakan. Atau aspek budaya yang bersifat abstrak seperti kepercayaan yang mereka anut, norma-norma, pengalaman hidup mereka, juga tentang sistem nilai kelompok yang mereka gunakan. Hal-hal inilah yang diteliti.

Menurut Spradley (1997: 3) sebagaimana yang dikatakan oleh Malinowski, tujuan etnografi ini berusaha memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya. Untuk itu, alur yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah alur penelitian maju bertahap (*The development research sequence*) (Spradley: 1997: 57).

Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada peran peneliti sebagai alat pengambilan data lapangan. Serta lebih jauh memilih subyek informan terbatas karena perannya yang besar terhadap obyek penelitian yang dikaji. Dengan demikian diharapkan pemahaman mendalam mengenai obyek penelitian dapat diperoleh secara menyeluruh sesuai dengan sudut pandang kelompok yang dikaji. Konstruksi lokal yang dimiliki komunitas Samin jauh lebih penting ketimbang persepsi peneliti terhadap dunia mereka.

Metode etnografi komunikasi ini dipakai untuk mengkaji kelompok suku pada awal digagasnya. Namun dalam perkembangannya, etnografi dapat dipakai untuk mengkaji budaya dan pola interaksi kelompok-kelompok sub-budaya. Metode ini menekankan pada pencarian ciri khas dari kelompok budaya tertentu dengan sudut pandang peneliti (*etik*) atau sudut pandang subyek penelitian (*emik*). Dalam proses penggambaran pola komunikasi belajar dua arah ini, perspektif yang digunakan adalah *emik*. Sehingga pemahaman terhadap pola komunikasi dan belajar komunitas Samin dari sudut pandang komunitas Samin sendiri. Penelitian ini dilakukan pada bulan April – Nopember 2008 di dalam kehidupan komunitas Samin yang tinggal di Sukolilo, Pati.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pandangan Hidup Komunitas Samin tentang Belajar

Masyarakat Samin merupakan suatu komunitas yang memiliki prinsip hidup yang sangat kuat berdasarkan kepercayaan, falsafah hidup serta agama yang mereka anut. Mereka memiliki resistensi yang sangat kuat terhadap pengaruh dari luar. Hal ini disebabkan karena mereka berusaha untuk menutup diri terhadap pengaruh dari luar dengan harapan sikap dan tingkah laku mereka tidak 'terpolusi' dengan ajaran-ajaran dari luar dan tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang mereka yakini.

Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan melarang anak-anak mereka untuk sekolah di pendidikan formal. Fenomena ini dapat kita lihat dari kondisi anak-anak komunitas Samin di Sukolilo, Pati tidak menempuh pendidikan secara formal di bangku-bangku sekolah. Pendapat yang sering mereka lontarkan adalah bahwa sekolah adalah untuk mencari kepandaian dan kalau orang sudah pandai biasanya kepandaian itu hanyalah untuk membohongi orang lain. Seperti yang dikatakan Tarno, tokoh utama komunitas Samin dalam wawancara mendalam, "*Sekolah ki jane arep golek apa? Rak ya kanggo golek kepinteran to? Trus yen wis pinter biasane rak yo kanggo minteri konco kancane to?*" (Sekolah itu sebetulnya untuk apa? Untuk mencari

ke pandaian kan? Kalau sudah pandai biasanya orang lantas menggunakan kepandaian itu untuk membohongi orang lain) (Wawancara dengan Tarno secara informal pada tanggal 7 Juni 2008).

Pendapat ini dilandasi pengalaman masa lalu terhadap sikap penjajahan Belanda yang berusaha membohongi masyarakat Indonesia yang masih terbelakang pada saat itu. Orang-orang Belanda yang mereka anggap sebagai orang-orang pandai justru menggunakan kepandaian mereka untuk membohongi orang lain. Akibatnya, masyarakat Samin berpandangan anak-anaknya tidak perlu dimasukkan ke sekolah formal. Sekolah formal dianggap sebagai sarana pendidikan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak mereka terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar yang bertentangan dengan ajaran mereka.

Dalam kehidupan komunitas Samin, pendidikan dipahami sebagai sekolah. Sekolah dalam pandangan mereka ada dua, yaitu sekolah tulis dan sekolah biasa. Sekolah tulis adalah pembelajaran yang dilakukan di bangku-bangku sekolah secara formal, sedangkan sekolah biasa adalah pembelajaran yang dilakukan di rumah oleh orang tua masing-masing. Sekolah biasa dalam pandangan komunitas Samin adalah sekolah macul, sekolah nyapu, sekolah masak dan sekolah nyuci yang dapat diajarkan oleh orang tua mereka sendiri-sendiri di pondokan (rumah) mereka. Dalam komunitas Samin yang ada di Sukolilo, untuk anak-anak usia sekolah juga diajarkan sekolah nulis, yaitu belajar menulis huruf jawa dan huruf latin, serta berhitung. Pelatihnnya adalah orang-orang Samin sendiri yang sudah bisa membaca dan menulis serta berhitung.

Pertama. Kearifan Lokal dan Budaya Lisan. Samin sebagai salah satu dari komunitas lokal memiliki kearifannya sendiri mengenai proses pendidikan. Kearifan lokal merupakan nilai dari sebuah masyarakat yang membuatnya bertahan dalam gerusan perkembangan jaman. Kearifan lokal komunitas Samin terwujud dalam kepercayaan atas apa yang dinamakan pendidikan. Selama ini mereka melakukan proses sosialisasi dan internalisasi pengetahuan secara turun temurun. Informasi mengenai dunia luar tidak langsung diterima oleh anggota komunitas, melainkan ha-

rus melalui *opinion leader*. Hal ini terjadi sebagai satu bentuk pertahanan terhadap pengetahuan dari luar yang didasari oleh latar belakang sejarah mereka.

Konsep belajar baca tulis ini tidak begitu populer di komunitas Samin. Salah satu faktor penyebabnya adalah budaya lisan yang sangat kuat dalam masyarakat ini. Sesebuah akan menyampaikan pesan-pesan, nasehat dan pituturnya kepada orang tua dan 'guru-guru' ini dalam pertemuan-pertemuan agama mereka, atau dalam pertemuan komunitas mereka. Apa yang diajarkan tersentral pada seseorang. Transfer informasi dari seseorang kepada orang tua dan 'guru-guru' dilakukan secara lisan.

Sedulur Sikep tidak punya kebiasaan menuliskan sesuatu, kecuali *tembang* (lagu) yang diturunkan secara regeneratif dari Tarno dan seseorang yang lain. Biasanya pelajaran hidup disampaikan secara lisan melalui *tembang*. Peristiwa-peristiwa penting dalam tahap kehidupan perorangan keluarga Samin ditandai dengan *tembang*. Bisa bermacam-macam jenis *tembang*, diantaranya Macapat, Dandang Gula, Asmarandana, dan sebagainya. Dalam rutinitas sehari-hari *tembang* dipakai juga untuk mengajarkan anak-anak mengenai etika hidup dan norma-norma moral yang diyakini. *Tembang* yang dipakai dalam metode pengajaran anak-anak ini biasanya tergolong *tembang dolanan* anak-anak.

"*Ya ika, kaya pas nggawekke sumur bocah-bocah, mbah Sampir kakung gawe tembang. Aku yo uwis lali lagune piye. Sajakke bocah-bocah isih nyatet. Wong senengane do ditulis, mung disimpen yak'e catetanne. Saiki malah wis do di foto kopi. Wah senenge, eneng mesin kuwi rak yo apik to. Marakke cepet, garek obo njaluk ping pi-ro.*" (Yaitu, seperti pada saat buat sumur untuk anak-anak, Sampir laki-laki buat *tembang*. Aku juga sudah lupa syairnya bagaimana. Sepertinya anak-anak masih punya catatannya. Mereka senang juga menuliskannya, Cuma mungkin disimpan catatannya. Sekarang malah sudah bisa foto copy. Wah senangnya, ada mesin itu kan bagus. Membuat jadi cepat, tinggal minta saja mau berapa kali.) (Sumber : wawancara dengan Sampir 10 Juli 2008).

Jadi budaya tulis itu baru datang kemudian di generasi berikutnya setelah generasi Sampir, yaitu generasi yang lahir sekitar tahun 70-an, karena budaya ini tergolong baru bagi komunitas Samin, maka ada proses pembelajaran yang kemudian diusahakan, meskipun tidak dijadikan norma yang harus dilakukan oleh anak-anak komunitas Samin.

Mekanisme belajar menurut praktek, yang terjadi pada umumnya membutuhkan pelaku, instrumen materi, institusi dan gedung, tetapi praktek belajar dalam kehidupan komunitas Samin ini berbeda dengan proses belajar pada umumnya yang lebih disebabkan karena keunikan budaya yang mereka miliki. Komunitas yang terbentuk akibat ikatan genealogis dan religiusitas ini memiliki keeratatan hubungan batin yang kuat dibanding masyarakat modern pada saat ini. Kondisi ikatan persaudaraan secara hubungan darah dan kepercayaan ini akhirnya mempengaruhi perilaku belajar mereka. Definisi belajar yang selama ini kita pahami sebagai mempelajari sesuatu di sekolah formal, maupun belajar dalam arti menjadi sesuatu (*being or becoming*) dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dipahami komunitas Samin menurut cara pandang sendiri dan berdasarkan keyakinan agama Adam yang mereka percayainya.

Kedua. Belajar adalah *Sinau*. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh komunitas Samin, 'belajar' dalam pandangan mereka bukanlah seperti yang kita pahami selama ini. 'Belajar' dalam pandangan mereka bukanlah belajar seperti pemahaman masyarakat modern yang memaknai belajar dengan duduk di kelas, mendengarkan, mencatat, menghafal lalu mengikuti ujian, tetapi belajar langsung tentang kehidupan.

Belajar dalam pandangan komunitas ini sering disebut dengan istilah '*sinau*'. '*Sinau*' yang dimaksudkan di sini adalah mempelajari segala hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan dengan baik. Standar bertahan hidup dan baik di sini tentu tidak bisa dibayangkan sebagai aktivitas hidup seperti: bisa pergi ke *mall*, atau memiliki mobil mewah. Bagi komunitas Samin, kebutuhan untuk menjalani hidup yang baik didasarkan pada satu motivasi filosofis tujuan hidup yang mereka yakini dengan ungkapan '*sing jenenge wong urip kuwi rak*

tujuane mung loro, pisan mbenerke pitutur, pindo mbecikke lelakon. Ora butuh banda. Duit kuwi rak dudu tujuan’ (yang namanya manusia hidup itu kan tujuannya hanya dua: pertama, berkata-kata dengan benar, kedua berperilaku dengan baik. Tidak butuh harta. Uang itu kan bukan tujuan) (Sumber: wawancara dengan Gunarti 11 Mei 2008).

Sinau dalam komunitas Samin bertujuan untuk mempelajari kebenaran hidup dan hubungan antar sesama yang disebut sebagai kehidupan yang baik. Motif dasar yang jauh berbeda sebagai awal mula kegiatan belajar dalam komunitas ini mempengaruhi pemaknaan *’sinau’* yang mereka hidupi. Menurut Gunarti, salah seorang anggota komunitas Samin yang berperan sebagai fasilitator *’sinau’*, *’sinau’* merupakan aktivitas sepanjang hidup, dari bangun pagi hingga malam hari. *’Sinau’* bisa mempelajari apapun yang dibutuhkan untuk bertahan dan beradaptasi, baik dengan alam maupun dengan lingkungan sosial. Dengan kata lain, *’sinau’* adalah hidup itu sendiri bagi mereka. Memasak, mencangkul, membuat pupuk, menikah dan menjadi orang tua adalah bagian dari banyak hal yang harus mereka pelajari.

Dalam kehidupan komunitas Samin, *’transfer of knowledge’* dilakukan melalui komunikasi dua arah dalam situasi yang informal. Tidak di dalam ruang kelas, tidak menggunakan buku paket dan terjadi begitu saja di dalam ruang-ruang publik komunitas Samin. Proses pembelajaran ini dapat terjadi di sawah, di *emper* rumah, di sungai maupun di pasar. Pada saat makan,



Gambar 1. Kegiatan belajar komunitas Samin (dokumen penelitian)

minum, maupun saat *guyonan*. Bentuknya lebih berupa dialog mengenai persoalan lokal yang dihadapi komunitas secara langsung dalam kehidupan sehari-hari dan jangka panjang.

’Sinau’ bisa dilakukan kapan saja, dimana saja seperti yang dipaparkan Gunarti, *“nek bocah neng kene ki yo sinau kapan wae, iso neng endi-endi, ora dikudokke.”* (kalo anak-anak di sini belajar ya bisa kapan saja, bisa di mana-mana, tidak perlu diharuskan). (Sumber: wawancara dengan Gunarti 11 Mei 2008).

Selain gambaran umum mengenai *’sinau’* yang telah dipaparkan tersebut, ada beberapa bentuk *’sinau’* yang berhasil di tangkap melalui wawancara dan pengamatan lapang. *’Sinau’* secara umum memang proses sepanjang hidup, namun proses *’sinau’* materi tertentu mereka polakan dalam situasi dan cara yang lebih khusus, sekalipun bukan dalam bentuk sekolah formal seperti yang diterapkan di masyarakat.

Sinau dalam kehidupan masyarakat Samin adalah *’transfer of knowledge’* dari semua bagian kehidupan mereka, mulai dari *sinau macul*, *sinau nyapu*, *sinau masak*. *Sinau* bukan hanya dalam konteks *sinau nulis* dan *sinau maca*, tetapi *sinau* dari keseluruhan *’transfer of knowledge’* dari bagian hidup mereka, sekalipun mereka juga melakukan *sinau maca* dan *sinau nulis* dalam situasi yang non formal. *Sinau* ini merupakan jenis *’sinau’* yang lebih khusus. *Sinau* yang pertama, yakni *maca* berarti belajar membaca, sementara *nulis* berarti belajar menulis. Sementara yang terakhir, *sinau ’nembang’* ini berarti belajar lagu.

Kembali ke fokus pada konsep belajar membaca dan menulis komunitas Samin, berdasarkan peta lokasinya proses belajar mengajar baca, tulis dan berhitung ini terpusat pada *sedulur Sikep* yang tinggal di daerah Ngawen. Komunitas Samin yang ada di kecamatan Sukolilo tersebar di lima desa, yaitu Ngawen, Curuk, Nggaliran, Mbombong dan Kutuk. Dari kelima desa ini, desa Ngawen merupakan pusat pembelajaran karena di daerah lain tidak melakukan proses pembelajaran ini. Proses pembelajaran di desa Ngawen ini dimotori oleh Gunarti, salah satu tokoh Samin. Gunarti dan keluarga besar Sampir tinggal di desa ini.

Seperti Sampir, Gunarti adalah salah satu anggota *sedulur Sikep* yang fasih baca, tulis dan

berhitung baik dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia. Sampir fasih membaca dan menulis karena pada awalnya Sampir adalah pemeluk agama tertentu yang masuk ke dalam komunitas Samin dan memeluk agama Adam.

Proses pembelajaran baca dan nulis dan sekarang khusus dilakukan komunitas Samin di Ngawen dilakukan pada hari-hari tertentu. Pada hari-hari tertentu yang sudah disepakati bersama, anak-anak kecil umur 6-10 dan remaja 11-15 tahun dari komunitas yang tinggal di daerah Nggaliran, Curuk dan Mbombong akan datang ke pemukiman Ngawen ini untuk *sinau nulis* dan *maca*.

Ketiga. Pelaku Belajar Komunitas Samin. '*Sinau*' bagi *sedulur Sikep* ini dipahami sebagai proses sepanjang hayat, dilakukan dengan spontan dan ditujukan untuk menunjang kehidupan. '*Sinau*' dilakukan oleh siapa saja, apa saja, dimana saja dan kapan saja. Prinsip ini tetap berlaku untuk belajar baca, tulis dan berhitung. Hanya saja '*sinau*' ini biasanya tidak dilakukan sebarang belajar materi lain. Menurut pengamatan di lapangan, *sedulur Sikep* akan bersama-sama menentukan waktu belajar dan berkumpul di salah satu *pondokan* (rumah) yang ada di Ngawen. Waktunya bisa siang hari, namun seringkali sore hingga malam hari, tergantung waktu luang yang dimiliki oleh Gunarti maupun '*turunannya*' (anaknyanya).

Peserta belajar *sedulur Sikep* kebanyakan anak-anak usia 6-10 dan remaja 11-15 tahun. Selain peserta belajar ini, ada peserta lain yang belajar baca dan tulis. Hanya saja peserta didik ini tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan ini, tetapi mereka akan belajar langsung dari *sedulur* (anggota komunitas) lain. Artinya dia tidak akan mengikuti pertemuan belajar di Ngawen. Pengajar dalam hal ini adalah guru bagi anak-anak. Prasyarat yang perlu dipenuhi oleh seorang guru dalam komunitas ini adalah seseorang yang bisa membaca, menulis dan berhitung baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Terlebih lagi, karena model kepemimpinan yang religius karismatis, seorang guru perlu memiliki pengetahuan cukup atau mumpuni tentang agama Adam. Selain itu dibutuhkan karakter 'orang tua' yang sabar dan *ngemong* (membimbing).

Sejauh ini yang berperan sebagai guru adalah Sampir, Gunarti, Heni dan Widodo. Tetapi setelah Sampir kakung *salin* (meninggal), yang berperan sebagai guru hanya Gunarti, Widodo dan Heni. Tiga perempuan inilah yang kemudian banyak mengambil peran dalam mengajar baca, tulis dan hitung di komunitas Samin.

"*Nek sinau maca ki ya isih neng kene, sing ngajari yo kae turunanku sing nomer siji. Nek aku ana wektu pas ora okeh gawean yo aku sing ngajari. Wong cah-cah ki luwih seneng nek aku sing ngajari. Cah-cah enom kae rak durung sabar.*" (Kalau belajar baca ya masih di sini, yang mengajar ya itu anak perempuanku yang nomer satu. Bila saya ada waktu pas tidak banyak pekerjaan ya saya yang mengajar. Soalnya anak-anak itu kan lebih senang bila aku yang mengajari. Anak-anak muda itu kan kurang sabar) (Sumber: wawancara dengan Gunarti, 7 Juli 2008)

Jumlah peserta belajar yang ikut dalam setiap pertemuan tidak banyak, hanya sekitar enam hingga sepuluh anak atau remaja. Tidak ada pembagian kelas berdasar usia dalam proses pembelajaran komunitas yang diawali oleh Samin Soerorentika ini. Mereka menganggap belajar adalah hak bagi semua orang dengan segala usia, dan mengajari adalah kewajiban semua orang yang memang sudah bisa atau sudah belajar lebih dahulu.

Berbicara tentang pelaku belajar dalam komunitas ini, maka aspek penting yang perlu dilihat adalah mengenai beragamnya usia peserta belajar dan pengajar atau guru. Pengajar atau guru dalam proses belajar komunitas Samin selama ini berpusat pada komunitas wilayah Ngawen, dengan tokoh sentral Gunarti.

Kondisi ini cukup menguntungkan bagi mereka, karena memang mudah mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini bila pengajaran baca, tulis, dan hitung dilakukan secara tersentral di satu daerah. Gun (demikian dia biasa disapa), sebagai tokoh kepercayaan pengganti Sampir (sesepuh sebelumnya), melalui proses belajar baca, tulis, hitung juga punya tanggungjawab untuk mempertahankan kelestarian kepercayaan mereka. Oleh karena itu dapat dipahami bila proses belajar ini lebih banyak dipusatkan di Ngawen. Hanya, saat dilakukan wawancara mendalam, Gun

sebenarnya tidak keberatan bila proses belajar ini juga bisa dilakukan *sedulur-sedulur Sikep* di daerah lain, bila memang ada anggota komunitas yang bisa baca, tulis, hitung dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.

Keempat. Materi yang dipelajari komunitas Samin. Tujuan belajar bagi anak-anak dan remaja Samin adalah mampu membaca, menulis dan menghitung. Tujuannya, setelah tahu mereka bisa menjaga diri mereka dari pengaruh asing maupun serangan ideologi dari luar seperti yang dipaparkan Gunarti:

“Bocah gelem sinau nulis iku wes apik. Lha rak tujuane sinau ki rak pisan ben ngerti lan iso, kepindo nek wes iso banjur dienggo pager ben ora dipoyoki sedulure.” (ya engga, anak-anak mau belajar itu sudah bagus. Lha kan tujuan belajar itu kan *pertama*, biar tahu dan bisa, *kedua*, setelah bisa dipakai untuk memagari diri supaya tidak diejek dan dicurangi temannya) (Sumber: wawancara dengan Gunarti, 11 Mei 2008).

Mereka memegang teguh keharmonisan hubungan. Bagi mereka proses belajar ini lebih menyerupai latihan bela diri. Sebuah ketrampilan untuk menjaga diri dari jahatnya lingkungan. Ketrampilan baca, tulis dan berhitung itu yang terpenting. Mengenai apa yang akan mereka baca dalam tulisan yang mereka baca, kemudian apa yang akan mereka tuangkan dalam tulisan, serta apa yang akan mereka hitung itu adalah perkara yang erat kaitannya dengan aktivitas hidup mereka.

Mata pencaharian utama sebagai petani, menjadi materi relevan dalam kegiatan belajar baca tulis. Keterampilan baca tulis menjadi satu bagian yang penting pula untuk melestarikan keyakinan mereka terhadap agama Adam. Bagi mereka, hanya satu sumber kebenaran yaitu kitab Adam. Selain itu, ikatan kekerabatan karena hubungan darah dan ikatan sakral mengharuskan mereka mengenal keluarga dan saudara-saudaranya. Oleh karena itu materi pendidikan untuk anak-remaja dalam komunitas Samin lebih banyak berisi materi-materi awal pengenalan tentang keluarga, bapak, ibu, keluarga batih dan pertanian.

“Nek do ajar nulis kuwi yo sak geleme. Sing penting nulis. Apa wae. Iso nulis

sejarah keluargane, iso nyrito bapakne..” (Bila belajar menulis itu semauanya sendiri. Yang penting menulis. Apa saja. Bisa menulis tentang sejarah keluarganya, bisa cerita tentang bapaknya). (Sumber: Wawancara dengan Gunarti pada tanggal 7 Juli 2008).

Materi belajar selama ini sejauh aksara Jawa, dan baca tulis Indonesia. Tema yang menjadi isi pembelajaran untuk anak-anak dan remaja lebih banyak berkaitan dengan konteks diri sendiri, keluarga, pertanian dan budaya *sedulur Sikep*. Konteks diri sendiri banyak bicara mengenai seseorang di dalam sebuah keluarga, hubungan dengan orang tua, kapasitas filosofis mereka sebagai manusia, kemudian berkaitan erat dengan kepercayaan agama Adam mereka. Sementara dalam proses pembelajaran dengan anak-anak bila mereka membahas mengenai keluarga maka yang dilakukan adalah proses pengenalan terhadap identitas orang tua mereka, siapa bapak, ibu, apa yang mereka kerjakan dan keyakinan macam apa yang mereka anut. Termasuk keyakinan gaya hidup mereka sebagai orang Jawa untuk tetap mempertahankan identitas bahasa, cara berpakaian, rumah dan kegiatan.

Sebagai orang Jawa dengan kondisi geografis persawahan, mereka sangat memegang teguh mata pencaharian sebagai petani. Segala hal yang berkaitan dengan pertanian menjadi pokok pengetahuan yang dibicarakan dalam pelajaran. Sekalipun materi-materi tematik itu tidak selalu diberikan secara sistematis, tapi kisaran tema yang dibahas selalu bertautan dengan bidang-bidang tersebut. Segala macam materi yang disuguhkan tersebut kemudian dapat dikembangkan secara lebih tersusun dan sistematis. Sehingga lebih mudah bagi anak-anak yang belajar dalam menangkap gambaran besar mengenai hal-hal yang mereka pelajari.

Komunikasi Dua Arah dalam Pembelajaran Komunitas Samin

Belajar dalam pandangan komunitas Samin, bisa dilakukan dengan cara apapun. Bicara sehari-hari sambil menimang anak dengan sesama ibu yang baru melahirkan merupakan proses belajar bagi anggota komunitas Samin. Ada transfer

pengetahuan melalui kegiatan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, berbagi pengetahuan tentang cara mengatasi mual dengan cara minum arang adalah salah satu kearifan lokal yang kemudian digunakan sebagai alat adaptasi terhadap hidup, itulah belajar. Hanya, bila mengupas cara belajar secara khusus dalam arti baca, tulis dan hitung, tentu menggunakan cara yang lebih terperinci. Biasanya dalam hari-hari tertentu yang tidak diatur waktunya, anak-anak dan remaja akan berkumpul untuk mendengarkan penuturan nasihat-nasihat dari sesepuh maupun dari ‘guru-guru’. Tempatnya tidak selalu di dalam rumah. Bisa di pekarangan, di halaman rumah maupun di dapur.

Belajar baca, tulis, dan hitung juga tidak terbatas pada saat mereka berkumpul. Anak-anak dan remaja yang ingin belajar bisa bertanya pada orang tua mereka yang bisa membaca. Seperti yang dituturkan Gunarti, “*Sing ngajari yo wong tuwone karo awakke dewe.*” Ada beberapa anggota komunitas lain yang juga bisa baca, tulis dan hitung selain Gunarti dan keluarganya. Sehingga kegiatan belajar bisa saja terjadi di sela-sela aktivitas hidup sehari-hari.

Contoh cara belajar komunitas Samin yang lainnya didapat oleh peneliti dalam satu kunjungan ke lapangan, ketika peneliti mengikuti kegiatan Gunarti. Sebelumnya peneliti membantu dan menemani dia memasak. Setelah acara memasak selesai Gunarti melanjutkan acaranya dengan ‘latihan’ kepada anak-anak usia sekolah yang ada di lingkungan itu. Sejak pagi hari peneliti sudah mengamati kegiatan anak-anak yang masih berusia sekolah ini. Ketika teman-teman yang lain pergi ke sekolah mereka justru bermain atau membantu orang tuanya.

Pagi itu, kegiatan anak laki-laki bermain layang-layang dan sepeda-sepedaan, sedangkan anak perempuan ada yang membantu ibunya mencuci pakaian, ada yang mencuci piring dan ada juga yang memasak serta menyapu halaman. Lamunan peneliti ini terputus ketika Gunarti berkata, “*Ayo mbak, sido melu apa ora? Latihane iki ana pondokane Kang Adam*” (Ayo mbak, jadi ikut latihan apa tidak? Latihan ini dilakukan di rumahnya Adam).

Peneliti kemudian mengikuti langkah Gunarti. Disitu sudah ada enam anak laki-laki dan

tujuh anak perempuan yang usianya sekitar 9-12 tahun. Ada yang duduk di lantai dan ada juga yang duduk di kursi. Dengan Papan tulis kecil, sekitar satu jam Gunarti memperkenalkan huruf-huruf Jawa kepada mereka. Kemudian pada jam berikutnya Gunarti mengajarkan mereka untuk berhitung mulai dari ‘tambah-tambahan’ sampai dengan perkalian. Sebelum mengakhiri latihan itu Gunarti memberi pesan kepada mereka, “*Saiki latihane wis rampung. Latihan iki kanggo kuwe kabeh supaya kowe kabeh dadi pinter, nanging aja pada minteri liyan. Kowe kabeh kudu nurut karo bapak dan emak. Wis saiki podo bali ono pondokane dewe-dewe*” (Sekarang latihannya sudah selesai. Latihan ini buat kalian semua supaya jadi pintar tetapi jangan dipakai untuk memperdayai orang lain. Kalian semua harus menurut sama bapak dan ibu. Sudah sekarang semua pulang kerumah masing-masing). Acara latihanpun selesai pada siang itu. Acara latihan biasanya diadakan setiap hari setelah Gunarti selesai memasak sekitar pukul 11.

“*Ya koyo mengkene ki latihane sedulur sikep. Sedulur Sikep ke ra seneng sekolah kaya liyane. Sekolah kita rak ya mung kanggo golek kepinteran to? Trus mengko yen wis pinter kanggo minteri liyan. Biasane ana latihan ini aku ngaturake pitutur saka Mbah Tarno pas rembug gunem ana Sukolilo, supaya bocah-bocah kuwi pada ngerti apa sing kudu ditindakno*” (Ya seperti ini latihannya saudara Sikep. Saudara Sikep tidak suka sekolah seperti saudara yang lain. Tujaun sekolah itu kan untuk kepandaian, tetapi kalau sudah pintar tetapi untuk memberdaya orang lain bagaimana? Biasanya dalam latihan ini aku menyampaikan pesan dari Tarno waktu Timbang Gunem di Sukolilo supaya anak-anak tahu apa yang harus dilakukan).

Cara-cara seperti inilah yang dilakukan untuk melakukan pendidikan di lingkungan masyarakat Samin. Penekanan dalam pembelajaran di lingkungan masyarakat Samin adalah mendidik anak-anak untuk taat mengikuti ajaran dan falsafah hidup yang diyakini masyarakat Samin. Menulis dan berhitung hanyalah sebagai sarana untuk menjadi manusia yang sempurna.

Oleh karena itu, sekalipun pembelajaran menulis dan membaca dilakukan oleh beberapa anggota komunitas masyarakat Samin, tetapi untuk pengajaran tentang falsafah hidup dan agama berada di bawah kontrol sesepuh. Ajaran-ajaran ini kadang-kadang disampaikan langsung oleh sesepuh kepada anak-anak, tetapi tidak jarang dilakukan dengan menggunakan media. Media yang digunakan adalah orang tua dan anggota komunitas masyarakat Samin lainnya yang menjadi 'guru' bagi mereka.

Pola pembelajar semacam ini dapat dikatakan menggunakan pola komunikasi dua arah yang berlangsung sehari-hari di komunitas Samin. Dengan begitu, abstraksi yang diangkat dari data lapangan terbukti bahwa komunitas Samin memiliki model komunikasi dialogis dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran yang terjadi secara dua arah ini dalam konsep tataran komunikasi jelas menunjukkan adanya pola komunikasi sirkular. Adanya sumber yakni orang tua atau mereka yang lebih tua sehingga memiliki penge-

tahuan lebih dahulu memberikan informasi-nya kepada yang lebih muda, atau malah dapat terjadi sebaliknya untuk informasi yang lebih khusus yang muda memberi informasi kepada yang lebih tua. Komunikasi yang melibatkan jenjang usia atau perbedaan generasi ini nampaknya tidak menyurutkan efektivitas penyaluran pengetahuan yang terjadi. Si peserta belajar, atau penerima dalam konteks ini nampaknya nyaman saja memberi umpan balik berupa pertanyaan atau sanggahan. Meski memang disampaikan dalam konteks norma kesopanan yang mereka anut dan berlangsung secara terus menerus dalam keseharian mereka.

Mengacu pada pendapatnya Friederich Kron (Biesta: 1995: 186), pola pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan paradigma interaksionalisme simbolik. Menurut pandangan ini, pendidikan tidak dimaknai sebagai tindakan manipulasi pendidik atas pesertanya. Pendidikan dipahami sebagai proses sosial yang dibangun oleh interpretasi yang dimiliki

Tabel 1. Perbandingan Sekolah Formal dan Proses Belajar Komunitas Samin dengan Komunikasi Dua Arah

Faktor Pembelajaran	Sekolah Formal	Sinau ala Samin
Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Paket dari pemerintah dalam bentuk satuan mata pelajaran ♦ Standar evaluasi tertentu, UAN ♦ Periode belajar Semester/Caturwulan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Materi sesuai kebutuhan hidup, diutamakan menulis, membaca dan berhitung bahasa Jawa dan Indonesia ♦ Standar evaluasi alami, teruji dalam praktek hidup sehari-hari ♦ Periode belajar sesuai kebutuhan dan kepuasan pencapaian dari masing-masing peserta belajar
Pengajar-Peserta Belajar	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Guru harus memenuhi standar pendidikan bidang pelajaran tertentu sesuai yang diampu ♦ Peserta belajar dibagi menurut tingkat usia dan memiliki kewajiban administrasi tertentu ♦ Hubungan Guru-Peserta belajar seringkali cenderung satu arah, karena kuota kelas yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Guru adalah orang tua, atau tokoh masyarakat setempat yang memiliki kemampuan menulis, membaca dan berhitung bahasa Jawa dan Indonesia ♦ Peserta belajar dibagi berdasarkan kemampuan bukan tingkat usia. ♦ Hubungan Pengajar-peserta belajar berlangsung dua arah, timbal balik, karena peserta belajar terbatas, serta menekankan pada hubungan kekeluargaan.
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gedung, kelas, papan tulis, dan teknologi informasi komunikasi ♦ Perpustakaan dan buku 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Rumah, kursi dan meja sendiri, papan tulis kapur di emperan ♦ Sumber informasi fotokopian tembang dan huruf Jawa
Proses Belajar	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Setiap hari, dengan durasi jam tertentu, sepanjang minggu, dengan hari libur yang ditentukan ♦ Peserta belajar menggunakan seragam 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Setiap kali pengajar punya waktu luang dan peserta belajar mau belajar ♦ Peserta belajar hadir dengan pakaian sehari-hari mereka.

oleh masing-masing peserta. Pendidik dan peserta didik merasa bahwa kedudukan mereka sama, tidak ada yang merasa lebih tinggi kedudukannya, sehingga antara pendidik dan peserta didik saling menghargai. Dalam hal ini, rasa saling percaya memegang peranan yang sangat penting. Model ini pada akhirnya memposisikan pendidikan sebagai proses komunikasi dua arah dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Proses pembelajaran seperti inilah yang justru selama ini dipraktekkan dalam komunitas Samin. Hanya saja, pola proses pembelajaran ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memunculkan rasa percaya dalam kehidupan komunitas Samin kepada orang lain sehingga mereka mau membuka diri terhadap informasi dan pengetahuan yang berasal dari luar komunitas. Setidaknya ke depan nanti komunitas Samin akan bisa melestarikan proses belajar baca, tulis dan hitung menurut kearifan mereka sendiri.

Dalam pandangan komunitas Samin, belajar itu sendiri dimaknai sebagai proses regenerasi dan pewarisan budaya. Maka belajar merupakan proses yang tidak terbatas di ruang kelas. Belajar bisa terjadi dimana saja, kapan saja selama proses percakapan berlangsung mengenai persoalan hidup yang dihadapi. Demikianlah konsep yang terdapat dalam tataran gagasan komunitas Samin, proses yang mengalir dalam keseharian tersebut akan sangat ditentukan oleh pola hidup dan aspek sosial budaya mereka.

Beberapa intisari dari pola pembelajaran komunitas Samin menunjukkan bahwa orang-orang Samin melakukan proses pewarisan budaya dan sosialisasinya melalui budaya lisan, informal dan mengalir dalam keseharian. Namun, setelah dilakukan pemetaan garis besar mengenai proses pembelajaran mereka, khususnya yang dipandang penting untuk mempertahankan diri bagi masyarakat ini adalah belajar baca, tulis dan hitung.

Strategi belajar dialogis atau dua arah yang dibangun dalam komunitas Samin menjadi modal dasar yang kuat untuk melestarikan pamanusiaan manusia yang selama ini mereka pertahankan. Hanya saja proses pembelajaran yang informal dan tidak terjadwal menjadikan proses belajar baca, tulis dan hitung jadi sangat acak. Oleh karena itu,

peneliti bermaksud mengembangkan cara belajar dialogis dengan mempertahankan pola pembelajaran dalam pola komunikasi sehari-hari dan mengembangkan pola pembelajaran dengan pertemuan-pertemuan yang informal namun teratur.

Transfer informasi yang dialogis inilah yang ingin dipertahankan dalam pola pertukaran simbol yang dikonsepskan oleh Gerooge Herbert Mead (Miller: 2002: 50) dalam teori interaksionisme simboliknya. Berlandaskan pada agama Adam serta berkisar pada pertanian sebagai profesi mereka sebagai orang Jawa maka proses pembelajaran tetap dilakukan berdasarkan ideologi mereka. Di sini peran guru tidak sekedar *nuturi* melainkan berperan aktif untuk menggali potensi, kebutuhan dan keinginan yang ada dalam diri peserta belajar, terutama anak-anak dan remaja yang membutuhkan alat untuk menggali pengetahuan di sekeliling mereka. Tujuan dari proses pembelajaran interaktif ini lebih ditujukan untuk membekali anak-anak dan remaja komunitas Samin dari terpaan pengaruh budaya dari luar, akibat banyaknya interaksi dengan nilai-nilai yang dibawa peneliti, LSM maupun pemerintah. Setidaknya dengan pembelajaran dari hati ini, anak-anak dan remaja dapat sepenuhnya memegang teguh nilai-nilai yang membuat mereka tetap bertahan hingga sekarang sebagai komunitas *sedulur Sikep*.

Temuan penting lain di dalam penelusuran proses pembelajaran ini tampak dalam tabel 1. Di dalam tabel 2 sengaja dibandingkan proses pembelajaran dalam komunitas Samin yang menggunakan konsep komunikasi dua arah dengan sekolah formal yang cenderung berbasis komunikasi linear atau ceramah bahkan pendiktean.

Melihat bagan tersebut, nampak pembelajaran dengan komunikasi dua arah lebih fleksibel, sehingga memberikan rasa senang maupun menambahkan pengetahuan dan kepintaran (*intellectual*). Beberapa faktor yang menyebabkan proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara dua arah diantaranya adalah pengajar dan peserta belajar merupakan keluarga batih maupun kerabat dekat, sehingga unsur kecemasan di antara peserta belajar (bisa dikatakan sebagai peserta komunikasi belajar)

cenderung rendah. Materi yang dipelajari kebanyakan seputar pengetahuan tentang cara hidup, sehingga motivasi yang melatari peserta belajar mengikuti proses komunikasi belajar cenderung tanpa paksaan bahkan karena kesadaran akan kebutuhan untuk menambah pengetahuan dan bisa melakukan ketrampilan tertentu. Ketidadaan paksaan dari luar, dan tingginya rasa butuh terhadap materi yang dikomunikasikan membuat peserta belajar dan pengajar secara sukarela melakukannya.

Faktor lain yang tak kalah menarik, cenderung dikaji dalam proses komunikasi antar budaya adalah artefak pembelajaran, termasuk di dalamnya ruang kelas dan seragam. Lain halnya dengan sekolah formal, pembelajaran komunitas Samin ini tidak memiliki seragam maupun kelas. Lingkungan belajar maupun kostum yang dipakai adalah materi keseharian, sehingga tidak asing bagi peserta komunikasi belajar. Singkatnya, di dalam proses komunikasi dua arah, sumber dan penerima memiliki derajat perbedaan yang rendah sehingga dapat dicapai pemahaman yang sama dengan lebih mudah. Selain itu pula, peserta belajar dapat dengan gampang menangkap dan memberi umpan balik tanpa rasa takut dan khawatir akan mendapat hukuman. Tampak nyata proses pembelajaran dengan komunikasi dua arah seperti yang terjadi dalam komunitas Samin ini memberikan komunikasi dengan kualitas *high fidelity* (kejernihan tingkat tinggi).

Simpulan

Berdasarkan sajian dan analisa data di atas, maka kesimpulan dari tulisan tentang model pembelajaran berbasis '*two way communications*' dalam kehidupan komunitas Samin adalah Komunitas yang memandang proses pembelajaran sebagai proses belajar seumur hidup. Prinsip yang diterapkan adalah belajar tentang segala hal yang penting bagi kehidupan mereka, kapan saja, bersama dengan siapa saja.

Pola pembelajaran sebagai proses sosialisasi dan pewarisan budaya komunitas Samin terwujud dalam bentuk komunikasi dua arah yang informal dan alami. Berdasarkan pola pembelajaran ini, maka peserta belajar melaku-

kan pembelajaran ini dengan sukarela sehingga tingkat kecemasan rendah. Pemahaman yang sama (*mutual understanding*) dalam pembelajaran ini mudah tercapai. Dalam hal ini peserta belajar dapat lebih mudah mengerti dengan terbukti mampu memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Komunikasi dua arah pun terbangun dengan lebih mudah.

Ucapan Terimakasih

Satu kesempatan yang sangat berharga ketika artikel jurnal dengan judul '*TWO WAYS COMMUNICATION: SEBUAH MODEL PEMBELAJARAN DALAM KOMUNITAS SAMIN, DI SUKOLILO, PATI*' dapat dimuat di Jurnal Komunikasi UPN. Artikel ini merupakan hasil penelitian Hibah Bersaing dengan judul "*Pemetaan Model Pembelajaran Berbasis 'Two Ways Communication' Dalam Kehidupan Komunitas Samin*" yang dibiayai oleh DIKTI. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk melakukan penelitian tentang Pemetaan Model Pembelajaran Berbasis '*Two Way Communication*' dalam Kehidupan Komunitas Samin. Selain itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak.

1. Kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pemetaan Model Pembelajaran Berbasis 'Two Way Communication' Dalam Kehidupan Komunitas Samin*". Kepercayaan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk peneliti.
2. Dewan Redaksi Jurnal Komunikasi UPN, untuk kesempatan yang diberikan sehingga tulisan hasil penelitian ini dapat dipublikasikan.
3. 'Sederek Sikep' di Sukolilo, Pati. Mbah Sampir putri, Mbah Tarno, Mbak Gunarti, Mas Kukoh, Mas Gun Retno, dan semua sederek Sikep lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk

kekeluargaan, kebersamaan, dan informasi yang diberikan kepada peneliti.

4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungan dan kerjasama yang baik. Tuhan memberkati.

Daftar Pustaka

Buku

- Basrowi dan Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia
- Borg, Walter R. and Meredith Damien Gall, 1989, *Educational Research*, New York: Longman
- Denzin, Norman K., 1994, *Handbook of Qualitatif Research*. Thousand Oaks : SAGE Publications.
- Griffin, Em., 2003, *A first look at communication theory*. New York: McGraw-Hill.
- Harefa, Andrias, 1995, *Sekolah Saja Tidak Cukup*, Jakarta: Gramedia.
- Littlejohn, Stephen W. and Roberta Gray, 2001, *Theories of Human Communication*, 7 th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Miller, K., 2002, *Communication Theories: Perspective, Processes, and Contexts*, Boston: McGraw Hill.
- Mulyana, Deddy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyadi Soeprapto, HR., 2002, *Interaksi Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastroatmodjo, Soejanto, 2003, *Masyarakat Samin: siapakah mereka?* Jogjakarta: Penerbit Narasi.
- Spradley, James P., 1997, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jurnal

- Biesta, Gert, 1996, Education/Communication: The Two Faces of Communicative Pedagogy, In A. Neiman (Ed), *Philosophy of Education*, 1995, (pp. 185-194). Urbana, III: Philosophy of Education Society.
- Darmastuti, Rini, 2007, Pengaruh terpaan televisi dan pola komunikasi komunitas Samin, *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XVIII, No. 3, Desember-Maret 2007
- Prasela, Mustika Kuri, 2007, Pendidik: Memaknai pendidikan sebagai interaksi dialogis, *Jurnal Enquiry* Vol 1, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana.

Majalah

- Hutomo, Suripan Sadi, 1985, Samin Surontiko dan Ajaran-ajarannya, *Basis*, Januari 1985.
- Intisari on the Net, Juli 2001, *Samin: Melawan Penjajah dengan Jawa Ngoko*
- Supari, Achmad, 2000, "Pembelajaran yang Menyenangkan", *Kompas*, Edisi Senin, 20 November 2000.
- Uchrowi, Zaim; dkk., 1987, Jalan Mulut Orang Samin, *Tempo*, 23 Mei 1987.

Internet

- Freire, Paulo, 1970, *Pedagogy of the Oppressed*, Wikipedia the free book.htm.
- Illich, Ivan, 1972, *Deschooling Society*, Wikipedia the free book.htm.

Tulisan yang tidak diterbitkan

- Darmastuti, Rini, 2005, *Pola Komunikasi Sosial Masyarakat Samin*, Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Terima kasih kepada Mitra Bestari

Berkaitan dengan diterbitkannya Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK) Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta, maka kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah berkenan membantu proses penyuntingan artikel ilmiah tersebut sampai layak untuk dipublikasikan. Beberapa Mitra Bestari yang terlibat dalam proses penyuntingan artikel ini adalah :

1. Prof. Karim Suryadi, M.Si dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
2. Dra. Sri Djoharwinarli, SU dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
3. Dr. Subhan Afifi, M.Si dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
4. Fajarini, M.Si dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta
5. Dr. Basuki Agus, M.Si dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
6. Prayudi, MA, Ph.D dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
7. Dr. Turnomo Rahardjo, M.S dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMU KOMUNIKASI FISIP UPN VY (TERAKREDITASI B)

I. Jenis artikel

Artikel berupa ringkasan hasil penelitian bidang Ilmu Komunikasi. Artikel yang dikirim ke redaksi bersifat orisinal (karya sendiri) dan belum pernah dipublikasikan di media lain.

II. Sistematika

- a. Penulisan Judul harus singkat dan mencerminkan isi tulisan.
- b. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik, di bawah nama penulis dicantumkan alamat institusi, nomor telephone atau handphone (HP) dan alamat email.
- c. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris (maksimal 200 kata) dan bahasa Indonesia (maksimal 200 kata), terdiri atas satu paragraf, dan menggambarkan keseluruhan isi artikel.
- d. Kata kunci dicantumkan di bawah abstrak, disesuaikan dengan bahasa yang digunakan dalam artikel, tiga sampai lima kata yang berisi kata-kata yang dianggap penting dalam artikel.
- e. Struktur naskah:
 - Pendahuluan (berisi ruang lingkup, masalah, tujuan, manfaat, teori yang digunakan, dan hipotesis (kalau ada)).
 - Metode penelitian (berisi jenis penelitian, subjek dan atau objek penelitian, teknik pengumpulan, analisis data, dan keabsahan data).
 - Hasil Penelitian dan Pembahasan (mendeskripsikan temuan penelitian dan pembahasan).
 - Simpulan (berisi secara singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan rekomendasi).
 - Daftar pustaka (mutakhir dan mengambil dari jurnal ilmiah, antara lain dari jurnal Ilmu Komunikasi UPN "Veteran" Yogyakarta).

III. Format Penulisan

- a. Artikel diketik pada kertas kuarto dengan spasi ganda dengan ukuran font 12, jenis huruf *times new roman*, panjang artikel 20-30 halaman.
- b. Setiap artikel diserahkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- c. Tabel ditulis tanpa menggunakan garis vertikal.
- d. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Tabel diketik satu spasi.
- e. Nomor dan judul gambar ada di bawah gambar, diikuti sumber.
- f. Jumlah tabel dan gambar maksimal 6 (enam).
- g. Kutipan menggunakan *bodynote*, contoh; Pesan nonverbal yang paling bermakna adalah ekspresi wajah khususnya pandangan mata (Mulyana, 2010:9).
- h. Sub topik tidak diberi nomor, dicetak tebal, *Tittle Case*.
- i. Daftar pustaka disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.
 - **Buku:**
Fowles, Jib, 1996, *Advertising and Popular Culture*, Sage Publication, London.
 - **Buku kumpulan artikel**
Borjesson, Kristina (ed.), 2006, *Mesin Penindas Pers: Membongkar Kebebasan Pers di Amerika*, Q-Press, V.
 - **Artikel dalam buku kumpulan artikel**
Chesney, Robert W, 1998, *Political Economy of Global Communication*, dalam Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood, John Bellamy Foster (Eds.), 1998, *Capitalism and the Information Age: The Political Economy of the Global Communication Revolution*, Montly Review Press, New York.

- **Artikel dalam Jurnal atau majalah**
Lestari, Puji, 2009, Model Komunikasi *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 7, Nomor 3, September-Desember 2009, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN"Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta.
- **Artikel dalam Koran:**
Haris, Syamsuddin, 2011, *Parpol Baru, Pemain Lama*, Kompas, 2 Mei 2011.
- **Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang)**
Media Indonesia, 16 juli 1999, *Proses Kelahiran Iklan Televisi*.
- **Dokumen resmi**
Polda DIY, 2004, *Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Bidang Humas Polda DIY tahun 2004*, Yogyakarta.
- **Buku terjemahan**
William, Raymond, 1974, *Televisi*, terjemahan Dian Yanuardy, 2009, Yogyakarta: Resist Book.
- **Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian**
Setyawati, Ariska, 2008, Peran Surat Kabar Elektronik dalam Memperkuat Civil Society di Indonesia (Analisis Situs pada *Detik.com*, *Okezone.com* dan *Kompas.com*, selama bulan Agustus 2007), *Tesis* tidak diterbitkan, PPS Ilmu Komunikasi UGM, Yogyakarta.
- **Makalah, seminar, lokakarya, penataran:**
Admiles Communication, *Makalah Seminar Perencanaan & Pemanfaatan Media Periklanan*, 9-10 Desember 2010, UPN Veteran Yogyakarta.
- **Internet (karya individual)**
Putral, Afdal Makkuraga, 2006, Ideologi dan Media Massa, 10 Juni 2009.http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/41036-4-622986219002.doc.
- **Internet (artikel dalam jurnal online)**
Prasetya, D, (2009,2 Januari), Bisnis RBT salah aturan internasional, *Media Indonesia Online*, 16 Mei 2009.

IV. Cetak Lepas dan Jurnal Lengkap.

Penulis akan diberi dua eksemplar jurnal lengkap dan 3 (tiga) eksemplar cetak lepas; Apabila menghendaki tambahan, satu eksemplar jurnal dikenakan biaya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk cetak lepas minimal 10 eksemplar dengan biaya @ Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).

V. Contact Person :

- a. Christina Rochayanti, HP 0815607701,
email = christina.rochayanti@upnyk.ac.id
- b. Puji Lestari, HP 08156874669,
email= pujilestariginting@yahoo.co.id

VI. Kontribusi bagi Artikel yang dimuat

Artikel yang dimuat dikenakan biaya Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Biaya dikirim ke nomor rekening BNI Cabang UGM Yogyakarta, a.n Christina Rochayanti, M.Si : 0219114240.

FORMULIR BERLANGGANAN

Mohon dicatat sebagai pelanggan JIK

Nama :

Alamat :

Telp/HP/email:/...../.....

Kode Pos:

Harga langganan mulai 1 Januari 2010 (3 nomor)

Untuk satu tahun ditambah ongkos kirim

- Rp. 175.000,- untuk wilayah Jawa
- Rp. 200.000,- untuk wilayah luar Jawa

(.....)

Formulir ini boleh difotokopi

Gunting dan kirimkan ke alamat Tata Usaha JIK, Jl.Babarsari no 2 Yogyakarta,
email:jik@upnyk.ac.id
HP 081227557605, Fax.0274-487147

BERITA PENGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar:

☐

Rp. 175.000,00 untuk langganan 1 tahun (3 Nomor), mulai Nomor.....Tahun.....

☐

Rp. 200.000,00 untuk langganan 1 tahun (3 Nomor), mulai Nomor.....Tahun.....

Uang tersebut telah saya kirim melalui:

☐

Bank BNI Kantor Kas Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, rekening atas nama Christina Rochayanti,M.Si. Nomor: 0219114240 dengan berita: pembayaran JIK UPNVY.